

Dr.Jamridafrizal,S.Ag.,S.S.,M.Hum
Inda Fitri,S.Ag.,S.S.,M.Si
Zulfitri,S.Ag., M.A
Tsulasiah,S.E.,S.IPI.,M.M

PROFESIONALISME KEPUSTAKAWANAN DAN PROFESIONAL INFORMASI DI ERA DIGITAL



Editor,

Dr.Sholahuddin Al Ayubi.M.A

PROFESIONALISME KEPUSTAKAWANAN DAN PROFESIONAL INFORMASI DI ERA DIGITAL

Penulis

Dr.Jamridafrizal,S.Ag.,S.S.,M.Hum

Inda Fitri,S.Ag.,S.S.,M.Si

Zulfitri,S.Ag., M.A

Tsulasiah,S.E.,S.IPI.,M.M

Editor,

Dr.Sholahuddin Al Ayubi.M.A



PROFESIONALISME KEPUSTAKAWANAN DAN PROFESIONAL INFORMASI DI ERA DIGITAL

Penulis : Dr. Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum
Inda Fitri, S.Ag., S.S., M.Si
Zulfitri, S.Ag., M.A.
Tsulasiah, S.E., S.IPL., M.M

Editor : Dr. Sholahuddin Al Ayubi. M.A

Desain
Arielaksita

Cetakan I Maret 2025

Diterbitkan oleh
Yayasan Laksita Indonesia
Anggota IKAPI
KSB Kelapa Gading Blok AJ 23-24 Kota Serang Banten
42122 Ph : 081292652034/081284504441
<https://laksitaindonesia.site>
Email : laksitaindonesia@gmail.com

Jamridafrizal, Inda Fitri, Zulfitri, Tsulasiah
PROFESIONALISME KEPUSTAKAWANAN DAN
PROFESIONAL INFORMASI DI ERA DIGITAL
Cet. 1 – Laksita Indonesia, 2025 212 hlm, 17 x 25 cm
ISBN 978-602-5749-27-8

Dilarang keras memproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, serta menjualbelikannya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

@HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ
اِقْطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah (RA) berkata: Rasulullah (SAW) bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya." (HR Muslim)

Sekapur Sirih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik Ilmu Yang sempurna. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran dari Sang Pemilik Ilmu.

Atas izin dan ridho-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud setelah melewati masa yang tak terhitung lamanya, dipenuhi dengan beragam tantangan dan rintangan. Buku ini adalah usaha tulus dari kami, para penulis, yang tergerak oleh semangat untuk berbagi pengetahuan dan wawasan tentang seluk-beluk profesi kepustakawanan dan informasi di era digital yang terus berkembang pesat.

Kita semua mengetahui bahwa transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia perpustakaan dan informasi. Pustakawan dan profesional informasi kini dituntut untuk tidak hanya menguasai keterampilan tradisional, tetapi juga kompetensi baru yang relevan dengan era digital, seperti literasi digital, manajemen informasi, dan teknologi informasi.

Buku ini diharapkan kehadirannya bagai sekuntum bunga di tengah padang gurun ilmu, sebuah persembahan sederhana di antara karya-karya besar para ahli. Namun, seperti bunga yang memberikan keindahan dan harapan, semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pustakawan dan profesional informasi dalam menghadapi tantangan era digital. Kami berharap buku ini menjadi jembatan pengetahuan yang menghubungkan para mahasiswa, pustakawan, profesional informasi, dan siapapun yang berhasrat mengembangkan diri di bidang ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami dengan segala kerendahan hati sangat berrharap dan menghargai kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga buku yang jauh dari sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia, serta mendorong lahirnya pustakawan dan profesional informasi yang berkualitas dan berintegritas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya buku sederhana ini. Semoga Allah SWT melimpahkan keikhlasan dan kerendahan hati kepada semua penulis buku ini, serta menjadikannya amal jariyah yang mengalir terus menerus di sisi Allah SWT. Amin

Serang, Februari 2025

Penulis

Ringkasan Isi

Disajikan dalam 10 bab, buku ini memberikan tinjauan komprehensif mengenai profesi pustakawan dan profesional informasi di era digital. Fokus utama diberikan pada analisis peran, kompetensi, dan tantangan yang dihadapi dalam menyediakan akses informasi dan mendukung literasi

Bab 1: Peran Pustakawan Sepanjang Sejarah

Peran pustakawan, lebih dari sekadar sebuah profesi, telah mengalami evolusi yang dinamis, senantiasa beradaptasi dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Sejak peradaban kuno hingga era digital saat ini, pustakawan telah memainkan peran ganda yang krusial, yaitu sebagai pemenuh kebutuhan informasi dan sebagai penjaga warisan intelektual. Di era digital, peran pustakawan semakin penting dalam memfasilitasi akses informasi, mengembangkan literasi informasi, dan mengelola pengetahuan. Untuk menjaga relevansi peran mereka dalam masyarakat, pustakawan perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).

Bab 2: Pendidikan Kepustakawanan dan Profesional Informasi: Tinjauan Historis dan Proyeksi Masa Depan

Pendidikan kepustakawanan telah mengalami perjalanan panjang, berawal dari pelatihan informal di perpustakaan kuno hingga menjadi disiplin ilmu yang mapan dan diakui secara global. Di Indonesia, pendidikan kepustakawanan dimulai dengan Kursus Pelatihan Ahli Perpustakaan (KPAP) pada tahun 1952 dan terus berkembang hingga saat ini. Kurikulum pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI) di Indonesia pun telah mengalami pergeseran paradigma, dari fokus awal pada "dokumentasi" ke arah "ilmu informasi" yang lebih luas. Pendidikan kepustakawanan di era digital menghadapi tantangan dan peluang baru, seperti pembelajaran daring, pengembangan profesional berkelanjutan (PKB), dan kebutuhan akan penelitian dan inovasi. Masa depan pendidikan kepustakawanan membutuhkan transformasi lebih lanjut untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, dan kesenjangan digital.

Bab 3: Profesi Pustakawan dan Profesional Informasi

Profesi pustakawan dan profesional informasi telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan

masyarakat. Pustakawan, yang awalnya identik dengan penjaga buku, kini telah bertransformasi menjadi pengelola informasi, fasilitator pembelajaran, dan mitra strategis dalam berbagai bidang. Peran dan tanggung jawab pustakawan modern mencakup kurasi dan pengelolaan koleksi, layanan referensi dan informasi, pengembangan literasi informasi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Kompetensi yang dibutuhkan pun semakin kompleks, meliputi penguasaan teknologi informasi, keterampilan komunikasi dan kolaborasi, serta kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Di era digital, etika profesi menjadi landasan penting bagi pustakawan, mencakup integritas, netralitas, dan komitmen untuk memberikan akses informasi yang adil dan merata. Masa depan profesi pustakawan penuh dengan peluang dan tantangan, menuntut pustakawan untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi.

Bab 4: Kode Etik Pustakawan

Kode etik merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme pustakawan. Kode etik memberikan panduan bagi pustakawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, terutama dalam menghadapi dilema etika yang kompleks di era digital. Kode etik pustakawan, baik yang berlaku di Indonesia, yang ditetapkan oleh IFLA, maupun yang diadopsi oleh organisasi profesi lainnya, mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban terhadap masyarakat dan pengguna, kewajiban terhadap profesi, hingga kewajiban terhadap diri sendiri. Prinsip-prinsip utama dalam kode etik ini meliputi aksesibilitas informasi, kerahasiaan, netralitas, objektivitas, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Di era digital, penerapan kode etik pustakawan menghadapi tantangan baru, seperti privasi data, akses terbuka, dan penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Penegakan kode etik menjadi kunci untuk menjaga martabat dan profesionalisme pustakawan.

Bab 5: Pengaruh Teknologi Terhadap Peran Pustakawan dan Profesional Informasi

Teknologi telah menjadi katalisator utama dalam transformasi peran pustakawan dan profesional informasi. Digitalisasi koleksi, layanan daring, dan media sosial telah mengubah cara pustakawan berinteraksi dengan pengguna dan menyediakan akses informasi. Kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin memberikan dampak signifikan pada profesi ini, membantu otomatisasi tugas dan meningkatkan efisiensi layanan. Peran pustakawan juga berkembang dengan munculnya teknologi baru seperti *virtual reality* (VR) dan *augmented reality* (AR), membuka peluang untuk menciptakan pengalaman belajar yang imersif. Di tengah perubahan yang

cepat ini, pustakawan perlu terus mengembangkan kompetensi mereka, termasuk penguasaan teknologi, literasi digital, dan keterampilan pemecahan masalah, agar tetap relevan dan mampu memberikan layanan yang berkualitas.

Bab 6: Transformasi Perpustakaan dan IPI di Era Digital

Era digital telah membawa perubahan besar dalam dunia perpustakaan dan informasi, menciptakan peluang dan tantangan baru bagi pustakawan dan profesional informasi. Teknologi digital telah mengubah cara perpustakaan beroperasi, mulai dari pengelolaan koleksi hingga pelayanan kepada pengguna. Profesional IPI harus beradaptasi dan mengembangkan kompetensi baru, termasuk literasi digital, untuk tetap relevan di era digital. Adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan big data dalam layanan perpustakaan menjadi semakin penting. Tantangan etika dan privasi dalam penggunaan teknologi digital perlu diatasi. Profesional IPI juga berperan penting dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan bisnis.

Bab 7: Kompetensi Pustakawan dan Profesional Informasi

Kompetensi pustakawan dan profesional informasi tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup karakteristik individu yang mendasari kinerja yang efektif. Kompetensi mencakup kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan seseorang melakukan tugas atau pekerjaan dengan baik. Pustakawan tidak lagi hanya penjaga koleksi buku, tetapi juga fasilitator akses informasi, pembimbing literasi informasi, dan mitra strategis dalam pembelajaran dan penelitian. Pemahaman mendalam tentang kompetensi pustakawan dan profesional informasi menjadi krusial untuk memastikan mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan. Aspek-aspek kompetensi pustakawan meliputi sejarah perkembangan konsep kompetensi, definisi dan interpretasi kompetensi, perbedaan antara *competence* dan *competency*, serta karakteristik penting kompetensi.

Bab 8: Kompetensi Pustakawan: Tinjauan Regulasi, Organisasi Profesi, dan Standar Internasional

Kompetensi inti pustakawan menjadi dasar dalam menjalankan peran mereka di era informasi. Regulasi dan organisasi profesi berfungsi untuk menjaga standar kompetensi pustakawan. Pustakawan perlu terus meningkatkan diri dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan masyarakat. Kompetensi pustakawan diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Perpustakaan No. 4 Tahun 2023, SKKNI No.236

Tahun 2019, dan KKNi No.2 Tahun 2021. Organisasi profesi seperti ALA dan standar kompetensi di Kanada mengidentifikasi kompetensi inti pustakawan, mulai dari pengetahuan dasar profesi hingga kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Pustakawan perlu terus mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna.

Bab 9: Paradigma Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Pergeseran paradigma dalam IPI telah membawa perubahan signifikan pada peran dan fungsi perpustakaan. Paradigma perpustakaan tradisional berfokus pada koleksi fisik, sedangkan paradigma informasi berorientasi pada pengguna dan pemanfaatan teknologi. Pergeseran paradigma ini mempengaruhi pendekatan pendidikan dan pelatihan pustakawan. Kurikulum pendidikan IPI perlu beradaptasi dengan perubahan ini, mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, serta mengembangkan kompetensi baru. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua paradigma memiliki tujuan yang sama: menyediakan akses informasi dan pengetahuan. Dengan mengintegrasikan kedua paradigma, perpustakaan dapat menjalankan fungsi tradisionalinya sekaligus memenuhi kebutuhan informasi pengguna di era digital.

Bab 10: Pendidikan Berkelanjutan bagi Pustakawan dan Profesional Informasi

Pendidikan berkelanjutan menjadi kunci bagi pustakawan dan profesional informasi untuk menjaga kompetensi dan daya saing di era digital. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, pustakawan dapat mengikuti perkembangan teknologi, memahami kebutuhan pengguna, dan memberikan layanan berkualitas tinggi. Pendidikan berkelanjutan memungkinkan pustakawan untuk beradaptasi dan tetap relevan di tengah perubahan yang terus berlangsung. Peran berbagai pihak, termasuk pustakawan, lembaga pendidikan, organisasi profesi, pemerintah, dan perpustakaan, sangat penting dalam mendukung pendidikan berkelanjutan. Strategi dan visi untuk masa depan pendidikan kepustakawanan perlu dirumuskan untuk memastikan bahwa pendidikan ini tetap relevan dan adaptif.

DAFTAR ISI

1.PERAN PUSTAKAWAN SEPANJANG SEJARAH -----	1
1.1 PUSTAKAWAN SEBAGAI PEMENUH KEBUTUHAN INFORMASI MANUSIA -----	1
1.2 PUSTAKAWAN: PENJAGA WARISAN INTELEKTUAL MELINTASI ZAMAN -----	3
1.2.1 <i>Pustakawan Era Peradaban Kuno: Pelopor Pelestarian Warisan Intelektual ...</i>	3
1.2.2 <i>Bagaimana Pustakawan Era Peradaban Kuno Meletakkan Dasar Profesionalisme di Era Digital.....</i>	5
1.2.3 <i>Pustakawan Era Abad Pertengahan dan Renaisans.....</i>	6
1.2.4 <i>Pustakawan Era Modern: Menghadapi Tantangan Revolusi Industri dan Informasi</i>	8
1.2.5 <i>Pustakawan di Era Digital: Transformasi Peran Menuju Dunia Maya</i>	9
2. PENDIDIKAN KEPUSTAKAWANAN DAN PROFESIONAL INFORMASI: TINJAUAN HISTORIS DAN PROYEKSI MASA DEPAN -----	19
2.1 LATAR BELAKANG HISTORIS PENDIDIKAN KEPUSTAKAWANAN (GLOBAL DAN NASIONAL) -----	20
2.1.1 <i>Perpustakaan Kuno dan Pelatihan Informal.....</i>	20
2.1.2 <i>Perintisan Sekolah Perpustakaan: Tonggak Awal Profesionalisme Pustakawan di Era Modern.....</i>	22
2.2. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEPUSTAKAWANAN: GLOBAL DAN NASIONAL -----	23
2.2.1 <i>Perkembangan Pendidikan Kepustakawanan di India.....</i>	25
2.2.2 <i>Perkembangan Pendidikan Kepustakawanan di Philipina</i>	26
2.2.3 <i>Perkembangan Pendidikan Kepustakawanan di Thailand.....</i>	28
2.2.4 <i>Perkembangan Pendidikan Kepustakawanan di Malaysia</i>	28
2.2.5 <i>Perkembangan Pendidikan Kepustakawanan di Indonesia</i>	29
2.2.6 <i>Tren dan Isu Kontemporer dalam Pendidikan Kepustakawanan</i>	39
2.2.6 <i>Proyeksi dan Tantangan Masa Depan Pendidikan Kepustakawanan</i>	41
2.3 PENDIDIKAN KEPUSTAKAWANAN DI ERA DIGITAL -----	43
2.3.1 <i>Pembelajaran Daring (Online) dan Luring (Offline)</i>	43
2.3.2 <i>Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PKB)</i>	45
2.3.3 <i>Penelitian dan Inovasi dalam Pendidikan Kepustakawanan</i>	46
2.3.4 <i>Peran Pustakawan dalam Mempromosikan Literasi Digital dan Literasi Informasi</i>	48
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG MASA DEPAN PENDIDIKAN KEPUSTAKAWANAN -----	49
2.4.1 <i>Isu-Isu Krusial Yang Akan Mempengaruhi Pendidikan Kepustakawanan ...</i>	50
2.4.2 <i>Peluang Untuk Mentransformasi Pendidikan yang Adaptif dan Inovatif</i>	51
2.4.3 <i>Strategi Dan Visi Untuk Pendidikan Kepustakawanan Yang Relevan Dengan Kebutuhan Masyarakat</i>	52
2.4.3 <i>Implikasi IFLA Trend Report Update 2023 terhadap Pendidikan Kepustakawanan</i>	54
3.PROFESI PUSTAKAWAN DAN PROFESIONAL INFORMASI -----	57

3.1 DEFINISI PROFESI DAN PROFESIONALISME	58
3.1.1 Definisi Profesi menurut Kamus	58
3.1.2 Definisi Profesi menurut Penulis	59
3.1.3 Definisi Profesionalisme	63
3.2 PERBEDAAN PROFESI DAN PEKERJAAN BIASA	65
3.2.1 Ciri-ciri umum Profesi	65
3.2.2 Ciri Utama Pekerjaan Biasa.....	67
3.2.3 Perbedaan Profesi dengan Pekerjaan Biasa	68
3.2.4 Pekerjaan Profesional dan Nonprofesional di Perpustakaan	69
3.2.5 Ciri Utama Non-Profesional perpustakaan.....	71
3.3 KEPUSTAKAWANANAN DAN PROFESIONAL INFORMASI: DEFINISI, SEJARAH, KARAKTERISTIK, DAN PERAN DALAM MASYARAKAT	72
3.3.1 Kepustakawanan	72
3.3.2 Sejarah Singkat Profesi Kepustakawanan.....	76
3.3.3 Definisi dan Karakteristik Profesional Informasi.....	77
3.3.4 Sejarah Singkat Profesional Informasi	79
3.3.5 Evolusi Profesi Kepustakawanan.....	80
3.3.6 Persamaan dan Perbedaan Pustakawan dengan di antara Profesi Informasi lain	81
3.3.7 Pustakawan dan Profesional Informasi dalam Humaniora Digital	82
3.3.8 Karakteristik Profesi Pustakawan dan Profesional Informasi	84
3.3.9 Peran Pustakawan dan Profesional Informasi dari Masa Ke Masa.....	88
3.4 EVOLUSI PROFESIONALISME KEPUSTAKAWANAN DARI ABAD KE-19 HINGGA ERA DIGITAL	93
3.4.1 Pergeseran Paradigma dalam Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI).....	94
3.4.2 Evolusi Identitas Profesional Pustakawan di Era Digital	98
3.4.3 Awal Profesionalisasi.....	99
3.4.4 Profesionalisme Kepustakawanan di Era Digital.....	100
3.5 TANTANGAN DALAM PROFESI PUSTAKAWAN DAN PROFESIONAL INFORMASI-----	102
3.5.1 Ledakan Informasi dan Kompleksitas Kebutuhan Pengguna.....	102
3.5.2 Privasi dan Keamanan Data.....	103
3.5.3 Etika dan Tanggung Jawab Profesional di Tengah Perkembangan Teknologi 104	104
3.5.4 Kesenjangan Digital dan Literasi Informasi	104
3.5.5 Perubahan Perilaku Pengguna di Era Digital	106
3.5.6 Keterbatasan anggaran dan infrastruktur.....	107
3.5.7 Pergeseran Nilai dan Ekspektasi Masyarakat.....	108
3.5.8 Kurangnya Sumber Daya dan Dukungan.....	109
3.5.9 Konflik Identitas Profesional	110
3.5.10 Isu Hak Cipta dan Akses Terbuka.....	111
4. KODE ETIK PUSTAKAWAN-----	113
4.1 SEJARAH SINGKAT KODE ETIK PUSTAKAWAN	114

4.2. PENGERTIAN KODE ETIK	115
4.3 KARAKTERISTIK, FUNGSI DAN TUJUAN KODE ETIK PROFESI	116
4.4 KODE ETIKA BERDASARKAN PANDANGAN ISLAM	117
4.4.1 Definisi Akhlak dalam Islam.....	118
4.4.2 Aspek-aspek Akhlak dan Jenis-jenis Akhlak dalam Islam.....	119
4.4.3 Karakteristik Profesi Pustakawan Berdasarkan Perspektif Islam.....	121
4.4.4 Fungsi Kode Etik perspektif Islam	123
4.5 KODE ETIK PUSTAKAWAN BERDASARKAN ORGANISASI PROFESI	124
4.5.1 Kode Etik Pustakawan dan Profesional Informasi berdasarkan IFLA.....	125
4.5.2 Kode Etik Pustakawan berdasarkan ALA	128
4.5.3 Kode Etik Pustakawan berdasarkan ALIA	129
4.5.4 Kode Etik Ikatan Pustakawan Filipina.....	130
4.5.5 Kode Etik Ikatan Pustakawan Malaysia (Terjemahahn Tidak Resmi).....	133
4.5.6 Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia.....	135
4.6 KODE ETIK PROFESI PUSTAKAWAN DALAM REGULASI INDONESIA	137
4.7 KODE ETIK IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM, IFLA DAN REGULASI NASIONAL.....	138
5.PENGARUH TEKNOLOGI TERHADAP PERAN PUSTAKAWAN DAN PROFESIONAL INFORMASI INFORMASI.....	140
5.1.PERAN TEKNOLOGI DALAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN.....	141
5.2 PERUBAHAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PUSTAKAWAN.....	153
5.3.TANTANGAN TEKNOLOGI DALAM PROFESI PUSTAKAWAN	155
5.4 PELUANG YANG DITAWARKAN OLEH TEKNOLOGI	157
6.TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN DAN IPI DI ERA DIGITAL	159
6.1 DAMPAK TEKNOLOGI DIGITAL PADA LAYANAN DAN OPERASI PERPUSTAKAAN ---	160
6.2 FAKTOR-FAKTOR PENDORONG TRANSFORMASI DIGITAL PERPUSTAKAAN	161
6.3 PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM MEMBANTU TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN DI ERA DIGITAL	163
6.4 PERAN ORGANISASI PROFESI DAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN	165
6.5 PENTINGNYA LITERASI DIGITAL BAGI PUSTAKAWAN	167
7.KOMPETENSI PUSTAKAWAN DAN PROFESIONAL INFORMASI	169
7.1 SEJARAH SINGKAT KOMPETENSI PUSTAKAWANAN	169
7.2 MAKNA ISTILAH "KOMPETENSI"	171
7.3 PENGERTIAN KOMPETENSI.....	172
7.4 COMPETENCE DAN COMPETENCY	179
7.5 KETERKAITAN COMPETENCE DAN COMPETENCY	181
7.6 KOMPETENSI DAN KINERJA PUSTAKAWAN: MODEL SEBAB-AKIBAT	182
7.6 KARAKTERISTIK PENTING KOMPETENSI	184
7.7. TINJAUAN KUALIFIKASI PROFESIONAL IPI GLOBAL	187

7.8 TINJAUAN KUALIFIKASI PROFESIONAL IPI DI ASIA TENGGARA DAN SELATAN ----	189
8.KOMPETENSI PUSTAKAWAN: TINJAUAN REGULASI,ORGANISASI PROFESI, DAN STANDAR INTERNASIONAL -----	192
8.1 KOMPETENSI PUSTAKAWAN BERDASARKAN PERATURAN PERPUSNAS NOMOR 4 TAHUN 2023 -----	192
8.2 KOMPETENSI PUSTAKAWAN BERDASARKAN SKKNI No.236 TAHUN 2019-----	193
8.3 KOMPETENSI PUSTAKAWAN BERDASARKAN KKNi No.2 TAHUN 2021 -----	195
8.4 KOMPETENSI PUSTAKAWAN BERDASARKAN ORGANISASI PROFESI PUSTAKAWAN 197	
8.4.1 Kompetensi inti pustakawan berdasarkan ALA.....	197
8.4.2 Kompetensi Pustakawan di Perpustakaan Riset Kanada.....	198
8.5 STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN DAN PROFESIONAL INFORMASI BERDASARKAN IFLA -----	201
8.6 ANALISIS PERBANDINGAN SKKNI 2019 DAN STANDAR KOMPETENSI IFLA. ----	205
8.7 PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN DAN PROFESIONAL INFORMASI----	207
8.7.1 Pentingnya Pengembangan Kompetensi Pustakawan dan Profesional Informasi	208
8.7.2 Penanggung Jawab Pengembangan Kompetensi Pustakawan	212
8.7.3 Peran organisasi profesi pustakawan dalam Peningkatan Kompetensi Pustakawan.....	214
8.7.4 Manfaat Pengembangan Kompetensi:	217
9.PARADIGMA ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI-----	219
9.1 PARADIGMA PERPUSTAKAAN VERSUS PARADIGMA INFORMASI -----	219
9.2 PERGESERAN PARADIGMA: PENDEKATAN BERBEDA DALAM PENDIDIKAN IPI ----	221
9.3 TITIK TEMU PARADIGMA IPI-----	225
10.PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI PUSTAKAWAN DAN PROFESIONAL INFORMASI --	228
10.1.PENTINGNYA PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DI ERA DIGITAL -----	228
10.1.1. Tantangan Kompetensi Pustakawan di Era Digital.....	229
10.1.2. Peran Pendidikan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kompetensi.....	230
10.2 PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PKB)-----	231
10.3 PERAN BERBAGAI PIHAK DALAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN -----	232
10.3.1. Peran Pemerintah dan Lembaga Pendidikan	234
10.3.2. Peran Organisasi Profesi	235
10.3.3. Peran Perpustakaan dan Lembaga Informasi dalam Pendidikan Berkelanjutan Pustakawan.....	236
10.4 MANFAAT PENDIDIKAN BERKELANJUTAN -----	237
10.5 STRATEGI DAN VISI MASA DEPAN -----	238
DAFTAR PUSTAKA-----	242
TENTANG PENULIS-----	243



Peran Pustakawan Sepanjang Sejarah

Bab ini mengajak kita merenungkan Pustakawan bukan sekadar profesi, melainkan sebuah odisei panjang yang berkelindan dengan sejarah peradaban manusia. Dari masa ke masa, peran pustakawan telah bermetamorfosis, beradaptasi dengan dinamika zaman dan kemajuan teknologi. Namun, esensi peran ini tetap tak tergoyahkan: menjadi penghubung antara manusia dan pengetahuan, memastikan informasi berharga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh generasi kini dan nanti.

Dalam penjelajahan ini, kita akan mengupas dua peran utama pustakawan yang telah menjadi pilar penting dalam perjalanan sejarah manusia. Pertama, kita akan mendalami peran pustakawan sebagai pemenuh kebutuhan informasi manusia. Peran ini kian vital di tengah derasnya arus informasi di era digital. Kedua, kita akan menelusuri peran pustakawan sebagai pengawal warisan intelektual. Peran ini telah mereka emban sejak zaman purba, melintasi berbagai peradaban, dan tetap relevan hingga kini.

1.1 Pustakawan Sebagai Pemenuh Kebutuhan Informasi Manusia

Sebagai makhluk yang sempurna dengan aktivitas fisik, mental, dan sosial yang beragam, manusia secara alami membutuhkan informasi. Kebutuhan ini melampaui sekadar keperluan praktis, seperti mencari informasi untuk menyelesaikan tugas atau membuat keputusan. Manusia juga memiliki rasa haus akan stimulus intelektual dan pengalaman baru.

Pada tahun 1959, Profesor Platt bahkan menyatakan bahwa kebutuhan terhadap informasi adalah "kebutuhan kelima manusia," merujuk pada dorongan untuk mencari informasi yang baru, tak terduga, dan menarik (Platt, J. R. 1959).

Dalam memenuhi kebutuhan ini, pustakawan memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung dan penengah untuk mengakses informasi. "Sepaimana dikemukakan oleh Shera dan Jesse (1965),

kebutuhan akan informasi merupakan bagian intrinsik dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, pustakawan memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa semua pengguna memiliki akses yang sama terhadap koleksi perpustakaan (hlm. 12). Pandangan ini masih relevan hingga saat ini, mengingat semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dalam akses informasi."

Peran pustakawan tidak hanya difokuskan pada penyediaan informasi, tetapi juga sebagai kurator dan fasilitator dalam mengakses informasi. Mereka bekerja untuk mengorganisir, memilih dengan hati-hati, dan menyuguhkan informasi sehingga mudah diakses dan dipahami oleh para pengguna. Pustakawan bertindak sebagai pemandu dalam menjelajahi dunia informasi yang luas dan rumit, membantu pengguna mengembangkan keterampilan literasi informasi yang penting, serta menilai keabsahan dan relevansi sumber-sumber informasi secara independen (Singh, 2021).

Tidak hanya itu, pustakawan juga memiliki peran sebagai "pengelola pengetahuan", memastikan bahwa informasi yang ada di perpustakaan akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan menggunakan layanan referensi, bimbingan literasi informasi, dan program pendidikan yang ditawarkan oleh pustakawan, individu dapat diberdayakan untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas dan mandiri. Mereka akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat (Aina, L. O., 2013).

Pustakawan telah mengalami perubahan yang signifikan dalam peran dan fungsi mereka berkat kemajuan teknologi digital. Di masa lalu, pengelolaan koleksi fisik seperti buku, majalah, dan surat kabar mendominasi aktivitas pustakawan. Namun, dengan adanya perubahan digital, pekerjaan-pekerjaan konvensional ini semakin digantikan oleh pengelolaan sumber daya digital, penyediaan akses daring (online), dan pendampingan pengguna dalam mengakses informasi digital yang semakin berkembang pesat (Obadare, 2014).

Di samping itu, terjadi perubahan paradigma dalam interaksi antara pustakawan dan pengguna. Saat ini, layanan referensi yang sebelumnya harus dilakukan secara tatap muka sudah tersedia dalam bentuk daring melalui berbagai platform komunikasi digital seperti surel (email), obrolan langsung (*live chat*), atau konferensi video. Selain itu, pustakawan juga bisa menggunakan media sosial dan berbagai platform daring lainnya untuk mengiklankan koleksi perpustakaan dan layanan yang ada. Hal ini juga memungkinkan terjalinnya hubungan lebih akrab dengan pengguna melalui interaksi santai.

Dalam era digital, peran pustakawan sebagai pemenuh kebutuhan informasi manusia menjadi semakin penting. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menghasilkan ledakan informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pustakawan perlu terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk dapat mengelola, menganalisis, dan menyajikan informasi digital secara efektif. Selain itu, mereka juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan preferensi pengguna, serta memanfaatkan TIK untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan perpustakaan.

1.2 Pustakawan: Penjaga Warisan Intelektual Melintasi Zaman

Peran pustakawan sebagai penjaga warisan intelektual telah mengakar dalam sejarah peradaban manusia. Sejak zaman kuno hingga era digital saat ini, pustakawan telah memainkan peran krusial dalam mengumpulkan, mengorganisasi, melestarikan, dan menyediakan akses terhadap informasi yang berharga bagi masyarakat. Peran ini terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan teknologi, namun esensinya tetap sama: menjaga agar pengetahuan dan informasi tetap hidup dan dapat diakses oleh generasi mendatang.

1.2.1 Pustakawan Era Peradaban Kuno: Pelopor Pelestarian Warisan Intelektual

Peran pustakawan sebagai penjaga warisan intelektual telah mengakar dalam sejarah peradaban manusia, bahkan sejak zaman kuno. Jauh sebelum teknologi digital mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi, peradaban-peradaban awal seperti Mesopotamia dan Mesir telah menyadari pentingnya mengumpulkan, mengorganisasi, dan melestarikan catatan-catatan berharga yang menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya.

Di Mesopotamia, para juru tulis dan imam dengan cermat menyalin dan menyimpan teks-teks keagamaan, hukum, dan sejarah pada lempengan tanah liat, memastikan kelestarian pengetahuan bagi generasi selanjutnya (Andrews, E. D., 2023, hlm. 31). Perpustakaan Alexandria di Mesir kuno, yang dianggap sebagai salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting di dunia kuno, menjadi pusat pembelajaran dan penelitian, tempat para pustakawan berperan dalam mengumpulkan, mengatalogkan, dan melestarikan manuskrip-manuskrip berharga dari berbagai belahan dunia (Collins, 2000). Mereka tidak hanya sekadar menyimpan dokumen, tetapi juga berperan aktif dalam mengembangkan sistem organisasi pengetahuan,

seperti katalog dan klasifikasi, yang menjadi cikal bakal sistem organisasi informasi modern.

Penemuan arkeologi yang menarik di reruntuhan Niniwe, ibu kota Asyur kuno, memberikan bukti nyata tentang keberadaan perpustakaan dan peran pustakawan pada masa itu. Relief istana kuno yang ditemukan menggambarkan tablet-tablet terakota yang merupakan bagian dari koleksi perpustakaan kerajaan yang luas, berjumlah sekitar 30.000 tablet (Menant, 1880). Salah satu contoh tablet dapat dilihat pada Gambar 1

Gambar: 1 tablet terakota(terra-cotta tablets)



(sumber: <https://www.worldhistory.org/image/2786/terra-cotta-tablet-from-nippur>)

Tablet-tablet kuno yang berfungsi sebagai "katalog" perpustakaan paling awal yang diketahui, berisi informasi tentang berbagai divisi, termasuk catatan pemerintah, kronik sejarah, puisi, karya ilmiah, mitologi, tulisan medis, dekrit kerajaan, ramalan, pertanda, dan himne pujian kepada para dewa (Murray, 2009; hlm. 15-16). Penemuan ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu, telah ada individu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil, mengatur, dan melestarikan karya-karya budaya mereka.

Oleh karena itu, peran pustakawan sebagai penjaga warisan intelektual telah ada sejak awal peradaban manusia. Mereka tidak hanya berperan dalam menjaga dan melestarikan pengetahuan, tetapi juga dalam mengembangkan sistem organisasi informasi yang memungkinkan aksesibilitas dan pemanfaatan pengetahuan tersebut oleh masyarakat. Peran ini menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, di mana pustakawan harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk

memastikan bahwa warisan intelektual tetap terjaga dan dapat diakses oleh generasi mendatang.

1.2.2. Bagaimana Pustakawan Era Peradaban Kuno Meletakkan Dasar Profesionalisme di Era Digital

Beberapa abad sebelum teknologi digital mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi, peradaban-peradaban awal seperti Mesopotamia dan Mesir telah menyadari pentingnya mengumpulkan, mengorganisasi, dan melestarikan catatan-catatan berharga. Di Mesopotamia, para juru tulis dan imam dengan cermat menyalin dan menyimpan teks-teks keagamaan, hukum, dan sejarah pada lempengan tanah liat, memastikan kelestarian pengetahuan bagi generasi selanjutnya (Andrews, 2023, hlm. 31). Sementara itu, Perpustakaan Alexandria di Mesir kuno, yang dianggap sebagai salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting di dunia kuno, menjadi pusat pembelajaran dan penelitian. Di sana, para pustakawan berperan dalam mengumpulkan, mengatalogkan, dan melestarikan manuskrip-manuskrip berharga dari berbagai belahan dunia (Collins, 2000, hlm. 3). Mereka tidak hanya sekadar menyimpan dokumen, tetapi juga berperan aktif dalam mengembangkan sistem organisasi pengetahuan, seperti katalog dan klasifikasi, yang menjadi cikal bakal sistem organisasi informasi modern.

Penemuan arkeologi di reruntuhan Niniwe, ibu kota Asyur kuno, memberikan bukti nyata tentang keberadaan perpustakaan dan peran pustakawan pada masa itu. Relief istana kuno yang ditemukan menggambarkan tablet-tablet terakota yang merupakan bagian dari koleksi perpustakaan kerajaan yang luas, berjumlah sekitar 30.000 tablet (Menant, 1880, hlm. 3). Tablet-tablet kuno ini, yang berfungsi sebagai "katalog" perpustakaan paling awal yang diketahui, berisi informasi tentang berbagai divisi, termasuk catatan pemerintah, kronik sejarah, puisi, karya ilmiah, mitologi, tulisan medis, dekret kerajaan, ramalan, pertanda, dan himne pujian kepada para dewa (Murray, 2009; hlm. 15-16). Penemuan ini menegaskan bahwa sejak zaman dahulu, telah ada individu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil, mengatur, dan melestarikan karya-karya budaya mereka.

Dapat kita simpulkan bahwa peran pustakawan sebagai penjaga warisan intelektual telah mengakar sejak awal peradaban manusia. Mereka tidak hanya berperan dalam menjaga dan melestarikan pengetahuan, tetapi juga dalam mengembangkan sistem organisasi informasi yang memungkinkan aksesibilitas dan pemanfaatan pengetahuan tersebut oleh masyarakat. Peran ini menjadi semakin penting seiring dengan

perkembangan zaman dan teknologi, di mana pustakawan harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk memastikan bahwa warisan intelektual tetap terjaga dan dapat diakses oleh generasi mendatang

1.2.3. Pustakawan Era Abad Pertengahan dan Renaisans

Abad Pertengahan (sekitar abad ke-5 hingga ke-15) dan Renaisans (abad ke-14 hingga ke-17) merupakan era yang sarat akan pergolakan dan transformasi. Jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, kebangkitan agama Kristen, Perang Salib, Wabah Hitam, dan pergeseran kekuasaan politik menandai periode yang penuh gejolak ini. Di tengah dinamika sosial, politik, dan intelektual yang begitu kompleks, pustakawan muncul sebagai sosok yang tak tergantikan dalam menjaga dan meneruskan obor pengetahuan.

1.2.2.1 Peran Biara sebagai Pusat Pengetahuan dan Scriptorium

Pada Abad Pertengahan, biara-biara menjadi pusat pelestarian dan pengembangan pengetahuan. Para biarawan, yang banyak di antaranya adalah pustakawan, mencurahkan waktu dan tenaga mereka untuk menyalin dan menerjemahkan manuskrip-manuskrip kuno, terutama teks-teks keagamaan dan filsafat (Casson, 2001). Mereka bekerja dengan teliti dan penuh dedikasi, menggunakan pena bulu dan tinta yang dibuat dari bahan-bahan alami. Proses penyalinan ini tidak hanya membantu melestarikan karya-karya berharga dari masa lalu, tetapi juga memungkinkan penyebaran pengetahuan kepada komunitas biarawan dan masyarakat luas.

Di dalam biara, terdapat ruangan khusus yang disebut *scriptorium*. Di sinilah para biarawan yang terampil dalam menulis, yang dikenal sebagai *skriptor*, bekerja menyalin manuskrip dengan teliti. Skriptor tidak hanya menyalin teks, tetapi juga memperkaya manuskrip dengan ilustrasi dan dekorasi yang indah, menjadikan setiap karya sebagai mahakarya seni yang tak ternilai. Beberapa manuskrip termasyhur yang lahir dari dedikasi mereka antara lain *Kitab Kells*, sebuah manuskrip Injil yang memukau dengan ilustrasi rumitnya, dan *Codex Gigas*, sebuah manuskrip raksasa yang memuat Alkitab lengkap serta beragam teks lainnya (Irvine, 1994). Biara-biara pada masa itu bukan sekadar pusat pelestarian pengetahuan, melainkan juga menjadi wadah subur bagi inovasi dalam penulisan dan penjiilidan buku.

1.2.2.2 Perpustakaan dan Kebangkitan Intelektual di Abad Pertengahan dan Renaisans

Peran biara sebagai pusat pengetahuan mulai berkurang seiring dengan perkembangan kota dan perdagangan pada akhir Abad Pertengahan. Hal ini mendorong munculnya universitas-universitas yang kemudian mengambil alih peran biara sebagai pusat pembelajaran dan penelitian.

Seiring dengan berkembangnya kota-kota dan perdagangan pada akhir Abad Pertengahan, muncul pula universitas-universitas yang mengambil alih peran biara sebagai pusat pembelajaran dan penelitian. Perpustakaan universitas, yang menyimpan manuskrip dan buku-buku langka, menjadi tempat para cendekiawan dan mahasiswa mencari informasi dan pengetahuan. Pustakawan universitas bertanggung jawab untuk mengelola koleksi, menyusun katalog, dan membantu pengguna dalam menemukan sumber daya yang mereka butuhkan (Johnson, E. D., 1977).

Renaissans, yang berlangsung dari abad ke-14 hingga ke-17, ditandai dengan kebangkitan minat yang besar terhadap pengetahuan dan budaya klasik Yunani dan Romawi. Para cendekiawan dan kolektor buku pada masa itu, seperti Petrarch dan Boccaccio, dengan dukungan para paus dan bangsawan seperti keluarga Medici, aktif mencari dan mengumpulkan manuskrip-manuskrip kuno yang tersebar di berbagai perpustakaan biara yang mulai terbengkalai (Cantor, 1994). Tujuan mereka tidak hanya untuk mengumpulkan karya-karya klasik demi gengsi pribadi, tetapi juga untuk menghidupkan kembali semangat belajar dan penyelidikan intelektual yang menjadi ciri khas zaman Renaissans (Burke, 2013).

Upaya para cendekiawan dan kolektor buku ini menghasilkan pembentukan perpustakaan-perpustakaan pribadi yang kaya akan koleksi karya-karya klasik. Perpustakaan-perpustakaan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan diskusi intelektual yang penting. Koleksi yang kaya ini memungkinkan para cendekiawan Renaissans untuk mempelajari kembali pemikiran-pemikiran besar dari masa lalu, seperti karya-karya Cicero, Plato, dan Aristoteles, yang kemudian menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat pada masa itu (Cantor, 1994).

Selama Abad Pertengahan dan Renaissans, pustakawan tidak hanya berperan sebagai penjaga buku, tetapi juga sebagai penjaga warisan intelektual umat manusia. Mereka memahami pentingnya melestarikan pengetahuan masa lalu untuk generasi mendatang. Mereka juga menyadari bahwa pengetahuan adalah kunci untuk kemajuan peradaban. Oleh karena itu, mereka bekerja keras untuk mengumpulkan, melestarikan, dan menyebarkan pengetahuan, bahkan di tengah tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi (Febvre & Martin, 1997).

Pustakawan di Abad Pertengahan dan Renaissans adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang untuk menjaga api pengetahuan tetap menyala di tengah kegelapan. Mereka adalah penjaga warisan intelektual yang berharga, yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban manusia. Dedikasi dan semangat

mereka dalam melestarikan dan menyebarkan pengetahuan patut kita teladani dan hormati.

1.2.4 Pustakawan Era Modern: Menghadapi Tantangan Revolusi Industri dan Informasi

Era modern, yang ditandai oleh Revolusi Industri dan ledakan informasi, membawa perubahan signifikan dalam lanskap pengetahuan dan informasi. Perpustakaan, sebagai lembaga penyimpan dan penyebar pengetahuan, juga turut mengalami transformasi besar. Peran pustakawan pun bergeser, dari sekadar kurator koleksi menjadi fasilitator akses informasi dan pengetahuan di tengah arus perubahan yang deras.

Revolusi Industri, yang dimulai pada akhir abad ke-18, membawa perubahan besar dalam produksi, teknologi, dan masyarakat. Percetakan mekanis memungkinkan produksi buku secara massal, sehingga memperluas akses terhadap literatur dan memicu peningkatan minat baca di kalangan masyarakat. Perpustakaan umum mulai bermunculan, menyediakan akses gratis terhadap buku dan sumber daya informasi lainnya bagi masyarakat luas (Chigwada & Chisita, 2021). Pada abad ke-19 dan ke-20, profesionalisme kepustakawanan mulai terbentuk dengan munculnya asosiasi-asosiasi perpustakaan, seperti American Library Association (ALA) pada tahun 1876, yang berperan dalam menetapkan standar, etika, dan pendidikan bagi pustakawan (Quinn, 2014, hlm.17-18). Laporan Williamson tahun 1923 juga memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan status profesional pustakawan dan menekankan pentingnya pendidikan formal dalam bidang ini (Rubin & Rubin, 2020, hlm.280).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 semakin mempercepat transformasi perpustakaan. Munculnya komputer, internet, dan teknologi digital lainnya membuka peluang baru bagi pustakawan untuk mengelola, mengakses, dan menyebarkan informasi secara lebih efisien dan efektif. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti kebutuhan akan keterampilan baru dalam mengelola teknologi digital dan mengelola informasi dalam format yang berbeda-beda (Lee, 2010).

Di era modern, pustakawan tidak hanya bertugas mengumpulkan, mengelola, dan melestarikan koleksi fisik, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi digital dan menyediakan akses terhadap sumber daya informasi online. Mereka harus menjadi ahli dalam mencari, mengevaluasi, dan mengorganisir informasi dari berbagai sumber, baik cetak maupun digital. Selain itu, pustakawan juga berperan sebagai pendidik dan fasilitator pembelajaran. Mereka membantu pengguna perpustakaan

untuk mengembangkan keterampilan literasi informasi, seperti kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Mereka juga merancang dan menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi informasi masyarakat (American Library Association, 1989).

Era informasi, yang ditandai oleh ledakan informasi dalam format digital, menghadirkan tantangan dan peluang bagi pustakawan. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengelola dan menyediakan akses terhadap informasi yang terus bertambah secara eksponensial. Pustakawan harus mampu menyaring informasi yang relevan dan berkualitas dari lautan informasi yang tersedia, serta membantu pengguna untuk menavigasi dan memahami informasi tersebut.

Namun, era informasi juga membuka peluang baru bagi pustakawan untuk memperluas jangkauan dan dampak perpustakaan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pustakawan dapat menyediakan akses ke sumber daya informasi dan layanan perpustakaan bagi masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Pustakawan juga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti sekolah, universitas, dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan literasi informasi dan memberdayakan masyarakat melalui akses terhadap pengetahuan. (Bode, 1994

Pustakawan di era modern menghadapi tantangan yang kompleks akibat revolusi industri dan informasi. Transformasi digital dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut pustakawan untuk terus beradaptasi dan mengembangkan kompetensi baru. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning), telah mengubah cara informasi diakses, dikelola, dan digunakan. Pustakawan perlu menguasai teknologi ini dan terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Hal ini sejalan dengan IFLA LIS Education Guidelines 2022 yang menekankan bahwa pustakawan perlu beradaptasi dengan lanskap sosiopolitik, teknologi, dan global yang dinamis untuk memberikan layanan yang relevan dan efektif bagi pengguna (Chu, 2022, hlm.1).

1.2.5 Pustakawan di Era Digital: Transformasi Peran Menuju Dunia Maya

Era digital telah menghadirkan perubahan signifikan dalam peran pustakawan, menuntut mereka untuk beradaptasi dan mengembangkan kompetensi baru. Pustakawan tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan koleksi fisik, tetapi juga harus mahir dalam mengelola sumber daya digital,

menyediakan akses online, dan membimbing pengguna dalam navigasi informasi digital yang semakin kompleks (Obadare, 2014).

IFLA LIS Education Guidelines 2022 menekankan pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam peran pustakawan modern. Pustakawan perlu memiliki pemahaman mendalam tentang TIK untuk mendukung implementasi sistem informasi, siklus hidup informasi, akses, dan layanan pengguna di perpustakaan (Chu et al., 2022).

Perubahan ini juga berdampak pada interaksi antara pustakawan dan pengguna. Layanan referensi tradisional kini dapat diakses secara daring melalui berbagai platform komunikasi digital. Pustakawan juga memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan komunitas (Obadare, 2014).

Kompetensi baru seperti transliterasi, yaitu kemampuan berinteraksi di berbagai platform dan media, menjadi krusial. Penguasaan transliterasi membutuhkan pendidikan berkelanjutan yang dapat difasilitasi melalui TIK. Namun, penggunaan TIK juga menghadirkan tantangan, seperti hilangnya komunikasi nonverbal yang dapat mempengaruhi kualitas komunikasi (Steinberg, 2007).

Pustakawan abad ke-21 juga dituntut untuk memiliki kompetensi lain, seperti keterampilan teknis, interpersonal, dan kognitif. Keterampilan teknis mencakup penguasaan teknologi informasi, perangkat lunak perpustakaan, dan alat pencarian informasi. Keterampilan interpersonal seperti komunikasi efektif, kolaborasi, dan kepemimpinan juga penting. Selain itu, kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif juga diperlukan untuk menghadapi tantangan di era digital.

Era digital menawarkan peluang dan tantangan bagi pustakawan. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan perluasan layanan, peningkatan aksesibilitas informasi, dan pengalaman pengguna yang lebih interaktif. Namun, pustakawan juga perlu terus belajar dan mengembangkan diri agar tetap relevan dan mampu memberikan layanan terbaik kepada pengguna.

Transformasi digital telah menjadikan pustakawan tidak hanya sekadar pengelola koleksi fisik, tetapi juga berperan sebagai navigator, fasilitator, dan edukator dalam dunia digital. Mereka harus terus beradaptasi, belajar, dan mengembangkan diri agar tetap relevan dan mampu memberikan layanan terbaik kepada pengguna di era digital yang terus bergerak maju.

1.2.5.1 Dampak Teknologi Digital Terhadap Peran Pustakawan

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam peran dan fungsi pustakawan. Transformasi digital mendorong pergeseran fokus dari pengelolaan koleksi fisik ke pengelolaan sumber daya digital, penyediaan akses online, dan pendampingan pengguna dalam navigasi informasi digital yang semakin meluas (Obadare, 2014, hlm. 8).

Selain itu, interaksi antara pustakawan dan pengguna juga mengalami perubahan. Layanan referensi tradisional yang bersifat tatap muka kini dapat diakses secara daring melalui berbagai platform komunikasi digital. Pustakawan juga memanfaatkan media sosial dan platform daring lainnya untuk berinteraksi, mempromosikan layanan, dan membangun hubungan dengan komunitas (Obadare, 2014, hlm. 10).

Perubahan ini menuntut pustakawan untuk terus mengembangkan kompetensi mereka. Pemahaman mendalam tentang teknologi informasi dan komunikasi, serta kemampuan dalam analisis data, pemasaran digital, dan manajemen proyek menjadi krusial. Keterampilan interpersonal yang kuat juga tetap penting dalam membangun hubungan (Obadare, 2014, hlm. 9).

IFLA LIS Education Guidelines 2022 pada FKA3 menegaskan pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung implementasi sistem informasi, siklus hidup informasi, akses, dan layanan pengguna di perpustakaan. Pustakawan dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam tentang TIK (Chu et al., 2022, hlm. 7).

Secara keseluruhan, dampak teknologi digital terhadap peran pustakawan sangatlah besar. Pustakawan tidak lagi sekadar pengelola koleksi fisik, tetapi juga berperan sebagai navigator, fasilitator, dan edukator dalam dunia digital. Mereka harus terus beradaptasi, belajar, dan mengembangkan diri agar tetap relevan dan mampu memberikan layanan terbaik kepada pengguna di era digital yang terus berubah.

1.2.5.2 Kompetensi Baru yang dibutuhkan Pustakawan di Era Digital

Perkembangan pesat teknologi dan sains telah mengubah lanskap masyarakat informasi secara mendasar. Perubahan ini menuntut pustakawan dan profesional informasi untuk terus mengembangkan kompetensi baru agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang (Bitri, 2012). Kompetensi-kompetensi yang sebelumnya dianggap sebagai nilai tambah, kini menjadi krusial bagi para profesional informasi.

Salah satu kompetensi baru yang dibutuhkan adalah "transliterasi", yaitu kemampuan untuk membaca, menulis, dan berinteraksi di berbagai platform, perangkat, dan media (Thomas et al., 2007). Transliterasi tidak hanya mencakup komunikasi verbal, tetapi juga komunikasi nonverbal, seperti gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Penguasaan transliterasi membutuhkan pendidikan berkelanjutan yang dapat difasilitasi melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (van Wyk & Thompson, 2008).

Namun, penggunaan TIK dalam pendidikan juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan hilangnya komunikasi nonverbal (NVC) dalam lingkungan digital. NVC mencakup sekitar 65% dari komunikasi yang sukses, sehingga ketidakhadirannya dapat mengurangi kualitas komunikasi (Steinberg, 2007). Oleh karena itu, para pendidik perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi hilangnya isyarat-isyarat kontekstual dan sosial ini dalam pembelajaran daring. Penelitian telah menunjukkan bahwa NVC, baik dari instruktur maupun mahasiswa, memiliki dampak positif pada proses pembelajaran (van Wyk & Thompson, 2008).

Selain transliterasi dan NVC, pustakawan abad ke-21 juga dituntut untuk memiliki kompetensi lain yang relevan dengan tuntutan masyarakat informasi saat ini. Khoo (2005) mengidentifikasi enam domain kompetensi yang dibutuhkan, meliputi keterampilan kepustakawanan tradisional, keterampilan yang menambah nilai, keterampilan TIK, keterampilan transfer dan soft skill, sikap, nilai, dan sifat pribadi yang sesuai, serta pengetahuan domain.

Pergeseran ini dari kompetensi profesional tradisional menuju kemampuan pribadi dan umum mencerminkan perubahan identitas profesional pustakawan dan pengelola informasi. Pustakawan masa depan tidak lagi sekadar pemegang pengetahuan, tetapi juga fasilitator pengetahuan yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, pendidikan berkelanjutan dan kemauan untuk terus belajar menjadi kunci bagi mereka untuk tetap relevan di dunia yang terus berkembang (Bitri, 2012).

Transformasi digital yang pesat menuntut pustakawan untuk terus mengembangkan kompetensi baru agar tetap relevan. Kompetensi-kompetensi baru ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek interpersonal dan kognitif.

1. Kompetensi Teknis.

Pustakawan perlu menguasai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkini, termasuk perangkat lunak perpustakaan, alat pencarian informasi, dan platform digital. Kemampuan dalam merancang dan mengembangkan situs web, mengelola repositori institusional, dan memanfaatkan teknologi jaringan juga menjadi krusial (Mwaniki, 2018). Selain itu, pemahaman tentang teknologi yang sedang berkembang, seperti blockchain, Internet of Things (IoT), dan virtual reality (VR) juga penting untuk dipelajari (Shashikumar et al., 2019). Penguasaan kompetensi teknis ini sejalan dengan pandangan Chu et al (2022) yang menyatakan bahwa seorang profesional IPI harus mampu menciptakan metadata berkualitas, mengadopsi dan mengembangkan sistem informasi, serta merencanakan dan mengelola penyimpanan koleksi.

2. Kompetensi Interpersonal

Kemampuan interpersonal seperti komunikasi efektif, kolaborasi, dan kepemimpinan menjadi semakin penting bagi pustakawan di era digital. Pustakawan perlu mampu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, peneliti, dan mahasiswa, untuk mengembangkan layanan perpustakaan yang inovatif dan relevan. Kemampuan kepemimpinan juga diperlukan untuk mengelola tim dan proyek, serta mengadvokasi kebutuhan perpustakaan di tingkat institusi dan masyarakat (Bertot, Sarin, & Percell, 2015).

3. Kompetensi Kognitif

Pustakawan perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif untuk dapat memecahkan masalah kompleks yang muncul di era digital. Kemampuan dalam menganalisis data, melakukan penelitian, dan mengevaluasi informasi juga menjadi semakin penting. Pustakawan perlu mampu berpikir di luar kebiasaan dan mengembangkan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang (Abels, Howarth, & Smith, 2018).

Pengembangan kompetensi baru ini sejalan dengan penelitian Jaguszewski dan Williams (2013) yang menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi dan belajar terus-menerus bagi pustakawan di era digital. Dengan memiliki kompetensi yang relevan, pustakawan dapat terus memberikan layanan berkualitas tinggi dan berkontribusi secara signifikan dalam mendukung kegiatan akademik dan penelitian di era digital.

Kompetensi-kompetensi baru ini diperlukan agar pustakawan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era digital dan terus

memberikan layanan yang berkualitas bagi pengguna. Pengembangan kompetensi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu pustakawan, tetapi juga lembaga pendidikan, asosiasi profesi, dan pemerintah. Dengan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, pustakawan dapat terus mengembangkan diri dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat informasi di era digital.

1.2.5.3 Tantangan dan Peluang di Era Digital

Era digital, ditandai oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, telah menghadirkan transformasi revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia perpustakaan. Pustakawan, sebagai garda terdepan dalam pengelolaan dan penyebaran informasi, dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap relevan dalam lanskap di mana sumber informasi tradisional semakin tergantikan oleh platform online (Pawlowsky & Ryan, 2016).

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi digital berjejaring telah menjadi pendorong utama dari periode transformatif ini (Pawlowsky & Ryan, 2016). Pustakawan perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan metode penyebaran informasi yang terus berkembang (León & Pope, 2016). Dalam konteks ini, tinjauan berkala terhadap program akademik menjadi penting untuk memastikan relevansi dan kesesuaian program dengan kebutuhan terkini (Chu et al., 2022, hlm.13).

Meskipun tantangannya signifikan, era digital juga membuka peluang baru bagi pustakawan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pustakawan dapat memperluas jangkauan layanan mereka, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan menarik. Oleh karena itu, pustakawan perlu merangkul perubahan ini dengan sikap adaptif dan inovatif, serta mengembangkan kompetensi digital yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital.

1.2.5.4 Pustakawan di Era Kecerdasan Buatan (AI)

Kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) telah mengantarkan era baru dalam kepustakawanan. Di satu sisi, AI menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, pengorganisasian, dan pelestarian informasi dalam skala yang lebih besar. Sebagai contoh, AI dapat digunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas seperti identifikasi, klasifikasi, dan terjemahan konten digital, serta memprediksi risiko kerusakan pada koleksi fisik. Selain itu, AI dapat

meningkatkan layanan perpustakaan dengan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi kepada pengguna, mengotomatiskan pertanyaan referensi, dan bahkan berperan sebagai asisten virtual yang cerdas.

Di sisi lain, adopsi AI dalam kepustakawanan juga menghadirkan tantangan. Pustakawan perlu beradaptasi dengan lanskap teknologi yang terus berkembang dengan memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru terkait AI (Yang, 2024). Pelatihan dan pengembangan profesional menjadi krusial untuk memastikan pustakawan dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Integrasi AI dalam alur kerja perpustakaan juga memerlukan evaluasi ulang terhadap kompetensi dan praktik profesional agar tetap relevan dengan tuntutan era digital (Cox, 2019).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah pertimbangan etis dalam penggunaan AI. Pustakawan perlu memastikan bahwa penggunaan AI dalam layanan perpustakaan dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan tidak melanggar privasi pengguna (Rahmani, 2023). Selain itu, penting untuk menjaga peran manusia dalam memahami, menginterpretasi, dan mengkontekstualisasikan informasi, serta tidak terlalu bergantung pada AI dalam pengambilan keputusan yang kompleks (Smith, 2022).

1.2.5.5 Kecerdasan Buatan dalam Kepustakawanan

Meskipun peran pustakawan telah mengalami transformasi signifikan akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, masa depan kecerdasan buatan (AI) dalam kepustakawanan menjanjikan inovasi dan peningkatan layanan yang lebih lanjut. Konsep seperti sistem pakar untuk layanan referensi, robot pembaca rak, dan tur realitas virtual menunjukkan potensi AI dalam menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan memperluas aksesibilitas informasi (Mashiyane & Molepo, 2021).

Penerapan AI dalam kepustakawanan sejalan dengan fokus pada kompetensi "Information and Communication Technologies" (FKA3) dan "Research and Innovation" (FKA4) dalam pendidikan kepustakawanan yang ditekankan oleh IFLA LIS Education Guidelines 2022. Kompetensi-kompetensi ini mempersiapkan pustakawan untuk menghadapi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh teknologi baru seperti AI (Chu et al., 2022).

Dengan perencanaan strategis dan penerapan yang bijaksana, AI dapat menjadi alat yang ampuh bagi pustakawan dalam menjaga warisan intelektual dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digital. Pemanfaatan AI yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional,

memperkaya pengalaman pengguna, dan membuka peluang baru untuk kolaborasi dan inovasi dalam bidang kepustakawanan

1.2.5.6 Peran Pustakawan Dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Era Digital

Peran pustakawan dalam pernyataan Federasi Internasional Perpustakaan dan Lembaga (IFLA) tentang perpustakaan dan kecerdasan buatan (AI) sangat penting dan mencakup berbagai aspek. Pustakawan semakin menjadi katalisator untuk integrasi teknologi modern, beradaptasi dengan alat-alat kontemporer yang meningkatkan layanan perpustakaan (Enakrire & Oladokun, 2024). Mereka memainkan peran penting dalam memastikan akses yang sama dan gratis terhadap informasi, mendukung literasi baca dan informasi, memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, dan menerapkan inovasi digital di perpustakaan (Omona, W., 2020).

AI telah merevolusi berbagai aspek operasi perpustakaan, termasuk katalogisasi dan klasifikasi. AI memungkinkan katalogisasi dan klasifikasi otomatis, menggunakan teknologi seperti pengenalan karakter optik untuk menyelesaikan tugas lebih cepat dan lebih akurat daripada manusia, yang pada akhirnya menghemat waktu dan sumber daya untuk perpustakaan (Tella & Odunola, 2023). Pustakawan semakin dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini, memastikan mereka dapat secara efektif menggunakan alat-alat AI untuk meningkatkan layanan perpustakaan dan memberikan layanan katalogisasi dan klasifikasi yang akurat dengan kesalahan minimal (Tella & Odunola, 2023).

Selain itu, IFLA menekankan pentingnya peran pustakawan dalam mempromosikan kebebasan intelektual dan literasi informasi. Pustakawan didorong untuk fokus pada isu-isu seperti pelatihan literasi informasi dan pengembangan kompetensi mereka, daripada hanya menyensor koleksi perpustakaan (Ayuningtyas et al., 2023). Panduan IFLA 2022 secara khusus menyebutkan pada FKA2 bahwa "Akses terhadap informasi, termasuk akses terbuka (OA), sebagai barang publik; kebebasan intelektual; pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan yang bertanggung jawab; dan teknologi serta kecerdasan yang mendorongnya, adalah hal yang penting bagi profesi ini" (hlm. 7).

Ini sejalan dengan tujuan lebih luas perpustakaan untuk secara aktif berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (SDGs), termasuk kelestarian lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi (Mathiasson & Jochumsen, 2022). Hal ini sesuai dengan tiga bidang pengetahuan dasar (FKAs) dalam IFLA LIS Education Guidelines (2022):

1. FKA1: Information in Society: Pustakawan perlu memahami bagaimana informasi berinteraksi dengan masyarakat, termasuk isu-isu kebebasan intelektual dan akses terbuka.
2. FKA7: Information Needs and User Services: Pustakawan perlu memahami kebutuhan informasi pengguna dan mengembangkan layanan yang mendukung literasi informasi.
3. FKA8: Literacies and Learning: Pustakawan berperan sebagai pendidik literasi, membantu individu mengembangkan keterampilan literasi informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Dengan adanya peran pustakawan dalam mempromosikan kebebasan intelektual, literasi informasi, dan berkontribusi pada SDGs merupakan bagian integral dari profesi ini, sebagaimana ditekankan dalam panduan IFLA dan didukung oleh penelitian terkini.

Proyek Visi Global IFLA, sebagaimana ditekankan oleh Chisita dan Chibanda (2019), menggarisbawahi pentingnya memperkuat perpustakaan di seluruh dunia melalui kolaborasi, inovasi, dan peningkatan layanan pengguna. Pustakawan, sebagai garda terdepan dalam mewujudkan visi ini, memiliki peran krusial dalam mengarahkan perkembangan perpustakaan di tengah lanskap ilmu informasi dan teknologi yang terus berkembang. Dengan merangkul inovasi disruptif dan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (AI), pustakawan dapat meningkatkan kinerja perpustakaan, memperluas akses ke sumber daya, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan pengetahuan dan penelitian (Adekoya & Adedimeji, 2021).

Laporan Tren IFLA 2023 dan Pernyataan IFLA tentang Perpustakaan dan Kecerdasan Buatan (AI) bersama-sama menyoroti peran penting perpustakaan sebagai agen perubahan dan pembangunan berkelanjutan, serta potensi AI dalam mendukung peran ini. Perpustakaan tidak hanya menjadi pusat literasi dan pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), kesetaraan gender (SDG 5), pengurangan kesenjangan (SDG 10), pembangunan kota dan komunitas yang berkelanjutan (SDG 11), serta berbagai tujuan lainnya.

Namun, perpustakaan juga menghadapi berbagai tantangan di era digital. Persepsi negatif, kesenjangan digital, regulasi ruang digital yang ketat, kurangnya investasi, dan ketidaksetaraan geografis merupakan beberapa hambatan yang perlu diatasi. Di sinilah AI hadir sebagai solusi potensial.

AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi, personalisasi layanan, otomatisasi tugas rutin, analisis data, dan pengambilan keputusan berbasis bukti di perpustakaan. Penerjemahan otomatis, pembuatan ringkasan teks, dan pengembangan antarmuka pengguna yang intuitif adalah beberapa contoh bagaimana AI dapat meningkatkan aksesibilitas informasi. Selain itu, AI juga dapat membantu pustakawan dalam menganalisis data pengguna dan tren terkini untuk mengembangkan koleksi, layanan, dan program yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya literasi AI bagi pustakawan dan masyarakat umum ditekankan dalam kedua dokumen tersebut. Dengan memahami cara kerja AI, potensi dampaknya, serta cara mengelola data dan informasi secara kritis, pustakawan dan masyarakat dapat memanfaatkan AI secara optimal dan bertanggung jawab. Literasi AI juga akan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog kebijakan terkait AI dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kepentingan publik.

Pernyataan IFLA tentang Perpustakaan dan AI secara khusus membahas tentang bagaimana pustakawan dapat mengintegrasikan AI ke dalam layanan mereka, seperti meningkatkan pengenalan karakter optik teks atau memanfaatkan koleksi perpustakaan yang dapat dibaca mesin. Pernyataan ini juga menekankan pentingnya standar etika yang jelas dalam penggunaan AI di perpustakaan, seperti yang tercantum dalam Kode Etik IFLA untuk Pustakawan dan Pekerja Informasi Lainnya.

Secara keseluruhan, kedua pendapat ini menggambarkan peran pustakawan yang semakin kompleks dan multifaset di era digital. Pustakawan tidak hanya dituntut untuk menguasai keterampilan tradisional dalam pengelolaan informasi, tetapi juga harus memiliki literasi digital dan AI yang memadai, serta pemahaman yang mendalam tentang etika dan privasi dalam penggunaan teknologi. Era digital telah mendorong pustakawan untuk mengambil peran baru, tidak hanya sebagai penjaga dan penyedia akses informasi, tetapi juga sebagai inovator, fasilitator literasi digital, dan agen perubahan yang memanfaatkan teknologi untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan perpustakaan yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

2

Pendidikan Kepustakawanan dan Profesional Informasi: Tinjauan Historis dan Proyeksi Masa Depan

Bab ini akan membahas perjalanan panjang dan dinamis pendidikan kepustakawanan dan profesional informasi, dari pelatihan informal di perpustakaan kuno hingga menjadi disiplin ilmu yang mapan dan diakui secara global. Evolusi ini mencerminkan perubahan kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, dan perkembangan ilmu informasi itu sendiri. Di Indonesia, perjalanan ini dimulai dengan pendirian Kursus Pelatihan Ahli Perpustakaan (KPAP) pada tahun 1952 dan terus berlanjut hingga saat ini dengan adanya program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI) di berbagai perguruan tinggi. Perkembangan kurikulum IPI di Indonesia juga menunjukkan pergeseran paradigma yang menarik, dari fokus awal pada "dokumentasi" menjadi pendekatan yang lebih luas dan holistik terhadap "ilmu informasi".

Di era digital, pendidikan kepustakawanan menghadapi tantangan dan peluang baru. Pembelajaran daring (online) menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas, namun juga menuntut adaptasi dalam hal interaksi dan motivasi belajar. Pengembangan profesional berkelanjutan (PKB) menjadi semakin penting, mendorong pustakawan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar tetap relevan. Penelitian dan inovasi juga didorong untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci tentang peran perpustakaan di era digital dan mengatasi tantangan seperti kesenjangan digital.

Masa depan pendidikan kepustakawanan penuh dengan potensi, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Perkembangan teknologi yang pesat, perubahan kebutuhan masyarakat, dan isu-isu seperti kesenjangan digital dan literasi informasi menuntut adanya transformasi

dalam pendidikan dan pengembangan kompetensi pustakawan. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi profesi, pemerintah, dan perpustakaan menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan kepustakawanan yang relevan, adaptif, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Untuk lebih memahami perkembangan pendidikan kepustakawanan, mari kita telusuri latar belakang historisnya, baik dalam konteks global maupun nasional.

2.1 Latar Belakang Historis Pendidikan Kepustakawanan (Global dan Nasional)

Praktik kepustakawanan yang telah ada sejak zaman perpustakaan kuno ini, seiring berjalannya waktu, mulai memunculkan kebutuhan akan pendidikan kepustakawanan yang lebih tersusun dan sistematis. Kebutuhan ini mendorong perpustakaan untuk bertransisi dari praktik informal menuju sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Marilah kita mulai dengan pembahasan dari Perpustakaan Kuno dan Pelatihan Informal

2.1.1 Perpustakaan Kuno dan Pelatihan Informal

Pendidikan kepustakawanan, sebagaimana profesi itu sendiri, telah mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pada awalnya, pendidikan pustakawan bersifat informal dan tidak terstruktur. Pada masa perpustakaan kuno, seperti di perpustakaan Sumeria dan Mesir, pengetahuan dan keterampilan kepustakawanan diturunkan secara turun-temurun melalui magang dan bimbingan dari pustakawan yang lebih berpengalaman (Walker, 1998). Pada masa itu, belum ada kurikulum formal atau standar yang ditetapkan, dan proses pembelajaran lebih berfokus pada praktik langsung di lapangan.

Di perpustakaan-perpustakaan kuno ini, para pustakawan, yang seringkali merupakan pendeta atau juru tulis terlatih, memiliki peran penting dalam memelihara catatan-catatan penting, seperti transaksi bisnis, catatan hukum, dan teks-teks keagamaan (Fischer, 2005). Mereka mengembangkan sistem pengarsipan awal, seperti penggunaan label atau tanda pada tablet tanah liat di Sumeria, untuk memudahkan pengambilan dan penyimpanan dokumen (Walker, 1998). Di Mesir, para pustakawan dilatih untuk menulis hieroglif, sistem tulisan yang dianggap suci dan memiliki kekuatan magis (Davies, 1998).

Meskipun pelatihan kepustakawanan pada masa perpustakaan kuno masih bersifat informal, praktik-praktik yang dilakukan di perpustakaan-perpustakaan tersebut menjadi fondasi bagi perkembangan profesi kepustakawanan di masa selanjutnya. Perpustakaan-perpustakaan kuno tersebut telah menunjukkan pentingnya pengorganisasian dan pelestarian informasi, serta peran krusial pustakawan dalam menjaga dan menyediakan akses terhadap pengetahuan bagi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan perpustakaan sebagai lembaga sosial dan budaya, kebutuhan akan pendidikan kepustakawanan yang lebih terstruktur mulai muncul. Pada abad ke-19, perpustakaan umum mulai bermunculan, menyediakan akses gratis terhadap buku dan sumber daya informasi lainnya bagi masyarakat luas (Chigwada & Chisita, 2021). Perpustakaan-perpustakaan ini membutuhkan pustakawan yang terlatih dan kompeten untuk mengelola koleksi yang semakin besar dan kompleks, serta memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Perkembangan ini turut dipengaruhi oleh gerakan sosial dan intelektual pada masa itu, seperti Renaisans dan Pencerahan, yang menekankan pentingnya pendidikan dan akses terhadap pengetahuan bagi semua orang. Gerakan-gerakan ini mendorong kesadaran akan pentingnya perpustakaan sebagai lembaga pendidikan dan kebutuhan akan pustakawan yang terlatih secara profesional (Harris and Johnson, 1984). Amerika Serikat, sebagai salah satu negara yang menjadi pusat perkembangan perpustakaan pada abad ke-19, merespons kebutuhan ini dengan mendirikan American Library Association (ALA) pada tahun 1876 yang kemudian menjadi pelopor dalam pendidikan formal kepustakawanan.

Revolusi Industri juga memainkan peran penting dalam mendorong profesionalisasi kepustakawanan. Industrialisasi menyebabkan peningkatan jumlah informasi yang diproduksi dan didistribusikan, serta perubahan dalam cara masyarakat mengakses dan menggunakan informasi (Kaser, 1980). Perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat informasi dan pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini menuntut pustakawan untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas, termasuk dalam bidang teknologi, manajemen informasi, dan layanan pengguna.

Selain itu, meningkatnya literasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga mendorong kebutuhan akan pustakawan yang terlatih secara profesional. Masyarakat mulai mengharapkan layanan perpustakaan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mereka. Oleh

karena itu, pustakawan perlu memiliki kompetensi yang memadai untuk memenuhi harapan tersebut.

Kebutuhan akan pustakawan yang kompeten dan profesional ini mendorong munculnya program-program pelatihan formal di bidang kepustakawanan. Program-program ini bertujuan untuk membekali calon pustakawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif, serta untuk meningkatkan status dan pengakuan profesi pustakawan di masyarakat.

2.1.2 Perintisan Sekolah Perpustakaan:Tonggak Awal Profesionalisme Pustakawan di Era Modern

Pada tahun 1887, Melvil Dewey, seorang visioner di bidang perpustakaan, mendirikan Columbia School of Library Economy di Columbia College, New York City (Vann, 1961). Sekolah ini bukan hanya yang pertama di dunia yang menawarkan pendidikan formal bagi pustakawan, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam sejarah profesi ini, menandai Amerika Serikat sebagai pelopor dan pusat pendidikan IPI di dunia. Dengan kurikulum yang komprehensif, mencakup katalogisasi, klasifikasi, manajemen perpustakaan, hingga layanan referensi (Wiegand,1996), sekolah ini meletakkan fondasi bagi pendidikan kepustakawanan yang terstruktur dan profesional.

Dewey, yang juga dikenal sebagai pencipta sistem klasifikasi desimal Dewey yang revolusioner, memiliki visi yang kuat tentang peran pustakawan. Ia percaya bahwa pustakawan haruslah profesional yang terlatih dan berpengetahuan luas, bukan hanya sekadar penjaga buku. Dewey memandang pustakawan sebagai "guru" dalam arti tertinggi, yang berperan penting dalam mendidik dan memberdayakan masyarakat melalui akses informasi dan pengetahuan (Dewey, 1978).

Columbia School of Library Economy menjadi wadah bagi Dewey untuk mewujudkan visinya. Sekolah ini tidak hanya memberikan landasan teoritis dan praktis yang kuat bagi calon pustakawan, tetapi juga membantu meningkatkan status dan pengakuan profesi pustakawan di masyarakat. Metode pembelajarannya pun inovatif, dengan penekanan pada pembelajaran berbasis proyek dan praktik kerja lapangan. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di kelas dalam lingkungan perpustakaan yang nyata, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja(Vann,1961)

Dampak sekolah ini tidak hanya terbatas pada Amerika Serikat, tetapi juga meluas ke seluruh dunia. Columbia School of Library Economy menjadi model bagi pengembangan kurikulum dan metode pengajaran di bidang kepustakawanan, serta berkontribusi pada pembentukan standar profesional yang diakui secara internasional. Keberhasilan sekolah ini dalam mencetak pustakawan yang berkualitas dan berdedikasi telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan perpustakaan sebagai lembaga sosial dan pendidikan, serta memperluas akses informasi bagi masyarakat luas.

Lulusan Sekolah Ekonomi Perpustakaan Columbia, termasuk Mary Wright Plummer, Alice Kroeger, dan Katharine Lucinda Sharp, memainkan peran penting dalam membentuk profesi kepustakawanan (Maack, 1986). Mereka tidak hanya mendirikan dan memimpin sekolah perpustakaan lain tetapi juga memperkenalkan kurikulum inovatif dan memperluas peran pustakawan sebagai pemimpin dan katalisator perubahan sosial. Kontribusi mereka mencontohkan era transformatif dalam kepustakawanan yang menekankan kepemimpinan, pendidikan, dan dampak sosial (Jones, 1989).

Meskipun ditutup pada tahun 1926, warisan Columbia School of Library Economy terus hidup dalam bentuk sekolah-sekolah perpustakaan lain yang didirikan di seluruh dunia. Visi Dewey tentang pustakawan sebagai profesional yang terlatih dan berdedikasi terus menginspirasi generasi pustakawan hingga saat ini. Keberhasilan sekolah ini dalam mencetak pustakawan yang berkualitas dan berdedikasi telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan perpustakaan sebagai lembaga sosial dan pendidikan, serta memperluas akses informasi bagi masyarakat luas.

2.2. Perkembangan Pendidikan Kepustakawanan: Global dan Nasional

Pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi (IPI) telah mengalami transformasi yang signifikan sejak awal yang sederhana. Pada awalnya, pendidikan ini lebih bersifat *ad hoc* dan pragmatis, berfokus pada pelatihan keperpustakawanan dasar untuk staf perpustakaan yang bekerja. Namun, seiring berjalannya waktu, IPI telah berkembang menjadi disiplin multidisiplin yang diakui secara global, menggabungkan berbagai bidang seperti manajemen, teknologi informasi, dan pendidikan (Abdullahi, Karisiddappa, & Asundi, 2014, hlm. 131).

Pendidikan kepustakawanan telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Laporan Williamson (1923) menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan

kepustakawanan dengan merekomendasikan pendidikan berbasis universitas dan kualifikasi akademik yang lebih tinggi bagi para pengajar. Dampak laporan ini sangat besar, mendorong sekolah-sekolah perpustakaan untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan pengajaran mereka, serta mengubah peran dan status pustakawan menjadi profesional yang diakui (Robbins-Carter & Seavey, 1986).

Beranjak dari laporan Williamson, dekade 1950-an dan 1960-an menjadi masa keemasan bagi sekolah-sekolah perpustakaan, didorong oleh berakhirnya Perang Dunia II, peluncuran Sputnik, dan inisiatif pendidikan tinggi dari pemerintahan Kennedy. Faktor-faktor ini memicu peningkatan kebutuhan akan pustakawan yang berkualitas, mendorong ekspansi koleksi perpustakaan, dan diversifikasi jenis perpustakaan. Kurikulum pendidikan kepustakawanan juga berkembang pesat dengan integrasi kursus-kursus tentang otomatisasi perpustakaan dan pencarian basis data (Rubin & Rubin, 2020).

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, jumlah sekolah perpustakaan di Amerika Utara menurun drastis. Menyikapi perubahan tersebut, beberapa institusi memilih untuk bertransformasi menjadi "iSchool" (*information schools*). Transformasi ini tidak hanya sekadar perubahan nama, tetapi juga menandai pergeseran fokus dari ilmu perpustakaan tradisional ke pendekatan yang lebih luas dan interdisipliner terhadap studi informasi. Akibatnya, muncul perdebatan tentang paradigma layanan perpustakaan versus paradigma informasi (Dillon, 2012a; Cronin, 1995).

Menjelang akhir abad ke-20, kekhawatiran mengenai kesenjangan antara teori dan praktik dalam pendidikan IPI mendorong dilakukannya penelitian mendalam yang dikenal sebagai Proyek KALIPER. Hasil dari proyek ini sangatlah penting, yaitu mengungkapkan enam tren utama dalam pendidikan IPI, termasuk perluasan fokus kurikulum, pengembangan inti kurikulum yang berpusat pada pengguna, integrasi teknologi informasi, fleksibilitas dalam spesialisasi, beragam format pembelajaran, dan ekspansi program terkait (ALISE, 2000). Laporan KALIPER menjadi katalis bagi perubahan dan inovasi dalam pendidikan IPI, mendorong diskusi tentang bagaimana mempersiapkan generasi profesional informasi berikutnya.

Meskipun IPI telah mencapai status global, perkembangannya tidak merata di seluruh dunia. Di tingkat global, perkembangan pendidikan kepustakawanan menunjukkan tren yang beragam di berbagai negara, seperti yang akan dibahas lebih lanjut mengenai India, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Di India, misalnya, terjadi reformasi dalam sistem pendidikan IPI untuk memenuhi tuntutan lingkungan digital. Sedangkan di Filipina,

pendidikan kepustakawanan diatur secara ketat melalui undang-undang dan lisensi profesional. Thailand dan Malaysia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pendidikan kepustakawanan, dengan program-program yang terus diperbarui dan diperluas. Negara-negara berkembang, khususnya di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan, sering menghadapi tantangan dalam menyediakan pendidikan IPI yang berkualitas. Tantangan-tantangan ini termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur, dan kesenjangan teknologi (Burnett, 2014, hlm. 53). Tantangan-tantangan ini diperparah oleh perubahan cepat dalam lanskap informasi, yang menuntut kurikulum IPI yang adaptif dan responsif (Singh & Shahid, 2010, hlm. 101).

Sementara itu, Indonesia memiliki perkembangan yang unik, dimulai dari fokus pada 'dokumentasi' hingga pergeseran ke arah 'ilmu informasi' seperti yang akan diuraikan lebih lanjut. Di Indonesia, pendidikan IPI telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Semakin banyak perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang menawarkan program IPI, mulai dari tingkat sertifikat hingga doktoral. Perkembangan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja terampil di bidang perpustakaan dan informasi di Indonesia (Sacchanand, 2014, hlm. 42).

Namun, pendidikan IPI di Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dengan yang dihadapi di negara-negara berkembang lainnya. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, dan kesenjangan teknologi merupakan beberapa hambatan yang perlu diatasi. Selain itu, kurikulum IPI perlu terus diperbarui untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.

Untuk memastikan masa depan pendidikan IPI yang berkelanjutan dan relevan, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan para profesional IPI perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan informasi. Alhasil, Indonesia dapat mempersiapkan generasi profesional informasi yang siap menghadapi tantangan dan peluang di era pengetahuan yang terus berkembang.

2.2.1 Perkembangan Pendidikan Kepustakawanan di India

Sejalan dengan dampak Laporan KALIPER, rekomendasi 9 dalam IFLA Trend Report Update 2022 menekankan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan bagi pustakawan. Perpustakaan perlu mendukung pemimpin baru dengan kesempatan belajar dan berkembang. Selain itu,

semua anggota profesi memiliki potensi untuk berkontribusi pada keberlanjutan perpustakaan (IFLA. (2022)

Pendidikan kepastakawanan di India juga mengalami perkembangan signifikan. Shankarappa N. (2023) menelusuri sejarah pendidikan IPI di India, dimulai dari tahun 1911 hingga perkembangan pesat setelah kemerdekaan. Rekomendasi Komisi Pengetahuan Nasional India mendorong reformasi dalam sistem pendidikan IPI.

K.Veeranjaneyulu (2023) menyoroti pentingnya merestrukturisasi pendidikan IPI untuk memenuhi tuntutan lingkungan digital. Beliau mengusulkan memasukkan mata pelajaran teknis seperti Teknologi Informasi (TI), Pengambilan Informasi (IR), dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam kurikulum, serta kolaborasi antara departemen akademik dan perpustakaan.

B. Ramesh Babu (2023) membahas krisis identitas profesi kepastakawanan akibat perubahan teknologi. Beliau mengidentifikasi faktor-faktor krisis, seperti kesenjangan teori dan praktik, serta ketidaksesuaian lulusan IPI dengan kebutuhan pasar kerja. Solusi yang ditawarkan adalah pendidikan IPI yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan relevansi dengan dunia kerja.

Mahadeva Prasad M.S. (2023) menyoroti pentingnya literasi informasi bagi mahasiswa politeknik. Meskipun memiliki akses teknologi, kompetensi literasi informasi mereka perlu ditingkatkan. Lembaga pendidikan perlu menyediakan pelatihan literasi informasi komprehensif, termasuk penggunaan sumber daya perpustakaan dan keterampilan pencarian informasi di internet.

Secara keseluruhan, perkembangan pendidikan kepastakawanan, baik secara global maupun di negara-negara seperti Amerika Serikat dan India, menunjukkan tren positif. Fokus utama terletak pada peningkatan relevansi kurikulum, pengembangan kompetensi pustakawan, dan integrasi teknologi dalam praktik kepastakawanan. Meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan keterampilan dan literasi digital masih perlu diatasi agar pustakawan dapat terus beradaptasi dengan tuntutan zaman yang terus berkembang.

2.2.2. Perkembangan Pendidikan Kepustakawanan di Philipina

Pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi (IPI) di Filipina memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Program IPI formal pertama di negara ini dimulai pada tahun 1914 di Universitas Filipina sebagai kursus

"ekonomi perpustakaan" (Vallejo, 1993, hlm. 31). Pada tahun 1916, program ini ditingkatkan menjadi program empat tahun yang mengarah ke gelar BSc dalam Ilmu Perpustakaan, dan pada tahun 1917, kursus untuk pustakawan sekolah ditawarkan di Philippine Normal School. Pada tahun 1961, Institut Ilmu Perpustakaan didirikan di Universitas Filipina, dan program magister akhirnya diperkenalkan. Saat ini, terdapat sekitar 72 universitas dan perguruan tinggi yang menawarkan program IPI, tetapi banyak di antaranya adalah jurusan IPI dalam program Sarjana Pendidikan (Abdullahi, Asundi, & Lin, 2014, hlm. 290).

Salah satu ciri paling signifikan dari profesi IPI di Filipina adalah lisensi pustakawan profesional oleh negara. Praktik kepustakawanan diatur oleh Undang-Undang Kepustakawanan Filipina tahun 2003, yang memperbarui Undang-Undang sebelumnya tahun 1990 (David & Perez, 2006, hlm. 290). Undang-undang ini dilaksanakan melalui Dewan Regulasi Profesional untuk Pustakawan (PRBFL) dari Komisi Regulasi Profesional (PRC) melalui ujian lisensi tahunan. Selain itu, pendidikan perpustakaan juga diatur lebih lanjut oleh Komisi Pendidikan Tinggi (CHED) dengan memastikan bahwa semua sekolah yang menawarkan Ilmu Perpustakaan dan Informasi mengikuti kurikulum yang dirancang dan direkomendasikan di bawah pengawasan PRBFL.

Pemantauan lebih lanjut dilakukan melalui badan akreditasi yang mensyaratkan kualifikasi minimum bagi pustakawan di lembaga pendidikan. Undang-undang tersebut selanjutnya mensyaratkan program pendidikan berkelanjutan dalam waktu 3 tahun sebelum berakhirnya sertifikat pendaftaran profesional. Program pendidikan berkelanjutan disediakan oleh asosiasi perpustakaan, yang paling utama adalah Asosiasi Pustakawan Filipina, Inc. (PLAI). PLAI adalah Organisasi Profesional Terakreditasi (APO) untuk pustakawan di Filipina.

Undang-undang tersebut secara efektif mengakui peran penting pustakawan dan perpustakaan dalam pembangunan nasional dan dalam mengembangkan kapasitas intelektual warga negara (Nera, 2006; Santos, 2003, hlm. 290-291). Undang-undang tersebut juga mendefinisikan ruang lingkup ujian lisensi dan konten kurikulum IPI. Hanya lulusan dengan gelar sarjana atau magister dalam IPI yang diizinkan mengikuti ujian. Peraturan semacam itu memungkinkan Dewan Pustakawan untuk merekomendasikan kepada Komisi penutupan sekolah perpustakaan ketika sebagian besar lulusannya tidak lulus ujian lisensi.

2.2.3 Perkembangan Pendidikan Kepustakawanan di Thailand

Pendidikan kepustakawanan di Thailand dimulai pada tahun 1951 di Universitas Chulalongkorn dengan program pelatihan perpustakaan yang didirikan oleh Frances Lander Spain di bawah naungan Fulbright Foundation (Gorton, 1977, hlm. 57). Program ini awalnya menghasilkan lulusan yang mendapatkan Sertifikat Ilmu Perpustakaan. Pada tahun 1955, Departemen Ilmu Perpustakaan secara resmi dibuka dan memiliki wewenang untuk memberikan diploma dalam Ilmu Perpustakaan. (Gorton, 1977, hlm. 57).

Pada tahun 1959, program sarjana Ilmu Perpustakaan pertama kali ditawarkan di Universitas Chulalongkorn. (Gorton, 1977, hlm. 57). Program ini kemudian juga ditawarkan di Universitas Thammasat pada tahun 1964, Universitas Chiangmai pada tahun 1967, dan Universitas Ramkhamheng pada tahun 1971. (Gorton, 1977, hlm. 57). Pada tahun 1964, Universitas Chulalongkorn juga memperkenalkan program magister Ilmu Perpustakaan dengan dukungan dari Rockefeller University Development Programme. (Gorton, 1977, hlm. 54).

Seiring dengan perkembangan zaman, program-program pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi (IPI) di Thailand terus diperbarui dan diperluas. Saat ini, lebih dari 15 universitas di Thailand menawarkan program IPI di tingkat sarjana, magister, dan doktor. (Premssmit, 2005, hlm. 1). Program-program ini bertujuan untuk mempersiapkan para profesional di bidang perpustakaan dan informasi, membekali mereka dengan kompetensi yang memadai untuk bekerja di sektor pemerintah maupun swasta. (Premssmit, 2005, hlm. 1).

2.2.4 Perkembangan Pendidikan Kepustakawanan di Malaysia

Pendidikan kepustakawanan formal di Malaysia dimulai pada tahun 1962 ketika Universitas Malaya menawarkan kursus sertifikat pascasarjana dalam ilmu perpustakaan. Program ini kemudian berkembang menjadi program diploma pada tahun 1965 dan program sarjana pada tahun 1972. (Singh, 2004, hlm. 134). Pada tahun 1987, Institut Teknologi MARA (sekarang Universitas Teknologi MARA) meluncurkan program diploma dalam ilmu perpustakaan, yang kemudian ditingkatkan menjadi program sarjana pada tahun 1992. (Singh, 2004, hlm. 134).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan kepustakawanan di Malaysia juga mengalami diversifikasi. Selain program tradisional dalam ilmu perpustakaan, kini terdapat program-

program yang berfokus pada manajemen informasi, teknologi informasi, dan ilmu arsip. (Wee, 2009, hlm. 135). Perkembangan ini mencerminkan perubahan peran pustakawan dari pengelola koleksi menjadi penyedia informasi dan fasilitator pembelajaran.

Meskipun telah mengalami kemajuan pesat, pendidikan kepustakawanan di Malaysia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya dosen yang berkualifikasi tinggi dan berpengalaman. Tantangan lainnya adalah kebutuhan untuk terus memperbarui kurikulum agar relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. (Wee, 2009, hlm. 136).

Di masa depan, pendidikan kepustakawanan di Malaysia diharapkan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Kolaborasi antara institusi pendidikan, perpustakaan, dan industri akan menjadi kunci untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan.

2.2.5. Perkembangan Pendidikan Kepustakawanan di Indonesia

Pendidikan IPI di Indonesia dimulai pada tahun 1952 dengan dibukanya Kursus Pelatihan Staf Perpustakaan di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (Sulistyo-Basuki, 1994). Awalnya berlangsung selama satu tahun, kursus ini kemudian diperpanjang menjadi 1,5 tahun dan akhirnya menjadi 2,5 tahun, dengan perubahan nama menjadi Kursus Pelatihan Teknisi Perpustakaan yang sering disingkat KPAP (Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan). Pada tahun 1959, nama pendidikan ini kembali berubah menjadi Sekolah Perpustakaan dengan durasi pendidikan tiga tahun (Sumarsidik, 1961).

Pada tahun 1961/1962, pengajaran pendidikan pustakawan berpindah ke Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Indonesia (DIP FKIP UI). Perubahan signifikan terjadi pada kurikulum kursus dokumentasi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI (Perpres) No. 20 Tahun 1961 tentang tugas, kewajiban, dan bidang kerja dokumentasi dan perpustakaan di lingkungan pemerintahan. Peraturan Presiden ini mendefinisikan dokumentasi sebagai kegiatan menyediakan informasi dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti luas sebagai hasil aktivitas manusia, serta mengumpulkan dan menyusun pernyataan-pernyataan tersebut.

Pada tahun 1969, Jurusan Ilmu Perpustakaan FSUI mulai menerima mahasiswa yang telah memiliki gelar Sarjana Muda (Bachelor), dan lebih disukai mereka yang bukan lulusan Ilmu Perpustakaan. Pada tahun yang sama, Jurusan Ilmu Perpustakaan FSUI menerima bantuan dari pemerintah Amerika Serikat berupa pengiriman calon dosen, beasiswa bagi mahasiswa (terbatas bagi mereka yang memiliki gelar Sarjana Muda, bukan Ilmu Perpustakaan), dan hibah buku dari Asia Foundation. Buku teks yang digunakan adalah karya Loosjes. Loosjes (1967) memberikan definisi terbatas tentang dokumentasi yang berkaitan dengan bidang ilmu perpustakaan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan pustakawan dibagi menjadi jalur pendidikan akademik dan profesional. Pendidikan akademik terbagi menjadi program sarjana (Strata 1), magister (Strata 2), dan doktor (Strata 3). Hingga saat ini, terdapat sekitar 17-20 program studi sarjana, sementara program pascasarjana hanya ada di empat universitas (Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, UIN Sunan Kalijaga), sementara Institut Pertanian Bogor tidak lagi menerima mahasiswa baru mulai tahun 2017. Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi memberikan pengajaran tentang dokumentasi media massa, yang secara virtual sama dengan pemahaman dokumentasi yang diberikan oleh FID (Hartinah & Sulistyono-Basuki, 2019).

2.2.5.1 Kurikulum Pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Informasi dalam Lintasan Sejarah

Kurikulum Pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI) di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pada periode awal, yaitu tahun 1952-1961, kurikulum masih berfokus pada konsep "dokumentasi" yang diadaptasi dari konteks Belanda. Buku teks utama yang digunakan adalah "Dokumentasi" karya Simatoepang, Sihombing, dan Aziz (1959), yang mendefinisikan dokumentasi secara luas sebagai aktivitas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan kembali dokumen dari berbagai jenis materi, serta secara terbatas dalam lingkup perpustakaan atau kantor yang menyediakan literatur terkait subjek tertentu.

Memasuki periode 1961-1969, pemahaman mengenai dokumentasi mengalami pergeseran akibat pengaruh Peraturan Presiden RI No. 20 Tahun 1961. Peraturan ini membatasi ruang lingkup dokumentasi pada pengetahuan yang relevan dengan tugas dan fungsi departemen atau

lembaga pemerintah. Selain itu, terjadi perbedaan yang lebih jelas antara perpustakaan dan dokumentasi, di mana dokumentasi dianggap menghasilkan dokumen baru (misalnya bibliografi, abstrak, indeks), sedangkan perpustakaan berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan pemeliharaan koleksi.

Pada periode 1969-1989, buku teks karya Loosjes (1967) menjadi rujukan utama, yang menawarkan tiga jenis definisi dokumentasi: definisi keseluruhan (dokumentasi lebih luas dari perpustakaan), definisi paralel (keduanya setara), dan definisi bawahan (dokumentasi adalah bagian dari perpustakaan). Perbedaan pendapat mengenai tugas perpustakaan dan dokumentasi juga muncul, seperti perbedaan fokus pada jenis bahan yang diolah (buku, surat kabar, majalah) atau bidang ilmu yang dilayani (sosial budaya vs. sains dan teknologi).

Perubahan signifikan terjadi pada periode 1989-2018, di mana istilah "dokumentasi" mulai tergantikan oleh "ilmu informasi". Hal ini didorong oleh perubahan nama American Documentation Institute menjadi American Society for Information Science pada tahun 1968 dan pembubaran FID (Federation Internationale de Documentation) pada tahun 2002. Selain itu, minimnya buku teks tentang dokumentasi dalam bahasa Indonesia serta peraturan pemerintah yang memasukkan IPI ke dalam rumpun ilmu informasi semakin memperkuat pergeseran ini (Hartinah & Sulistyono-Basuki, 2019).

Menurut Zen (2013), kurikulum pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI) pada tahun 2013 secara umum terdiri dari tiga kelompok mata kuliah yaitu:

1. Mata kuliah umum (12%, 17 SKS): Berdasarkan kurikulum universitas, meliputi Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Statistika, Metodologi Penelitian, dan Dasar-dasar Ilmu Sosial/Sains/Budaya.
2. Mata kuliah inti (47%, 68 SKS): Berfokus pada IPI, mencakup mata kuliah seperti Pengantar IPI, Dasar-Dasar Organisasi Informasi, Indeks Kosakata, Metadata, Klasifikasi, Administrasi Perpustakaan, Layanan Referensi, Konservasi, Teknologi Informasi, Manajemen Perpustakaan Digital, Otomasi, Metodologi Penelitian, Pengembangan Koleksi, Aspek Hukum, Literasi Informasi, Etika Profesi, Pemasaran, Jaringan Informasi, Manajemen Arsip, Layanan Informasi, Manajemen Perpustakaan (berbagai jenis), Manajemen Gedung, Kerja Lapangan, dan Skripsi.

3. Mata kuliah khusus (42%, 59 SKS): Disesuaikan dengan fakultas tempat jurusan berada, misalnya berkaitan dengan budaya, sastra, humaniora, komunikasi, atau ilmu sosial.

Perkembangan kurikulum ini mencerminkan upaya untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam mengelola perpustakaan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan informasi. Harapan kita terhadap lulusan program studi IPI dapat menjadi profesional yang kompeten dan relevan di era digital.

2.2.5.2 Pergeseran Paradigma Kurikulum Pendidikan Kepustakawanan

Pergeseran paradigma dalam kurikulum pendidikan kepustakawanan di Indonesia dapat diamati dari perubahan fokus dari terminologi "dokumentasi" menjadi "ilmu informasi". Awalnya, istilah "dokumentasi" merujuk pada aktivitas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mengambil kembali dokumen dari berbagai jenis materi (Simatoepang, Sihombing, dan Aziz, 1959). Namun, seiring waktu, terjadi pergeseran makna dan fokus ke arah pengelolaan informasi secara lebih luas.

Perubahan ini sejalan dengan perkembangan di Amerika Serikat, di mana American Documentation Institute berubah nama menjadi American Society for Information Science pada tahun 1968 (Hartinah & Sulistyobasuki, 2019). Istilah "dokumentasi" pun berganti menjadi "ilmu informasi", yang mencakup investigasi sifat dan perilaku informasi, kekuatan yang mengatur aliran informasi, dan cara pemrosesan informasi untuk aksesibilitas dan kegunaan yang optimal (Borko, 1968).

Hartinah & Sulistyobasuki, (2019) memaparkan bahwa di Indonesia, pergeseran ini juga terlihat dari perubahan nomenklatur di berbagai lembaga penelitian dan pengembangan (R&D). Beberapa lembaga, seperti LIPI, BPPT, LAPAN, dan BATAN, tidak lagi menggunakan istilah "dokumentasi" dalam struktur organisasinya. Sebagian menggantinya dengan istilah "perpustakaan" atau menghapus unit dokumentasi

Perubahan ini menunjukkan bahwa fokus pendidikan kepustakawanan telah bergeser dari pengelolaan dokumen fisik ke pengelolaan informasi secara holistik, termasuk informasi dalam format digital. Pergeseran paradigma ini juga mencerminkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut perubahan dalam cara pandang dan pendekatan terhadap IPI di Indonesia.

2.2.5.3 Institusi Pendidikan Kepustakawanan di Indonesia

Hartinah & Sulistyo-Basuki (2019) menguraikan bahwa pendidikan IPI di Indonesia, khususnya pada rentang waktu 1952 hingga 1986, berpusat di Departemen Ilmu Perpustakaan, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia (FSUI). Hal ini terjadi karena hingga tahun-tahun tersebut, FSUI menjadi satu-satunya institusi pendidikan formal yang menyediakan program studi ini. Meskipun terdapat Departemen Ilmu Perpustakaan di IKIP Bandung (yang kemudian pindah ke Universitas Padjadjaran), namun dokumentasi yang tersedia dari institusi tersebut sangat terbatas.

Pada tahun 1969, Departemen Ilmu Perpustakaan FSUI menerima bantuan dari pemerintah Amerika Serikat, termasuk pengiriman calon dosen, beasiswa bagi mahasiswa (terbatas untuk mereka yang memiliki gelar Sarjana Muda, bukan Ilmu Perpustakaan), dan hibah buku dari Asia Foundation. Bantuan ini turut memperkuat posisi FSUI sebagai pusat pendidikan IPI di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, pendidikan IPI di Indonesia semakin berkembang. Pada tahun 1989, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan pustakawan dibagi menjadi jalur akademik dan profesional. Pendidikan akademik menawarkan program sarjana (Strata 1), magister (Strata 2), dan doktor (Strata 3), sementara pendidikan profesional berfokus pada pengembangan keterampilan praktis.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartinah dan Sulistyo-Basuki pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 17 hingga 20 program studi sarjana IPI di Indonesia. Program pascasarjana pada saat itu hanya tersedia di empat universitas, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, dan UIN Sunan Kalijaga (hlm.89). Namun, penelitian yang lebih baru oleh Nashihuddin & Hidayatullah pada tahun 2020 mengungkapkan peningkatan signifikan dalam jumlah institusi yang menawarkan program studi ini. Berdasarkan data dari Pangkalan Data Kemenristekdikti (Data Pelaporan Tahun 2018/2019), terdapat 48 perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan Prodi IPI (IP&I) dengan total 73 jenjang pendidikan, termasuk jenjang D3, S1, dan S2.

Penelitian yang dilakukan oleh Nashihuddin dan Hidayatullah pada tahun 2020 mengungkapkan adanya beragam nama program studi di bidang ilmu perpustakaan, dengan 11 variasi nama yang berbeda. Di antara variasi tersebut, nama "Ilmu Perpustakaan" menjadi yang paling populer dan digunakan oleh 31 program studi.

Mayoritas program studi ilmu perpustakaan menawarkan jenjang pendidikan Sarjana (S1), dengan total 44 program studi. Jenjang Diploma 3 (D3) juga cukup banyak diminati, dengan 25 program studi yang tersedia. Sementara itu, jenjang Diploma 2 (D2) dan Magister (S2) masing-masing hanya ditawarkan oleh 2 program studi. Menariknya, jenjang pendidikan Doktor (S3) di bidang ilmu perpustakaan saat ini belum tersedia di tingkat perguruan tinggi.

Mayoritas Prodi IP&I berstatus "Aktif" (61 prodi), sementara sisanya berstatus "Alih Bentuk" (6 prodi), "Tutup" (5 prodi), dan "Pembinaan" (1 prodi). Prodi-prodi ini tersebar di 23 fakultas yang berbeda, dengan Fakultas Adab dan Humaniora menjadi yang paling umum (12 institusi), diikuti oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (10 institusi)

Meskipun terjadi peningkatan jumlah institusi penyelenggara, data dari Kemenristekdikti menunjukkan bahwa masih ada perguruan tinggi yang belum terdaftar, seperti Universitas Widyatama, yang menawarkan program studi S1 Ilmu Perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sebenarnya perguruan tinggi yang menawarkan program studi IP&I mungkin lebih tinggi dari yang tercatat secara resmi.

2.2.5.4 Lama Studi Pendidikan Ilmu Pendidikan Informasi

Pendidikan IPI di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal durasi dan jenjang pendidikan. Pada awal kemunculannya di tahun 1952, pendidikan ini dimulai dengan Kursus Pelatihan Staf Perpustakaan yang berlangsung selama satu tahun. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga pustakawan yang lebih terampil, durasi kursus ini kemudian diperpanjang menjadi 1,5 tahun pada pertengahan 1950-an, dan selanjutnya menjadi 2,5 tahun pada akhir 1950-an, dengan perubahan nama menjadi Kursus Pelatihan Teknisi Perpustakaan (KPAP) (Sulistyo-Basuki, 1994).

Pada tahun 1959, KPAP mengalami transformasi menjadi Sekolah Perpustakaan dengan durasi pendidikan tiga tahun (Sumarsidik, 1961). Transformasi ini menandai peningkatan status dan pengakuan terhadap profesi pustakawan, serta kebutuhan akan pendidikan yang lebih komprehensif.

Hartinah & Sulistyo-Basuki, (2019) menjelaskan bahwa perkembangan lebih lanjut terjadi pada tahun 1969, ketika program pendidikan tinggi ilmu perpustakaan dibuka di Departemen Ilmu Perpustakaan FSUI. Program ini menerima mahasiswa yang telah memiliki gelar Sarjana Muda,

menunjukkan peningkatan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi pustakawan profesional (hlm 89).

Mereka berpendapat bahwa awal puncak perkembangan pendidikan IPI di Indonesia terjadi pada tahun 1989, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan. Undang-undang ini secara resmi membagi pendidikan pustakawan menjadi jalur akademik (Strata 1, Strata 2, Strata 3) dan profesional, membuka peluang bagi pengembangan pendidikan dan karier yang lebih luas bagi para pustakawan di Indonesia(hlm.89). Untuk mendapatkan sertifikat Program Sarjana (Program Sarjana), jumlah minimum kredit yang harus diperoleh adalah 144 kredit. Lama studi adalah 4-6 tahun. Secara umum, komposisi kurikulum IPI terdiri dari: mata kuliah umum, mata kuliah inti, mata kuliah khusus, dan mata kuliah pilihan (Zen, 2013).

2.2.5.5 Pendidikan Vokasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Pendidikan vokasi di Indonesia merupakan jalur pendidikan yang mempersiapkan pustakawan paraprofesional atau terampil. Program ini, yang juga dikenal sebagai Program Diploma, menawarkan kurikulum yang berorientasi praktik dan terdiri dari empat jenjang, yaitu D1, D2, D3, dan D4, dengan durasi dan beban studi yang bervariasi. Pada saat ini, mayoritas pendidikan vokasi perpustakaan di Indonesia adalah program Diploma 3.

Sejarah pendidikan perpustakaan di Indonesia dimulai pada tahun 1952 dengan adanya kursus, yang kemudian berkembang menjadi Sekolah Perpustakaan pada tahun 1959. Universitas Indonesia (UI) juga pernah menyelenggarakan pendidikan setingkat "Sarjana Muda" antara tahun 1961-1969, yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pendidikan vokasi di bidang ini. Pada tahun 1978, Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang menjadi pelopor dengan mendirikan Program Diploma 3 Ilmu Perpustakaan, menerima lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai calon mahasiswa (Zen, Z,2013)

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pustakawan terampil menurut Zen, Z. (2013, July) berbagai universitas dan institut mulai mendirikan Program Diploma setelah tahun 1980-an. Beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang menawarkan program Diploma 3 Ilmu Perpustakaan antara lain Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Padjajaran (UNPAD), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Suka), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Negeri Malang

(UM), Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA), dan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)

Pada tahun 2013 mayoritas Pendidikan Vokasi di bidang Pendidikan Perpustakaan adalah Program Diploma 3. Jumlahnya mencapai 22 program, dengan 17 program di perguruan tinggi negeri dan 5 program di perguruan tinggi swasta. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel.1.Nama Perguruan Tinggi penyelenggara program diploma sd 2013

No	Nama Perguruan Tinggi	Tahun Berdiri	No	Nama Perguruan Tinggi	Tahun Berdiri
1.	UI, Jakarta	1952-1969, 1986-	13.	IAIN Ar Raniri, Banda Aceh	1998
2.	UNHAS, Makassar*	1975-1984	14.	UNILA, Lampung	1998-
3.	USU Medan	1983, 2001-	15.	IAIN Imam Bonjol, Padang	1998-
4.	IPB Bogor**	1982-2006	16.	UIN Suka, Jogjakarta	1999-
5.	ULK, Pakan Baru **	1982-	17.	UNP Padang	2001-
6.	UNAIR, Surabaya	1989-	18.	UM, Mataram**	2001-
7.	UGM Yogyakarta	1989-1992, 2000-	19.	IAIN Antasari, Banjarmasin	2001-
8.	UT, Jakarta	1992-	20.	UNS, Solo	2001-
9.	UNSRAT, Manado*	1993-2007, 2022-	21.	UNHALU, Kendari	2004-
10.	Univ. Yarsi, Jakarta**	1994-	22.	UM Malang	2010-
11.	STISIP, Soppeng**	1996-	23.	UNUD Denpasar	2011-
12.	UNIB Bengkulu	1997-	24.	UNDIKSHA, Singaraja	2013-
(*tutup,** universitas swasta)					

(Sumber; Zen, Z. (2013, July). Library and Information Science Education in Indonesia. In Seminar on Library and Information Science Education Collaboration among ASEAN Countries Hosted by Sukhothai Thammathirat Open University Bangkok (pp. 14-16).

2.2.5.6 Tantangan dan Peluang Pendidikan Kepustakawanan di Indonesia

Pendidikan kepustakawanan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan dan peluang yang dinamis di era globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi lanskap informasi, menuntut adaptasi dan inovasi dari perpustakaan dan pustakawan agar tetap

relevan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana pendidikan kepastakawanan dapat mempersiapkan pustakawan masa depan yang tidak hanya mahir dalam teknologi, tetapi juga memiliki literasi informasi yang kuat dan keterampilan komunikasi interpersonal yang baik (Moser, 2017, hlm. 1455). Kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang, sebagaimana diungkapkan dalam IFLA Trend Report Update 2023, menjadi krusial bagi pustakawan untuk terus memperbarui keterampilan dan pengetahuan mereka dalam pemanfaatan teknologi terbaru untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Namun, di balik tantangan tersebut, terbentang peluang besar. Teknologi informasi dan komunikasi menyediakan berbagai alat baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan perpustakaan. Digitalisasi koleksi, pengembangan platform daring, dan penggunaan media sosial merupakan beberapa contoh inovasi yang dapat diadopsi untuk memperluas jangkauan layanan dan menjangkau pengguna baru (Moser, 2017, hlm. 1456). IFLA Trend Report Update 2023 menyoroti bagaimana digitalisasi berperan penting dalam mengatasi kesenjangan akses informasi, terutama di daerah-daerah terpencil.

Perpustakaan di abad ke-21 telah bertransformasi menjadi pusat pembelajaran dan kolaborasi, bukan lagi sekadar gudang buku. Peran perpustakaan dalam mendukung pendidikan dan penelitian di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam IFLA Guidelines for Professional LIS Education Programmes (Chu et al., 2022), menjadi semakin penting. Perpustakaan kini dapat berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan penelitian, menyediakan akses ke sumber daya informasi yang berkualitas, dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran sepanjang hayat.

Pendidikan kepastakawanan memegang peranan kunci dalam membekali pustakawan dengan kompetensi yang dibutuhkan di era digital. Kurikulum pendidikan harus adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan riil di lapangan (Rubin & Froehlich, 2017, hlm. 1471). Program magang, pelatihan profesional, dan pengembangan kemampuan teknologi merupakan beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.

Lebih lanjut, selain kompetensi teknis, pendidikan kepastakawanan juga harus memperhatikan aspek etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai pengelola informasi, pustakawan memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan aksesibilitas informasi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat (Rubin & Froehlich, 2017, hlm. 1473). Pendidikan kepastakawanan perlu menanamkan nilai-nilai etika, seperti kejujuran,

toleransi, dan keadilan, agar lulusan mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara profesional dan beretika.

Dalam konteks global, pendidikan kepastakawanan di Indonesia menghadapi tantangan dalam hal pengakuan kualifikasi profesional (Miwa, 2015, hlm. 3). Hal ini dapat menghambat mobilitas lulusan untuk bekerja di luar negeri atau terlibat dalam proyek internasional. Di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang bagi pengembangan kurikulum yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta kolaborasi internasional dalam pendidikan dan penelitian (Miwa, 2015, hlm. 9).

Institusi pendidikan kepastakawanan di Indonesia perlu merespon tantangan dan peluang ini secara proaktif. Pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja global menjadi krusial. Penguatan kerjasama internasional dalam pendidikan dan penelitian juga perlu ditingkatkan (Schultz-Jones and Oberg, 2019, hlm. 11). Upaya-upaya ini akan meningkatkan kualitas lulusan dan memperkuat posisi pustakawan Indonesia di kancah global.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memberikan arahan bagi peningkatan mutu pendidikan kepastakawanan di Indonesia. Beberapa pasal yang relevan dengan tantangan dan peluang tersebut antara lain:

Pasal 14 ayat (3) huruf a: Mengatur tentang fleksibilitas proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh (termasuk daring), atau kombinasi keduanya, menunjukkan pentingnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dosen dan mahasiswa.

Pasal 33 ayat (2) huruf c: Menekankan pentingnya pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan perguruan tinggi, relevan dengan kebutuhan pustakawan untuk mengelola perpustakaan digital.

Pasal 48 ayat (3) huruf a: Mengatur tentang penyediaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, menunjukkan pentingnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai di perguruan tinggi.

Pasal 8 ayat (2): Mengamanatkan capaian pembelajaran lulusan harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan kompetensi kerja, dan ranah keilmuan program studi, menekankan perlunya kurikulum pendidikan kepastakawanan yang adaptif.

Pasal 41 ayat (1): Menyatakan bahwa materi pembelajaran harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, konsep baru dari penelitian terkini, dan kebutuhan dunia kerja, relevan dengan pendidikan kepestakawanan.

Pasal 103 ayat (2): Mewajibkan BAN-PT dan LAM untuk menyusun dan menetapkan instrumen dan tata cara akreditasi yang sesuai dengan Permendikbudristek ini, menunjukkan perlunya penyesuaian instrumen akreditasi.

Pasal 8 ayat (1): Mengatur tentang penyusunan capaian pembelajaran lulusan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, menunjukkan pentingnya kolaborasi.

Pasal 45: Mengatur tentang penerapan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (sistem ganda), dapat menjadi model bagi program studi kepestakawanan.

Pasal 75 ayat (3): Menyatakan bahwa standar LAM harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti, mendorong program studi kepestakawanan untuk terus meningkatkan mutu.

Pasal 86: Membuka peluang bagi program studi untuk mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional, dapat meningkatkan pengakuan terhadap kualitas lulusan program studi kepestakawanan.

Dengan memperhatikan gagasan-gagasan penting tersebut, pendidikan kepestakawanan di Indonesia dapat lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan global, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2.2.6 Tren dan Isu Kontemporer dalam Pendidikan Kepestakawanan

Pendidikan IPI saat ini menghadapi berbagai tren dan isu kontemporer yang memengaruhi arah dan perkembangannya. Beberapa tren utama meliputi:

1. Pergeseran Fokus Kurikulum: Terjadi pergeseran fokus kurikulum dari keterampilan tradisional seperti katalogisasi dan klasifikasi, ke arah literasi digital, manajemen data penelitian, dan pengalaman pengguna (UX). Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi digital dan perubahan kebutuhan pengguna perpustakaan.
2. Pentingnya Literasi Digital: Literasi digital menjadi kompetensi inti bagi profesional IPI di era digital (Jaeger et al., 2011). Ini mencakup kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan

informasi secara efektif dalam lingkungan digital, serta memahami isu-isu etika dan privasi terkait.

3. Manajemen Data Penelitian (RDM): RDM menjadi bidang yang semakin penting dalam pendidikan IPI karena meningkatnya produksi dan penggunaan data penelitian. Profesional IPI perlu memiliki keterampilan dalam mengelola, mengatur, dan menyediakan akses ke kumpulan data yang besar dan kompleks.
4. Desain Pengalaman Pengguna (UX Design): UXD menjadi fokus utama dalam pendidikan IPI, karena perpustakaan semakin beralih ke layanan digital (Schmidt and Etches, 2014). Profesional IPI perlu memahami prinsip-prinsip desain yang berpusat pada pengguna untuk menciptakan antarmuka dan layanan yang mudah digunakan dan efektif.
5. Pembelajaran Aktif dan Pembelajaran Daring: Metode pengajaran tradisional seperti ceramah semakin digantikan dengan metode pembelajaran aktif seperti studi kasus, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah (Chu, 2015; Forbes & Keeran, 2017). Pembelajaran daring dan jarak jauh juga semakin populer (Oguz, Chu, & Chow, 2015), menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar bagi mahasiswa .
6. Keragaman dan Inklusi: Isu keragaman dan inklusi menjadi perhatian utama dalam pendidikan IPI, Pendidikan IPI mesti berupaya untuk meningkatkan keterwakilan kelompok minoritas di antara mahasiswa dan fakultas, dengan tujuan memastikan bahwa layanan perpustakaan memenuhi kebutuhan beragam komunitas.

Dokumen "IFLA Guidelines for Professional Library and Information Science (LIS) Education Programmes" (2022) menyoroti beberapa tren dan isu kontemporer yang relevan dengan pendidikan kepustakawanan, antara lain:

1. Pergeseran Fokus Pendidikan: Terjadi pergeseran fokus dalam pendidikan kepustakawanan dari perpustakaan tradisional ke ilmu informasi yang lebih luas. Hal ini tercermin dari perubahan nama program studi dan kurikulum yang semakin mencakup aspek teknologi informasi, literasi digital, dan manajemen data.
2. Pentingnya Kompetensi Pedagogis: Dokumen ini menekankan pentingnya kompetensi pedagogis bagi staf pengajar IPI. Dosen LIS diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam teori pembelajaran, metode pengajaran, desain materi pembelajaran, penilaian, teknologi pendidikan, dan praktik pengajaran reflektif.

3. **Internasionalisasi dan Pengalaman Dunia Nyata:** Pendidikan IPI didorong untuk mengintegrasikan perspektif internasional dan pengalaman dunia nyata ke dalam kurikulum. Upaya internasionalisasi dapat dilakukan melalui pertukaran pelajar dan pengajar, serta kolaborasi dalam inisiatif pendidikan dan penelitian. Selain itu, keterlibatan praktisi profesional dan pembelajaran langsung juga dianggap penting untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa.
4. **Keterampilan Abad ke-21:** Kurikulum pendidikan IPI perlu mencakup keterampilan abad ke-21, seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Keterampilan ini dianggap penting bagi pustakawan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
5. **Keragaman, Kesenjangan, Inklusi, dan Aksesibilitas (DEIA):** Isu DEIA menjadi perhatian penting dalam pendidikan kepustakawanan. Kurikulum dan praktik pengajaran harus dirancang untuk memastikan bahwa nilai-nilai DEIA terintegrasi dalam semua aspek pendidikan dan praktik profesional IPI.
6. **Decolonization and Indigenization:** Pendidikan IPI juga perlu mempertimbangkan dekolonisasi dan indigenisasi konten dan praktik. Ini berarti mengakui dan menghargai pengetahuan dan praktik tradisional, serta mempertimbangkan bagaimana pengetahuan dan praktik tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan dan layanan perpustakaan.

Tren dan isu ini mencerminkan perubahan lanskap informasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pendidikan kepustakawanan perlu beradaptasi dengan perubahan ini untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

2.2.6 Proyeksi dan Tantangan Masa Depan Pendidikan Kepustakawanan

Masa depan pendidikan IPI akan terus dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Beberapa proyeksi dan tantangan yang mungkin dihadapi antara lain:

1. **Perkembangan Teknologi:** Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, dan realitas virtual akan terus mengubah cara perpustakaan beroperasi dan layanan yang mereka berikan. Pendidikan IPI perlu beradaptasi dengan perkembangan ini

dengan memasukkan teknologi baru ke dalam kurikulum dan membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan. (Abels et al., 2018)

2. **Kebutuhan Kompetensi Baru:** Peran profesional IPI akan terus berkembang, dan kompetensi baru akan dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan (Abels et al., 2018). Ini mungkin termasuk keterampilan dalam analisis data, visualisasi data, manajemen proyek, dan komunikasi lintas budaya.
3. **Kolaborasi dan Kemitraan:** Kolaborasi antara Program Studi IPI, praktisi perpustakaan, dan pemberi kerja akan menjadi semakin penting (Sands et al., 2018) untuk memastikan bahwa pendidikan IPI tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pasar kerja. Kemitraan dengan industri dan lembaga lain juga dapat memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis dan mengembangkan jaringan profesional.
4. **Kesenjangan Digital dan Literasi Digital:** Kesenjangan digital tetap menjadi tantangan global, dan pendidikan IPI memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini (Sands et al., 2018). Mempromosikan literasi digital dan memastikan akses yang adil terhadap informasi dan teknologi akan menjadi prioritas utama bagi para pendidik IPI

Berdasarkan laporan "IFLA Trend Report 2023 Update", berikut adalah beberapa proyeksi dan tantangan masa depan pendidikan kepastakawanan yang dapat disimpulkan, meskipun tidak secara eksplisit dibahas dalam laporan:

1. **Relevansi Pendidikan Kepustakawanan:** Tantangan utama adalah menjaga relevansi pendidikan kepastakawanan di tengah perubahan pesat dalam teknologi dan masyarakat. Kurikulum perlu beradaptasi dengan kebutuhan keterampilan baru seperti literasi digital, literasi informasi, dan kompetensi teknologi lainnya.
2. **Pendanaan dan Investasi:** Kurangnya investasi publik dalam layanan publik dapat menjadi tantangan bagi pengembangan pendidikan kepastakawanan. Mencari sumber pendanaan alternatif dan membangun kemitraan dengan sektor swasta atau organisasi nirlaba dapat menjadi solusi potensial.
3. **Persepsi terhadap Profesi Pustakawan:** Mengatasi persepsi bahwa pustakawan hanya sebagai staf pendukung dan bukan aktor pembangunan merupakan tantangan penting. Pendidikan kepastakawanan perlu memperkuat citra profesional pustakawan dan menekankan peran mereka dalam pembangunan masyarakat.

4. Kesenjangan Digital: Pendidikan kepustakawanan harus mampu mengatasi kesenjangan digital dengan menyediakan pelatihan yang memadai bagi pustakawan dalam literasi digital dan teknologi.
5. Kemampuan Berpikir Strategis: Laporan ini menyoroti pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir strategis di kalangan pustakawan. Pendidikan kepustakawanan perlu membekali pustakawan dengan keterampilan untuk menganalisis tren, mengidentifikasi peluang, dan merencanakan masa depan perpustakaan secara efektif.

Masa depan pendidikan IPI dipenuhi dengan peluang dan tantangan. Perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, dan kesenjangan digital menuntut adaptasi yang cepat dan berkelanjutan. Pendidikan IPI perlu mempersiapkan lulusan yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki kompetensi baru seperti analisis data, manajemen proyek, dan komunikasi lintas budaya. Kolaborasi dengan praktisi perpustakaan, industri, dan lembaga lain akan menjadi kunci untuk memastikan relevansi dan daya saing lulusan. Selain itu, mengatasi persepsi terhadap profesi pustakawan, kesenjangan digital, dan mengembangkan kemampuan berpikir strategis akan menjadi tantangan penting yang perlu dihadapi.

2.3 Pendidikan Kepustakawanan di Era Digital

Pendidikan kepustakawanan di era digital telah mengalami perubahan yang signifikan, baik dalam hal kurikulum, metode pengajaran, maupun peran pustakawan itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru sekaligus tantangan bagi dunia kepustakawanan. Di satu sisi, teknologi digital memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan efisien. Di sisi lain, pustakawan dituntut untuk terus beradaptasi dan mengembangkan kompetensi baru agar tetap relevan di era digital.

2.3.1 Pembelajaran Daring (Online) dan Luring (Offline)

Pendidikan kepustakawanan di era digital telah mengalami perubahan signifikan dengan munculnya pembelajaran online. Pembelajaran daring menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar bagi mahasiswa, memungkinkan mereka untuk belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir secara fisik di kelas (Hofmann, 2018, hlm. 13). Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki keterbatasan geografis, waktu, atau mobilitas. Selain itu, pembelajaran daring juga memungkinkan akses ke berbagai sumber belajar digital, seperti ebook, jurnal online, dan basis data, yang dapat memperkaya pengalaman belajar mahasiswa.

Namun, pembelajaran daring juga menghadirkan tantangan tersendiri (Hofmann, 2018, hlm. 14). Salah satu tantangan utama adalah kurangnya interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa, serta antara sesama mahasiswa. Interaksi tatap muka yang terbatas dapat mengurangi kesempatan untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan membangun jaringan profesional. Selain itu, pembelajaran daring juga menuntut kemandirian dan disiplin diri yang tinggi dari mahasiswa, karena mereka harus mengatur waktu belajar mereka sendiri dan tetap termotivasi tanpa pengawasan langsung dari dosen.

Untuk mengatasi tantangan ini, banyak program pendidikan kepastakawanan mengadopsi pendekatan hybrid yang menggabungkan pembelajaran daring dan luring (offline) (Hofmann, 2018, hlm. 20). Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan manfaat dari kedua mode pembelajaran. Pembelajaran luring, seperti kuliah tatap muka, diskusi kelompok, dan praktik kerja lapangan, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan dosen dan sesama mahasiswa, serta mendapatkan pengalaman praktis di lapangan. Sementara itu, pembelajaran daring memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu atau tempat.

Pendekatan hybrid ini juga memungkinkan sekolah perpustakaan untuk menjangkau mahasiswa yang lebih luas, termasuk mereka yang berada di lokasi geografis yang berbeda atau memiliki jadwal yang padat. Dengan memadukan pembelajaran daring dan luring, pendidikan kepastakawanan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya, komprehensif, dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa di era digital. Selain perubahan dalam konten kurikulum, metode pengajaran dalam pendidikan IPI juga telah berkembang. Pendekatan pedagogis tradisional seperti ceramah dan latihan individu semakin dilengkapi dengan metode pembelajaran aktif seperti studi kasus, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah (Chu, 2015; Forbes and Keeran, 2017).

Metode-metode ini mendorong mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan menerapkan pengetahuan mereka pada skenario dunia nyata. Pembelajaran daring dan jarak jauh juga semakin dimanfaatkan, terutama dengan menggunakan teknologi berbasis web (Oguz, Chu, & Chow, 2015). Hal ini memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar bagi mahasiswa, terutama mereka yang memiliki keterbatasan geografis atau waktu. Beberapa ahli juga mengusulkan inovasi lebih lanjut dalam metode pengajaran, seperti pemanfaatan *Massive Open Online Courses (MOOCs)* untuk memperluas jangkauan pendidikan berkelanjutan (Keiser, 2012) dan

penggunaan Open Digital Badges sebagai pengakuan atas pencapaian kompetensi tertentu melalui pelatihan daring (Fields, 2015).

Kesimpulannya, pendidikan kepastakawanan di era digital telah mengalami transformasi signifikan dengan hadirnya pembelajaran daring yang menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas lebih luas, namun juga menghadirkan tantangan dalam hal interaksi dan motivasi belajar. Pendekatan hybrid yang menggabungkan pembelajaran daring dan luring menjadi solusi yang menjanjikan, memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa di era digital. Perkembangan dalam metode pengajaran juga patut diperhatikan. Kini, metode pengajaran lebih menekankan pada pembelajaran aktif dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan inklusif.

2.3.2 Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PKB)

Pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi (IP&I) menuntut adanya pengembangan profesional berkelanjutan (PKB) bagi para pustakawan dan profesional informasi. PKB merupakan proses pembelajaran berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan profesional agar tetap relevan dengan perkembangan global. Dalam konteks internasionalisasi, PKB meliputi peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu global, tren terkini dalam IP&I, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan multicultural. (Yoon & Jeong, 2019, hlm. 45) PKB menjadi semakin penting dalam pendidikan kepastakawanan di era digital. Mengingat lanskap informasi yang terus berubah dan perkembangan teknologi yang pesat, para profesional IPI perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar tetap relevan dan kompeten.

Lebih lanjut, PKB tidak hanya tentang mengikuti perkembangan terbaru, tetapi juga tentang mengembangkan keterampilan baru, memperdalam pemahaman tentang isu-isu terkini, dan memperluas jaringan profesional. (Kim & Sin, 2015, hlm. 12) Salah satu bentuk PKB yang umum adalah mengikuti kursus dan lokakarya yang ditawarkan oleh Lembaga Pendidikan IPI, asosiasi profesional, atau penyedia pendidikan lainnya. Kursus-kursus ini dapat mencakup berbagai topik, mulai dari teknologi terbaru hingga isu-isu etika dan sosial dalam kepastakawanan. Selain itu, konferensi dan seminar juga memberikan peluang berharga bagi profesional IPI untuk belajar dari pakar, berjejaring dengan rekan sejawat, dan berbagi pengalaman. Partisipasi aktif dalam forum-forum internasional memungkinkan pustakawan dan profesional informasi untuk berbagi

pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dengan kolega dari berbagai negara.

Pemanfaatan teknologi juga telah mengubah cara PKB dilakukan. Pembelajaran online dan platform pembelajaran online seperti WebJunction (hasil kolaborasi antara OCLC dan Bill and Melinda Gates Foundation) menawarkan akses ke berbagai sumber belajar dan pelatihan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja (Keiser, 2012). Beberapa Lembaga Pendidikan IPI di Negara Maju, misalnya Amerika Serikat juga mulai menawarkan Massive Open Online Courses (MOOCs) sebagai sarana PKB yang terjangkau dan dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Pentingnya PKB juga diakui dalam Kode Etik ALA dan Kompetensi Inti Ilmu Perpustakaan, yang menekankan perlunya pengembangan profesional berkelanjutan bagi pustakawan (ALA, 2009b).

Penting untuk dicatat bahwa PKB merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari individu maupun institusi. (Rhee, 2017, hlm. 89) Beberapa cara untuk mendorong PKB antara lain adalah dengan memberikan insentif finansial atau pengakuan atas partisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional, menyediakan waktu dan sumber daya yang memadai bagi staf untuk mengikuti pelatihan, dan menciptakan budaya belajar di tempat kerja. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, profesional IPI dapat memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang dan berkontribusi pada kemajuan perpustakaan di era digital.

2.3.3 Penelitian dan Inovasi dalam Pendidikan Kepustakawanan

Pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi (IP&I) mendorong peningkatan fokus pada penelitian dan inovasi. Lingkungan akademik yang mendukung internasionalisasi mengharuskan institusi dan program studi untuk aktif dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan isu-isu global. (Chu, 2018, hlm. 76) Penelitian kolaboratif internasional memberikan peluang bagi para akademisi dan peneliti untuk berbagi pengetahuan, metodologi, dan data, serta menghasilkan temuan yang berdampak luas. Penelitian dan inovasi menjadi aspek penting dalam pendidikan kepustakawanan di era digital. Laporan Williamson tahun 1923 telah menekankan pentingnya penelitian dalam pengembangan pendidikan kepustakawanan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penelitian di bidang ini semakin relevan untuk memahami bagaimana teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan perpustakaan dan akses informasi bagi masyarakat.

Penelitian dalam pendidikan kepastakawanan mencakup berbagai topik, mulai dari studi tentang perilaku informasi pengguna (Case and Given, 2016), efektivitas berbagai sistem dan layanan perpustakaan, hingga pengembangan model dan pendekatan baru dalam pengelolaan informasi. Penelitian ini tidak hanya dilakukan oleh akademisi di Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi IPI, tetapi juga oleh para praktisi perpustakaan yang berupaya meningkatkan layanan mereka berdasarkan bukti empiris. Lebih lanjut, inovasi dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan layanan perpustakaan menjadi krusial dalam menjawab tantangan global dan memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin beragam. (Lee & Park, 2016, hlm. 92)

Inovasi dalam pendidikan kepastakawanan juga didorong oleh kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna. Beberapa contoh inovasi meliputi pengembangan kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja, penerapan teknologi pembelajaran baru seperti realitas virtual dan augmented reality dalam pengajaran, serta pengembangan model pembelajaran daring yang lebih interaktif dan kolaboratif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pendidikan dan pelayanan IP&I perlu diintegrasikan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas. Misalnya, pengembangan platform pembelajaran online, repositori digital, dan layanan perpustakaan virtual merupakan contoh inovasi yang mendukung internasionalisasi.

Selain itu, penelitian dan inovasi juga berperan penting dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kepastakawanan, seperti kesenjangan digital dan kurangnya keragaman dalam profesi. Penelitian tentang perilaku informasi pengguna dari kelompok yang kurang terlayani dapat membantu perpustakaan mengembangkan layanan yang lebih inklusif dan efektif. Penelitian dan inovasi juga berperan penting dalam mengembangkan kompetensi lulusan IP&I agar mampu bersaing di tingkat global. (Lankes, 2011, hlm. 14)

Kurikulum yang dinamis dan berorientasi pada masa depan perlu dirancang untuk membekali lulusan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam dunia kerja yang semakin global. Program magang internasional, pertukaran pelajar, dan kunjungan studi ke perpustakaan dan institusi informasi di luar negeri dapat memberikan pengalaman belajar yang berharga dan memperluas wawasan internasional lulusan. Dengan terus mendorong penelitian dan inovasi, pendidikan kepastakawanan dapat terus berkembang dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Hal ini akan

memastikan bahwa profesi pustakawan tetap relevan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat.

2.3.4 Peran Pustakawan dalam Mempromosikan Literasi Digital dan Literasi Informasi

Dalam era digital yang terus berkembang, peran pustakawan dalam literasi digital dan literasi informasi menjadi semakin krusial. Literasi digital, yang merujuk pada kemampuan individu untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara efektif, serta literasi informasi, yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali kebutuhan informasi, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu, merupakan dua aspek penting yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat informasi saat ini.

Pustakawan dapat berperan sebagai fasilitator dan pengajar literasi digital dan literasi informasi. Mereka dapat merancang dan memberikan pelatihan serta lokakarya tentang berbagai topik, termasuk penggunaan internet, evaluasi sumber informasi, keamanan online, dan etika informasi. Pelatihan dan lokakarya ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lansia (Horton, 2019). Selain itu, pustakawan juga dapat mengembangkan panduan dan tutorial online untuk mendukung pembelajaran mandiri dan menjangkau khalayak yang lebih luas, melampaui batasan fisik perpustakaan.

Lebih lanjut, pustakawan memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan digital dengan menyediakan akses ke teknologi dan sumber daya digital. Dengan menawarkan akses internet publik, komputer, dan perangkat lainnya, perpustakaan memastikan bahwa individu yang kurang memiliki sumber daya memiliki sarana untuk mengembangkan keterampilan literasi digital mereka. Selain itu, pustakawan dapat membantu pengguna menavigasi lanskap digital yang kompleks dan menemukan informasi yang relevan dan dapat dipercaya, sehingga mengurangi kesenjangan antara yang memiliki informasi dan yang tidak (McCook and Bossaller, 2018).

Pustakawan juga dapat berperan sebagai advokat untuk literasi digital, bekerja sama dengan sekolah, organisasi komunitas, dan pembuat kebijakan untuk mempromosikan pentingnya literasi digital dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung akses yang adil terhadap sumber daya dan pelatihan digital (Jaeger et al., 2011). Dengan secara aktif berpartisipasi dalam wacana publik dan bermitra dengan para pemangku kepentingan, pustakawan dapat membantu membentuk masa depan

informasi dan memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat digital.

Peran pustakawan dalam FKA8: Literacies and Learning sangat luas dan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengajaran literasi tradisional seperti membaca dan menulis, hingga pengembangan keterampilan digital dan advokasi untuk akses yang adil terhadap informasi dan teknologi. Pustakawan tidak hanya berfokus pada literasi tradisional tetapi juga pada berbagai literasi lainnya, termasuk literasi informasi, media, data, visual, dan digital.

Literasi informasi menjadi sangat penting di era digital, di mana individu dihadapkan pada banjir informasi dari berbagai sumber. Profesional IPI berperan dalam membimbing individu untuk dapat mengevaluasi informasi secara kritis, membedakan antara fakta dan opini, serta mengenali sumber informasi yang kredibel. Dalam konteks literasi digital, pustakawan membantu individu untuk memahami dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Mereka dapat memberikan pelatihan tentang penggunaan internet, perangkat lunak, dan aplikasi, serta membantu individu mengembangkan keterampilan dalam mencari, mengelola, dan membuat informasi digital.

2.4 Tantangan dan Peluang Masa Depan Pendidikan Kepustakawanan

Pendidikan kepustakawanan berada di persimpangan jalan, di mana tantangan dan peluang saling berkelindan. Di satu sisi, perkembangan teknologi yang pesat dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut adaptasi yang cepat dan inovatif. Di sisi lain, peluang untuk mentransformasi pendidikan ini menjadi lebih relevan dan berdampak belum pernah sebesar ini.

Bagian ini akan membahas isu-isu krusial yang akan mempengaruhi pendidikan kepustakawanan di masa depan, serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mentransformasi pendidikan ini agar lebih adaptif dan inovatif. Selain itu, akan dibahas strategi dan visi yang diperlukan untuk menciptakan pendidikan kepustakawanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta implikasi dari laporan "IFLA Trend Report Update 2023" bagi pengembangan pendidikan kepustakawanan di Indonesia.

2.4.1 Isu-Isu Krusial Yang Akan Mempengaruhi Pendidikan Kepustakawanan

Pendidikan kepustakawanan di masa depan akan menghadapi sejumlah isu krusial yang perlu diantisipasi dan ditangani. Salah satu isu utama adalah perkembangan teknologi yang pesat. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin (machine learning), dan realitas virtual (VR) akan terus mengubah cara perpustakaan beroperasi dan layanan yang mereka berikan (Abels et al., 2018). Tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi-teknologi ini ke dalam kurikulum dan memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang relevan untuk menghadapi perubahan ini.

Selain itu, kebutuhan akan kompetensi baru juga menjadi isu penting. Peran profesional IPI akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Kompetensi baru seperti analisis data, visualisasi data, manajemen proyek, dan komunikasi lintas budaya akan semakin dibutuhkan (Abels et al., 2018). Pendidikan kepustakawanan perlu mempersiapkan lulusan dengan kompetensi-kompetensi ini agar mereka dapat berhasil dalam lingkungan kerja yang terus berubah.

Kesenjangan digital juga merupakan isu krusial yang perlu diatasi. Meskipun akses terhadap teknologi semakin meluas, masih terdapat kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan keterampilan digital dengan mereka yang tidak (Sands et al., 2018). Pendidikan kepustakawanan memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan bagi individu dan komunitas untuk mengembangkan literasi digital mereka.

IFLA Trend Report Update 2023 tidak secara eksplisit membahas isu-isu krusial yang akan memengaruhi pendidikan kepustakawanan. Namun, beberapa tren yang diidentifikasi dalam laporan ini dapat memberikan wawasan tentang tantangan potensial yang akan dihadapi oleh pendidikan kepustakawanan di masa depan

1. Perpustakaan semakin dipandang tidak relevan: Tren ini menunjukkan kebutuhan untuk memperbarui kurikulum pendidikan kepustakawanan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan teknologi yang berkembang pesat.
2. Kurangnya investasi publik: Penurunan anggaran publik dapat menyebabkan kurangnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan

pustakawan, sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas tenaga kerja perpustakaan yang berkualitas.

3. Perpustakaan dipandang sebagai lembaga tambahan: Persepsi ini dapat menyebabkan kurangnya dukungan terhadap pengembangan profesional pustakawan dan inovasi dalam praktik kepastakawanan.
4. Kesenjangan digital: Pendidikan kepastakawanan perlu mengatasi kesenjangan digital dengan lebih baik, memastikan bahwa semua pustakawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menavigasi lanskap digital yang terus berkembang.

Tren-tren ini menunjukkan bahwa pendidikan kepastakawanan perlu beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi untuk tetap relevan dan efektif dalam mempersiapkan pustakawan masa depan. Pendidikan kepastakawanan harus fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan, serta memperkuat peran perpustakaan sebagai lembaga yang penting dalam masyarakat

2.4.2 Peluang Untuk Mentransformasi Pendidikan yang Adaptif dan Inovatif

Isu-isu yang dihadapi pendidikan kepastakawanan juga menghadirkan peluang untuk mentransformasi pendidikan agar lebih adaptif dan inovatif. *IFLA Trend Report Update 2023* menyoroti beberapa peluang kunci, termasuk:

1. Pemanfaatan Teknologi Digital: Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan efektif. Misalnya, penggunaan *virtual reality* (VR) dan *augmented reality* (AR) dapat memberikan pengalaman belajar yang imersif dan memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan lingkungan perpustakaan secara virtual (King, D. L., 2020). Teknologi imersif ini dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, memungkinkan mahasiswa untuk "mengunjungi" perpustakaan yang berbeda, berinteraksi dengan koleksi digital, dan bahkan mensimulasikan skenario layanan perpustakaan.
2. Kolaborasi dan Kemitraan: Kolaborasi antara Program Studi IPI, praktisi perpustakaan, dan pemberi kerja dapat menghasilkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengembangan kurikulum, Lembaga Pendidikan IPI dapat memastikan bahwa lulusan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh industri. Praktik kerja lapangan atau magang dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang dipelajari di kelas ke dalam

situasi dunia nyata, serta membangun jaringan profesional yang berharga.

3. Peningkatan Aksesibilitas: Teknologi digital juga dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan kepastakawanan. Pembelajaran online dan platform pembelajaran online, seperti WebJunction, memungkinkan mahasiswa dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis untuk mengakses materi pembelajaran dan berpartisipasi dalam diskusi (Keiser, 2012).
4. Transformasi Pendekatan Pedagogis: Pendekatan pedagogis juga dapat diubah untuk mendorong pembelajaran yang lebih aktif dan kolaboratif. Alih-alih hanya mengandalkan kuliah tradisional, Lembaga Pendidikan IPI dapat memasukkan studi kasus, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah ke dalam kurikulum mereka. Pendekatan ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah secara kreatif, dan bekerja sama secara efektif, yang merupakan keterampilan penting bagi profesional IPI di era digital.

Selain peluang-peluang di atas, laporan tersebut juga menekankan pentingnya:

1. Pembelajaran Sepanjang Hayat: Mendorong pustakawan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka sepanjang karier mereka.
2. Pengembangan Bakat: Investasi dalam pengembangan bakat untuk mempersiapkan pemimpin masa depan di bidang kepastakawanan.
3. Keragaman, Kesenjangan, dan Inklusi: Menerapkan kebijakan yang mempromosikan keragaman, kesetaraan, dan inklusi dalam pendidikan dan praktik kepastakawanan.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini dan mengatasi tantangan yang ada, seperti persepsi menurunnya relevansi perpustakaan, kurangnya investasi publik, dan kesenjangan digital, pendidikan kepastakawanan dapat bertransformasi menjadi lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang

2.4.3 Strategi Dan Visi Untuk Pendidikan Kepustakawanan Yang Relevan Dengan Kebutuhan Masyarakat

Untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, pendidikan kepastakawanan perlu memiliki strategi dan visi yang jelas. Strategi ini harus mencakup beberapa elemen kunci, seperti:

1. Kurikulum yang Adaptif: Kurikulum harus terus diperbarui untuk mencerminkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat

yang terus berubah. Ini termasuk mengintegrasikan teknologi baru ke dalam kurikulum, seperti kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin (machine learning), dan realitas virtual (VR), serta mengembangkan kompetensi baru yang relevan, seperti analisis data, visualisasi data, dan manajemen proyek. Selain itu, penekanan pada pembelajaran berbasis masalah dan pengalaman langsung akan membantu mahasiswa menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Hal ini sejalan dengan FKA3: Information and Communication Technologies dalam *IFLA Guidelines for Professional LIS Education Programmes*, yang menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan kepustakawanan.

2. Pendekatan Pembelajaran yang Inovatif: Lembaga Pendidikan IPI perlu merangkul pedagogi inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran daring yang interaktif, untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi mahasiswa. Pembelajaran daring, misalnya, dapat meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas, memungkinkan mahasiswa dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis untuk berpartisipasi (Oguz, Chu, & Chow, 2015). Ini sejalan dengan G3: Curriculum and Pedagogy dalam pedoman IFLA, yang menganjurkan penggunaan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang inovatif.
3. Kemitraan yang Kuat: Membangun kemitraan yang kuat dengan praktisi perpustakaan, pemberi kerja, dan lembaga lain dapat membantu memastikan bahwa pendidikan IPI tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja (Sands et al., 2018). Kemitraan ini juga dapat memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis melalui magang, proyek kolaboratif, atau program mentoring. Hal ini terkait dengan G7: Complementary Education and Professional Development, yang menekankan pentingnya pengalaman praktis dan pembelajaran di luar kelas.
4. Fokus pada Keragaman dan Inklusi: Pendidikan IPI perlu secara aktif mempromosikan keragaman dan inklusi di antara mahasiswa dan fakultas, serta mengintegrasikan perspektif keragaman ke dalam kurikulum (Jaeger et al., 2011). Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memastikan bahwa lulusan dapat melayani beragam komunitas dengan efektif. Prinsip ini sejalan dengan G6: Students dalam pedoman IFLA, yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua mahasiswa.

5. Penelitian yang Relevan: Penelitian di bidang kepastakawanan harus diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang bagaimana perpustakaan dapat melayani masyarakat secara efektif di era digital, serta bagaimana mengatasi tantangan seperti kesenjangan digital dan perubahan kebutuhan informasi (Sands et al., 2018). Penelitian juga dapat mengeksplorasi dampak teknologi baru terhadap praktik kepastakawanan dan mengidentifikasi cara-cara inovatif untuk meningkatkan layanan perpustakaan. Ini berkaitan dengan FKA4: Research and Innovation, yang menekankan pentingnya penelitian dan inovasi dalam pendidikan dan praktik kepastakawanan.

2.4.3 Implikasi IFLA Trend Report Update 2023 terhadap Pendidikan Kepustakawanan

IFLA Trend Report Update 2023 menyoroti berbagai tren yang memiliki implikasi signifikan terhadap pendidikan kepastakawanan. Laporan ini menggarisbawahi tantangan utama dalam menjaga relevansi pendidikan di tengah perubahan pesat teknologi dan masyarakat.

Kurikulum perlu beradaptasi dengan kebutuhan keterampilan baru seperti literasi digital, literasi informasi, manajemen data penelitian, pengalaman pengguna (UX), dan kompetensi teknologi lainnya. Pendekatan pedagogis perlu direvisi agar lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik, misalnya dengan mengintegrasikan pembelajaran aktif, pembelajaran daring, dan metode inovatif lainnya.

Tantangan lain adalah kurangnya investasi publik dalam layanan publik, yang dapat menghambat pengembangan pendidikan kepastakawanan. Lembaga pendidikan perlu mencari sumber pendanaan alternatif, seperti menjalin kemitraan, untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas program.

Selain itu, mengatasi persepsi bahwa pustakawan hanya sebagai staf pendukung merupakan tantangan penting. Pendidikan kepastakawanan perlu memperkuat citra profesional pustakawan dengan menekankan peran mereka dalam literasi informasi, pembelajaran sepanjang hayat, dan pembangunan masyarakat di era digital. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam *Building Strong LIS Education: A Call to Global and Local Action* yang menekankan pentingnya pendidikan IPI yang kuat untuk membekali pustakawan dengan keterampilan yang relevan.

Kesenjangan digital juga menjadi isu krusial. Penyediaan pelatihan yang memadai bagi pustakawan dalam literasi digital dan teknologi menjadi suatu keharusan. Selain itu, peserta didik perlu dibekali dengan pengetahuan

dan keterampilan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan literasi digital mereka.

Laporan ini juga menyoroti pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir strategis di kalangan pustakawan. Pendidikan kepustakawanan perlu membekali pustakawan dengan keterampilan untuk menganalisis tren, mengidentifikasi peluang, dan merencanakan masa depan perpustakaan secara efektif.

Beberapa poin penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat:

1. Pendidikan sepanjang hayat dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi pustakawan merupakan hal krusial untuk memastikan relevansi mereka. Fokus pendidikan kepustakawanan haruslah pada pengembangan keterampilan baru dan peningkatan kompetensi yang ada. Hal ini sejalan dengan rekomendasi *G7: Complementary Education and Professional Development* dalam pedoman IFLA.
2. Pendidikan sepanjang hayat dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi pustakawan merupakan hal krusial untuk memastikan relevansi mereka. Fokus pendidikan kepustakawanan haruslah pada pengembangan keterampilan baru dan peningkatan kompetensi yang ada. Hal ini sejalan dengan rekomendasi *G7: Complementary Education and Professional Development* dalam pedoman IFLA.
3. Investasi dalam pengembangan bakat dan kepemimpinan di bidang kepustakawanan juga menjadi sorotan penting. Memberikan kesempatan bagi pustakawan muda untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan inovasi mereka akan sangat bermanfaat. Konsep ini selaras dengan *FKA6: Management for Information Professionals*, yang menekankan pentingnya keterampilan manajemen dan kepemimpinan.
4. Laporan ini juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang beragam, setara, dan inklusif dalam pendidikan dan praktik kepustakawanan. Pendidikan harus mempersiapkan pustakawan untuk melayani masyarakat yang beragam dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap informasi dan layanan, sejalan dengan *G6: Students* dalam pedoman IFLA.
5. Keterlibatan aktif pustakawan dalam perencanaan digital dan pembuatan kebijakan terkait teknologi informasi dan komunikasi juga sangat dianjurkan. Langkah ini akan menjamin bahwa perpustakaan tetap relevan dan efektif dalam era digital, sesuai dengan *FKA3: Information and Communication Technologies* dalam pedoman IFLA.

6. Terakhir, pendidikan kepustakawanan perlu menyelaraskan tujuannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. Ini berarti mempersiapkan pustakawan untuk berperan aktif dalam mengatasi tantangan global, berkaitan erat dengan *FKAI: Information in Society*, yang menekankan peran informasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi

Dengan mengimplementasikan strategi dan visi ini, serta memperhatikan implikasi dari IFLA Trend Report Update 2023, pendidikan kepustakawanan dapat terus berkembang dan menghasilkan profesional yang kompeten, adaptif, dan berdedikasi untuk melayani masyarakat dan memajukan akses pengetahuan di era digital.

3

Profesi Pustakawan dan Profesional Informasi

Profesi pustakawan dan profesional informasi telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Pustakawan tidak lagi hanya sekadar penjaga buku, tetapi telah berkembang menjadi pengelola informasi, fasilitator pembelajaran, dan mitra strategis dalam berbagai bidang.

Bab ini akan membahas peran dan tanggung jawab pustakawan modern mencakup berbagai aspek, mulai dari kurasi dan pengelolaan koleksi, layanan referensi dan informasi, hingga pengembangan literasi informasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Kompetensi yang dibutuhkan juga semakin kompleks, mencakup penguasaan teknologi informasi, keterampilan komunikasi dan kolaborasi, serta kemampuan analisis dan pemecahan masalah.

Profesi pustakawan di Indonesia diatur dalam undang-undang dan standar kompetensi yang jelas, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pengakuan profesi, kesejahteraan, dan pengembangan karir. Upaya untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan terus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan organisasi profesi.

Di era digital, etika profesi menjadi semakin penting bagi pustakawan. Integritas, netralitas, dan komitmen untuk memberikan akses informasi yang adil dan merata menjadi prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi. Tantangan etika baru juga muncul, seperti privasi data, akses terbuka, dan penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab.

Masa depan profesi pustakawan penuh dengan peluang dan tantangan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat, perubahan

kebutuhan masyarakat, dan tuntutan untuk beradaptasi dengan cepat menuntut pustakawan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kolaborasi, inovasi, dan komitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat menjadi kunci kesuksesan profesi pustakawan di masa depan.

Untuk memahami lebih dalam mengenai esensi dari profesi pustakawan, mari kita mulai dengan mengulas definisi profesi dan profesionalisme secara umum.

3.1 Definisi Profesi dan Profesionalisme

Untuk memahami lebih lanjut tentang konsep 'profesionalisme', mari kita telaah bagaimana istilah ini didefinisikan, baik dari sudut pandang kamus maupun para ahli.

3.1.1 Definisi Profesi menurut Kamus

Dalam *etymonline.com*, kata "profesi" awalnya berasal dari bahasa Latin "*professionem*" yang berarti "pernyataan publik". Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Perancis Kuno menjadi "*profession*" dan akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris pada sekitar abad ke-12 dengan arti yang sedikit berbeda, yaitu "sumpah yang diambil saat memasuki ordo agama" (Harper, tanpa tahun)

Berdasarkan kamus daring *Oxford Learner's Dictionaries* (tanpa tahun) kata "profesi" dalam empat pengertian:

1. Jenis pekerjaan yang membutuhkan pelatihan atau keterampilan khusus, terutama pendidikan tinggi.
2. Semua orang yang bekerja dalam jenis profesi tertentu.
3. Pekerjaan tradisional yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan tingkat tinggi, seperti dokter atau pengacara.
4. Pernyataan publik tentang keyakinan, perasaan, atau pemikiran seseorang (*Oxford Learner's Dictionaries*)

Definisi kata "profession" (kata benda) menurut kamus daring Merriam-Webster mencakup beberapa makna yang saling terkait:

1. Tindakan mengambil sumpah komunitas religius, yaitu pernyataan resmi yang diucapkan saat bergabung dengan komunitas tersebut.
2. Tindakan menyatakan keyakinan atau pendapat secara terbuka, yaitu mengungkapkan kepercayaan atau pandangan di depan umum.
3. Keyakinan atau agama yang diakui secara terbuka, yaitu agama atau kepercayaan yang dianut dan diungkapkan secara publik.
4. Pekerjaan atau profesi, yang memiliki tiga sub-makna:

- 1) Panggilan yang membutuhkan pengetahuan khusus, seperti dokter atau pengacara.
- 2) Pekerjaan atau mata pencaharian utama seseorang.
- 3) Seluruh kelompok orang yang terlibat dalam suatu panggilan, seperti semua dokter atau pengacara (Merriam-Webster)

Berdasarkan analisis pengertian 'profesi' dari tiga kamus di atas (Oxford Learner's Dictionaries, Merriam-Webster, dan Online Etymology Dictionary), maka dapat kita simpulkan bahwa profesi adalah suatu bidang pekerjaan atau kegiatan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Keahlian dan Pengetahuan Khusus: Profesi menuntut penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam dan spesifik dalam bidang tertentu. Hal ini biasanya dicapai melalui pendidikan formal, pelatihan intensif, dan pengalaman praktis.
2. Komitmen dan Tanggung Jawab: Profesi tidak hanya sekadar pekerjaan, tetapi juga melibatkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat atau klien yang dilayani. Profesional diharapkan menjunjung tinggi standar etika dan integritas dalam menjalankan tugasnya.
3. Pengakuan Publik: Profesi seringkali diakui secara formal melalui sertifikasi atau lisensi, yang menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh organisasi atau badan profesional.
4. Organisasi Profesi: Profesi biasanya memiliki organisasi atau asosiasi yang mewadahi para anggotanya, menetapkan standar etika dan praktik, serta mempromosikan kepentingan profesi tersebut.
5. Pernyataan Publik: Secara historis, istilah "profesi" berasal dari tindakan membuat pernyataan publik atau pengakuan, yang menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan profesi tersebut.

Sebagaimana kita harapkan profesi tidak hanya sekadar pekerjaan untuk mencari nafkah, tetapi juga merupakan panggilan yang membutuhkan dedikasi, keahlian, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat.

Selain memahami definisi "profesi" dari sudut pandang kamus, mari kita lihat bagaimana para ahli dan penulis mendefinisikan konsep ini secara lebih mendalam dan komprehensif.

3.1.2 Definisi Profesi menurut Penulis

Definisi profesi telah mengalami evolusi yang signifikan seiring perubahan zaman. Pada awalnya, istilah "profesi" lebih bermakna religius,

merujuk pada pengakuan iman dan sumpah, seperti yang dijelaskan oleh Boyer dan Nissenbaum (1993). Namun, pada abad keenam belas, makna "profesi" bergeser menjadi pengakuan atas keahlian atau keterampilan khusus (Kimball, B.A.: 1996, h.19).

Ahlstrom (2004) mencatat bahwa pada tahun 1675, makna "profesi" bergeser ke arah sekuler, mengacu pada "memiliki hak atas kualifikasi." Konsep ini sebelumnya hanya berlaku untuk para imam. Carr-Saunders dan Wilson (1933) juga mengamati pergeseran ini. Mereka menunjukkan bahwa profesi awalnya terkait dengan bidang keagamaan, layanan bersenjata, kedokteran, hukum, dan pendidikan.

Seiring waktu, konsep profesi semakin meluas. Hill (1965) mengamati evolusi pekerjaan di negara-negara Barat, yang tercermin dalam perubahan konotasi kata "profesi" dari dimensi religius menjadi dimensi sekuler. Cheetham dan Chivers (2005) menambahkan bahwa konsep profesi semakin meluas untuk mencakup bidang-bidang seperti arsitektur dan pengajaran (Cheetham, G., & Chivers, G. E., 2005).

Pill et al. (2004) mencatat bahwa definisi awal profesi tidak membedakan antara profesi dan pekerjaan biasa. Namun, pergeseran makna kemudian membedakan antara layanan yang dibayar dan layanan sukarela, menunjukkan bahwa profesi mulai dikaitkan dengan pekerjaan yang memberikan imbalan finansial (14-17).

Parsons (1968) menekankan sifat dinamis dan ambigu dari definisi profesi. Menurutnya, beberapa kriteria inti membedakan pekerjaan profesional, termasuk pelatihan teknis formal, pengembangan keterampilan dalam berbagai konteks, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa profesi tidak hanya tentang keahlian teknis, tetapi juga tentang komitmen terhadap nilai-nilai dan etika.

Kongres AS (1990) dan Dewan Profesi Australia (2003) memberikan definisi profesi yang lebih spesifik. Kongres AS menekankan pelatihan khusus dan integritas (Congress, U. S. (1990)). Sementara Dewan Profesi Australia (2023) menambahkan unsur disiplin tinggi, etika kuat, dan dedikasi untuk kebaikan orang lain sebagai karakteristik penting sebuah profesi.

O'Donnell (2004) dan Carr (2014) memberikan definisi yang lebih komprehensif. O'Donnell menekankan penguasaan pengetahuan kompleks, kode etik, kontrak sosial, monopoli pengetahuan, dan otonomi dalam praktik. Sementara Carr menyoroti status sosial tinggi, standar moral dan teknis yang tinggi, serta kebanggaan yang terkait dengan pengakuan sebagai profesi.

Monteiro (2015) menyoroti makna etimologis "profesi" sebagai pernyataan keyakinan dan mengakui kompleksitas dalam mendefinisikannya secara tunggal (h.53). Ini menunjukkan bahwa konsep profesi terus berkembang dan tidak dapat dibatasi oleh satu definisi yang kaku.

Pandangan sosiologis, seperti yang diungkapkan oleh Bloom (2002), menekankan bahwa profesi adalah "pekerjaan dengan seperangkat pengetahuan dan keterampilan (keahlian) yang digunakan untuk kebaikan orang lain; kesejahteraan masyarakat.". Definisi ini menyoroti dimensi sosial dari profesi, menekankan bahwa profesi tidak hanya tentang kepentingan pribadi, tetapi juga tentang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Sejumlah literatur yang terkait dengan kepustakawanan, profesi ini merujuk pada individu yang memiliki keahlian khusus dalam mengelola, mengorganisir, dan menyediakan akses terhadap informasi (Applegate, 2010). Pustakawan profesional tidak hanya bertugas mengelola koleksi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna perpustakaan. Profesi kepustakawanan menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi spesifik yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktis (Capurro & Hjørland, 2003).

Pustakawan profesional diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang konteks sejarah, terlibat dalam penelitian, mendidik pengguna, dan secara efektif mengelola sumber daya manusia dan koleksi (Capurro & Hjørland, 2003). Mereka juga dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri, mengikuti perkembangan teknologi informasi, serta beradaptasi dengan perubahan kebutuhan informasi pengguna (Adekoya & Fasae, 2021). Profesionalisme dalam bidang ini mencakup dedikasi terhadap perilaku etis, integritas, serta pengejaran keunggulan dalam pelayanan (Triumph & Beile, 2015).

Dari berbagai pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, serta memiliki kode etik dan standar praktik yang tinggi. Profesi juga memiliki tanggung jawab sosial dan komitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Lebih lanjut, profesi juga ditandai dengan adanya otonomi dalam praktik dan pengakuan dari masyarakat. Contoh profesi yang memenuhi kriteria ini antara lain dokter, pengacara, dan insinyur.

Sejalan dengan perkembangan konsep profesi, Dale E. Shaffer dalam bukunya "The Maturity of Librarianship as a Profession" (1968, hlm. 17)

menekankan bahwa profesi merupakan suatu vokasi yang menuntut pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif. Seorang profesional harus memiliki kompetensi dalam menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah dan memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, profesi juga ditandai dengan adanya kode etik yang mengatur perilaku dan tanggung jawab para anggotanya.

Selain definisi-definisi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat perspektif historis dan etimologis yang dapat memperdalam pemahaman kita tentang profesi. Secara etimologis, istilah "profesi" berasal dari bahasa Latin "*professio*" yang berarti "pengakuan" atau "pernyataan terbuka". Pada masa Romawi kuno, *professio* merujuk pada pernyataan publik yang dibuat oleh seseorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Mereka harus menyatakan kualifikasi dan kesanggupan mereka di hadapan publik untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Konsep *professio* ini kemudian berkembang dan bertransformasi seiring perkembangan zaman. Profesi tidak lagi hanya terbatas pada jabatan publik, tetapi juga mencakup berbagai bidang pekerjaan yang menuntut keahlian, pengetahuan, dan tanggung jawab yang tinggi. Profesi dipandang sebagai suatu "*calling*" atau panggilan jiwa yang mendorong seseorang untuk mengabdikan diri pada suatu bidang tertentu dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk lebih memahami karakteristik profesi, Shaffer (1968) mengajukan 19 kriteria kematangan profesi yang dapat digunakan sebagai tolok ukur. Kriteria tersebut meliputi aspek-aspek seperti basis pengetahuan yang sistematis, pendidikan formal yang terstandarisasi, organisasi profesi yang kuat, kode etik yang ditegakkan, dan pengakuan masyarakat. Dengan menerapkan kriteria ini, kita dapat mengevaluasi tingkat kematangan profesi pustakawan dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. 19 kriteria kematangan profesi menurut Shaffer (1968) ini dapat dibaca secara detail pada sub tajuk 3.3.8. Karakteristik Profesi Pustakawan dan Profesional Informasi.

Setelah menggali lebih dalam tentang definisi 'profesi', mari kita beralih ke pembahasan mengenai 'profesionalisme' yang memiliki keterkaitan erat.

3.1.3 Definisi Profesionalisme

Untuk lebih memahami konsep 'profesionalisme', mari kita telaah bagaimana istilah ini didefinisikan.

1.1.3.1. Definisi Profesionalisme Menurut Kamus

Profesionalisme didefinisikan sebagai "Conduct, aims, or qualities that characterize or mark a profession or a professional person" (Perilaku, tujuan, atau kualitas yang mencirikan atau menandai sebuah profesi atau individu yang profesional) dan "the following of a profession (such as athletics) for gain or livelihood" (menjalani sebuah profesi (seperti olahraga) demi keuntungan atau mata pencaharian)" (Merriam-Webster, 2023).

Cambridge Dictionary mendefinisikan profesionalisme sebagai "perilaku, tujuan, atau kualitas yang menjadi ciri atau menandai sebuah profesi atau seseorang yang profesional" serta "menjalani sebuah profesi (seperti atletik) untuk mendapatkan keuntungan atau mata pencaharian" (diakses dari pada 15 September 2024). Ini berarti bahwa profesionalisme mencakup standar, etika, dan dedikasi yang membedakan individu dan bidang pekerjaan sebagai sesuatu yang benar-benar profesional.

ODLIS mendefinisikan profesionalisme sebagai "penerapan standar penilaian terlatih yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan klien atau pengguna layanan" (diakses pada 15 September 2024).

Berdasarkan definisi kamus di atas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah: Suatu sikap atau perilaku yang mencerminkan kualitas atau kemampuan yang tinggi dalam bidang tertentu. Mencakup standar, etika, dan dedikasi yang membedakan individu dan bidang pekerjaan sebagai sesuatu yang benar-benar profesional. Profesionalisme dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku.

3.1.3.2. Definisi Profesionalisme Menurut Ahli

Profesionalisme, sebuah konsep yang multifaset dan terus berkembang, telah menjadi fokus perhatian para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Pemahaman mendalam mengenai profesionalisme penting untuk mengukur kinerja dan kualitas layanan dalam berbagai bidang, termasuk kepastakawanan. Profesionalisme sering didefinisikan sebagai kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dari seorang profesional (Jones & Hyde, 2019) atau sebagai perilaku di tempat kerja yang menghasilkan hubungan bisnis yang positif (Anderson & Bolt, 2016).

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai konsep profesionalisme ini. Max Weber, seorang sosiolog terkemuka, memandang

profesionalisme sebagai karakteristik yang melekat pada profesi tertentu. Menurutnya, profesi memiliki atribut khusus yang membedakannya dari pekerjaan biasa, seperti:

1. Penguasaan pengetahuan teoritis
2. Pelatihan sistematis
3. Pengujian kompetensi
4. Kode etik
5. Organisasi profesi

Weber juga menekankan otonomi, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap pengembangan profesional sebagai ciri khas seorang profesional (Weber, M., 1968).

Millerson (1964), dalam studinya tentang profesionalisasi, mengidentifikasi enam karakteristik kunci profesi: praktik keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis, penyediaan pelatihan dan pendidikan, pengujian kompetensi anggota, asosiasi anggota dalam suatu organisasi, kepatuhan terhadap kode etik, dan pengabdian pelayanan altruistik. Millerson menekankan bahwa profesi tidak hanya tentang keahlian teknis, tetapi juga tentang komitmen terhadap nilai-nilai etika dan pelayanan kepada masyarakat.

Greenwood (1957) menyoroti lima atribut ideal dari sebuah profesi: dasar teori yang sistematis, otoritas yang diakui, dukungan komunitas, kode etik, dan budaya profesional. Menurutnya, profesi tidak hanya sekadar pekerjaan, tetapi juga memiliki sistem nilai dan norma yang membedakannya dari pekerjaan lainnya.

Flexner (1915), dalam analisisnya tentang pekerjaan sosial, mengidentifikasi enam ciri khas profesi: tubuh pengetahuan, tubuh literatur, asosiasi profesional, proses akreditasi atau lisensi, sistem pendidikan, dan sistem etika. Pandangan Flexner menekankan pentingnya landasan pengetahuan yang kuat, regulasi yang ketat, dan komitmen terhadap etika dalam praktik profesional (Flexner, A., 2001).

Johnson (1996) mengemukakan enam kriteria profesi yang meliputi asosiasi profesional, pelatihan dan sertifikasi, status hukum, kode etik, otonomi individu, dan badan penelitian. Kriteria ini mencerminkan kompleksitas profesi dan kebutuhan akan regulasi dan pengembangan berkelanjutan.

Selain itu, para ahli lain seperti Roddenberry (1953) dan Kailas Sree Chandran (2020) juga menekankan pentingnya integritas, komitmen terhadap pelayanan, akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi dalam menjalankan tugas profesional.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah konsep multidimensi yang mencakup aspek keahlian, pengetahuan, etika, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap pengembangan diri. Profesionalisme tidak hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi juga tentang bagaimana melakukannya dengan integritas, dedikasi, dan kualitas yang tinggi.

Dalam konteks tempat kerja, profesionalisme diartikan sebagai perilaku yang menghasilkan hubungan bisnis yang positif, menunjukkan bahwa profesionalisme tidak hanya berlaku dalam profesi tradisional, tetapi juga dalam berbagai bidang pekerjaan.

Profesionalisme, dengan segala atribut dan implikasinya, menjadi faktor pembeda yang signifikan antara profesi dan pekerjaan biasa. Untuk memahami perbedaan ini lebih lanjut, mari kita telaah ciri-ciri yang melekat pada sebuah profesi.

3.2 Perbedaan Profesi dan Pekerjaan Biasa

Profesionalisme, dengan segala atribut dan implikasinya, menjadi faktor pembeda yang signifikan antara profesi dan pekerjaan biasa. Pemahaman kita tentang profesionalisme memberikan landasan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan ini secara lebih jelas. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi ciri-ciri khas yang melekat pada sebuah profesi.

3.2.1 Ciri-ciri umum Profesi

Profesi dicirikan oleh sejumlah atribut kunci. *Pertama*, profesi didasarkan pada penguasaan badan pengetahuan teoritis yang tersistematis dan terus berkembang. Pengetahuan ini diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan berkelanjutan, serta didukung oleh penelitian dan praktik terbaik. *Kedua*, profesi memiliki otoritas yang diakui oleh masyarakat, diperoleh melalui keahlian dan pengetahuan khusus, serta pengakuan formal seperti lisensi atau sertifikasi. *Ketiga*, profesi diatur oleh kode etik yang menjadi panduan moral dan etika bagi anggotanya. *Keempat*, profesi memiliki organisasi atau asosiasi yang mewadahi anggotanya, menetapkan standar praktik, dan mengadvokasi kepentingan profesi. *Kelima*, profesi memiliki komitmen yang kuat terhadap pelayanan masyarakat, menggunakan keahlian mereka untuk memberikan kontribusi positif. *Keenam*, profesi menuntut otonomi dan tanggung jawab yang tinggi dari anggotanya, yang memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Terakhir, profesi dicirikan oleh budaya profesional yang khas, mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang membedakannya dari pekerjaan lain.

George Ritzer (1975) dalam artikelnya membahas pandangan Max Weber mengenai karakteristik profesi, antara lain: 1) kekuasaan yang diperoleh melalui monopoli atas tugas-tugas kerja, 2) pengetahuan yang sistematis dan terorganisir dalam bentuk doktrin, 3) pelatihan yang rasional dan teoretis, 4) kualifikasi dan standar tertentu, 5) spesialisasi dalam bidang tertentu, 6) pekerjaan penuh waktu, 7) adanya klien atau umat yang dilayani, 8) struktur gaji sebagai kompensasi, 9) mekanisme promosi, 10) tugas dan tanggung jawab yang ditentukan secara profesional, dan 11) gaya hidup yang khas (Ritzer, G., 1975)

Selain pandangan Weber, Millerson (1964) juga menyoroti bahwa kelompok-kelompok yang mengklaim sebagai profesi seringkali memiliki karakteristik berikut: 1) praktik keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis, 2) sistem pelatihan dan pendidikan yang terstruktur, 3) mekanisme pengujian kompetensi anggota, 4) organisasi atau asosiasi yang mewadahi anggotanya, 5) kepatuhan terhadap kode etik, dan 6) pengabdian pelayanan yang altruistik (Millerson, 1964)

Berbeda dengan Millerson, Greenwood berargumen bahwa atribut-atribut berikut ini merupakan ciri-ciri ideal dari sebuah profesi 1) dasar teori yang sistematis dan teruji, 2) otoritas yang diakui klien dan masyarakat luas, dibuktikan dengan regulasi, lisensi, atau sertifikasi, 3) kode etik yang mengatur hubungan antara profesional, klien, dan rekan kerja, 4) budaya profesional yang kuat yang dipertahankan oleh asosiasi profesional, mencakup nilai, norma, dan praktik yang membedakannya dari pekerjaan lain (Greenwood, E. (1957)

Sejalan dengan Greenwood, House Armed Services Committee (1990) juga mengemukakan ciri-ciri yang harus dimiliki sebuah profesi yaitu: 1) Cakupan bidang kekhususan ilmu, 2) Persyaratan pendidikan dan pelatihan, 3) Organisasi profesional, 4) Sertifikasi atau lisensi, 5) Kode etik, dan 6) Utilitas sosial.

Senada dengan House Armed Services Committee, Flexner (1915) menambahkan bahwa sebuah profesi dicirikan dari: 1) Tubuh Pengetahuan yang sistematis dan terus berkembang, 2) Tubuh Literatur yang mendokumentasikan pengetahuan, penelitian, dan praktik terbaik, 3) Asosiasi Profesional yang mewadahi anggotanya, 4) Proses Akreditasi atau Lisensi untuk memastikan kompetensi profesional, 5) Sistem Pendidikan formal yang terstruktur dan terakreditasi, dan 6) Sistem Etika yang mengatur perilaku dan tanggung jawab anggota

Selain Flexner, Roddenberry (1953) menyebutkan karakteristik kelompok pekerjaan yang dapat digambarkan sebagai profesi dengan serangkaian tugas yang meliputi: 1) mengutamakan pelayanan pada umat

manusia, 2) mempersiapkan diri sebelum praktik, 3) terus meningkatkan keterampilan dan berbagi pengetahuan, 4) menerapkan keterampilan tanpa pamrih, 5) menetapkan standar tinggi untuk profesi, 6) menjunjung tinggi kehormatan profesi, dan 7) meningkatkan disiplin diri.

Berbeda dengan Roddenberry, Greenwood (1957) berpendapat bahwa atribut-atribut berikut membantu mengidentifikasi dan membedakan profesi dari pekerjaan non-profesional yaitu: 1) landasan teori yang sistematis, koheren, dan teruji empiris; 2) otoritas yang diakui masyarakat berkat keahlian dan pengetahuan khusus yang mereka miliki, serta didukung oleh pengakuan masyarakat luas; 3) kode etik yang mengatur perilaku dan tindakan anggotanya; 4) dukungan komunitas, yang tercermin dalam regulasi, lisensi, atau sertifikasi yang diberikan kepada para profesional; 5) budaya profesional yang khas, mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang diturunkan dari generasi ke generasi

Pendapat lain dikemukakan oleh Roberts, K. A., dan Donahue, K. A. (2000) yang menggambarkan enam ciri yang menggambarkan profesi dari pekerjaan sebagai berikut: 1) penguasaan teori khusus, 2) otonomi dan kendali atas pekerjaan, 3) motivasi yang berfokus pada penghargaan intrinsik dan kepentingan klien, 4) komitmen terhadap profesi dan tujuan layanan organisasi, 5) rasa kebersamaan dan kolegialitas dengan rekan seprofesi, serta 6) pengawasan diri dan pengaturan etika sesuai kode etik (Roberts, K. A., & Donahue, K. A., 2000).

Selain itu, Menurut Kailas Sree Chandran (2020) bahwa kriteria utama suatu profesi meliputi hal-hal berikut: 1) keahlian tingkat lanjut, baik dalam aspek teknis maupun seni liberal, dengan penekanan pada pendidikan berkelanjutan; 2) regulasi diri oleh organisasi profesi yang menetapkan standar, kode etik, dan perilaku; 3) pelayanan terhadap kepentingan publik dengan menjunjung tinggi standar etika (Kailas Sree Chandran, 2020)

3.2.2 Ciri Utama Pekerjaan Biasa

Pekerjaan biasa, berbeda dengan profesi, ditandai oleh karakteristik yang lebih sederhana dan standar yang tidak setinggi profesi. Beberapa ciri utamanya meliputi:

1. Keterampilan yang Mudah Dipelajari: Pekerjaan biasa umumnya berfokus pada keterampilan praktis yang dapat dipelajari dalam waktu relatif singkat melalui pelatihan atau pengalaman langsung, berbeda dengan profesi yang menuntut penguasaan teori yang mendalam (Greenwood, 1957, hlm. 170). Penekanannya lebih pada "bagaimana" melakukan sesuatu daripada "mengapa" di baliknya.

2. Otonomi yang Terbatas: Pekerja dalam kategori ini biasanya beroperasi di bawah arahan dan prosedur yang ditentukan, dengan sedikit ruang untuk inisiatif individu atau pengambilan keputusan independen (Roberts & Donahue, 2000, hlm. 367). Hal ini berbeda dengan profesi yang seringkali memberikan otonomi dan kendali yang lebih besar atas pekerjaan.
3. Motivasi Ekstrinsik: Motivasi utama dalam pekerjaan biasa cenderung bersifat ekstrinsik, seperti gaji dan tunjangan, meskipun kepuasan intrinsik juga dapat berperan (Roberts & Donahue, 2000, hlm. 367). Pekerjaan dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain, bukan sebagai panggilan atau tujuan itu sendiri.
4. Komitmen yang Fleksibel: Komitmen terhadap pekerjaan biasa mungkin tidak sekuat dalam profesi. Pekerjaan ini bisa dipandang sebagai sementara atau batu loncatan menuju peluang lain, yang menyebabkan tingkat pergantian karyawan yang lebih tinggi (Roberts & Donahue, 2000, hlm. 367).
5. Kurangnya Asosiasi Profesional: Pekerjaan biasa biasanya tidak memiliki badan pengatur mandiri atau kode etik yang mengikat seperti yang dimiliki oleh profesi (Greenwood, 1957, hlm. 174). Standar perilaku dan kinerja seringkali ditetapkan oleh pemberi kerja atau industri.
6. Tidak Adanya Budaya yang Kuat: Rasa komunitas dan norma-norma perilaku mungkin kurang berkembang dalam pekerjaan biasa dibandingkan dengan profesi, yang seringkali memiliki rasa kolegalitas dan identitas profesional yang kuat (Greenwood, 1957, hlm. 175).

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa beberapa pekerjaan biasa mungkin memiliki beberapa karakteristik yang mirip dengan profesi, seperti pelatihan yang lebih intensif atau tanggung jawab yang lebih besar. Namun, secara keseluruhan, perbedaan mendasar antara profesi dan pekerjaan biasa tetap terlihat jelas.

3.2.3 Perbedaan Profesi dengan Pekerjaan Biasa

Perbedaan mendasar antara profesi dan pekerjaan biasa terletak pada berbagai aspek, mulai dari landasan pengetahuan dan keterampilan hingga motivasi dan pengakuan sosial. Mari kita telaah lebih lanjut perbedaan-perbedaan ini:

1. **Pengetahuan dan Keahlian:** Profesi dibangun di atas fondasi teori dan pengetahuan khusus yang mendalam, yang biasanya diperoleh melalui pendidikan formal yang ekstensif (Greenwood, 1957, hlm. 47). Sebaliknya, pekerjaan biasa sering kali melibatkan keterampilan praktis yang dapat dipelajari dengan relatif cepat melalui pelatihan atau pengalaman kerja (Greenwood, 1957, hlm. 170).
2. **Otonomi dan Kendali:** Profesional biasanya memiliki otonomi dan kendali yang signifikan atas pekerjaan mereka, membuat keputusan berdasarkan penilaian profesional mereka (Asheim, 1978, hlm. 231). Sebaliknya, pekerja biasa sering kali memiliki lebih sedikit otonomi, beroperasi dalam kerangka prosedur dan arahan yang ditetapkan (Roberts & Donahue, 2000, hlm. 367).
3. **Motivasi:** Profesional cenderung dimotivasi secara intrinsik oleh kepuasan yang berasal dari pekerjaan mereka dan keinginan untuk melayani klien mereka (Roberts & Donahue, 2000, hlm. 367). Di sisi lain, pekerja biasa sering kali lebih termotivasi oleh imbalan ekstrinsik seperti gaji dan tunjangan (Roberts & Donahue, 2000, hlm. 367).
4. **Komitmen dan Identitas:** Profesi sering dipandang sebagai panggilan seumur hidup, dengan identitas profesional yang kuat dan komitmen mendalam terhadap bidang mereka (Roberts & Donahue, 2000, hlm. 367). Pekerjaan biasa mungkin dipandang sebagai pekerjaan sementara atau batu loncatan, dengan komitmen yang lebih rendah terhadap pekerjaan atau organisasi tertentu (Roberts & Donahue, 2000, hlm. 367).
5. **Pengaturan Mandiri dan Kode Etik:** Profesi biasanya memiliki asosiasi profesional yang kuat yang menetapkan standar etika dan perilaku, serta mengawasi anggotanya (Greenwood, 1957, hlm. 174). Pekerjaan biasa umumnya tidak memiliki badan pengatur mandiri atau kode etik formal.
6. **Pengakuan Masyarakat:** Profesi seringkali menikmati tingkat prestise dan pengakuan sosial yang lebih tinggi karena keahlian dan layanan penting yang mereka berikan kepada masyarakat. Pekerjaan biasa, meskipun penting, mungkin tidak memiliki tingkat pengakuan atau status sosial yang sama.

3.2.4 Pekerjaan Profesional dan Nonprofesional di Perpustakaan

Pekerjaan di perpustakaan mencakup berbagai kegiatan, yang dapat diklasifikasikan sebagai profesional atau nonprofesional. Sebagai contoh,

pustakawan yang merancang dan mengimplementasikan kebijakan perpustakaan, mengelola anggaran, dan mengawasi staf termasuk dalam kategori profesional. Di sisi lain, staf yang bertugas meminjamkan dan menerima buku, mengelola catatan keterlambatan, dan melakukan tugas administrasi rutin termasuk dalam kategori nonprofesional. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat kompleksitas tugas, kebutuhan akan pengetahuan teoretis dan keterampilan khusus, serta tingkat pengambilan keputusan dan kebijaksanaan yang terlibat (Shaffer, D. E., 1968, hlm. 54-59)

1. Sirkulasi:

- 1) Profesional: Mengembangkan kebijakan sirkulasi, menangani masalah pengguna yang kompleks, mengawasi staf nonprofesional, dan menganalisis data sirkulasi untuk meningkatkan layanan.
- 2) Nonprofesional: Meminjamkan dan menerima buku, mengelola catatan keterlambatan, menyortir kartu buku, dan mengumpulkan statistik dasar.

2. Referensi:

- 1) Profesional: Menjawab pertanyaan referensi yang kompleks, melakukan penelitian mendalam, memberikan instruksi penggunaan sumber daya perpustakaan, menyusun bibliografi, dan mengelola file informasi khusus.
- 2) Nonprofesional: Membantu pengguna dalam pencarian dasar, mengarahkan pengguna ke pustakawan referensi, dan melakukan tugas administrasi rutin.

3. Katalogisasi dan Klasifikasi:

- 1) Profesional: Mengklasifikasikan materi perpustakaan, menetapkan tajuk subjek dan referensi silang, melakukan penelitian terkait katalogisasi, membuat kartu entri utama, dan merevisi pekerjaan staf nonprofesional.
- 2) Nonprofesional: Mengetik kartu katalog, menarik buku dari catatan, memesan kartu Library of Congress, mengubah nomor klasifikasi, menyimpan kartu, dan melakukan tugas persiapan fisik buku.

4. Pemilihan dan Pemesanan Buku:

- 1) Profesional: Mengevaluasi dan memilih materi perpustakaan berdasarkan kebutuhan pengguna dan anggaran, meninjau buku dan publikasi, menghadiri pertemuan penerbit, dan melakukan riset untuk mengembangkan koleksi yang seimbang.

- 2) Nonprofesional: Memproses pesanan buku, memeriksa faktur, menyimpan catatan pesanan, dan melakukan tugas administrasi terkait.

5. Administrasi:

- 1) Profesional: Merancang dan mengimplementasikan kebijakan perpustakaan, mengelola anggaran, mengawasi staf, membangun hubungan dengan komunitas, melakukan survei kebutuhan pengguna, dan mewakili perpustakaan dalam forum profesional.
- 2) Nonprofesional: Melakukan tugas administrasi rutin seperti menyiapkan laporan keuangan, mengelola catatan personel, dan mengatur jadwal staf

3.2.5 Ciri Utama Non-Profesional perpustakaan

Berikut adalah beberapa karakteristik yang umumnya diasosiasikan dengan pekerjaan biasa atau non-profesional di perpustakaan, terutama jika dibandingkan dengan pekerjaan profesional seperti yang dijelaskan dalam konteks kepustakawanan:

1. Otonomi dan kontrol yang terbatas: Pekerjaan non-profesional cenderung memiliki tingkat otonomi dan kontrol yang rendah. Pekerja mungkin memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kendali atas tugas, proses kerja, atau jadwal mereka. Hal ini berbeda dengan profesi seperti pustakawan, di mana individu diharapkan dapat menggunakan penilaian profesional mereka dan membuat keputusan secara mandiri dalam pekerjaan mereka (Dority, 2006, hlm. 4353)
2. Tugas yang rutin dan berulang: Pekerjaan non-profesional seringkali melibatkan tugas-tugas yang bersifat rutin dan repetitif, dengan sedikit ruang untuk kreativitas atau pemecahan masalah. Hal ini berbeda dengan pekerjaan profesional yang seringkali menuntut pemikiran kritis, pemecahan masalah yang kompleks, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru dan dinamis (Koenig & Neveroski, 2018, hlm. 2657)
3. Keterampilan dan pengetahuan yang terbatas: Pekerjaan non-profesional seringkali membutuhkan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan profesional. Pelatihan untuk pekerjaan semacam itu mungkin singkat dan berfokus pada tugas-tugas tertentu, sedangkan pekerjaan profesional seringkali memerlukan pendidikan formal yang ekstensif dan pengembangan profesional yang berkelanjutan (Thomas, 2018, hlm. 4335)

4. Mobilitas dan jenjang karir yang terbatas: Pekerjaan non-profesional seringkali memiliki mobilitas pekerjaan yang rendah, dengan sedikit peluang untuk kemajuan atau pengembangan karir. Sebaliknya, profesi menawarkan jalur karier yang lebih jelas dan peluang untuk pertumbuhan serta pengembangan diri yang lebih luas (DiMattia, 2018, hlm. 4351).
5. Status sosial yang lebih rendah: Pekerjaan non-profesional seringkali dipandang memiliki status atau prestise sosial yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan profesional. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kompensasi, tunjangan, dan pengakuan yang diterima oleh para pekerja (Dority, 2006, hlm. 4353)
6. Standarisasi dan pengawasan yang ketat: Pekerjaan non-profesional seringkali ditandai dengan adanya standarisasi dan pengawasan yang ketat, dengan sedikit ruang untuk fleksibilitas atau inisiatif individu. Hal ini berbeda dengan profesi, di mana otonomi dan penilaian profesional sangat dihargai (Stenmark, D.,2017)

Penting untuk diingat bahwa perbedaan antara pekerjaan biasa dan profesional bukanlah sesuatu yang kaku dan absolut. Ada banyak pekerjaan yang memiliki beberapa karakteristik dari keduanya. Selain itu, karakteristik suatu pekerjaan dapat berubah seiring waktu karena kemajuan teknologi, perubahan kondisi ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Meskipun demikian, ciri-ciri utama yang telah dijelaskan di atas memberikan kerangka acuan yang berguna untuk memahami perbedaan umum antara pekerjaan biasa dan non-profesional.

3.3 Kepustakawanan dan Profesional Informasi: Definisi, Sejarah, Karakteristik, dan Peran dalam Masyarakat

3.3.1 Kepustakawanan

3.3.1.1 Definisi Pustakawan

Istilah "pustakawan" memiliki akar sejarah yang menarik. Berasal dari bahasa Latin *bibliothecarius* yang berarti "seorang pustakawan" atau "penjaga buku" (Harper, 2023). Istilah ini mencerminkan peran tradisional pustakawan sebagai pemelihara dan pengelola koleksi buku. Kata Latin ini sendiri berakar dari kata *bibliotheca*, yang berarti "perpustakaan" atau "koleksi buku" (Harper, 2023). Jejak etimologis ini mengarah ke bahasa Yunani Kuno, yaitu *bibliothēkē*, yang juga berarti "tempat penyimpanan buku" (Harper, 2023). Kata Yunani ini merupakan gabungan dari *biblion* yang berarti "buku" dan *thēkē* yang berarti "kotak" atau "tempat penyimpanan". Dapat kita simpulkan, istilah "pustakawan" secara harfiah

merujuk pada seseorang yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan buku, sejalan dengan peran tradisionalanya.

Seiring perkembangan bahasa, istilah ini diadopsi ke dalam bahasa Inggris sebagai "bibliothecary" pada tahun 1610-an (Online Etymology Dictionary). Bentuk awal istilah ini dalam bahasa Inggris, "bibliothecar", muncul pada tahun 1580-an, menunjukkan evolusi linguistiknya. Akhirnya, istilah tersebut berkembang menjadi "librarian" seperti yang kita kenal sekarang, namun akar katanya tetap mencerminkan peran penting pustakawan dalam menjaga dan mengelola pengetahuan.

Istilah "pustakawan" mulai diperbincangkan dalam dunia akademik sejak akhir abad ke-19, ketika profesi ini mulai mendapatkan pengakuan (Tedder, 1882). Pustakawan mulai dianggap lebih dari sekadar penjaga buku, tetapi sebagai individu yang berperan penting dalam mengelola dan menyediakan akses informasi. Perkembangan ini ditandai dengan didirikannya sekolah-sekolah perpustakaan pertama, seperti yang diprakarsai oleh Melvil Dewey pada tahun 1887 (Kuhlman, 1938). Sekolah-sekolah ini bertujuan untuk memberikan pelatihan formal bagi pustakawan, yang mencakup keterampilan teknis seperti pengorganisasian dan pengkatalogan, serta pengetahuan tentang literatur dan disiplin ilmu lainnya.

Di Amerika Serikat, pendirian sekolah perpustakaan pertama oleh Melvil Dewey dan pengembangan sistem Klasifikasi Desimal Dewey mendorong standarisasi praktik perpustakaan dan berkontribusi pada pembentukan profesi pustakawan (Wiegand, 1996). American Library Association (ALA) didirikan pada tahun 1876 dan menjadi organisasi profesional utama bagi pustakawan di Amerika Serikat (Kuhlman, 1938). Sementara itu, di Britania Raya, pendirian Library Association pada tahun 1877 juga menandai profesionalisasi pustakawan. Asosiasi ini mempromosikan pelatihan dan kualifikasi bagi pustakawan, yang mengarah pada pengembangan program pendidikan perpustakaan formal di universitas (Owen, 2012).

Perkembangan ini menjadikan pustakawan sebagai profesi yang diakui, dengan pelatihan dan kualifikasi khusus. Istilah "pustakawan" kemudian digunakan untuk merujuk pada individu yang memiliki keahlian dalam mengelola dan memelihara koleksi perpustakaan, serta memberikan layanan kepada pengguna (Bolles, 2001).

3.3.1.2 Definisi Kepustakawanan

Definisi kepustakawanan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Secara sederhana, Collins Dictionary mendefinisikan kepustakawanan

sebagai "administrasi profesional sumber daya dan layanan perpustakaan" (diakses pada 15 September 2024). Definisi ini mencakup aspek-aspek utama kepastakawanan, yaitu pengelolaan sumber daya perpustakaan, pelayanan kepada pengguna, dan pengadaan serta pengorganisasian koleksi.

The American Library Association (ALA) Glossary of Library and Information Science memberikan definisi yang lebih komprehensif: "profesi yang berhubungan dengan penerapan prinsip, teori, teknik, dan teknologi IPI untuk pemilihan, klasifikasi, pengelolaan, distribusi, dan pemanfaatan koleksi informasi dalam semua format" (Levine-Clark dan Dean, 2013). Definisi ini menekankan peran kepastakawanan dalam menerapkan IPI untuk mengelola dan memanfaatkan informasi.

Selain itu, kepastakawanan dapat dilihat dari tiga perspektif:

1. Kepustakawanan sebagai disiplin ilmu: Bidang studi yang berkaitan dengan pengelolaan, pengorganisasian, pelestarian, dan penyebaran informasi dan sumber daya informasi (Bolles, 2001).
2. Kepustakawanan sebagai praktik profesional: Praktik profesional dari individu yang bekerja di perpustakaan dan pusat informasi. Para profesional ini memiliki keterampilan dalam mengelola koleksi, memberikan layanan referensi, dan mempromosikan literasi informasi (Bolles, 2001).
3. Kepustakawanan sebagai gerakan sosial: Gerakan sosial yang bertujuan untuk menyediakan akses yang adil dan merata terhadap informasi bagi semua orang. Ini termasuk advokasi untuk kebijakan informasi yang mendukung akses terbuka, kebebasan intelektual, dan privasi pengguna (Rubin & Froehlich, 2017).

Pandangan lain datang dari Dr. Savage, yang dikutip dalam laporan tahun 1946 di University of Strathclyde: kepastakawanan dapat dianggap sebagai "bibliografi terapan" atau upaya untuk membuat buku produktif dengan membawanya ke titik penggunaan (Annual Report of the Council, 1946, h. 55). Anne Grimshaw, dalam artikelnya "What is Librarianship?", menggambarkan kepastakawanan sebagai "kemampuan membaca pikiran" dan menekankan bahwa kepastakawanan melibatkan beragam keterampilan, seperti kesabaran dan ketegasan (Grimshaw, 1974).

Dari berbagai perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa kepastakawanan adalah bidang yang kompleks dan dinamis. Kepustakawanan tidak hanya tentang mengelola buku dan informasi, tetapi juga tentang memberikan layanan kepada pengguna, mempromosikan akses informasi, dan memperjuangkan kebijakan informasi yang adil.

3.3.1.3 Kepustakawanan sebagai disiplin Ilmu

Dalam dunia perpustakaan dan informasi, terdapat beragam pertanyaan dan ketidakpastian. Pada awal perkembangannya, profesi ini dihadapkan pada pertanyaan mendasar mengenai eksistensi ilmu perpustakaan itu sendiri. (Wright, 1988, hlm. 173) Pertanyaan ini mencakup pertanyaan-pertanyaan spesifik seperti apakah fokus utama dari ilmu perpustakaan adalah pada buku atau pada pengguna perpustakaan, dan apakah perpustakaan merupakan suatu disiplin ilmu atau hanya kumpulan dari berbagai kegiatan yang berbeda. (Wright, 1988, hlm. 174)

Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini terus berlanjut, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ilmu perpustakaan telah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang diakui. (Wright, 1988, hlm. 175) Bukti-bukti ini meliputi pengakuan terhadap program pendidikan formal untuk pustakawan, yang telah ada selama lebih dari 130 tahun, serta banyaknya penelitian yang dilakukan dalam profesi ini. (Wright, 1988, hlm. 176) Selain itu, terdapat pula badan literatur ilmiah, organisasi profesi, dan konferensi-konferensi profesional yang mendukung pengembangan ilmu perpustakaan. (Wright, 1988, hlm. 177)

Perkembangan ini menunjukkan bahwa ilmu perpustakaan telah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang utuh dan diakui. Namun, pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai peran pustakawan dan ilmu perpustakaan dalam masyarakat tetap ada. (Wright, 1988, hlm. 178) Dalam lingkungan akademik, pertanyaan-pertanyaan ini mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pustakawan akademik harus memiliki gelar master dalam ilmu perpustakaan dan informasi (MLS) atau gelar master dalam disiplin ilmu lain, apakah pustakawan akademik harus memiliki status fakultas, dan apakah pustakawan akademik harus melakukan penelitian dan berkontribusi pada beasiswa. (Wright, 1988, hlm. 179)

3.3.1.4 Hubungan antara Kepustakawanan dan Pustakawan

Hubungan antara kepustakawanan dan pustakawan adalah hubungan yang saling melengkapi. Kepustakawanan sebagai disiplin ilmu memberikan landasan teoretis bagi pustakawan. Pustakawan, di sisi lain, menerapkan prinsip-prinsip kepustakawanan dalam praktik untuk mengelola dan menyediakan akses informasi (DiMattia, 2018, hlm. 4351). Pustakawan bertanggung jawab untuk mengelola perpustakaan dan menyediakan layanan informasi kepada pengguna. Mereka memiliki pengetahuan dalam berbagai bidang, termasuk manajemen informasi dan teknologi informasi (Woolls, 2018, hlm. 3991).

3.3.2 Sejarah Singkat Profesi Kepustakawanan

Pasca tahun 1850-an, terjadi pergeseran signifikan dalam persepsi peran pustakawan, dari penjaga buku menjadi individu yang bertanggung jawab atas aspek intelektual dan literer dari pekerjaan mereka (Davis & Shaw, 2017). Profesionalisme perpustakaan modern muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai respons terhadap pertumbuhan koleksi perpustakaan yang pesat dan kebutuhan akses informasi yang efisien (Bolles, 2001).

Di Amerika Serikat, berdirinya American Library Association (ALA) pada tahun 1876 oleh Melvil Dewey menjadi tonggak penting dalam standarisasi praktik perpustakaan dan pembentukan profesi pustakawan yang berbeda (Wiegand, 1996). Dewey juga berperan dalam mendirikan Library Journal, jurnal profesional pertama bagi pustakawan, serta mengembangkan Dewey Decimal Classification (DDC) yang merevolusi cara pengorganisasian koleksi perpustakaan. Pada tahun 1887, Dewey mendirikan sekolah perpustakaan formal pertama di Columbia University, yaitu Columbia School of Library Economy, yang menjadi standar pendidikan perpustakaan di Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Mary Salome Cutler Fairchild (Wiegand, 1996).

Di Britania Raya, Library Association didirikan pada tahun 1877, mempromosikan pelatihan dan kualifikasi bagi pustakawan (Owen, 2012). Gerakan profesionalisasi ini juga menyebar secara internasional, dengan pembentukan asosiasi perpustakaan dan sekolah perpustakaan di berbagai negara. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), yang didirikan pada tahun 1927, memainkan peran penting dalam mempromosikan kerja sama dan pengembangan standar perpustakaan secara global (Sapa, 2017)

Pada awal abad ke-20, laporan Williamson (1923) mengkritik kualitas pendidikan perpustakaan yang ada dan merekomendasikan agar pendidikan perpustakaan dilakukan di tingkat pascasarjana di universitas. Laporan ini mendorong profesionalisasi lebih lanjut di bidang ini dengan menekankan pentingnya landasan teori dan penelitian dalam pendidikan pustakawan. (Williamson, C. C, 1923)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada pertengahan abad ke-20 membawa perubahan besar dalam profesi pustakawan (Cronin, 2005). Pustakawan tidak lagi hanya berurusan dengan koleksi fisik, tetapi juga harus mampu mengelola dan menyediakan akses ke sumber daya

digital. Pada saat inilah Istilah "profesional informasi" mulai digunakan untuk menggambarkan peran pustakawan yang semakin luas dan kompleks, mencakup keahlian dalam teknologi informasi, manajemen data, dan pengembangan sistem informasi

3.3.3 Definisi dan Karakteristik Profesional Informasi

Istilah "Profesional Informasi" merujuk pada individu yang berkecimpung dalam dunia informasi, yang mencakup beragam peran seperti pustakawan, spesialis informasi, manajer pengetahuan, pengembang web, pialang informasi, dan konsultan. Kemunculan istilah ini pada akhir abad ke-20 didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan informasi yang profesional (Cronin, 2005).

Greer dan Fowler (2013, hlm. 11) mendefinisikan Profesional Informasi sebagai individu yang terlibat dalam penciptaan, pengorganisasian, penyebaran, dan pelestarian informasi serta pengetahuan. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang informasi, pengetahuan, dan teknologi informasi, serta keterampilan dalam memproses simbol dan menangani informasi yang terkodifikasi atau terobjektifikasi. Keahlian ini membedakan mereka dari individu yang hanya berurusan dengan informasi dalam bentuk subjektif.

Berbeda dengan Greer dan Fowler, Mason (1990) mendefinisikan profesional informasi sebagai individu yang memanfaatkan pengetahuan khusus mereka tentang informasi dan teknologi informasi dengan satu tujuan utama: menyampaikan informasi yang tepat dari sumber yang tepat kepada klien yang tepat pada waktu yang tepat, dalam format yang paling sesuai untuk digunakan, dan dengan biaya yang sepadan dengan manfaatnya. Definisi ini menekankan bahwa profesional informasi tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan informasi, tetapi juga berfokus pada penyampaian informasi yang relevan dan bermanfaat bagi klien.

Mendefinisikan "profesional informasi" bukanlah hal yang mudah. Profesi ini mencakup beragam peran dan tanggung jawab yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat. Secara umum, profesional informasi adalah individu yang memiliki keahlian dalam mengelola, mengorganisir, menyebarkan, dan mengevaluasi informasi. Mereka bertindak sebagai jembatan antara

informasi dan pengguna, memastikan bahwa informasi yang tepat mencapai orang yang tepat pada waktu yang tepat (Rosenberg, 1990, hlm. 118).

Beberapa ahli telah mencoba merumuskan definisi yang lebih spesifik. Machlup (1962, hlm. 360), misalnya, menekankan peran profesional informasi dalam "memproses, mentransmisikan, atau menyimpan informasi". Sementara itu, Porat (1977, hlm. 2) mendefinisikan profesional informasi sebagai individu yang "pekerjaan utamanya adalah menangani informasi". Definisi ini menunjukkan bahwa fokus utama dari pekerjaan profesional informasi adalah pada informasi itu sendiri, bukan pada produk atau jasa lain.

Namun, definisi-definisi tersebut masih memiliki keterbatasan. Pertama, mereka cenderung berfokus pada aspek teknis dari pekerjaan informasi, sementara mengabaikan dimensi sosial dan etis. Kedua, definisi tersebut sulit diterapkan pada profesi yang berada di batas antara "informasi" dan "non-informasi", seperti guru atau konsultan. Oleh karena itu, diperlukan definisi yang lebih komprehensif yang mencakup semua aspek pekerjaan informasi dan relevan dengan perkembangan masyarakat informasi saat ini.

Dalam upaya memahami peran dan kebutuhan profesional informasi di sektor galeri, perpustakaan, arsip, dan museum (GLAM), penting untuk merumuskan definisi yang komprehensif. Terras (2009, hlm. vii) mendefinisikan profesional informasi sebagai "individu yang bekerja di lingkungan perpustakaan, arsip, museum, warisan budaya, atau informasi yang bertujuan untuk memelihara, dan seringkali meningkatkan, akses terhadap informasi yang terus berkembang yang dihasilkan dari dalam industri budaya dan warisan, media, dan, semakin meningkat, oleh masyarakat umum". Definisi ini menyoroti peran kunci para profesional ini dalam mengelola dan menyediakan akses terhadap informasi, terutama dalam konteks digital yang terus berkembang.

Namun, definisi tersebut tidak selalu diterima secara universal di semua sektor GLAM. Kurator galeri dan arsiparis, misalnya, memiliki pandangan yang berbeda. Kurator mengakui bahwa definisi tersebut menggambarkan aspek peran mereka, tetapi menekankan bahwa peran mereka membutuhkan pengetahuan yang lebih terspesialisasi (Howard et al., 2016, hlm. 15). Arsiparis, di sisi lain, berpendapat bahwa peran mereka secara historis lebih difokuskan pada pemeliharaan dan pemenuhan

persyaratan legislatif, daripada aksesibilitas informasi (Howard et al., 2016, hlm. 15). Meskipun demikian, mereka mengakui adanya pergeseran menuju model yang lebih berfokus pada akses.

Perbedaan perspektif ini menggarisbawahi pentingnya memahami nuansa masing-masing sektor GLAM. Meskipun ada tumpang tindih dalam keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, setiap sektor juga memiliki persyaratan khusus. Profesional informasi di sektor GLAM tidak hanya harus mahir dalam teknologi dan praktik informasi, tetapi juga harus memiliki hasrat dan pemahaman yang mendalam tentang sektor tempat mereka bekerja. Kemampuan untuk menjembatani kesenjangan antara keahlian informasi dan pengetahuan khusus domain menjadi semakin penting dalam lingkungan digital saat ini

3.3.4 Sejarah Singkat Profesional Informasi

. Sejarah profesional informasi berakar pada awal abad ke-20, didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon dan mesin tik yang menciptakan kebutuhan akan pengelolaan informasi yang lebih baik (Buckland, 1997). Istilah "dokumentasi" muncul untuk menggambarkan praktik ini, dengan tokoh seperti Paul Otlet dan Suzanne Briet memelopori gerakan dokumentasi.

Setelah Perang Dunia II, kebutuhan akan informasi ilmiah dan teknis meningkat pesat, melahirkan bidang "ilmu informasi" (Rayward, 1998). Tokoh-tokoh seperti Vannevar Bush dan Claude Shannon memberikan kontribusi penting dalam pengembangannya, dengan ide-ide tentang sistem penyimpanan dan pengambilan informasi otomatis.

Munculnya komputer pribadi dan internet pada akhir abad ke-20 merevolusi cara informasi diakses dan digunakan (Cronin, 2005). Profesional informasi semakin dibutuhkan untuk merancang dan mengelola sistem informasi digital, serta membantu pengguna menavigasi dan mengevaluasi informasi online. Pada saat yang sama, perkembangan ini mendorong penggunaan istilah "pustakawan dan profesional informasi" secara terintegrasi, mencerminkan perluasan peran pustakawan yang tidak hanya berurusan dengan koleksi fisik, tetapi juga dengan sumber daya digital. Istilah "profesional informasi" kemudian digunakan untuk mencakup peran pustakawan yang semakin luas dan kompleks, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan informasi secara profesional (Cronin, 2005)

Abad ke-21 menyaksikan perkembangan berkelanjutan dari profesi informasi, dengan spesialisasi baru muncul sebagai respons terhadap kebutuhan informasi dan teknologi yang terus berubah. Profesional informasi bekerja di berbagai bidang, memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan strategis, manajemen pengetahuan, dan inovasi (Cronin, 2005)

3.3.5 Evolusi Profesi Kepustakawanan

. Profesi pustakawan, dalam perjalanannya yang panjang, telah mengalami transformasi yang luar biasa, berawal dari peran sederhana sebagai penjaga buku hingga menjadi garda terdepan dalam dunia informasi digital. Evolusi ini didorong oleh perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat, yang menuntut pustakawan untuk terus beradaptasi dan mengembangkan kompetensi baru. Mari kita telusuri jejak evolusi profesi pustakawan, dari masa lalu hingga masa kini.

Pada masa awal peradaban, seperti di Mesir dan Mesopotamia Kuno, pustakawan dikenal sebagai individu terpelajar yang dihormati, bahkan seringkali memegang jabatan politik penting. (Johnson, 1970, hlm. 102) Mereka bertugas memelihara dan mengelola koleksi buku dan manuskrip berharga, memastikan pengetahuan tetap lestari dan dapat diakses oleh generasi mendatang. (Casson, 2001) Di perpustakaan-perpustakaan kuno, seperti Perpustakaan Alexandria, pustakawan tidak hanya menyimpan dan merawat koleksi, tetapi juga berperan aktif dalam mengorganisir dan mengkatalogkan informasi, meletakkan fondasi bagi sistem temu kembali informasi modern. (Parsons, 1952)

Beranjak ke Abad Pertengahan, peran pustakawan masih didominasi oleh tugas-tugas pemeliharaan dan pelestarian koleksi, terutama di lingkungan biara dan institusi keagamaan. (Casson, 2001) Namun, seiring dengan perkembangan zaman, peran pustakawan mulai berkembang. Pada abad ke-19, dengan meningkatnya literasi dan akses terhadap pendidikan, pustakawan semakin berperan sebagai penyedia informasi dan fasilitator pembelajaran. (Johnson & Kavanagh, 1994) Mereka membantu masyarakat dalam mengakses dan memahami berbagai sumber informasi, serta mengembangkan keterampilan literasi.

Memasuki abad ke-20, profesionalisasi kepustakawanan semakin meningkat. (Bolles, 2001) Pendidikan formal di bidang ilmu perpustakaan dan informasi (IPI) mulai berkembang, membekali pustakawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih komprehensif. (Williamson, 1923) Laporan Williamson tahun 1923 menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan kepustakawanan, mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan memperkuat status profesional pustakawan.

Pada paruh kedua abad ke-20, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa perubahan besar dalam dunia kepustakawanan. (Cronin, 2005) Pustakawan tidak lagi hanya berurusan dengan koleksi fisik, tetapi juga harus mampu mengelola dan menyediakan akses ke sumber daya digital yang terus berkembang. (Sapa, 2017) Istilah "profesional informasi" muncul untuk menggambarkan peran pustakawan yang semakin kompleks ini.

Di era digital saat ini, peran pustakawan semakin dinamis dan multifaset. (Cronin, 1995; Gorman, 2004; Crowley, 2008; Wiegand, 2001, 2005) Mereka menjadi navigator informasi, fasilitator literasi digital, dan agen perubahan yang memanfaatkan teknologi untuk memberdayakan masyarakat. (Adekoya & Adedimeji, 2021) Pustakawan tidak hanya mengelola informasi, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan literasi informasi dan digital masyarakat, membantu mereka dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. (Awoyemi & Awoyemi, 2021)

Dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital, pustakawan harus terus belajar dan mengembangkan diri. Penguasaan teknologi baru, literasi digital, keterampilan komunikasi, dan kemampuan beradaptasi menjadi semakin penting. (Chu et al., 2022) Dengan terus berinovasi dan berkolaborasi, pustakawan dapat memastikan bahwa perpustakaan tetap relevan dan menjadi pusat pengetahuan yang dinamis bagi masyarakat di era digital

3.3.6 Persamaan dan Perbedaan Pustakawan dengan di antara Profesi Informasi lain

Pustakawan dan profesional informasi lain sama-sama berperan penting dalam dunia informasi, meskipun fokus dan tugas mereka berbeda. Pada dasarnya, pustakawan berfokus pada pengorganisasian dan penyimpanan informasi, terutama dalam bentuk buku dan sumber informasi terbitan lainnya (Greer, Grover & Fowler, 2007, hlm. 12). Namun, seiring perkembangan teknologi, peran pustakawan telah berevolusi. Mereka kini memadukan tugas-tugas tradisional dengan teknologi baru seperti CD-ROM, internet, dan perpustakaan virtual (Greer, Grover & Fowler, 2007, hlm. 12).

Peran utama pustakawan adalah membantu pengguna menemukan dan memanfaatkan informasi secara efektif, baik untuk kepentingan pribadi maupun profesional (Greer, Grover & Fowler, 2007, hlm. 13). Untuk itu, pustakawan harus memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai sumber informasi, termasuk sumber ilmiah dan publik. Mereka juga dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan di bidang penerbitan, komputer, dan media,

sehingga dapat mengawasi pemilihan dan pengorganisasian materi perpustakaan dengan baik (Greer, Grover & Fowler, 2007, hlm. 13).

Di sisi lain, terdapat beragam jenis profesional informasi lain dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Manajer arsip, misalnya, bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengorganisasi, dan mengelola berbagai bentuk informasi yang dianggap penting untuk disimpan secara permanen, termasuk foto, film, rekaman video dan suara, arsip kertas, dan dokumen tradisional (Greer, Grover & Fowler, 2007, hlm. 13). Sementara itu, manajer informasi lebih fokus pada penyediaan informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna, seringkali dengan merangkum atau mengemas ulang informasi tersebut agar lebih mudah dipahami (Greer, Grover & Fowler, 2007, hlm. 14).

Selain manajer arsip dan manajer informasi, terdapat juga ilmuwan informasi yang fokus pada teori dan studi tentang penciptaan, penggunaan, dan penyebaran informasi dan pengetahuan (Greer, Grover & Fowler, 2007, hlm. 14). Ada pula profesional sistem informasi yang bertugas mengembangkan sistem internal untuk mengelola informasi di dalam perusahaan, seperti informasi personalia dan anggaran (Greer, Grover & Fowler, 2007, hlm. 15).

Lebih lanjut, terdapat manajer pengetahuan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merekomendasikan informasi yang relevan kepada pengguna (Greer, Grover & Fowler, 2007, hlm. 15). Terakhir, wirausahawan informasi menerapkan keterampilan manajemen informasi dan penelitian mereka di berbagai bidang di luar perpustakaan, seperti pengembangan basis data dan konsultasi informasi (Greer, Grover & Fowler, 2007, hlm. 15).

Meskipun sama-sama bergelut di bidang informasi, terdapat perbedaan mendasar antara pustakawan dan profesional informasi lain. Pustakawan cenderung fokus pada pengelolaan dan pengorganisasian koleksi informasi, sementara profesional informasi lain mungkin lebih fokus pada analisis, interpretasi, dan penerapan informasi untuk tujuan tertentu (Greer, Grover & Fowler, 2007, hlm. 11)

3.3.7 Pustakawan dan Profesional Informasi dalam Humaniora Digital

. Peran perpustakaan, pustakawan, dan IPI dalam humaniora digital (DH) sangatlah krusial dan saling terkait. Perpustakaan, terutama perpustakaan akademik, menjadi pusat kolaborasi dalam penelitian DH dengan menyediakan infrastruktur, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan. Lebih dari itu, perpustakaan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan proyek DH dengan melestarikan akses terhadap hasil-hasil

penelitian setelah proyek selesai, berkat infrastruktur yang stabil dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan proyek (Lucky & Harkema, 2018).

Pustakawan, sebagai ujung tombak perpustakaan, memiliki peran ganda dalam humaniora digital. Di satu sisi, mereka dapat membangun identitas institusi yang berfokus pada DH melalui pengembangan layanan yang inovatif dan relevan, seperti yang disarankan oleh Richardson dan Eichmann-Kalwara (2017). Di sisi lain, pustakawan juga berperan sebagai mitra aktif bagi peneliti DH, menawarkan keahlian mereka dalam manajemen informasi, pemilihan konten, dan digitalisasi. Selain itu, pustakawan juga memberikan pelatihan dan dukungan kepada peneliti DH dalam hal penggunaan alat dan metode digital, serta manajemen data penelitian.

IPI sendiri memiliki peran yang tak kalah penting dalam humaniora digital. IPI memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian DH, terutama dalam hal organisasi, akses, dan penggunaan informasi. Kontribusi LIS juga terlihat dalam pengembangan metodologi dan praktik terbaik dalam penelitian DH, seperti strategi penjangkauan, manajemen proyek, dan digitalisasi. Selain itu, kesamaan nilai antara LIS dan DH dalam hal membangun komunitas dan kolaborasi membuka peluang untuk memperkuat kemitraan antara kedua bidang ini, seperti yang ditekankan oleh Robinson et al. (2015).

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pustakawan dan profesional informasi dalam mendukung penelitian DH. Poole (2017) dan Richardson and Eichmann-Kalwara (2017) menyoroti kurangnya sumber daya, jaringan pendukung, dan peluang pelatihan sebagai hambatan utama bagi pustakawan yang ingin lebih terlibat dalam penelitian DH. Risam menambahkan bahwa terdapat pula defisit penelitian berbasis DH di perguruan tinggi daerah dan perpustakaan mereka, dengan fokusnya tetap pada lembaga penelitian (Risam et al., 2017). Hal ini membuat pustakawan berada dalam posisi sulit karena berusaha mendefinisikan diri mereka sebagai humanis digital atau pustakawan tanpa sumber daya yang tersedia untuk benar-benar melibatkan diri mereka dalam inisiatif DH.

Dengan mengatasi tantangan ini dan memperkuat kolaborasi antara pustakawan, perpustakaan, dan komunitas DH, profesi IPI dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam memajukan penelitian humaniora digital.

3.3.8 Karakteristik Profesi Pustakawan dan Profesional Informasi

Profesi pustakawan dan profesional informasi memiliki karakteristik yang khas dan terus berkembang seiring waktu. Secara umum beberapa karakteristik kunci yang dapat diidentifikasi dari profesi ini antara lain:

Pendapat lain misalnya, Johnson (1996) bahwa mengemukakan bahwa suatu profesi memiliki kriteria berikut: 1) asosiasi profesional dengan kriteria keanggotaan yang jelas dan ketat, 2) pelatihan berkelanjutan dan proses sertifikasi, 3) status hukum yang diakui, 4) kode etik yang mengatur perilaku dan tindakan anggota, 5) otonomi individu yang tinggi dalam praktik kerja, dan 6) badan penelitian yang aktif mengembangkan pengetahuan (hlm.81)

Selain itu, Hernon (1991) menambahkan sembilan atribut lain yang menjadi ciri khas sebuah profesi, termasuk bidang studi yang diakui, status departemen, otonomi, pengakuan formal di perguruan tinggi, dasar teori yang substansial, kesepakatan tentang area penelitian dan metode, keyakinan akan pentingnya penelitian, tokoh-tokoh terkemuka, dukungan dari perkumpulan belajar nasional, dan usia disiplin ilmu.

1. Pengetahuan Khusus: Profesi pustakawan dan profesional informasi memerlukan penguasaan pengetahuan khusus yang mendalam, yang biasanya diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan berkelanjutan. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup aspek teknis seperti pengorganisasian, pengkatalogan, dan klasifikasi (Kuhlman, 1938; Tedder, 1884). Selain itu, pemahaman luas tentang berbagai disiplin ilmu juga diperlukan (Tedder, hlm 1884). Seiring perkembangan zaman, pengetahuan tentang literasi informasi dan teknologi informasi juga menjadi tuntutan (Butler, 1951)
2. Tanggung Jawab Intelektual: Pustakawan dan profesional informasi bertanggung jawab atas tugas-tugas intelektual yang kompleks. Hal ini termasuk mengembangkan dan memelihara koleksi, menyediakan layanan referensi dan penelitian, merancang dan menerapkan sistem informasi, serta mengajar dan melatih pengguna perpustakaan (Kuhlman, 1938; Tedder, 1884).
3. Orientasi Layanan: Profesi ini sangat berorientasi pada pelayanan publik. Pustakawan dan profesional informasi berusaha untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna mereka dan berkontribusi pada perkembangan intelektual dan sosial masyarakat (Kuhlman, 1938; Tedder, 1884).

4. Etika Profesi: Kode etik yang kuat mengatur perilaku dan praktik profesional dalam bidang ini. Kode etik ini menekankan nilai-nilai seperti akses informasi yang adil, kerahasiaan, objektivitas, dan integritas profesional (Tedder, 1884).
5. Organisasi Profesi: Asosiasi profesional seperti American Library Association (ALA) dan Library Association memainkan peran penting dalam menetapkan standar, mempromosikan pengembangan profesional, dan mengadvokasi kepentingan profesi (Kuhlman, 1938; Tedder, 1884).
6. Komunitas Profesional: Profesi ini memiliki komunitas yang kuat, dengan anggota yang berbagi nilai, tujuan, dan minat yang sama. Komunitas ini memfasilitasi pertukaran pengetahuan, kolaborasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan (Butler, P., 1951).

Selain itu, Shaffer (1968) menambahkan bahwa terdapat sejumlah kriteria penting yang harus dipenuhi oleh suatu disiplin ilmu agar dapat diakui sebagai profesi yang matang dan dihormati. Kriteria ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi tingkat profesionalisme suatu bidang, seperti yang terlihat pada profesi mapan seperti kedokteran dan hukum, yang memiliki kode etik yang jelas, organisasi profesi yang kuat, serta standar pendidikan yang tinggi. Berikut adalah 19 poin kriteria profesional yang dikemukakan oleh Shaffer (1968):

1. Pengetahuan khusus yang mendalam: Profesi yang diakui memiliki seperangkat pengetahuan yang unik, terorganisir secara sistematis, dan terus berkembang, yang menjadi ciri khasnya dan membedakannya dari bidang pekerjaan lain.
2. Keahlian intelektual lintas bidang: Seorang profesional sejati tidak hanya ahli dalam bidang spesifiknya, tetapi juga memiliki pemahaman yang luas dalam berbagai disiplin ilmu terkait. Hal ini memungkinkan mereka untuk menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang dan memberikan solusi yang komprehensif.
3. Penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan: Profesi yang matang terus berupaya untuk mengembangkan dan memperluas pengetahuan yang ada melalui penelitian dan inovasi. Praktisi profesional secara aktif terlibat dalam penelitian untuk meningkatkan praktik mereka dan berkontribusi pada kemajuan bidang mereka.
4. Landasan ilmiah yang kuat: Profesi yang diakui harus didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan pengetahuan yang telah teruji dan terbukti

kebenarannya. Ini memastikan bahwa praktik profesional didasarkan pada bukti dan penalaran yang kuat.

5. Pendidikan profesional yang terstruktur: Untuk menjadi seorang profesional, seseorang harus menyelesaikan pendidikan formal yang terstruktur dan diakui secara resmi. Pendidikan ini membekali calon praktisi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan profesi mereka dengan kompeten.
6. Pengetahuan dan keterampilan yang terintegrasi: Seorang profesional sejati tidak hanya memiliki pengetahuan teoretis, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut secara efektif dalam praktik sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan mereka saling melengkapi dan terintegrasi untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Melayani kebutuhan masyarakat: Tujuan utama dari sebuah profesi adalah memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan sosial yang penting. Profesi yang matang menyadari tanggung jawab sosialnya dan berusaha untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
8. Mengutamakan kepentingan publik: Seorang profesional sejati selalu mengutamakan kepentingan publik dan klien di atas kepentingan pribadi mereka. Mereka bertindak dengan integritas dan mengutamakan kesejahteraan orang lain dalam setiap tindakan profesional mereka.
9. Semangat altruisme: Profesi yang matang memiliki semangat altruisme, yaitu keinginan untuk memberikan lebih dari yang dituntut oleh kewajiban mereka demi kebaikan masyarakat. Mereka tidak hanya memenuhi kewajiban minimal, tetapi juga berusaha untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
10. Fokus pada manusia: Profesi sejati berfokus pada interaksi dengan manusia dan memberikan dampak positif pada kehidupan individu dan masyarakat. Mereka tidak hanya berurusan dengan objek atau tugas, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dalam pekerjaan mereka.
11. Berpikir kritis dan analitis: Seorang profesional sejati memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis yang kuat. Mereka mampu menganalisis masalah kompleks, mengevaluasi berbagai pilihan, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti dan penalaran yang logis.
12. Organisasi profesional yang solid: Profesi yang diakui memiliki organisasi profesional yang kuat dan representatif. Organisasi ini

berperan dalam menetapkan standar, melindungi kepentingan anggota, memberikan dukungan dan sumber daya, serta mempromosikan pengembangan profesi secara keseluruhan.

13. Standar tinggi: Profesi yang matang menetapkan standar tinggi untuk anggotanya, baik dalam hal pendidikan, kompetensi, maupun etika. Standar ini terus ditingkatkan untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan dan memastikan bahwa profesi tersebut memenuhi harapan masyarakat.
14. Kode etik yang ketat: Profesi sejati memiliki kode etik yang ketat yang mengatur perilaku dan praktik anggotanya. Kode etik ini menekankan tanggung jawab profesi terhadap masyarakat dan individu yang dilayaninya, serta integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
15. Karir seumur hidup: Profesi sejati menawarkan peluang karir jangka panjang dan keanggotaan permanen dalam komunitas profesional. Ini berarti bahwa menjadi seorang profesional adalah komitmen seumur hidup yang melibatkan pengembangan dan pertumbuhan terus-menerus.
16. Pengakuan hukum dan masyarakat: Profesi yang mapan diakui secara hukum dan dihormati oleh masyarakat luas atas kontribusi dan keahliannya. Pengakuan ini memberikan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut.
17. Pengembangan profesional berkelanjutan: Seorang profesional sejati berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang karir mereka. Ini termasuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang mereka, meningkatkan keterampilan mereka, dan memperluas pengetahuan mereka.
18. Istilah teknis yang baku: Profesi yang matang memiliki seperangkat istilah teknis yang baku dan dipahami oleh semua anggotanya. Hal ini penting untuk komunikasi yang efektif dan akurat di antara para profesional, serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam praktik profesional.
19. Definisi yang jelas: Profesi sejati memiliki definisi yang jelas tentang peran, fungsi, dan ruang lingkupnya. Ini membantu masyarakat memahami apa yang diharapkan dari seorang profesional dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan(hlm.18-20)

3.3.9 Peran Pustakawan dan Profesional Informasi dari Masa Ke Masa

Peran profesional informasi, termasuk pustakawan, telah mengalami transformasi yang signifikan dari waktu ke waktu, mencerminkan perubahan kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, dan perkembangan ilmu informasi itu sendiri.

1. Profesional Informasi di Masa Mesir dan Babilonia Kuno

Sejarah profesi profesional informasi dapat ditelusuri kembali ke masa Mesir Kuno, di mana mereka merupakan individu yang dihormati dan berpendidikan tinggi, seringkali memegang jabatan politik yang penting (Johnson, 1970, hlm. 102). Salah satu bukti keberadaan mereka pada masa itu adalah penemuan makam dua pustakawan yang bertugas di bawah Ramses di Thebes. Di Kuil Thoth di Hermopolis, yang menyimpan salah satu koleksi papirus terbesar tentang ilmu kedokteran, terdapat seorang imam-juru tulis dengan gelar 'Penjaga Kitab-Kitab Suci', dan seorang asisten pustakawan wanita yang bergelar 'Nyonya Huruf, Nyonya Rumah Buku'. (Johnson, 1970, hlm. 102)

Di Babylonia dan Assyria, sekitar seribu tahun sebelum perpustakaan terkenal di Nineveh, profesional informasi dikenal dengan gelar Nisu-duppi-satri, yang berarti 'Orang yang Menulis di Tablet' (Johnson, 1970, hlm. 103). Perpustakaan Ashurbanipal di Nineveh adalah salah satu contoh perpustakaan penting pada masa itu, yang menyimpan ribuan lempengan tanah liat berisi teks-teks penting tentang sejarah, agama, ilmu pengetahuan, dan sastra. Profesional informasi pada masa itu haruslah lulusan sekolah juru tulis dan terlatih dalam bidang sastra atau jenis catatan yang mereka kelola. Selain bertugas mengelola koleksi, mereka juga berperan dalam menyunting, menyalin, dan menerjemahkan karya-karya penting bagi pejabat tinggi pemerintah atau agama.

2. Profesional Informasi di Masa Yunani dan Romawi Kuno

Di Yunani Kuno, Demetrios dari Phaleron, seorang filsuf dan gubernur Athena, dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pengelolaan Perpustakaan Alexandria (Parsons, 1952). Ia berperan penting dalam mendirikan Museum dan Perpustakaan Alexandria, yang menjadi pusat pengetahuan dan pembelajaran pada masa itu. Zenodotus dari Ephesus, penggantinya, mendorong 'akses publik gratis' ke perpustakaan, menunjukkan perubahan paradigma dalam memandang perpustakaan sebagai institusi publik.

Di Romawi Kuno, peran profesional informasi tidak sepenting di Alexandria (Thompson, 1977). Meskipun perpustakaan umum dikelola oleh

procurator bibliothecarum, seperti L. Julius Vestinus pada masa Hadrian (117-138 M), pustakawan (bibliothecarius) lebih berperan sebagai pejabat administratif. Tugas perpustakaan yang sebenarnya, seperti perawatan koleksi dan pelayanan pembaca, dilakukan oleh asisten seperti librarius, vilicus, atau antiquarius

3. Profesional Informasi di Abad Pertengahan dan Modern

Pada abad pertengahan, profesional informasi berperan sebagai penjaga dan pengelola koleksi buku dan manuskrip berharga. Tugas mereka berpusat pada pengumpulan, pengorganisasian, dan pelestarian materi-materi ini, seringkali di lingkungan biara atau institusi keagamaan (Casson, 2001).

Abad ke-19 menandai era profesionalisasi perpustakaan yang signifikan. Tokoh-tokoh berpengaruh seperti Melvil Dewey dan Charles Ammi Cutter memperkenalkan sistem klasifikasi dan katalogisasi yang lebih efisien, mengubah peran profesional informasi menjadi ahli organisasi informasi (Hanson & Daily, 1970). Seiring dengan meningkatnya popularitas perpustakaan umum, profesional informasi juga mulai berperan sebagai pemberi layanan informasi, membantu masyarakat mengakses dan memahami berbagai sumber informasi (Johnson & Kavanagh, 1994)

4. Profesional Informasi di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada akhir abad ke-20 merevolusi dunia perpustakaan dan informasi. Profesional informasi, termasuk pustakawan, kini tidak hanya berurusan dengan koleksi fisik, tetapi juga sumber daya digital yang terus berkembang (Cronin, 2005). Istilah "profesional informasi" muncul untuk mencakup peran yang lebih luas, termasuk peran tradisional pustakawan, dalam mengelola, menyediakan, dan menavigasi informasi (Sapa, 2017).

Profesional informasi memainkan peran penting dalam infrastruktur informasi global yang terus berkembang. Secara historis, peran mereka berpusat pada pengorganisasian, penyebaran, dan pelestarian informasi (Greer, Grover, & Fowler, 2013). Namun, munculnya era digital telah memperluas peran ini secara signifikan. Profesional informasi sekarang aktif terlibat dalam difusi pengetahuan, memberdayakan individu dan masyarakat untuk memahami dan menerapkan informasi secara efektif (Grover, Greer, Achleitner, & Visnak, 2015).

Pergeseran paradigma ini dari penyimpanan informasi pasif ke difusi aktif memerlukan seperangkat keterampilan dan pengetahuan baru. Profesional informasi harus memahami tidak hanya lanskap teknologi yang

terus berubah tetapi juga teori sosial yang mendasari perilaku dan penggunaan informasi (Greer et al., 2013). Mereka harus mahir dalam berbagai format informasi, dari sumber tradisional hingga media digital yang muncul, dan harus mampu menjembatani kesenjangan antara keduanya (Grover et al., 2015).

Selain itu, profesional informasi saat ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembuatan dan kurasi pengetahuan. Dengan munculnya akses terbuka dan repositori institusional, pustakawan dan profesional informasi lainnya berkolaborasi dengan para peneliti untuk mengatur, menyimpan, dan menyebarluaskan temuan penelitian (Grover et al., 2015). Peran yang diperluas ini memposisikan profesional informasi sebagai mitra penting dalam penciptaan dan penyebaran pengetahuan, berkontribusi pada kemajuan masyarakat yang terinformasi dan terdidik.

Di era digital, profesional informasi, termasuk pustakawan, dituntut untuk memiliki keterampilan teknologi informasi yang mumpuni. Mereka berperan sebagai navigator informasi, membantu pengguna menavigasi lautan informasi yang tersedia secara daring maupun luring. Peran ini selaras dengan definisi Foundations of the LIS Profession (FKA2) dalam IFLA Guidelines for Professional Library and Information Science (LIS) Education Programmes 2022 (Chu et al., 2022)

Sebagai praktisi IPI, pustakawan dan profesional informasi memiliki peran krusial dalam seluruh siklus hidup informasi, mulai dari penciptaan, pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, hingga penyebaran dan penggunaan informasi. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, mereka menghubungkan individu dengan informasi yang dibutuhkan. Pustakawan dan profesional informasi berkontribusi di berbagai lingkungan informasi, termasuk perpustakaan, arsip, museum, perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi nirlaba. Keseluruhan peran dan tanggung jawab ini mencerminkan esensi dari FKA2, yang menekankan pada pengelolaan informasi secara holistik dan etis, serta peran teknologi dalam memfasilitasi akses dan penggunaan informasi.

Pendidikan IPI secara holistik membangun kapasitas profesional dengan menanamkan etika dan nilai-nilai humanistik. Kesetaraan, keragaman, inklusi, dan aksesibilitas (EDIA) menjadi prinsip-prinsip penting dalam profesionalisme IPI yang juga menekankan orientasi pelayanan, tanggung jawab sosial, keberlanjutan, pendidikan, dan pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, akses terhadap informasi, termasuk akses terbuka (OA), sebagai barang publik; kebebasan intelektual; pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan yang bertanggung jawab; dan

teknologi serta kecerdasan yang mendorongnya, merupakan hal yang fundamental bagi profesi ini. LIS memanfaatkan bidang terkait untuk mendukung pengembangan penalaran, pemikiran kritis, dan keterampilan lunak lainnya, yang dapat diterapkan pada sub-bidang dan konteks yang lebih khusus dalam ekosistem warisan budaya dan pengetahuan yang lebih luas

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong transformasi peran pustakawan dan profesional informasi. Mereka tidak lagi sekadar penjaga buku tradisional, melainkan menjadi agen perubahan yang dinamis dalam lanskap informasi digital (Cronin, 1995; Gorman, 2004; Crowley, 2008; Wiegand, 2001, 2005).

Hal ini sejalan dengan Tren 9 dalam *IFLA Trend Report 2023* yang menyatakan, "Library and information workers are seen as auxiliaries, rather than development actors in their own right" (IFLA, 2023). Tren ini menyoroti bahwa pustakawan seringkali dipandang sebagai tenaga pendukung, bukan sebagai pelaku utama dalam pembangunan.

Oleh karena itu, pustakawan perlu menegaskan peran penting mereka dalam masyarakat, terutama dalam pengembangan literasi informasi, pemberdayaan komunitas, dan dukungan terhadap penelitian. Peran ini semakin krusial di era digital, di mana informasi menjadi komoditas berharga dan akses terhadap informasi menjadi hak dasar setiap individu. Pustakawan tidak hanya menjadi penjaga gerbang pengetahuan, tetapi juga menjadi fasilitator yang membantu masyarakat mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi secara efektif.

Untuk mewujudkan peran tersebut, pustakawan di era digital memiliki sejumlah tanggung jawab kunci sebagai berikut:

1. Pengelolaan Informasi Digital

Pustakawan saat ini harus mampu mengelola dan menyediakan akses terhadap sumber daya digital yang terus berkembang, termasuk koleksi digital, basis data online, jurnal elektronik, dan berbagai format informasi lainnya. Mereka perlu menguasai keterampilan teknis dalam pengorganisasian, pengkatalogan, pengarsipan, dan penyajian informasi digital, serta memahami isu-isu terkait hak cipta, lisensi, dan akses terbuka (Miller, 2018).

Selain itu, pustakawan juga berperan dalam memastikan keandalan dan kualitas informasi digital yang disediakan, termasuk memverifikasi sumber informasi, mengevaluasi konten, dan mengidentifikasi informasi yang salah atau menyesatkan. Hal ini selaras dengan *Tren 10: Globalisation*

continues, opening up new expectations for information access dalam IFLA Trend Report 2023, yang menyoroti meningkatnya harapan akan akses informasi yang lebih mudah dan luas di era globalisasi. Pustakawan juga berperan dalam memastikan bahwa sumber daya digital yang tersedia dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas (Dugdale, 1999; Moeller, 2019).

2. Fasilitator Pembelajaran dan Penelitian

Pustakawan berperan sebagai fasilitator pembelajaran dan penelitian dengan menyediakan sumber daya informasi yang relevan, akurat, dan terkini. Mereka tidak hanya membantu pengguna perpustakaan dalam mencari informasi, tetapi juga memberikan panduan dalam mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif. Pustakawan juga dapat merancang dan menyelenggarakan program-program pembelajaran yang mendukung literasi informasi dan keterampilan digital, serta berkolaborasi dengan dosen dan peneliti dalam mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang inovatif.

3. Pengembangan Literasi Informasi dan Digital

Salah satu peran penting pustakawan di era digital adalah meningkatkan literasi informasi dan digital masyarakat. Mereka memberikan pelatihan, workshop, dan bimbingan tentang cara mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dan etis. Pustakawan juga membantu pengguna perpustakaan untuk memahami dan memanfaatkan berbagai alat dan platform digital yang tersedia, sehingga mereka dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan secara efektif dan efisien. Selain itu, pustakawan juga dapat berperan sebagai advokat untuk akses terbuka terhadap informasi dan teknologi, sehingga memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Hal ini sejalan dengan *Tren 11: Even as connectivity improves, the digital divide is persistent and getting more serious* dalam IFLA Trend Report 2023, yang menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan digital yang masih ada.

4. Pengembangan dan Pengelolaan Repositori Institusi

Pustakawan berperan dalam mengembangkan dan mengelola repositori institusi, yaitu platform digital untuk menyimpan, mengelola, dan menyebarluaskan hasil penelitian dan karya ilmiah yang dihasilkan oleh institusi mereka. Hal ini penting untuk meningkatkan visibilitas dan dampak penelitian, serta mendukung akses terbuka terhadap pengetahuan. Selain itu, repositori institusi juga dapat menjadi sarana untuk melestarikan dan

mengarsipkan karya-karya ilmiah, sehingga dapat diakses oleh generasi mendatang.

5) Dukungan Publikasi Akses Terbuka

Pustakawan juga berperan dalam mendukung publikasi akses terbuka, yaitu model publikasi yang memungkinkan akses gratis dan terbuka terhadap hasil penelitian dan karya ilmiah. Mereka dapat memberikan informasi dan pelatihan tentang akses terbuka kepada peneliti, serta membantu mereka dalam memilih jurnal akses terbuka yang tepat dan memahami kebijakan hak cipta. Harapan besar kita pustakawan dapat berkontribusi pada demokratisasi pengetahuan dan memastikan bahwa hasil penelitian dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

3.4 Evolusi Profesionalisme Kepustakawanan dari Abad Ke-19 Hingga Era Digital

Profesionalisme kepustakawanan telah mengalami perjalanan panjang dan menarik, bermula dari peran tradisional sebagai penjaga buku hingga menjadi agen perubahan di era digital. Perkembangan zaman dan teknologi telah membentuk ulang peran dan identitas pustakawan dan profesional informasi. Transformasi ini menjadi bukti bagaimana profesi ini terus beradaptasi dan berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Bagian ini akan menelusuri perjalanan evolusi profesionalisme kepustakawanan, dimulai dari awal profesionalisasi di abad ke-19, di mana peran pustakawan mulai bergeser dari sekadar penjaga buku menjadi profesional yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus. Selanjutnya, akan dibahas peran pustakawan di era digital, yang ditandai dengan munculnya perpustakaan digital dan penggunaan teknologi komunikasi informasi (TIK) secara luas. Perpustakaan digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan layanan melalui pemanfaatan teknologi digital secara efektif.

Meskipun telah terjadi pergeseran paradigma, identitas profesional pustakawan tetap penting dan terus berkembang. Pengalaman kerja, interaksi dengan rekan seprofesi, dan perkembangan teknologi membentuk cara pustakawan memandang diri mereka sendiri dan profesi mereka. Identitas profesional bersifat dinamis dan terus berkembang sepanjang karier seseorang. Pustakawan masa kini dituntut untuk tidak hanya menguasai pengetahuan tradisional, tetapi juga harus memiliki literasi

digital yang memadai, serta pemahaman yang mendalam tentang etika dan privasi dalam penggunaan teknologi.

3.4.1 Pergeseran Paradigma dalam Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI)

Pekerjaan pustakawan adalah serebral dan tak tentu, jarang berupa penerapan formula atau prosedur tetap. Setiap klien baru atau masalah baru adalah tantangan intelektual baru yang dipenuhi dengan respons segar dan inventif—bukan dengan mengacu pada 'badan pengetahuan' kanonik. Pekerjaan pustakawan tidak dapat dipecah menjadi serangkaian tugas praktis yang begitu disukai oleh analis pekerjaan. Pekerjaan pustakawan jauh lebih dekat dengan pengajaran dan penelitian fakultas daripada apa pun yang tunduk pada analisis pekerjaan industri. Seperti para profesional pengetahuan lainnya—ahli bedah, pengacara, ekonom, ilmuwan, profesor—pustakawan terlibat erat dengan dinamika interaktif dan hasil yang tidak dapat diprediksi dari sistem kehidupan, misalnya, orang lain dan masyarakat secara keseluruhan." (Veaner, Allen B. 1994)

Veaner (1994) dalam kutipan di atas menekankan bahwa pekerjaan pustakawan bersifat dinamis dan kompleks, menuntut respons yang kreatif dan adaptif terhadap setiap kebutuhan pengguna. Pernyataan Veaner ini sejalan dengan pergeseran paradigma dalam IPI, di mana pustakawan tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan koleksi, tetapi juga pada pemberian layanan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna. Kutipan Veaner menunjukkan bahwa pustakawan, seperti profesional lainnya, harus terlibat aktif dalam memahami dan merespons dinamika kebutuhan informasi pengguna, yang merupakan inti dari paradigma baru dalam IPI. Pergeseran paradigma ini ditandai dengan perpindahan fokus dari paradigma bibliografi ke paradigma yang berpusat pada pengguna (Kuhlthau, 2004, hlm. 58)

Dalam paradigma bibliografi, Pustakawan dan profesional informasi lebih mengutamakan pengumpulan, pengorganisasian, dan pelestarian materi informasi (Grover, Greer, & Fowler, 2013, hlm. 58). Koleksi dan ukurannya dianggap sebagai indikator utama kualitas sebuah perpustakaan.

Namun, kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat telah mendorong pergeseran menuju paradigma yang lebih berpusat pada pengguna. Dalam paradigma ini, kebutuhan dan kepuasan pengguna menjadi prioritas utama. Pustakawan dan profesional informasi tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan koleksi, tetapi juga pada pemberian layanan yang membantu pengguna menemukan, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif (Grover et al., 2013, hlm. 59).

Pergeseran paradigma ini menuntut perubahan dalam cara pandang dan praktik profesional informasi. Mereka harus mengembangkan

keterampilan baru dalam memahami kebutuhan pengguna, merancang layanan yang responsif, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan. Pustakawan tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga gerbang informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra dalam proses pembelajaran dan penciptaan pengetahuan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memicu transformasi signifikan dalam bidang IPI. Perpustakaan, yang awalnya berfungsi sebagai gudang penyimpanan buku dan sumber informasi fisik lainnya, kini telah bertransformasi menjadi pusat pengelolaan informasi dalam berbagai format, termasuk format digital (Curzon et al., 2017). Transformasi ini menuntut perubahan paradigma dalam profesi IPI, dari fokus pada pengelolaan koleksi fisik menjadi pengelolaan informasi digital dan penyediaan akses yang lebih luas dan mudah bagi pengguna.

Perpustakaan tidak lagi hanya berfokus pada pengumpulan dan penyimpanan koleksi fisik, tetapi juga pada pengelolaan informasi dalam berbagai format dan platform (Dextre Clarke, 2018). Pustakawan dituntut untuk memiliki keterampilan teknologi informasi yang memadai untuk mengelola dan menyediakan akses ke sumber-sumber informasi digital, seperti basis data online, jurnal elektronik, dan koleksi digital lainnya. Selain itu, mereka juga harus mampu memberikan layanan referensi dan pengajaran yang efektif dalam lingkungan digital.

Pergeseran paradigma ini juga mempengaruhi peran pustakawan dalam masyarakat. Pustakawan tidak lagi hanya berperan sebagai penjaga koleksi, tetapi juga sebagai fasilitator akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Mereka membantu pengguna dalam mencari, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang relevan dengan kebutuhan mereka (Curzon et al., 2017). Pustakawan juga berperan dalam mengembangkan literasi informasi masyarakat, yaitu kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa tantangan baru bagi Profesional IPI, seperti masalah hak cipta, privasi, dan keamanan informasi. Pustakawan harus memahami isu-isu etis dan hukum yang terkait dengan pengelolaan dan penyebaran informasi digital. Mereka juga harus mampu melindungi hak-hak pengguna dan memastikan keamanan informasi yang mereka kelola.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital, profesional IPI perlu terus beradaptasi dan mengembangkan diri. Pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi, manajemen informasi, dan literasi informasi menjadi semakin penting bagi pustakawan. Selain itu, mereka juga

harus memiliki kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik untuk dapat bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyediakan akses informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan kebutuhan informasi telah mendorong pergeseran paradigma dalam profesi pustakawan dan profesional informasi. Secara tradisional, profesi pustakawan identik dengan pekerjaan di perpustakaan sebagai institusi fisik. Namun, lulusan LIS kini tidak hanya bekerja di perpustakaan, tetapi juga di berbagai bidang lain seperti manajemen informasi, analisis kebijakan, pengembangan taksonomi, dan bahkan menjadi pengusaha informasi (American Library Association, 2014). Hal ini sesuai dengan temuan IFLA Trend Report 2023 yang menyoroti semakin luntarnya batasan profesi pustakawan dan perlunya pustakawan beradaptasi dengan peran-peran baru yang muncul.

Gagasan bahwa profesional IPI sedang mengalami masa transisi dan tantangan besar telah banyak dikemukakan dalam berbagai penelitian dan konteks praktisi (Fraser-Arnott, 2019). Beberapa faktor telah berkontribusi terhadap transformasi ini, baik dalam hal jenis pekerjaan yang dilakukan pustakawan maupun cara mereka melakukannya. Salah satu faktor utama adalah kemunculan berbagai teknologi informasi yang memungkinkan peningkatan dramatis dalam jumlah informasi yang tersedia bagi masyarakat umum (American Library Association, 2014).

Dorner et al. (2017) dalam artikel mereka di *International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Journal* yang berjudul "Making sense of the future of libraries", menguraikan lima proyek besar di berbagai negara yang berupaya menanggapi tantangan serius terhadap kepustakawanan. Mereka berargumen bahwa tantangan-tantangan ini mendorong pustakawan dan asosiasi perpustakaan untuk terlibat dalam proses pemaknaan secara individu dan kolektif. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa pengembangan pemahaman bersama yang baru tentang profesi kepustakawanan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan advokasi perpustakaan.

Perubahan dalam suatu profesi, yang dipicu oleh peluang atau ancaman dari lingkungan eksternal, akan memerlukan perubahan pada identitas profesional anggota profesi tersebut. Meskipun identitas profesional dibangun secara individual dan unik karena menggabungkan aspek pengalaman, sikap, dan aspirasi seseorang, ada beberapa anggota profesi yang pengalaman profesionalnya berpotensi membuat mereka menjadi outlier dalam komunitas profesional mereka. Mereka adalah para

profesional yang terlibat dalam tugas atau peran yang sedang berkembang, tidak umum, tidak biasa, atau tidak tradisional.

Perubahan ini menyebabkan pergeseran dalam definisi dan praktik profesional IPI. Konsep "perpustakaan sebagai tempat" mulai bergeser menjadi "keperpustakawanan sebagai praktik," di mana keahlian dan pengetahuan pustakawan dapat diterapkan di berbagai konteks (Rathbun-Grubb & Marshall, 2009). Hal ini sesuai dengan IFLA Trend Report 2023 yang menyoroti semakin luntarnya batasan profesi pustakawan dan perlunya pustakawan beradaptasi dengan peran-peran baru yang muncul.

Untuk membangun pemahaman bersama tentang ruang lingkup IPI, kelompok kerja Building Strong LIS Education (BSLISE) memperkenalkan definisi berikut:

Kajian IPI adalah bidang studi, penelitian, dan aplikasi. Dalam pendidikan dan penelitian, IPI berkaitan dengan informasi dalam segala format dan prosesnya, teknologi yang memprosesnya, serta interaksi manusia dengan informasi dan teknologi terkait. Sebagai praktik profesional, IPI mencakup seluruh aspek siklus hidup informasi, memanfaatkan teknologi yang tepat untuk menghubungkan orang di mana saja dengan informasi, dan dilakukan di berbagai lingkungan informasi, termasuk lembaga warisan budaya. (Chu et al., 2022)

Definisi ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Bidang studi, penelitian, dan aplikasi: IPI tidak hanya sekadar praktik profesional, tetapi juga mencakup penelitian dan pengembangan teori dalam bidang informasi.
2. Informasi dalam semua format dan prosesnya: IPI tidak hanya terbatas pada informasi dalam bentuk teks atau buku, tetapi juga mencakup berbagai format informasi seperti audio, visual, dan digital.
3. Teknologi yang memproses informasi: IPI melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola, memproses, dan menyediakan akses terhadap informasi.
4. Interaksi manusia dengan informasi dan teknologi: IPI juga memperhatikan aspek sosial dan budaya dalam interaksi manusia dengan informasi dan teknologi.
5. Siklus hidup informasi: IPI mencakup seluruh proses pengelolaan informasi, mulai dari penciptaan, pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, hingga penyebarluasan dan penggunaan informasi.
6. Berbagai lingkungan informasi: Profesi IPI dapat diterapkan di berbagai lingkungan, termasuk perpustakaan, arsip, museum, perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi nirlaba.

Definisi ini mencerminkan sifat dinamis dan berkembangnya profesi pustakawan dan profesional informasi. Dalam era digital, LIS semakin relevan dan penting dalam memastikan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi informasi bagi masyarakat.

3.4.2 Evolusi Identitas Profesional Pustakawan di Era Digital

Identitas profesional pustakawan telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan evolusi teknologi informasi. Dari peran tradisional sebagai penjaga buku, pustakawan modern telah berevolusi menjadi pemimpin informasi yang adaptif dan inovatif. Perkembangan teknologi digital telah mendorong pustakawan untuk terus mengembangkan kompetensi dan memperluas cakupan peran mereka.

Penelitian menunjukkan bahwa identitas profesional pustakawan bersifat dinamis dan terus berkembang sepanjang karier (Fraser-Arnott, 2019). Pengalaman kerja, interaksi dengan rekan seprofesi, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi faktor utama yang membentuk identitas ini. Sosialisasi ke dalam profesi kepustakawanan merupakan proses berkelanjutan yang tidak hanya melibatkan pemahaman tentang peran tradisional, tetapi juga tentang lanskap kepustakawanan yang terus berubah (Khalid, 2011).

Pengalaman kerja yang beragam telah memperkaya identitas profesional pustakawan. Baik di dalam maupun di luar lingkungan perpustakaan tradisional, pustakawan telah mengembangkan keterampilan baru, seperti manajemen data, analisis informasi, dan pengembangan konten digital. Hal ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang semakin kompleks dan memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berubah (Corrall, 2005; Martzoukou, 2013).

Perkembangan TIK telah mengubah cara pustakawan bekerja dan berinteraksi dengan pengguna. Pustakawan kini tidak hanya menyediakan akses fisik ke koleksi, tetapi juga berperan sebagai mediator informasi dalam dunia digital. Mereka harus menguasai berbagai alat dan teknologi, seperti big data, manajemen data ilmiah, dan media sosial, untuk memberikan layanan informasi yang relevan dan berkualitas (Lemos & Ferraz, 2014; Sanches, 2022).

Pustakawan di luar perpustakaan tradisional telah membuka peluang baru bagi profesi ini. Mereka bekerja di berbagai sektor, seperti industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba, sebagai spesialis informasi, analis data, atau konsultan teknologi. Pengalaman ini tidak hanya memperluas cakupan peran pustakawan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berkontribusi

pada pemecahan masalah yang lebih luas (Martzoukou & Tramantza, 2014; Johnson, 2018).

Untuk tetap relevan di era digital, pustakawan perlu terus belajar dan mengembangkan diri. Mereka harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, berpikir kritis, dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Sehingga pustakawan dapat memperkuat identitas profesional mereka dan memastikan bahwa mereka tetap menjadi aset yang berharga bagi organisasi dan masyarakat (Fraser-Arnott, 2019).

3.4.3 Awal Profesionalisasi

Profesionalisasi kepustakawanan mulai berkembang pada paruh kedua abad ke-19, bersamaan dengan munculnya kesadaran akan status dan identitas profesional di berbagai bidang lain. Seperti yang ditulis Lester Asheim (1978) dalam artikelnya "Librarians as Professionals", asosiasi profesional mulai bermunculan, menandai pergeseran menuju profesionalisasi di berbagai bidang, termasuk hukum, pekerjaan sosial, kedokteran, dan bahkan olahraga (Asheim, 1978).

Pada abad ke-19, peran pustakawan mulai bergeser dari penjaga buku menjadi profesional yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus. Perpustakaan umum mulai bermunculan, menyediakan akses informasi bagi masyarakat luas, dan pustakawan berperan penting dalam mengelola dan memberikan layanan di perpustakaan-perpustakaan ini (Battles, 2004). Perkembangan teknologi cetak pada abad ke-19 mendorong pertumbuhan koleksi perpustakaan dan meningkatkan kebutuhan akan pengelolaan informasi yang lebih terstruktur, sehingga memicu munculnya badan-badan pengetahuan perpustakaan khusus dan kode-kode katalogisasi. "Rules for the Compilation of the Catalogue" (1841) dan "Rules for a Printed Dictionary Catalog" karya Cutter (1876) menjadi tonggak penting dalam membangun fondasi profesionalisme kepustakawanan (Kent, 1968).

Melvil Dewey menjadi tokoh kunci dalam peningkatan profesionalisme kepustakawanan pada akhir abad ke-19. Dewey mendirikan Columbia School of Library Economy pada tahun 1887, sekolah perpustakaan pertama di Amerika Serikat yang menawarkan pelatihan formal dalam berbagai aspek kepustakawanan (Vann, 1961). Dewey juga berperan penting dalam mendirikan American Library Association (ALA) pada tahun 1876, yang menjadi wadah bagi para pustakawan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mengembangkan standar profesi (Quinn, 2014).

Laporan Williamson pada tahun 1923 menjadi titik balik penting dalam profesionalisme kepustakawanan. Laporan ini mendorong pengakuan pustakawan sebagai profesional yang membutuhkan pendidikan tinggi dan persiapan komprehensif (Williamson, C. C, 1923). Standar profesional dalam pendidikan dan praktik kepustakawanan mulai diterapkan, termasuk sistem sertifikasi sukarela dan akreditasi sekolah perpustakaan. Laporan ini juga menekankan pentingnya perpustakaan dalam sistem pendidikan dan mendorong pergeseran fokus dari pelatihan administratif ke pendidikan profesional yang lebih luas.

3.4.4 Profesionalisme Kepustakawanan di Era Digital

Munculnya perpustakaan digital dan penggunaan teknologi komunikasi informasi (TIK) secara luas telah merevolusi cara perpustakaan beroperasi, memengaruhi penyampaian layanan dan fungsi organisasi (Kehinde, 2018). Teknologi tidak hanya mengubah ruang perpustakaan fisik dan virtual tetapi juga mengharuskan pergeseran peran dan tanggung jawab pustakawan untuk beradaptasi dengan era digital (Farmer, 2014)

Di era digital, pustakawan memiliki peran penting dalam mengelola kekayaan intelektual di perpustakaan digital. Mereka menghadapi tantangan hak cipta dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan (Chemulwo, 2018). Perpustakaan digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan layanan melalui pemanfaatan teknologi digital secara efektif (Chisita et al., 2021). Pustakawan terlibat dalam mengevaluasi dan meningkatkan alur kerja digitalisasi untuk efisiensi, keandalan, dan kualitas yang lebih baik (Swaminathan, 2012). Kemajuan teknologi komputer dan komunikasi telah mendorong pengembangan perpustakaan digital, mengubah cara informasi disebarluaskan dan digunakan (Rogers-Whitehead, 2022)

Lynch (2000) menjelaskan bahwa TIK sebelumnya memungkinkan otomatisasi dan inovasi di perpustakaan, namun baru-baru ini telah membawa transformasi dengan penyediaan konten online, yang mencakup materi 'born-digital' dan versi digital dari koleksi lama

Pustakawan berada di garis depan dalam mengadvokasi kewarganegaraan digital, mempromosikan penggunaan teknologi yang etis dan bertanggung jawab di abad ke-21 (Quadri & Sodiq, 2018). Era digital telah mengharuskan pengembangan strategi keterlibatan digital untuk perpustakaan universitas guna mengoptimalkan layanan perpustakaan digital, program literasi, platform media sosial, dan infrastruktur TI (Owusu-Ansah, 2020). Integrasi perpustakaan ke dalam ruang informasi digital di lembaga pendidikan menjadi sangat penting, mengharuskan pustakawan untuk beradaptasi dengan perubahan radikal yang dibawa oleh digitalisasi

dan kecerdasan buatan (Mamedova, S. I. ,2023).Saat perpustakaan bertransisi ke ruang digital, pustakawan harus menemukan kembali diri mereka sendiri dan menjelajahi peran baru di luar batas tradisional agar tetap relevan di era digital (Bridges, 2012).

Lanskap perpustakaan digital yang terus berkembang menggarisbawahi pentingnya pustakawan memiliki fleksibilitas intelektual, merangkul perubahan, dan terus memperbarui keterampilan mereka untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang dalam lanskap digital (Croud et al., 2002). Pustakawan semakin diakui sebagai fasilitator akses informasi, pembangun komunitas, promotor literasi, dan pendukung inisiatif akses terbuka (Cox, 2019). Dinamika yang berubah di era digital telah menyoroti potensi pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui teknologi digital, khususnya dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh populasi yang menua (Tószegi, 2009).

Profesional informasi, termasuk pustakawan, memainkan peran penting dalam mendorong literasi informasi di berbagai konteks, menekankan pentingnya mengembangkan kompetensi dalam menavigasi dan mengevaluasi informasi di era digital (Awoyemi & Awoyemi, 2021). Mengajar literasi informasi tetap menjadi tanggung jawab inti bagi pustakawan, tetapi kemajuan dalam sistem temu kembali informasi membentuk kembali cara pustakawan terlibat dengan pengguna dalam domain ini (Burns, C. S. ,2014)

Pustakawan didorong untuk menemukan kembali diri mereka sendiri dan mengeksplorasi peran baru di luar batas tradisional, memanfaatkan peluang untuk memperluas dampak dan relevansi mereka di era digital (Cordell, R. M. ,2013.). Digitalisasi literatur telah merevolusi aksesibilitas, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Dalam era digital ini, pustakawan dan ilmuwan digital memainkan peran penting dalam merancang dan mengembangkan alat digital untuk perpustakaan digital (Mantilla, M,2023). Pustakawan semakin dituntut untuk memiliki program literasi digital guna menjelajahi dan memanfaatkan sumber daya digital secara efektif (Khan & Bhatti, 2017). Integrasi literasi informasi dan instruksi menulis menekankan pentingnya metakognisi dalam meningkatkan keterlibatan individu dalam lingkungan informasi (Cordell et al., 2013).

Keterlibatan perpustakaan akademik dalam proses komunikasi ilmiah menggarisbawahi peran penting yang dimainkan pustakawan dalam memfasilitasi penyebaran karya ilmiah dan mendukung anggota fakultas dalam upaya penelitian mereka (Yusuf et al., 2016).

3.5 Tantangan dalam Profesi Pustakawan dan Profesional Informasi

Di era digital yang terus bergerak maju, pustakawan dan profesional informasi menghadapi berbagai tantangan yang menuntut mereka untuk beradaptasi dan mengembangkan kompetensi baru. Tantangan-tantangan ini muncul seiring dengan perubahan teknologi, harapan pengguna, serta dinamika lingkungan informasi yang semakin kompleks

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah lanskap informasi secara signifikan, memengaruhi cara informasi diakses, dikelola, dan disebarluaskan. Pustakawan dan profesional informasi berada di garis depan perubahan ini, dituntut untuk terus beradaptasi dan mengembangkan keterampilan baru agar tetap relevan di era digital. Namun, perubahan ini juga menghadirkan serangkaian tantangan baru yang harus diatasi. Mulai dari kesenjangan keterampilan dan literasi digital, perubahan harapan dan perilaku pengguna, hingga keamanan data dan isu hak cipta, tantangan-tantangan ini menuntut pustakawan dan profesional informasi untuk terus belajar dan berinovasi. Mari kita telaah lebih lanjut beberapa tantangan utama yang mereka hadapi saat ini

3.5.1 Ledakan Informasi dan Kompleksitas Kebutuhan Pengguna

Era digital telah membawa perubahan besar dalam lanskap informasi, ditandai dengan pertumbuhan pesat informasi, terutama dalam format digital. Fenomena ini sering disebut sebagai "ledakan informasi", di mana volume, kecepatan, dan variasi informasi yang tersedia meningkat secara eksponensial. Keadaan ini membuat pengelolaan, pengorganisasian, dan penyediaan akses informasi menjadi semakin kompleks. (Saracevic, 1999, hlm. 2214).

Perpustakaan, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyediaan akses informasi, harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Pustakawan perlu mengembangkan keterampilan dan strategi baru untuk menyaring informasi yang relevan di tengah lautan data yang terus bertambah. Mereka harus memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan disimpan mudah ditemukan serta diakses oleh pengguna, baik melalui katalog online, basis data, maupun platform digital lainnya.

Selain itu, kebutuhan informasi pengguna juga semakin kompleks dan beragam. Pengguna perpustakaan saat ini tidak hanya mencari informasi faktual, tetapi juga membutuhkan informasi yang kontekstual, analitis, dan dapat diandalkan. Mereka juga mengharapkan layanan perpustakaan yang personal dan responsif terhadap kebutuhan mereka. (Rubin & Rubin, 2020)

Oleh karena itu, pustakawan perlu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna dan mampu memberikan layanan yang sesuai. Mereka harus mampu memberikan bimbingan dalam pencarian informasi, membantu pengguna mengevaluasi sumber informasi, dan menyediakan akses ke berbagai format informasi yang relevan. Selain itu, pustakawan juga perlu terus mengembangkan keterampilan literasi informasi mereka sendiri agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan tren informasi terkini.

Dalam menghadapi tantangan ledakan informasi dan kompleksitas kebutuhan pengguna, pustakawan harus terus berinovasi dan beradaptasi. Mereka harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif untuk meningkatkan layanan perpustakaan dan memenuhi kebutuhan pengguna di era digital.

3.5.2 Privasi dan Keamanan Data

Penggunaan teknologi digital dalam perpustakaan memunculkan masalah privasi dan keamanan data pengguna. Pustakawan memiliki tanggung jawab etis untuk melindungi privasi pengguna dan memastikan bahwa data mereka digunakan secara bertanggung jawab (Kian, L. A., & Eastman, S. D., 2017). Hal ini memerlukan pengembangan kebijakan privasi yang jelas, penggunaan teknologi keamanan yang tepat, dan pelatihan staf tentang praktik terbaik dalam pengelolaan data. Sejalan dengan itu, Tren 6: *Regulation of digital spaces is accelerating, but without consideration of impacts on how libraries support development* dalam IFLA Trend Report 2023 menyoroti bahwa regulasi ruang digital yang semakin ketat, namun seringkali tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap peran perpustakaan dalam mendukung pembangunan. Bhavya K.P. dan V.K. Dhanyasree (2023) juga menyoroti kerentanan perpustakaan digital terhadap serangan siber, terutama ransomware, sehingga menekankan pentingnya langkah-langkah keamanan yang kuat.

Tantangan ini menuntut pustakawan untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi perlindungan data berdasarkan peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Mereka harus mampu mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti enkripsi data, penggunaan kata sandi yang kuat, dan pembatasan akses terhadap informasi sensitif. Selain itu, pustakawan juga perlu mengedukasi pengguna tentang pentingnya privasi data dan cara melindungi informasi pribadi mereka saat menggunakan layanan perpustakaan.

3.5.3 Etika dan Tanggung Jawab Profesional di Tengah Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etika baru bagi pustakawan. Masalah privasi, keamanan data, dan aksesibilitas informasi menjadi isu-isu krusial yang harus dihadapi. Pustakawan memiliki tanggung jawab etis untuk melindungi privasi pengguna, memastikan keamanan data, dan menyediakan akses informasi yang adil dan merata bagi semua orang (Amoah & Yeboah, 2019).

Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya regulasi ruang digital yang semakin ketat, seperti yang disoroti dalam *Tren 6: Regulation of digital spaces is accelerating, but without consideration of impacts on how libraries support development* dalam IFLA Trend Report 2023. Pustakawan harus mampu menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dengan misi mereka untuk menyediakan akses terbuka terhadap informasi.

Dalam menghadapi dilema etika ini, pustakawan perlu mengembangkan kerangka kerja etis yang kuat dan komprehensif. Mereka harus memahami prinsip-prinsip etika informasi, seperti otonomi, privasi, keadilan, dan aksesibilitas, serta menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik sehari-hari. Selain itu, pustakawan juga perlu mengedukasi pengguna tentang etika informasi dan hak-hak mereka, serta mendorong penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Sebagaimana kita harapkan, tantangan dan peluang di era digital menuntut pustakawan untuk tidak hanya menjadi ahli dalam bidang informasi, tetapi juga menjadi agen etika yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan masyarakat.

3.5.4 Kesenjangan Digital dan Literasi Informasi

Kesenjangan digital dan keterampilan menjadi isu krusial dalam dunia kepustakawanan di era digital. Tidak semua pengguna perpustakaan memiliki akses atau keterampilan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital (Johnson, 1970, hlm. 102). Pustakawan perlu mengatasi kesenjangan ini dengan menyediakan pelatihan dan dukungan yang memadai, terutama bagi kelompok rentan yang kurang terampil dalam teknologi.

Penelitian Prema dan B. U. Kannappanavar (2023) menunjukkan bahwa meskipun sumber daya elektronik tersedia di perpustakaan akademik, tingkat pemanfaatannya masih rendah karena kurangnya keterampilan

pengguna. Selain itu, Mahadeva Prasad M.S. (2023) menemukan bahwa mahasiswa politeknik, meskipun akrab dengan teknologi, masih memerlukan pelatihan lebih lanjut tentang literasi informasi dan strategi pencarian yang efektif.

Sejalan dengan Tren 11 dalam IFLA Trend Report 2023, yang menyoroti kesenjangan digital yang persisten, pustakawan perlu terus mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan era digital, seperti analisis data dan penguasaan teknologi baru. Pustakawan memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan digital dengan menyediakan akses internet publik, pelatihan literasi digital, dan layanan inklusif.

Pustakawan juga perlu mengembangkan kompetensi mereka dalam teknologi baru agar dapat memberikan layanan yang relevan dan efektif. K. Veeranjanyulu (2023) menekankan pentingnya pelatihan dan perekrutan staf yang memiliki pengetahuan di bidang TIK untuk mendukung transformasi digital perpustakaan.

S.R. Muralidharan dan P. Dharani Kumar (2023) menyebutkan bahwa perpustakaan pintar (smart library) dapat berperan dalam menyediakan akses internet berkecepatan tinggi dan pelatihan literasi digital bagi pengguna.

Kesenjangan digital, yang ditandai dengan ketidaksetaraan akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), telah muncul sebagai tantangan krusial dalam era digital (Dipa & Turulja, 2023, hlm. 39). Kesenjangan ini, yang mencakup kesenjangan dalam akses fisik, keterampilan, dan dampak sosial ekonomi, dapat memperburuk kesenjangan sosial yang sudah ada (Lupač, 2018, hlm. 1; Ravaglio et al., 2023, hlm. 59). Literasi informasi, yang mencakup kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi secara kritis dan etis, menjadi semakin penting dalam mengatasi kesenjangan digital ini (IFLA, 2022, hlm. 9).

Perpustakaan, dengan peran tradisionalnya sebagai pusat informasi dan pengetahuan, memiliki posisi strategis dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat (Lux, 2024, hlm. 74). Melalui penyediaan akses terhadap beragam sumber informasi, penyelenggaraan pelatihan literasi informasi, dan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, perpustakaan dapat memberdayakan individu dan komunitas untuk lebih siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Dalam konteks pendidikan tinggi, di

mana mahasiswa dihadapkan pada kebutuhan untuk menavigasi dan memanfaatkan sumber daya informasi digital yang semakin kompleks, peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi informasi menjadi semakin vital (Anwar et al., 2023, hlm.

3.5.5 Perubahan Perilaku Pengguna di Era Digital

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah secara signifikan mengubah cara individu mengakses, menggunakan, dan berinteraksi dengan informasi (More, R. 2012). Evolusi ini tidak hanya berdampak pada cara orang berinteraksi dengan informasi tetapi juga memengaruhi kebiasaan dan preferensi pengguna perpustakaan, yang mengharuskan pustakawan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam layanan mereka guna memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang (Obinyan, 2021)

Perpustakaan akademik semakin merangkul Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengotomatiskan fungsi inti, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan (Enakrire & Ocholla, 2017). Integrasi TIK ini terbukti meningkatkan kepuasan pelanggan karena layanan perpustakaan menjadi lebih baik (Obinyan, 2021).

IFLA Trend Report 2023 menyoroti beberapa tren yang terkait dengan perubahan perilaku pengguna perpustakaan di era digital:

Tren 4: *More diverse societies make delivering universal services and achieving equity more complicated.* Masyarakat yang semakin beragam membuat penyediaan layanan universal dan pencapaian kesetaraan menjadi lebih rumit. Pustakawan perlu memahami dan merespons perubahan perilaku pengguna yang beragam. Layanan perpustakaan perlu inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna dari berbagai latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi. Contohnya, menyediakan koleksi dalam berbagai bahasa, menawarkan program literasi informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tertentu, dan menciptakan lingkungan perpustakaan yang ramah bagi semua pengguna.

Tren 10: *Globalization continues, opening up new expectations for information access.* Globalisasi terus berlanjut, membuka harapan baru akan akses informasi. Pustakawan perlu menyediakan akses ke sumber daya digital yang relevan dan mutakhir, seperti jurnal elektronik, basis data online, dan buku elektronik. Selain itu, mereka juga perlu mengembangkan layanan referensi virtual yang memungkinkan pengguna mendapatkan bantuan dan informasi dari jarak jauh.

Tren 11: *Even as connectivity improves, the digital divide is persistent and getting more serious.* Meskipun konektivitas internet

meningkat, kesenjangan digital tetap menjadi masalah serius. Pustakawan perlu berperan aktif dalam mengatasi kesenjangan ini dengan menyediakan akses internet publik, pelatihan literasi digital, dan layanan yang mendukung inklusi digital bagi semua anggota masyarakat.

Selain tren-tren yang disebutkan di atas, pustakawan juga perlu memperhatikan perubahan perilaku pengguna lainnya, seperti preferensi untuk menggunakan perangkat mobile, kebutuhan akan informasi yang lebih personal dan terkurasi, serta keinginan untuk berinteraksi dengan perpustakaan melalui media sosial dan platform online lainnya.

Dengan memahami dan merespons perubahan perilaku pengguna, pustakawan dapat memastikan bahwa perpustakaan tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat di era digital. Layanan seperti akses ke sumber daya digital, layanan referensi virtual, ruang belajar kolaboratif yang mendukung penggunaan teknologi, layanan personalisasi, rekomendasi konten, dan akses ke teknologi terbaru menjadi semakin penting untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang.

Perubahan perilaku pengguna ini tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga peluang bagi pustakawan untuk berinovasi dan mengembangkan layanan baru yang lebih menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan terus beradaptasi dan berinovasi, pustakawan dapat memastikan bahwa perpustakaan tetap menjadi pusat pengetahuan dan pembelajaran yang relevan di era digital.

3.5.6 Keterbatasan anggaran dan infrastruktur

Keterbatasan anggaran dan infrastruktur, terutama di negara berkembang, dapat menghambat adopsi dan implementasi teknologi digital di perpustakaan. M. Nagaveni, N.R. Shilpa Rani, dan S.N. Prathibha (2023) dalam penelitian mereka tentang pemanfaatan *cloud computing* di perpustakaan ilmu kesehatan, menemukan bahwa kendala anggaran dan infrastruktur menjadi salah satu tantangan utama. N. Karunakar dan C.S. Surendra (2023) juga menyoroti bahwa banyak perpustakaan di perguruan tinggi masih kekurangan sumber daya elektronik yang memadai.

Keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan utama bagi perpustakaan di era digital, terutama karena tuntutan investasi yang besar dalam teknologi dan sumber daya digital. Hal ini sejalan dengan *Tren 3: "In many countries, public spending – and so scope for investment – is tightening"* dalam IFLA Trend Report 2023, yang menyoroti pengetatan anggaran publik di banyak negara sebagai hambatan bagi perpustakaan dalam mengembangkan layanan dan infrastruktur.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, pustakawan perlu mengadopsi pendekatan kreatif dan inovatif dalam mencari solusi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Mencari Sumber Pendanaan Alternatif: Pustakawan dapat mencari hibah dan dana dari berbagai sumber, seperti pemerintah, yayasan, perusahaan, atau individu. Selain itu, mereka juga dapat menggali potensi sumber pendapatan lain, seperti mengadakan acara penggalangan dana, menyewakan ruang perpustakaan untuk kegiatan komersial, atau menjual produk dan jasa terkait perpustakaan.
 - 2) Membangun Kemitraan: Kemitraan dengan pihak lain, seperti institusi pendidikan, komunitas lokal, atau perusahaan swasta, dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Melalui kemitraan, perpustakaan dapat memperoleh akses ke sumber daya tambahan, seperti teknologi, keahlian, atau dana, yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dan program perpustakaan.
 - 3) Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya yang Ada: Pustakawan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan sumber daya yang ada, seperti koleksi, staf, dan fasilitas. Dengan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan, pustakawan dapat mengurangi pemborosan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien.
 - 4) Menerapkan Teknologi Terbuka: Penggunaan perangkat lunak dan sumber daya terbuka dapat membantu mengurangi biaya lisensi dan perangkat lunak. Pustakawan dapat memanfaatkan berbagai sumber daya terbuka yang tersedia, seperti sistem manajemen perpustakaan, platform pembelajaran online, dan basis data terbuka.
 - 5) Peningkatan Efisiensi Operasional: Menerapkan praktik manajemen yang efisien, seperti otomatisasi tugas-tugas rutin, penggunaan sistem manajemen perpustakaan yang terintegrasi, dan pelatihan staf yang efektif, dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas.
- Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, pustakawan dapat mengatasi keterbatasan anggaran dan tetap memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pengguna di era digital.

3.5.7 Pergeseran Nilai dan Ekspektasi Masyarakat

Perubahan nilai dan ekspektasi masyarakat terhadap perpustakaan menjadi tantangan signifikan di era digital. Masyarakat semakin mengharapkan layanan yang lebih personal, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Pustakawan perlu terus berinovasi dan mengembangkan layanan yang sesuai dengan harapan masyarakat, serta mengkomunikasikan

nilai dan relevansi perpustakaan secara efektif kepada publik. Hal ini sejalan dengan *Tren 1: "Libraries are increasingly seen as irrelevant in a changing world"* dalam IFLA Trend Report 2023, yang menunjukkan adanya persepsi bahwa perpustakaan semakin dipandang kurang relevan.

Selain itu, *Tren 2: "The world is going down a path that discounts the value of community-driven infrastructures, and of information for development"* juga relevan dengan tantangan ini. Tren ini menunjukkan adanya penurunan apresiasi terhadap infrastruktur berbasis komunitas, termasuk perpustakaan, serta informasi untuk pembangunan. Oleh karena itu, pustakawan perlu tidak hanya berinovasi dalam layanan, tetapi juga secara aktif mengadvokasi nilai dan peran perpustakaan dalam pembangunan masyarakat kepada para pemangku kepentingan dan publik.

3.5.8 Kurangnya Sumber Daya dan Dukungan

Keterbatasan sumber daya, jaringan pendukung, dan peluang pelatihan menjadi hambatan bagi pustakawan yang ingin lebih terlibat dalam inisiatif digital dan penelitian humaniora digital (Poole, 2017); Richardson dan Eichmann-Kalwara, 2017). Perpustakaan perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung pengembangan profesional pustakawan dan memfasilitasi kolaborasi lintas disiplin. Keterbatasan anggaran dapat menjadi kendala dalam pengadaan perangkat keras dan lunak yang diperlukan, serta dalam penyelenggaraan pelatihan dan lokakarya. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang humaniora digital di kalangan pustakawan juga dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi pendekatan ini. N. Amsaveni, P. Raja Rajeshwari, dan R.S. Jeya Suriya Dheva (2023) juga menemukan bahwa kurangnya pendanaan dan infrastruktur TIK menjadi hambatan dalam penerapan teknologi di perpustakaan, termasuk dalam konteks *open access* dan pelestarian digital.

Kurangnya kolaborasi antara pustakawan dan peneliti humaniora juga dapat menjadi kendala. Pustakawan mungkin kurang memahami kebutuhan dan metodologi penelitian humaniora digital, sementara peneliti humaniora mungkin kurang menyadari potensi sumber daya dan layanan yang dapat ditawarkan oleh perpustakaan. Oleh karena itu, penting untuk membangun kemitraan yang kuat antara kedua belah pihak untuk memastikan keberhasilan proyek humaniora digital. L. Radha, J. Arumugam, dan Mayank Trivedi (2023) menekankan pentingnya kolaborasi antara pustakawan dan fakultas dalam merancang kurikulum yang mendukung penerapan humaniora digital di perpustakaan akademik.

3.5.9 Konflik Identitas Profesional

Pergeseran peran dan praktik profesi pustakawan di era digital dapat memicu konflik identitas di kalangan pustakawan. Beberapa pustakawan mungkin merasa kesulitan untuk mendefinisikan diri mereka sebagai pustakawan tradisional atau sebagai praktisi humaniora digital (Richardson and Eichmann-Kalwara, 2017). Hal ini dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja pustakawan, serta menghambat pengembangan profesional mereka.

Krisis identitas merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pustakawan di era digital. B. Ramesh Babu (2023) menjelaskan bahwa pustakawan saat ini menghadapi krisis identitas akibat perubahan teknologi yang pesat. Transformasi dari perpustakaan tradisional menjadi perpustakaan digital menuntut pustakawan untuk menguasai keterampilan baru dan beradaptasi dengan peran yang terus berkembang. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai identitas dan nilai profesi pustakawan di era digital.

Selain itu, K. Veeranjanyulu (2023) juga menyoroti adanya kesenjangan antara lulusan IPI dengan kebutuhan pasar kerja. Kesenjangan ini dapat memperburuk krisis identitas yang dialami oleh pustakawan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk merestrukturisasi kurikulum pendidikan IPI agar lebih relevan dengan kebutuhan industri dan mempersiapkan lulusan untuk menghadapi perubahan teknologi.

Jais James dan Joseph I. Thomas (2023) menambahkan bahwa krisis identitas ini juga dapat diperparah dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran pustakawan di era digital oleh karena itu, penting bagi pustakawan untuk secara aktif mengkomunikasikan peran dan nilai mereka kepada masyarakat, serta menunjukkan bagaimana mereka dapat membantu masyarakat dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi di era digital.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan pustakawan untuk menghadapi tantangan ini antara lain:

1. Personalisasi Layanan: Menerapkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih personal, seperti rekomendasi buku berdasarkan minat pengguna, notifikasi tentang acara dan kegiatan yang relevan, serta layanan bantuan virtual yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
2. Peningkatan Relevansi Koleksi: Mengkaji ulang koleksi perpustakaan secara berkala dan memperbarui koleksi dengan sumber daya yang relevan dengan kebutuhan dan minat pengguna saat ini. Ini termasuk

menyediakan akses ke sumber daya digital seperti ebook, jurnal elektronik, dan basis data online.

3. Pengembangan Layanan Inovatif: Mengembangkan layanan baru yang inovatif dan menarik bagi pengguna, seperti ruang belajar kolaboratif, program literasi digital, lokakarya keterampilan, atau acara komunitas yang berfokus pada topik-topik yang relevan dengan masyarakat.
4. Komunikasi dan Pemasaran yang Efektif: Mengkomunikasikan nilai dan relevansi perpustakaan secara efektif kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti media sosial, situs web, buletin, dan acara-acara publik. Pustakawan perlu membangun citra perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran yang modern, relevan, dan inklusif.
5. Advokasi dan Kemitraan: Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti institusi pendidikan, komunitas lokal, dan sektor swasta, untuk meningkatkan dampak dan jangkauan layanan perpustakaan. Pustakawan juga perlu berperan aktif dalam mengadvokasi kepentingan perpustakaan dan pengguna perpustakaan kepada pembuat kebijakan.

Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, pustakawan dapat mengubah tantangan pergeseran nilai dan ekspektasi masyarakat menjadi peluang untuk memperkuat peran perpustakaan dalam masyarakat, meningkatkan relevansi layanan, dan memastikan keberlanjutan perpustakaan di era digital.

3.5.10 Isu Hak Cipta dan Akses Terbuka

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai tantangan baru dalam bidang kepustakawanan, terutama yang berkaitan dengan isu hak cipta dan akses terbuka. Dalam era digital, informasi dapat dengan mudah disalin, dibagikan, dan dimodifikasi, sehingga menimbulkan pertanyaan kompleks tentang kepemilikan, penggunaan, dan distribusi karya intelektual (Chidananda et al., 2023, hlm. 2210)

Undang-undang hak cipta, yang awalnya dirancang untuk melindungi karya cetak, kini harus beradaptasi dengan cepatnya perkembangan teknologi digital. Profesional informasi, termasuk pustakawan, perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang undang-undang hak cipta yang berlaku di wilayah mereka, serta implikasinya terhadap pengelolaan dan penyebaran informasi digital (Chidananda et al., 2023, hlm. 2210). Mereka harus mampu memberikan panduan yang jelas kepada pengguna tentang hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan informasi digital, serta memastikan bahwa hak-hak pemilik hak cipta tetap dihormati.

Salah satu isu penting yang muncul adalah akses terbuka terhadap informasi ilmiah dan penelitian. Gerakan akses terbuka mendorong agar hasil penelitian, terutama yang didanai oleh publik, dapat diakses secara bebas oleh masyarakat luas. Namun, hal ini seringkali bertentangan dengan kepentingan penerbit komersial yang mengandalkan penjualan jurnal dan akses berbayar untuk mendapatkan keuntungan (McKay, 2011, hlm. 251). Profesional informasi perlu terlibat dalam diskusi dan advokasi terkait akses terbuka, serta mencari solusi yang seimbang antara kepentingan peneliti, penerbit, dan masyarakat.

Selain itu, digitalisasi koleksi perpustakaan juga menimbulkan pertanyaan tentang hak cipta. Pustakawan harus memahami batasan-batasan hak cipta dalam mendigitalkan dan menyediakan akses ke koleksi digital, terutama untuk karya-karya yang masih dilindungi hak cipta. Mereka juga harus mempertimbangkan penggunaan lisensi Creative Commons atau mekanisme lain yang memungkinkan akses terbuka yang bertanggung jawab terhadap karya-karya tersebut.

Perkembangan teknologi digital juga memunculkan tantangan dalam penegakan hukum hak cipta. Pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan dan distribusi ilegal karya digital, semakin marak terjadi di era digital. Profesional informasi perlu bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak cipta, serta mengedukasi pengguna tentang pentingnya menghormati hak cipta.

Dalam menghadapi isu-isu hak cipta dan akses terbuka yang kompleks ini, profesional informasi perlu memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum hak cipta, teknologi digital, dan etika informasi. Mereka juga harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan perkembangan hukum yang terus berlangsung. Harapan kita adalah mereka dapat memastikan bahwa perpustakaan dan lembaga informasi lainnya dapat menyediakan akses yang seimbang dan bertanggung jawab terhadap informasi digital, sambil tetap melindungi hak-hak pemilik hak cipta.

4

Kode Etik Pustakawan

Kode etik merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme pustakawan. Sebagai pedoman perilaku, kode etik memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pustakawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, terutama dalam menghadapi dilema etika yang kompleks di era digital.

Kode etik pustakawan Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban terhadap masyarakat dan pengguna, kewajiban terhadap profesi, hingga kewajiban terhadap diri sendiri. Prinsip-prinsip utama dalam kode etik ini meliputi aksesibilitas informasi, kerahasiaan, netralitas, objektivitas, dan pengembangan profesional berkelanjutan.

Di era digital, penerapan kode etik pustakawan menghadapi tantangan baru, seperti privasi data, akses terbuka, dan penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Pustakawan perlu memahami dan mengantisipasi implikasi etika dari setiap tindakan mereka dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

Penegakan kode etik menjadi kunci untuk menjaga martabat dan profesionalisme pustakawan. Sanksi yang tegas dan adil perlu diterapkan bagi mereka yang melanggar kode etik, sementara mekanisme pelaporan dan penanganan kasus pelanggaran harus transparan dan efektif.

Pentingnya kode etik tidak hanya terletak pada perlindungan pengguna dan profesi, tetapi juga pada pengembangan kepribadian pustakawan itu sendiri. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, pustakawan dapat membangun kepercayaan publik, meningkatkan citra profesi, dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat.

4.1 Sejarah Singkat Kode Etik Pustakawan

Sejarah perkembangan kode etik pustakawan berawal dari masa Renaissance dan awal modern. Pada masa ini, perpustakaan pribadi dan perpustakaan yang mendukung institusi pendidikan, keagamaan, dan pemerintahan mulai berkembang. Pada akhir periode ini, muncul perpustakaan nasional yang biasanya didirikan untuk tujuan pendidikan dan pemeliharaan koleksi. (Davis & Shaw, 2017)

Pada awal abad ke-20, Plummer dan Bolton menekankan pentingnya kode etik dalam profesi pustakawan. Kode etik ini dipandang sebagai alat penting untuk menegaskan status profesional pustakawan, mendefinisikan identitas mereka sebagai lebih dari sekadar penjaga buku, merinci kewajiban mereka terhadap lembaga, staf, dan publik, serta menetapkan standar praktik etis yang diharapkan dari setiap pustakawan (Bolton, C. K., 1909)

Perkembangan kode etik pustakawan mencerminkan perubahan nilai dan tantangan yang dihadapi profesi ini dari waktu ke waktu. Kode etik pertama kali dibahas pada awal abad ke-20, namun baru diadopsi secara resmi oleh American Library Association (ALA) pada tahun 1938 (Lindsey & Prentice, 1985). Kode etik awal ini berfokus pada netralitas, layanan berkualitas, dan akses yang adil terhadap informasi.

Selama beberapa dekade, kode etik pustakawan terus berkembang seiring dengan perubahan lanskap sosial dan teknologi. Pada tahun 1981, kode etik direvisi untuk memasukkan prinsip-prinsip kebebasan intelektual dan kerahasiaan pengguna (ALA, 2019a). Pada tahun 1995, kode etik kembali direvisi untuk menekankan pentingnya keberagaman dan inklusi dalam layanan perpustakaan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mempengaruhi kode etik pustakawan. Pada tahun 2008, kode etik direvisi untuk memasukkan prinsip-prinsip terkait penggunaan teknologi secara etis, seperti menghormati hak cipta dan privasi pengguna dalam lingkungan digital (ALA, 2019a).

Selain ALA, organisasi profesi lain seperti Association for Information Science and Technology (ASIS&T) dan Society of American Archivists (SAA) juga memiliki kode etik dan pedoman profesional masing-masing. Kode etik ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh para profesional informasi, seperti integritas, objektivitas, dan tanggung jawab sosial.

4.2. Pengertian Kode Etik

Istilah kode etik berasal dari dua kata, yaitu "kode" dan "etik". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, "kode" diartikan sebagai "tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dan sebagainya); kumpulan peraturan yang bersistem; dan kumpulan prinsip yang bersistem" (KBBI, tanpa tahun a). Sementara itu, "etika" didefinisikan sebagai "ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)" (KBBI, tanpa tahun b). Dengan begitu, kode etik dapat diartikan sebagai "norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku"

Kode etik merupakan seperangkat aturan atau prinsip yang disepakati oleh suatu kelompok atau profesi tertentu untuk mengatur perilaku anggotanya. Tujuan dari kode etik adalah untuk menjaga profesionalisme anggota kelompok atau profesi tersebut, serta melindungi masyarakat dari praktik yang tidak etis atau tidak profesional. Kode etik juga berfungsi sebagai panduan bagi anggota profesi dalam menghadapi dilema etika dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

Menurut kamus daring *Merriam-Webster Dictionary* (2023), dalam bahasa Inggris, kata "ethics" memiliki beberapa arti:

- a. Seperangkat prinsip moral: teori atau sistem nilai moral (contoh: etika materialistik masa kini, etika kerja kuno). Sering digunakan dalam bentuk jamak, tetapi dapat berupa tunggal atau jamak dalam konstruksi (contoh: etika yang rumit, etika Kristen);
- b. Prinsip-prinsip perilaku yang mengatur individu atau kelompok (contoh: etika profesional);
- c. Kesadaran akan pentingnya moral (contoh: menempa etika konservasi);
- d. Filosofi pembimbing. (Plural) Kumpulan isu moral atau aspek (seperti kebenaran) (contoh: membahas etika kloning manusia). (Plural dalam bentuk, tetapi tunggal atau jamak dalam konstruksi): Disiplin yang berurusan dengan apa yang baik dan buruk serta dengan kewajiban dan tanggung jawab moral. (diakses pada 15 September 2024)

Dalam kamus daring *Britannica.com*, etika didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan dan keburukan, serta benar dan salah. Analisis etika adalah proses pemeriksaan dan penilaian tindakan atau perilaku seseorang berdasarkan prinsip-prinsip etika tersebut (Britannica, T. Editors of Encyclopaedia, 2023)

Sementara itu, pengertian "kode etik" dalam kamus daring *Merriam-Webster.com* adalah seperangkat prinsip moral atau profesional yang mengatur perilaku individu atau kelompok.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dalam Pasal 1 ayat (3) mendefinisikan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai ASN Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari

4.3 Karakteristik, Fungsi dan Tujuan Kode Etik Profesi

Kode etik profesi adalah seperangkat prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku individu dalam suatu profesi. Berdasarkan pandangan para ahli seperti Ritzer (1975), Millerson (1964), Greenwood (1957), Flexner (1915), dan Roddenberry (1953), karakteristik kode etik profesi meliputi:

1. Sebagai Panduan Moral dan Etika: Kode etik berfungsi sebagai acuan bagi para profesional dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai profesi, seperti yang ditekankan oleh Ritzer dalam pandangan Weber tentang doktrin atau pengetahuan umum sistematis.
2. Pengatur Perilaku dan Tindakan: Kode etik memberikan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh profesional, seperti yang dijelaskan oleh Millerson dalam poin tentang kepatuhan terhadap kode etik perilaku atau praktik.
3. Penjaga Integritas dan Profesionalisme: Kode etik memastikan para profesional menjunjung tinggi standar etika dan moral dalam praktik profesi mereka, sesuai dengan pandangan Greenwood dan Flexner tentang pentingnya kode etik dalam menjaga integritas dan profesionalisme.
4. Pembangun Kepercayaan Publik: Kode etik membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi dengan menunjukkan bahwa para profesional dapat dipercaya dan bertanggung jawab, seperti yang dijelaskan oleh Greenwood tentang otoritas yang diakui oleh klien dan dukungan komunitas.
5. Pencerminkan Nilai-nilai Profesi: Kode etik mencerminkan nilai-nilai dan standar etika yang dijunjung tinggi oleh suatu profesi, menjadi landasan praktik dan pengembangan profesi, seperti yang dijelaskan oleh Greenwood tentang budaya profesional yang dipertahankan oleh asosiasi profesional resmi.

Sedangkan fungsi kode etik profesi, berdasarkan pandangan para ahli tersebut, meliputi:

1. Membedakan Profesi dari Pekerjaan Lain: Kode etik menjadi salah satu ciri pembeda utama antara profesi dan pekerjaan non-profesional, seperti yang ditekankan oleh Ritzer, Millerson, Greenwood, dan Flexner.
2. Melindungi Kepentingan Publik: Kode etik berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dengan memastikan bahwa para profesional bertindak sesuai dengan standar etika dan profesional yang tinggi, seperti yang dijelaskan oleh Roddenberry tentang kewajiban untuk melindungi masyarakat dari praktik di bawah standar atau tidak etis.
3. Menjaga Kualitas Layanan: Kode etik membantu menjaga kualitas layanan yang diberikan oleh para profesional dengan mendorong mereka untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, seperti yang dijelaskan oleh Roddenberry tentang kewajiban untuk terus meningkatkan keterampilan dan secara bebas mengomunikasikan pengetahuan yang diperoleh.
4. Memperkuat Identitas dan Solidaritas Profesi: Kode etik membantu memperkuat identitas dan solidaritas di antara para profesional dengan menciptakan rasa kebersamaan dan komitmen terhadap nilai-nilai dan tujuan bersama, seperti yang dijelaskan oleh Roberts & Donahue tentang rasa kebersamaan dan perasaan kolegalitas.
5. Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan Profesi: Kode etik mendorong pertumbuhan dan pengembangan profesi dengan mendorong para profesional untuk terus belajar, berinovasi, dan meningkatkan standar praktik mereka, seperti yang dijelaskan oleh Johnson tentang badan penelitian lanjutan dan pengetahuan abstrak yang luas.

Berdasarkan hal tersebut, karakteristik dan fungsi kode etik profesi saling terkait dan berperan penting dalam membentuk identitas, integritas, dan kualitas suatu profesi.

4.4 Kode Etika berdasarkan Pandangan Islam

Dalam Islam, konsep etika memiliki padanan yang disebut *akhlaq*, yang seringkali diartikan sebagai moralitas. Namun, terdapat perbedaan antara pemahaman *akhlaq* dan etika dalam konteks Barat. Dalam kosakata Barat, istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan atau adat, sedangkan "moralitas" berasal dari bahasa Latin *mores* yang juga berarti kebiasaan atau adat. Perbedaan ini kemudian berkembang menjadi pemahaman bahwa etika lebih mengacu pada apa yang "tepat dan rasional,"

sementara moralitas lebih mengacu pada apa yang "umumnya dirasakan dan dilakukan" (Siddiqui, 1997)

Kata padanan etika dalam bahasa arab adalah akhlāq yang dimaknai dengan sikap dan tingkah laku yang dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam waktu lama, sehingga melekat dalam diri pemiliknya, dan membentuk kepribadiannya. Kata akhlāq tidak pernah digunakan dalam Al-Qur'an, tetapi untuk menunjuk pengertian "budi pekerti" Al-Qur'an menggunakan kata khuluq, dan merupakan satu satunya kata yang dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an. (Kemenag RI:2010.h.32).Konsep ini dalam Al-quran dinyatakan dalam al-Quran al -Karim "dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. (al- Qalam/68: 4).Dalam Kamus KBBI daring "Kata akhlak/*akh-lak*/" n budi pekerti; kelakuan(KBBI, tanpa tahun c)

4.4.1 Definisi Akhlak dalam Islam

Secara etimologis, akhlak (dalam bahasa Arab: الأخلاق, *al-akhlāq*, bentuk jamak dari *al-khuluq*) merujuk pada watak, tabiat, atau kebiasaan yang terbentuk melalui tindakan berulang hingga menjadi sifat yang melekat dalam diri seseorang. Al-Ghazali (1987) mendefinisikan akhlak sebagai ungkapan watak jiwa yang mapan, yang darinya perbuatan-perbuatan timbul dengan mudah dan tanpa susah payah, tanpa memerlukan pemikiran atau musyawarah. Akal dan hukum muncul dari watak tersebut, sehingga disebut akhlak yang baik. Sebaliknya, watak yang menghasilkan perbuatan buruk disebut sebagai sumber tingkah laku yang buruk (Al-Ghazali, 2013)

Sejalan dengan Al-Ghazali, Ahmad Amin dalam bukunya "Falsafatul-Akhlāq" (1967) juga mendefinisikan akhlak sebagai sikap dan tingkah laku yang terbangun melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu lama. Kebiasaan-kebiasaan ini melekat dalam diri seseorang dan membentuk kepribadiannya (Amin, 1967, h. 8).

Kedua definisi tersebut menyoroti pentingnya pembiasaan dalam pembentukan akhlak. Akhlak bukan sekadar tindakan tunggal, melainkan hasil dari latihan dan pengulangan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, akhlak mencerminkan kualitas jiwa seseorang yang tercermin dalam perbuatannya sehari-hari.

Kata "khuluq" dalam Al-Qur'an, yang diterjemahkan sebagai "akhlak" oleh Departemen Agama dan diartikan sebagai "budi pekerti" atau "kelakuan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki makna yang luas. Akhlak dapat mencakup perilaku terpuji maupun tercela, baik pada tingkat

individu maupun bangsa (Departemen Agama RI, tanpa tahun; KBBI, tanpa tahun e)

Dalam bahasa Arab, kata "etika" seringkali merujuk pada kepribadian yang mulia, perilaku yang baik, adat istiadat, atau sifat-sifat yang baik. Kata ini berasal dari akar kata "al-akhlaq" (الأخلاق), bentuk jamak dari "al-khuluq" (الخلق) yang berarti watak, tabiat, atau kebiasaan. Nisreen Al-Disi (2021) juga menegaskan bahwa "al-akhlaq" mengandung makna seperti kejujuran, kebiasaan, sifat yang baik, atau karakter

Dapat kita simpulkan baik "akhlak" maupun "etika" dalam konteks ini merujuk pada konsep yang serupa, yaitu kualitas moral dan perilaku seseorang yang terbentuk dari kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya.

Kata khuluq dalam ayat Al-Qur'an, "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ" (Surah Al-Qalam ayat 4), diterjemahkan oleh tim penerjemah Departemen Agama dengan akhlak, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan akhlak dengan budi pekerti atau kelakuan. Jika akhlak dimaknai seperti itu, maka ia dapat mengandung pengertian akhlak yang terpuji dan akhlak yang tidak terpuji, akhlak individu dan akhlak bangsa (yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat).

Menurut kamus al-Munjid, kata 'etika' dalam bahasa Arab (الأخلاق, *al-akhlāq*) sering kali mengacu pada kepribadian yang mulia, perilaku yang baik, adat istiadat, atau sifat-sifat yang baik. Nisreen Al-Disi (2021) juga mengemukakan bahwa kata "الأخلاق" (*akhlāq*) adalah bentuk jamak dari kata "خلق" (*khuluq*) yang mengandung arti seperti kejujuran, kebiasaan, sifat yang baik, atau karakter

4.4.2 Aspek-aspek Akhlak dan Jenis-jenis Akhlak dalam Islam

Siddiqui (1997) menguraikan empat aspek fundamental yang membentuk kerangka etika dalam Islam, yaitu: *iman*, *islam*, *taqwa*, dan *ihsan*. Iman, sebagai pondasi utama, merujuk pada keyakinan yang kokoh terhadap Allah dan ajaran-Nya, yang menjadi dasar dari segala tindakan dan perilaku manusia. Islam, sebagai perwujudan praktis dari iman, tercermin dalam ibadah dan kepatuhan terhadap syariat. Taqwa, yang berarti kesadaran akan kehadiran Allah dan rasa takut akan azab-Nya, mendorong manusia untuk menjauhi larangan dan melaksanakan perintah-Nya. Puncak dari etika Islam adalah ihsan, yaitu berbuat baik dengan tulus ikhlas seolah-olah melihat Allah atau merasa dilihat oleh-Nya.

Selain aspek-aspek Akhlak, Al-Disi (2021) mengklasifikasikan akhlak menjadi dua jenis yang berbeda: akhlak bawaan (*akhlaq jibilliyah*) dan akhlak yang diperoleh (*akhlaq mukhtasah*). Akhlak bawaan merupakan

sifat-sifat yang telah tertanam dalam jiwa manusia sejak lahir, seperti naluri mempertahankan diri dan mencari kebahagiaan. Sementara itu, akhlak yang diperoleh terbentuk melalui proses pembelajaran dan interaksi sosial, meliputi kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pemahaman tentang konsep etika dalam Islam dan berbagai aspeknya dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan kode etik profesi pustakawan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Integrasi nilai-nilai akhlak dalam Kode Etik Pustakawan memiliki implikasi yang krusial dalam membentuk profesionalisme pustakawan. Beberapa nilai akhlak yang relevan dengan Kode Etik Pustakawan antara lain:

1. Amanah (Kepercayaan): Pustakawan sebagai penjaga dan penyedia akses informasi harus menjunjung tinggi amanah dalam mengelola koleksi, menjaga kerahasiaan informasi pengguna, dan memastikan integritas informasi yang disampaikan.
2. Adil: Pustakawan harus bersikap adil dalam memberikan layanan kepada semua pengguna tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan persamaan hak dan perlakuan.
3. Jujur: Kejujuran merupakan nilai fundamental dalam Islam. Pustakawan harus menyampaikan informasi yang akurat dan tidak memihak, serta menghindari plagiarisme dan segala bentuk manipulasi informasi.
4. Bertanggung Jawab: Pustakawan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam menjalankan tugas profesional. Mereka harus berupaya memberikan layanan terbaik kepada pengguna dan bertanggung jawab atas dampak dari informasi yang mereka sediakan.
5. Ikhlas: Dalam Islam, ikhlas berarti melakukan suatu perbuatan semata-mata karena Allah. Pustakawan yang bekerja dengan ikhlas akan memberikan layanan dengan tulus dan sepenuh hati, tanpa pamrih atau mengharapkan imbalan materi semata.
6. Tawadhu (Rendah Hati): Kesombongan merupakan sifat yang tercela dalam Islam. Pustakawan harus bersikap rendah hati, menghargai pendapat dan kontribusi orang lain, serta senantiasa belajar dan mengembangkan diri.

Penerapan nilai-nilai akhlak dalam profesi pustakawan akan memberikan dampak positif yang signifikan, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Layanan: Pustakawan yang berakhlak akan memberikan layanan yang lebih baik, ramah, dan profesional kepada pengguna.
2. Membangun Kepercayaan: Akhlak yang baik akan membangun kepercayaan pengguna terhadap pustakawan dan institusi perpustakaan secara keseluruhan.
3. Meningkatkan Citra Profesi: Pustakawan yang berakhlak akan meningkatkan citra profesi pustakawan di mata masyarakat, sehingga profesi ini semakin dihargai dan dihormati.

Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif: Akhlak yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, saling menghargai, dan produktif, sehingga meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja pustakawan

4.4.3 Karakteristik Profesi Pustakawan Berdasarkan Perspektif Islam

Seorang pustakawan profesional dalam perspektif Islam memiliki karakteristik yang berakar pada nilai-nilai luhur agama. Karakteristik ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga menjadi cerminan akhlak mulia seorang muslim.

1. Amanah (Kepercayaan): Kepercayaan adalah pondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai pustakawan. Integritas dalam mengelola koleksi, menjaga kerahasiaan informasi pengguna, dan menjamin keakuratan informasi merupakan amanah yang harus dijaga. Rasulullah ﷺ mengingatkan dalam sabdanya:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

Artinya: "Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika dipercaya dia berkhianat." (HR Al-Bukhari no. 2682 dan Muslim no. 59)

Pentingnya amanah juga ditegaskan dalam hadis lain:

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحْفَظَ أَمْ ضَيَّعَ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

Artinya: "Allah SWT akan mempertanyakan semua orang yang memegang amanah atas amanah yang ia tanggung, apakah ia memeliharanya atau menyia-nyiakannya? Hingga Allah SWT akan mempertanyakan seseorang pada keluarganya." (HR. Muslim)

2. Adil: Keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam. Pustakawan harus memberikan layanan yang sama kepada semua pengguna tanpa diskriminasi, sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ:

- إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَعَلَّ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ - وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang adil itu berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya di samping kanan Ar-Rahman, (sementara) kedua tangan-Nya adalah kanan. (Mereka) adalah orang-orang yang berlaku adil dalam memutuskan perkara, terhadap keluarga mereka, dan terhadap apa saja yang mereka urus." (HR. Muslim)

3. Jujur: Kejujuran adalah landasan akhlak mulia dalam Islam. Pustakawan harus menyampaikan informasi yang akurat, tidak memihak, dan menghindari segala bentuk manipulasi informasi. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya: "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur, akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian dusta, karena dusta akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan membiasakan diri berdusta, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Bertanggung Jawab: Pustakawan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam menjalankan tugas profesional. Mereka harus berupaya memberikan layanan terbaik kepada pengguna dan bertanggung jawab atas dampak dari informasi yang mereka sediakan. Seperti dalam hadis riwayat Anas RA:

إِنَّ اللَّهَ سَائِلُ كُلِّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَغْنَاهُ أَحْفَظَ أَمْ ضَيَّعَ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

Artinya: "Allah SWT akan mempertanyakan semua orang yang memegang amanah atas amanah yang ia tanggung, apakah ia

memeliharanya atau menyia-nyiakannya? Hingga Allah SWT akan mempertanyakan seseorang pada keluarganya." (HR. Muslim)

5. Ikhlas: Ikhlas adalah bekerja dengan niat semata-mata karena Allah. Pustakawan harus memberikan layanan dengan tulus dan sepenuh hati, tanpa pamrih atau mengharapkan imbalan materi semata. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai) bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat (menilai) keikhlasan hatimu". (HR. Muslim)

6. Tawadhu (Rendah Hati): Kerendahan hati adalah sifat mulia yang harus dimiliki seorang pustakawan. Menghargai pendapat orang lain, terus belajar, dan tidak merasa diri paling tahu akan menciptakan hubungan yang baik dengan pengguna dan rekan kerja. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ

Artinya: "Siapa yang tawadhu' (rendah hati) karena Allah, maka Allah akan mengangkat (derajat)nya (di dunia dan akhirat), dan siapa yang sombong maka Allah akan merendharkannya."

Karakteristik-karakteristik ini tidak hanya menjadi tuntutan profesi, tetapi juga jalan untuk meraih ridha Allah dan mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan memiliki karakteristik-karakteristik tersebut, pustakawan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat.

4.4.4 Fungsi Kode Etik perspektif Islam

Dalam Islam, kode etik memiliki fungsi yang sangat penting dalam membimbing perilaku dan tindakan manusia agar sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan agama. Kode etik berperan sebagai pedoman moral yang membantu individu dan kelompok dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Dalam konteks kepustakawanan, kode etik berfungsi sebagai:

1. Pedoman Perilaku Profesional: Kode etik memberikan panduan jelas tentang perilaku yang diharapkan dari seorang pustakawan dalam menjalankan tugasnya. Ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, integritas, objektivitas, dan pelayanan yang adil kepada semua pengguna perpustakaan. Konsep ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali tentang

akhlak sebagai cerminan jiwa yang menghasilkan perbuatan baik, yang dalam hal ini tercermin dalam perilaku profesional pustakawan.

2. **Penjaga Integritas Profesi:** Kode etik membantu menjaga martabat dan integritas profesi pustakawan dengan menetapkan standar etika yang tinggi. Ini mencegah praktik-praktik yang tidak etis, seperti plagiarisme, penyalahgunaan informasi, atau diskriminasi terhadap pengguna. Ahmad Amin menekankan pentingnya pembentukan akhlak melalui kebiasaan yang konsisten, yang dalam konteks ini berarti menegakkan standar etika secara terus-menerus untuk menjaga integritas profesi.
3. **Perlindungan Pengguna dan Koleksi:** Kode etik memastikan bahwa pustakawan melindungi hak-hak pengguna perpustakaan, termasuk hak atas privasi dan akses informasi yang adil. Selain itu, kode etik juga menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan koleksi perpustakaan sebagai warisan budaya dan sumber pengetahuan.
4. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Dengan berpegang pada kode etik, pustakawan akan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Ini berarti memberikan informasi yang akurat dan relevan, membantu pengguna menemukan sumber daya yang mereka butuhkan, dan menciptakan lingkungan perpustakaan yang ramah dan inklusif. Pemikiran Dr. Nisreen Al-Disi tentang akhlak yang diperoleh melalui proses belajar dan interaksi dengan lingkungan relevan di sini, karena pustakawan dapat terus mengembangkan akhlak profesional mereka melalui pembelajaran dan pengalaman.
5. **Pembentukan Reputasi dan Kepercayaan:** Kode etik yang dijalankan dengan baik akan membangun reputasi positif bagi pustakawan dan institusi perpustakaan. Kepercayaan publik terhadap perpustakaan akan meningkat, dan ini akan berdampak pada peningkatan pemanfaatan layanan perpustakaan.

Dengan memahami fungsi kode etik dan mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam praktik keprofesionalan, pustakawan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat dan mewujudkan visi perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan sumber daya informasi yang terpercaya.

4.5 Kode Etik Pustakawan berdasarkan Organisasi Profesi

Organisasi profesi di seluruh dunia memiliki peran penting dalam merumuskan dan menegakkan standar etika bagi para anggotanya. Dalam konteks keprofesionalan, berbagai organisasi profesi telah mengembangkan kode etik yang menjadi pedoman bagi pustakawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kode etik ini tidak hanya mencerminkan nilai-

nilai luhur profesi, tetapi juga memberikan kerangka kerja untuk menghadapi dilema etika yang mungkin muncul dalam praktik sehari-hari.

Pada bagian ini, kita akan menjelajahi beberapa contoh kode etik pustakawan yang diadopsi oleh organisasi profesi terkemuka di berbagai negara. Penting untuk dicatat bahwa pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi komprehensif, melainkan sebagai sampel representatif dari berbagai pendekatan dalam merumuskan kode etik pustakawan.

Kita akan mulai dengan menelaah Kode Etik Pustakawan dan Profesional Informasi yang diterbitkan oleh IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), sebuah organisasi internasional yang mewadahi asosiasi perpustakaan dan lembaga informasi dari seluruh dunia. Selanjutnya, kita akan membahas kode etik yang diadopsi oleh American Library Association (ALA) dan Australian Library and Information Association (ALIA), dua organisasi profesi terkemuka di Amerika Serikat dan Australia. Selain itu, kita juga akan melihat kode etik yang berlaku di Filipina dan Indonesia, untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kode etik pustakawan diterapkan dalam konteks yang berbeda.

Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana berbagai organisasi profesi merumuskan prinsip-prinsip etika yang relevan dengan konteks lokal dan global, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kode etik tersebut dalam praktik sehari-hari.

4.5.1 Kode Etik Pustakawan dan Profesional Informasi berdasarkan IFLA

Kode Etik IFLA dituangkan dalam dokumen yang berjudul “IFLA code of ethics for librarians and other information workers” untuk pustakawan dan tenaga informasi lainnya, yang disetujui oleh Dewan Pengurus IFLA pada Agustus 2012, adalah seperangkat pedoman etika komprehensif untuk para profesional di bidang perpustakaan dan informasi. Kode etik ini bertujuan untuk memberikan panduan etika bagi pustakawan dan tenaga informasi, serta sebagai pertimbangan bagi Asosiasi Perpustakaan dan Informasi dalam pembuatan atau revisi kode etik mereka sendiri (Garcia-Febo, et.al, 2012)

Preambul kode etik ini mengakui pentingnya hak asasi manusia, terutama hak akses terhadap informasi dan kebebasan berekspresi, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kode etik ini mencerminkan komitmen

pustakawan dan tenaga informasi terhadap prinsip-prinsip etika yang mendorong akses terhadap informasi, inklusi, dan penghargaan terhadap hak-hak individu.

Kode etik profesi pustakawan dan tenaga informasi memiliki beberapa tujuan utama yang esensial. Pertama, kode etik ini mendorong para profesional untuk melakukan refleksi mendalam terhadap prinsip-prinsip etika yang mendasari pekerjaan mereka. Kode etik ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai panduan moral yang membantu mereka dalam merumuskan kebijakan dan menghadapi dilema etika yang mungkin muncul dalam praktik profesional mereka.

Kedua, kode etik ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran diri profesional. Melalui kode etik, pustakawan dan tenaga informasi diingatkan akan nilai-nilai etika yang harus mereka junjung tinggi dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Kesadaran diri profesional ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh para profesional selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang kuat.

Ketiga, kode etik ini bertujuan untuk menciptakan transparansi antara pustakawan dan tenaga informasi dengan pengguna layanan dan masyarakat luas. Transparansi ini mencerminkan komitmen para profesional untuk menjalankan tugas mereka dengan jujur, adil, dan sesuai dengan standar etika yang tinggi. Dengan begitu, masyarakat dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap layanan yang diberikan oleh pustakawan dan tenaga informasi.

Kode etik profesi pustakawan dan profesional informasi juga mencakup prinsip-prinsip kunci yang mendasari praktik profesional mereka:

1. Akses terhadap Informasi: Pustakawan dan tenaga informasi berkomitmen untuk memastikan akses terhadap informasi bagi semua orang, mempromosikan perkembangan pribadi, pendidikan, pengayaan budaya, dan partisipasi demokratis. Mereka menentang sensor dan berupaya menyediakan akses gratis atau dengan biaya rendah ke layanan mereka, memastikan bahwa individu yang kurang beruntung secara sosial tidak terpingkirkan.
2. Tanggung Jawab terhadap Individu dan Masyarakat: Pustakawan dan tenaga informasi berupaya memberikan akses informasi yang adil dan setara tanpa memandang faktor seperti usia, kewarganegaraan, kemampuan fisik, identitas gender, dan lainnya. Mereka mendukung hak komunitas berbahasa minoritas untuk mengakses informasi dalam

bahasa mereka sendiri dan mempromosikan literasi informasi dan penggunaan etis informasi.

3. Privasi, Kerahasiaan, dan Transparansi: Kode etik ini menekankan pentingnya menghormati privasi pribadi dan melindungi data pribadi yang dibagikan antara individu dan lembaga. Hubungan antara pengguna perpustakaan dan pustakawan ditandai dengan kerahasiaan. Selain itu, pustakawan mendukung transparansi dalam pemerintahan, administrasi, dan bisnis, mengakui pentingnya pengungkapan pelanggaran kerahasiaan oleh "pengungkap" yang disebut.
4. Akses Terbuka dan Hak Kekayaan Intelektual: Pustakawan berusaha memberikan akses terbaik kepada informasi dan gagasan dalam berbagai media atau format. Ini mencakup dukungan terhadap prinsip-prinsip akses terbuka, sumber terbuka, dan lisensi terbuka. Pustakawan berupaya mendapatkan persyaratan terbaik untuk akses kepada karya demi kepentingan pengguna. Mereka juga berperan sebagai mitra bagi penulis, penerbit, dan pencipta karya yang dilindungi hak cipta. Pustakawan berjuang untuk pembatasan dan pengecualian hak cipta yang sesuai untuk perpustakaan.
5. Netralitas, Integritas Pribadi, dan Keterampilan Profesional: Pustakawan tunduk pada netralitas dalam pengumpulan, akses, dan layanan informasi, membedakan antara keyakinan pribadi dan tugas profesional. Mereka berusaha mencapai keunggulan dalam profesi mereka dan menjunjung standar pelayanan tertinggi.
6. Hubungan Sesama dan Hubungan Pimpinan /Karyawan: Pustakawan memperlakukan sesama dengan adil dan hormat. Mereka menentang diskriminasi dalam segala aspek ketenagakerjaan berdasarkan usia, kewarganegaraan, keyakinan politik, kemampuan fisik atau mental, gender, status perkawinan, asal, ras, agama, atau orientasi seksual. Pustakawan berupaya mempromosikan pembayaran dan manfaat yang sama bagi laki-laki dan perempuan yang menduduki pekerjaan yang setara. Mereka berbagi pengalaman profesional dengan rekan kerja dan membantu serta membimbing profesional baru untuk memasuki komunitas profesional dan mengembangkan keterampilan mereka. Pustakawan memberikan kontribusi pada kegiatan asosiasi profesional mereka dan berpartisipasi dalam penelitian dan publikasi tentang masalah profesional. (IFLA,2012)

Kode etik ini berfungsi sebagai kerangka dasar untuk perilaku etis dalam bidang perpustakaan dan informasi. Ini mengakui sifat dinamis pertimbangan etis dan perlunya adaptasi sesuai dengan masyarakat dan konteks yang berbeda. Pustakawan dan tenaga informasi didorong untuk

menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik profesional mereka dan terus mengkaji dan memperbarui ketika diperlukan

4.5.2 Kode Etik Pustakawan berdasarkan ALA

Meskipun diterbitkan oleh American Library Association (ALA), prinsip-prinsip dalam Kode Etik Pustakawan memiliki relevansi universal, termasuk dalam konteks kepustakawanan di Indonesia. Prinsip-prinsip ini dapat diadaptasi dan diaplikasikan untuk memastikan layanan perpustakaan yang berkualitas, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan berkontribusi pada perkembangan masyarakat

4.5.1 Kode Etik Pustakawan berdasarkan ALA (terjemahan tidak resmi)

Kode Etik ALA (American Library Association) adalah pedoman yang menerjemahkan nilai-nilai kebebasan intelektual dalam profesi kepustakawanan menjadi prinsip-prinsip konkret. Prinsip-prinsip ini, yang dirangkum dalam terjemahan tidak resmi berikut, berfungsi sebagai kerangka kerja bagi pustakawan dan individu yang bekerja di perpustakaan dalam menghadapi situasi yang melibatkan konflik etika.

1. Pelayanan Prima: Pustakawan berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada semua pengguna perpustakaan. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan sumber daya yang sesuai dan terorganisir, kebijakan layanan yang adil, akses yang merata, serta respons yang akurat, tidak bias, dan sopan terhadap semua permintaan.
2. Kebebasan Intelektual: Pustakawan menjunjung tinggi prinsip kebebasan intelektual dan menolak segala bentuk penyensoran terhadap sumber daya perpustakaan.
3. Privasi dan Kerahasiaan: Pustakawan melindungi hak privasi dan kerahasiaan setiap pengguna perpustakaan terkait informasi yang dicari, diterima, atau dipinjam.
4. Hak Kekayaan Intelektual: Pustakawan menghormati hak kekayaan intelektual dan berupaya menyeimbangkan kepentingan pengguna informasi dengan pemegang hak.
5. Rasa Hormat dan Keadilan: Pustakawan memperlakukan rekan kerja dan kolega dengan rasa hormat, keadilan, dan itikad baik. Mereka juga mendukung kondisi kerja yang melindungi hak dan kesejahteraan semua karyawan.
6. Menghindari Konflik Kepentingan: Pustakawan tidak memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan pengguna, kolega, atau lembaga tempat mereka bekerja.

7. Profesionalisme: Pustakawan membedakan antara keyakinan pribadi dan tugas profesional, serta tidak membiarkan keyakinan pribadi mengganggu netralitas dalam menjalankan tugas.
8. Pengembangan Diri: Pustakawan berkomitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, serta mendorong pengembangan profesional rekan kerja dan calon pustakawan untuk mencapai keunggulan dalam profesi.
9. Keadilan Sosial: Pustakawan menjunjung tinggi martabat dan hak setiap individu. Mereka berkomitmen untuk melawan bias, ketidakadilan, dan penindasan, serta meningkatkan keragaman, inklusi, dan keadilan sosial di perpustakaan dan komunitas yang mereka layani.

Prinsip-prinsip ini, yang dirangkum dalam terjemahan tidak resmi ini, mencerminkan nilai-nilai inti profesi kepustakawanan dan memberikan panduan etis bagi pustakawan dalam menjalankan tugas mereka (ALA, 2023)

4.5.3 Kode Etik Pustakawan berdasarkan ALIA

Australian Library and Information Association (ALIA) memiliki sepuluh prinsip dalam Kebijakan Perilaku Profesional ALIA yang menjadi panduan bagi para pustakawan dan profesional layanan perpustakaan. Sepuluh prinsip mencakup:

1. Mendorong dan mendukung kebebasan intelektual serta aliran informasi dan gagasan yang bebas.
2. Menjalankan tugas pemeliharaan untuk rekan kerja dan komunitas mereka.
3. Mengakui dan menghormati kekayaan intelektual orang lain.
4. Melindungi privasi dan kerahasiaan informasi pribadi, serta hak individu untuk mengakses informasi mereka sendiri.
5. Membedakan dan memisahkan dalam tindakan dan pernyataan mereka antara sudut pandang pribadi mereka dan sudut pandang pemberi kerja mereka atau organisasi lain tempat mereka berafiliasi.
6. Memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian profesional mereka, mendorong pengembangan profesional rekan kerja mereka, dan memupuk aspirasi calon profesional layanan perpustakaan dan informasi.
7. Membantu individu dan komunitas mereka untuk memahami cara paling efektif untuk mendapatkan akses ke informasi yang otentik.
8. Menolak dan menghindari konflik kepentingan yang sebenarnya, yang dirasakan, atau yang potensial antara peran profesional mereka dan kepentingan pribadi mereka.

9. Mendukung tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan praktik berbasis bukti.
10. Mempromosikan inklusi yang memungkinkan, di mana semua individu diperlakukan secara adil, sopan santun, dengan martabat, dan rasa hormat, serta bebas dari perundungan, pelecehan, dan diskriminasi (ALIA. (2001, 2007, 2018))

Kebijakan Perilaku Profesional ALIA memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa para profesional di bidang layanan perpustakaan dan informasi menjalankan tugas mereka dengan integritas dan etika yang tinggi, serta demi kepentingan publik. Ini adalah kerangka kerja yang membantu menjaga standar profesional yang tinggi dalam profesi tersebut.

4.5.4 Kode Etik Ikatan Pustakawan Filipina

Kode Etik Pustakawan Filipina merupakan kerangka kerja yang komprehensif yang menggarisbawahi prinsip-prinsip etika dan standar perilaku yang diharapkan dari para profesional perpustakaan di Filipina (Nera, Almeior, & Peralejo, 2006, hal. 3). Kode etik ini menyentuh berbagai aspek peran pustakawan, termasuk hubungan mereka dengan masyarakat, negara, profesi, rekan sejawat, pengguna layanan, dan pihak eksternal seperti pemasok dan penerbit.

Pertama-tama, kode etik ini menegaskan peran penting pustakawan dalam masyarakat Filipina. Pustakawan tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan akses ke sumber daya informasi, tetapi juga berperan aktif dalam mempromosikan literasi, pendidikan, dan pelestarian warisan budaya bangsa. Mereka diharapkan untuk menjunjung tinggi hak atas informasi, mematuhi undang-undang hak kekayaan intelektual, dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang berpengetahuan dan berbudaya.

Selain itu, kode etik ini juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam praktik kepustakawanan. Pustakawan diharapkan untuk menjunjung tinggi martabat profesi mereka, menjaga reputasi yang baik, dan terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Mereka juga diharapkan untuk memperlakukan rekan sejawat dengan hormat dan saling mendukung, serta menghindari segala bentuk persaingan yang tidak sehat atau praktik yang tidak etis.

Selanjutnya, kode etik ini juga memberikan perhatian khusus pada hubungan pustakawan dengan pengguna layanan. Pustakawan diamanatkan

untuk memberikan layanan yang responsif, tidak memihak, dan menghormati privasi semua pengguna, tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi mereka. Mereka juga diharapkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama layanan profesional dan melindungi hak privasi pengguna.

Terakhir, kode etik ini juga mengatur interaksi pustakawan dengan pihak eksternal, seperti pemasok, penerbit, dan penjual. Pustakawan diharapkan untuk bertindak secara profesional dan transparan dalam semua transaksi bisnis, menghindari konflik kepentingan, dan menolak segala bentuk gratifikasi pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan profesional mereka.

Berdasarkan hal tersebut, Kode Etik Pustakawan Filipina berfungsi sebagai pedoman penting bagi pustakawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara etis dan profesional. Kode etik ini tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga memperkuat peran pustakawan sebagai agen perubahan sosial dan pelayan publik yang berkomitmen untuk memajukan masyarakat dan bangsa.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip yang diuraikan di atas, berikut adalah terjemahan lengkap Kode Etik Pustakawan Filipina ke dalam terjemahan tidak resmi ke dalam Bahasa Indonesia

Kode Etik Pustakawan Filipina

Pembuka

Pustakawan, menyadari peran mereka dalam pengembangan pengetahuan dan budaya serta pengayaan kehidupan masyarakat, mengupayakan standar perilaku etis tertinggi dalam hubungan mereka dengan sekolah, klien/pemberi kerja, profesi dan rekan pustakawan, lembaga dan asosiasi, serta masyarakat umum.

1. Pustakawan dengan Negara, Masyarakat, dan Publik
 - 1.1. Pustakawan menjunjung tinggi Konstitusi, mematuhi hukum negara, dan menghormati otoritas yang sah.
 - 1.2. Pustakawan mempromosikan literasi dan pendidikan publik dengan membuat sumber daya dan layanan perpustakaan diketahui dan dapat diakses oleh penggunanya.

- 1.3. Pustakawan menjunjung tinggi dan mempromosikan hak atas informasi serta mematuhi ketentuan undang-undang hak kekayaan intelektual.
- 1.4. Pustakawan menjadi mitra masyarakat yang mereka layani dalam menanamkan nasionalisme, mempraktikkan nilai-nilai Filipina, dan melestarikan warisan sejarah, budaya, dan intelektual negara.
2. Pustakawan dengan Profesi Kepustakawanan
 - 2.1. Pustakawan menjunjung tinggi martabat dan integritas profesi.
 - 2.2. Pustakawan menjaga reputasi mereka tetap terhormat dan berperilaku untuk mendapatkan penghargaan dan rasa hormat publik terhadap perpustakaan dan profesi mereka.
 - 2.3. Pustakawan tidak membantu praktik kepustakawanan yang tidak sah.
 - 2.4. Pustakawan memperlakukan satu sama lain dengan hormat, sopan santun, dan ketulusan, serta menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi, kompetensi, dan kemampuan rekan mereka. Mereka tidak menggunakan cara yang tidak adil untuk mendapatkan kemajuan profesional.
 - 2.5. Pustakawan berusaha untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi profesional mereka melalui cara-cara formal dan informal.
 - 2.6. Pustakawan berusaha menjunjung standar tertinggi dalam praktik profesi mereka. Mereka mengadopsi dan menghayati moto: CAN I - Constant and Never-ending Improvement (Peningkatan Kualitas dan Standar Layanan Profesional yang Konstan dan Tanpa Henti).
 - 2.7. Pustakawan mematuhi prinsip-prinsip proses yang adil dan kesetaraan kesempatan dalam hubungan mereka dengan rekan kerja, terutama sesama pustakawan.
 - 2.8. Pustakawan mempertahankan keanggotaan, berpartisipasi, dan bekerja sama dalam upaya asosiasi perpustakaan untuk meningkatkan efektivitas profesi.
 - 2.9. Pustakawan berpartisipasi dan bekerja sama dalam semua upaya asosiasi perpustakaan untuk meningkatkan efektivitas profesi.
 - 2.10. Pustakawan waspada dalam melindungi semua sumber daya perpustakaan yang ditempatkan di bawah perawatan mereka.
 - 2.11. Pustakawan berhak atas biaya yang adil dan wajar untuk konsultasi dan layanan profesional lainnya

3. Pustakawan dengan Pemasok, Penerbit, Penjual, dll.

- 3.1. Pustakawan memilih pemasok dan penerbit secara eksklusif berdasarkan kualitas barang, biaya, dan layanan.
- 3.2. Pustakawan menolak semua gratifikasi pribadi.
- 3.3. Pustakawan tidak pernah terlibat dalam transaksi bisnis yang merugikan perpustakaan tetapi menguntungkan kepentingan mereka sendiri.

4. Pustakawan dengan Klien dan/atau Pengguna Layanan Profesional Lainnya

- 4.1. Pustakawan memberikan tanggapan yang sopan, cepat, memadai, terampil, dan akurat terhadap semua permintaan bantuan.
- 4.2. Pustakawan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama layanan profesional. Mereka melindungi hak privasi klien terkait informasi yang dicari atau diterima serta materi yang dikonsultasikan, dipinjam, atau diperoleh melalui perpustakaan.
- 4.3. Pustakawan memberikan layanan yang tidak memihak kepada semua pengguna perpustakaan tanpa memandang ras, keyakinan, usia, jenis kelamin, atau status sosial mereka.
- 4.4. Pustakawan menolak hadiah atau bantuan dari klien dan pemasok perpustakaan untuk kepentingan pribadi. Mereka menghindari penggunaan sumber daya perpustakaan yang dapat merugikan layanan yang diberikan perpustakaan kepada penggunanya.

Tindakan Disipliner

Pustakawan Terdaftar yang terbukti melanggar ketentuan dalam Kode Etik ini oleh Dewan setelah dilakukan penyelidikan akan dikenakan tindakan disipliner berupa pencabutan Sertifikat Registrasi atau penangguhannya, yang akan diberlakukan oleh Dewan setelah dilakukan penyelidikan yang semestinya.

Klausula Pemisahan

Ketentuan atau bagian dari Kode Etik ini yang dinyatakan oleh Pengadilan sebagai tidak konstitusional, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan tidak akan mempengaruhi konstitusionalitas, keabsahan, dan keberlakuan ketentuan lainnya (Ditetapkan di kota Manila pada tanggal 13 September 2006)

4.5.5 Kode Etik Ikatan Pustakawan Malaysia (Terjemahahn Tidak Resmi)

Persatuan Pustakawan Malaysia (Librarians Association of Malaysia)

Pembukaan

Tujuan penyusunan kode etik bagi Pustakawan adalah untuk membantu menetapkan standar perilaku profesional yang diharapkan dari anggota, sejalan dengan tujuan dan sasaran Asosiasi. Kode etik ini juga akan membantu mengatur perilaku profesional dalam hal menjaga kepentingan masyarakat yang dilayani.

Pustakawan memiliki pengaruh atau kendali yang signifikan terhadap pemilihan, pengorganisasian, pelestarian, dan penyebaran informasi. Mereka dipercayakan dengan tanggung jawab untuk menyediakan akses informasi kepada klien mereka. Oleh karena itu, kode etik sangat penting dalam menentukan tanggung jawab profesional mereka.

Kebijakan Informasi Nasional yang dirumuskan pada tahun 1989 memberikan kerangka kerja untuk memandu arus informasi yang bebas ke semua sektor masyarakat Malaysia. Namun, kebijakan ini tidak mencakup peran dan tanggung jawab pustakawan dalam penyediaan layanan informasi, mungkin ini mencerminkan citra "rendah" yang diberikan kepada pustakawan di negara ini. Kode etik tertulis untuk memandu perilaku profesional mereka tentu akan membantu meningkatkan citra profesional pustakawan.

Kode Etik

Pustakawan harus menjunjung tinggi dan mempertahankan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konstitusi Persatuan Pustakawan Malaysia. Selain itu, mereka juga harus:

1. Menyediakan layanan tingkat tertinggi kepada pengguna perpustakaan melalui sumber daya yang sesuai dan terorganisir dengan baik, kebijakan layanan yang adil, serta respons yang akurat, tidak bias, dan sopan terhadap semua permintaan.
2. Berusaha untuk mencapai keunggulan dalam profesi dengan mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka, dan tetap mengikuti perkembangan dalam bidang kepustakawanan.
3. Menjunjung tinggi prinsip kebebasan intelektual dan mengizinkan pengguna untuk memiliki akses yang bebas dan setara ke sumber informasi tanpa diskriminasi, dalam batas-batas hukum.
4. Melindungi hak privasi dan kerahasiaan pengguna perpustakaan sehubungan dengan informasi yang dicari atau diterima, serta materi yang dikonsultasikan atau dipinjam.

5. Membedakan antara filsafat atau sikap pribadi dan tugas profesional dengan tidak membiarkan keyakinan pribadi mengganggu tujuan institusi atau badan profesional.
6. Menghindari situasi di mana kepentingan dan keuntungan pribadi dapat didahulukan daripada kepentingan pengguna perpustakaan, kolega, atau institusi tempat bekerja.
7. Memastikan bahwa tindakan dan keputusan ditentukan semata-mata oleh penilaian profesional; pustakawan tidak boleh mengambil keuntungan dari posisi mereka selain dari remunerasi atau biaya normal untuk layanan profesional.
8. Memperlakukan rekan kerja dan sesama pustakawan dengan hormat, adil, dan penuh itikad baik.
(sumber: <http://www.pnm.my/ppm/index-1.htm>)

4.5.6 Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia

Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku profesional pustakawan di Indonesia. Kode etik ini disahkan oleh Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan menjadi bagian integral dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI. Tujuan utama dari Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia adalah untuk:

1. Membina dan mengembangkan karakter anggota profesi: Kode etik membantu membentuk karakter dan integritas pustakawan, mendorong mereka untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka.
2. Mengawasi perilaku anggota profesi: Kode etik memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan dari pustakawan, baik dalam interaksi dengan pemustaka (pengguna perpustakaan) maupun dengan sesama rekan seprofesi.
3. Mencegah kesalahpahaman dan konflik: Kode etik membantu mencegah kesalahpahaman dan konflik yang mungkin timbul dalam lingkungan perpustakaan, baik antara pustakawan dengan pemustaka, maupun antara pustakawan dengan pustakawan lainnya.
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan mengangkat citra profesi: Dengan mematuhi kode etik, pustakawan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi mereka. Masyarakat akan melihat pustakawan sebagai individu yang dapat diandalkan,

profesional, dan berdedikasi untuk memberikan layanan terbaik (Indonesia, I. P. (2019).

Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia terdiri dari delapan prinsip utama yang disebut "Asta Etika Pustakawan Indonesia":

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan harapan pemustaka: Pustakawan harus berusaha memahami kebutuhan pemustaka dan memberikan layanan yang sesuai dengan harapan mereka.
2. Meningkatkan keunggulan kompetensi setinggi-tingginya: Pustakawan harus terus belajar dan mengembangkan diri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang kepustakawanan.
3. Membedakan antara pandangan pribadi dan tugas profesi: Pustakawan harus dapat memisahkan pandangan pribadi mereka dari tugas profesional mereka, sehingga tidak mempengaruhi objektivitas dan kualitas layanan yang diberikan.
4. Menjamin tindakan dan keputusannya berdasarkan profesionalisme: Pustakawan harus mengambil tindakan dan keputusan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pertimbangan profesional, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau pengaruh dari luar.
5. Menjunjung tinggi atas informasi dan menyediakan akses tak terbatas: Pustakawan harus memastikan bahwa informasi yang tersedia di perpustakaan dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi.
6. Melindungi hak privasi pemustaka dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi: Pustakawan harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi pemustaka dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa izin, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.
7. Mengakui dan menghormati Hak Kekayaan Intelektual: Pustakawan harus menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya, serta memastikan bahwa materi yang tersedia di perpustakaan tidak melanggar hak-hak tersebut.
8. Menjalin kerjasama dan saling menghargai teman sejawat: Pustakawan harus membangun hubungan kerja sama yang baik dengan sesama rekan seprofesi, saling menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama.

Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia ini sangat penting bagi profesi pustakawan di Indonesia. Dengan mematuhi kode etik ini, pustakawan dapat memastikan bahwa mereka memberikan layanan yang berkualitas, menjaga

kepercayaan masyarakat, dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi di Indonesia.

4.6 Kode Etik Profesi Pustakawan dalam Regulasi Indonesia

Regulasi di Indonesia belum secara eksplisit mengatur kode etik pustakawan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (UU No.43.Tahun 2007) dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 (PP No.24 Tahun 2014. Meskipun demikian, kedua peraturan perundang-undangan ini menekankan pentingnya profesionalisme pustakawan. Pasal 1 ayat (8) UU No. 43 Tahun 2007 mendefinisikan pustakawan sebagai individu yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Selain itu, PP No. 24 Tahun 2014 memperkuat pentingnya profesionalisme pustakawan dengan mengatur standar kompetensi dan kualifikasi mereka. Standar kompetensi ini secara tidak langsung mengarahkan pustakawan untuk bertindak secara etis dan profesional.

Meskipun tidak ada kode etik pustakawan yang dijabarkan secara rinci dalam UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014, pentingnya profesionalisme yang ditekankan dalam kedua peraturan ini dapat diartikan sebagai tuntutan bagi pustakawan untuk selalu bertindak sesuai dengan etika profesi mereka.

Terkait dengan pengaturan kode etik, UU No. 43 Tahun 2007 telah mengamanatkan organisasi profesi pustakawan untuk menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan. Pasal 34 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa pustakawan membentuk organisasi profesi, dan Pasal 35 huruf b memberikan kewenangan kepada organisasi profesi untuk menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan. Pasal 36 ayat (1) menjelaskan bahwa kode etik ini berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas. Pasal 36 ayat (2) lebih lanjut mengatur bahwa kode etik tersebut memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakannya.

Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 12 Tahun 2019, meskipun ditujukan untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama, tetap relevan bagi pustakawan. Nilai-nilai dasar ASN yang diatur dalam Permenag ini, seperti integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan keteladanan, juga merupakan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pustakawan.

Secara keseluruhan, regulasi di Indonesia belum secara eksplisit mengatur kode etik pustakawan. Namun, peraturan perundang-undangan yang ada telah memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan dan penegakan kode etik tersebut. Nilai-nilai profesionalisme yang ditekankan dalam UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014, serta nilai-nilai dasar ASN dalam Permenag No. 12 Tahun 2019, dapat menjadi acuan bagi pustakawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara etis dan profesional.

4.7 Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam, IFLA dan Regulasi Nasional

Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia (Kode Etik IPI) memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai landasan etika, baik yang berasal dari ajaran Islam, standar internasional yang ditetapkan oleh IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), maupun regulasi yang berlaku di Indonesia.

1. Relevansi Kode Etik IPI dengan Etika Islam

Kode Etik IPI mencerminkan nilai-nilai akhlak yang dijunjung tinggi dalam Islam, seperti amanah (kepercayaan), adil, jujur, bertanggung jawab, ikhlas, dan tawadhu (rendah hati). Pustakawan muslim diharapkan untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek pekerjaan mereka, mulai dari pengelolaan koleksi hingga pelayanan kepada pengguna. Misalnya, prinsip amanah menuntut pustakawan untuk menjaga kerahasiaan informasi pengguna dan memastikan integritas informasi yang disampaikan. Prinsip keadilan mengharuskan pustakawan untuk memberikan layanan yang adil dan merata kepada semua pengguna tanpa diskriminasi. Kejujuran menjadi landasan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tidak memihak, serta menghindari plagiarisme.

2. Relevansi Kode Etik IPI dengan Kode Etik IFLA

Kode Etik IPI juga sejalan dengan kode etik yang ditetapkan oleh IFLA. Kedua kode etik ini menekankan pentingnya akses universal terhadap informasi, kebebasan intelektual, privasi, keragaman budaya, dan tanggung jawab sosial. Pustakawan Indonesia diharapkan untuk tidak hanya mematuhi standar etika nasional, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan visi global tentang perpustakaan sebagai lembaga yang inklusif dan demokratis.

3. Relevansi Kode Etik IPI dengan UU No 43 tahun 2007

UU No 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan secara eksplisit mengakui pentingnya kode etik dalam profesi kepustakawanan. Pasal 35 menyebutkan bahwa organisasi profesi pustakawan memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan. Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) menjelaskan bahwa kode etik tersebut berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa kode etik pustakawan tidak hanya bersifat internal bagi organisasi profesi, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap kode etik menjadi kewajiban bagi setiap pustakawan di Indonesia, dan pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kode Etik IPI merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesinya. Kode Etik IPI juga menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi dan diamalkan oleh setiap pustakawan. Selain itu, Kode Etik IPI juga mengatur hubungan pustakawan dengan diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat, dan negara.

Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia (Kode Etik IPI) merupakan panduan yang relevan dan komprehensif bagi pustakawan Indonesia dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan etis. Kode Etik IPI tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai akhlak dalam Islam dan kode etik internasional yang ditetapkan oleh IFLA, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam regulasi Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan Kode Etik IPI, pustakawan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di Indonesia

5

Pengaruh Teknologi Terhadap Peran Pustakawan dan Profesional Informasi

Teknologi telah mengubah wajah perpustakaan dan terus mengubah cara kita bekerja dan memberikan layanan kepada pengguna. Kemampuan untuk mengenali dan menggabungkan tren teknologi yang sedang berkembang ke dalam lingkungan perpustakaan sangat penting untuk terus memberikan layanan terbaik.

—David Lee King, *How to Stay on Top of Emerging Technology Trends for Libraries* (2018), 5

Bab kelima ini membahas bagaimana teknologi telah menjadi katalisator utama dalam transformasi peran pustakawan dan profesional informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan yang menuntut adaptasi dan inovasi. Digitalisasi koleksi, layanan daring, dan media sosial telah mengubah cara pustakawan berinteraksi dengan pengguna dan menyediakan akses informasi.

Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan pembelajaran mesin (machine learning) juga memberikan dampak signifikan pada profesi ini. AI dapat membantu otomatisasi tugas-tugas rutin, meningkatkan efisiensi layanan, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan pertanyaan etis dan tantangan baru, seperti bias algoritma dan privasi data.

Peran pustakawan juga berkembang seiring dengan munculnya teknologi baru seperti realitas virtual (virtual reality/VR) dan realitas tertambah (augmented reality/AR). Teknologi ini membuka peluang untuk

menciptakan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif, serta memperluas akses informasi bagi pengguna dengan kebutuhan khusus.

Di tengah perubahan yang cepat ini, penting bagi pustakawan untuk terus mengembangkan kompetensi mereka agar tetap relevan dan mampu memberikan layanan yang berkualitas. Penguasaan teknologi, literasi digital, dan keterampilan pemecahan masalah menjadi semakin penting. Kolaborasi dengan ahli teknologi dan profesional lain juga diperlukan untuk memanfaatkan potensi teknologi secara optimal.

Masa depan profesi pustakawan dan profesional informasi penuh dengan peluang dan tantangan. Dengan terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi, pustakawan dapat memainkan peran penting dalam menyediakan akses informasi yang berkualitas dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat di era digital.

5.1. Peran Teknologi dalam Transformasi Perpustakaan

Teknologi pertama kali memasuki dunia perpustakaan pada tahun 1930-an dalam bentuk mesin bisnis, yang dianggap sebagai cara untuk membebaskan pustakawan dari tugas rutin yang membosankan (Quinn, M. E., 2014, hlm. 19).

Namun, perkembangan teknologi perpustakaan modern baru benar-benar terlihat beberapa dekade kemudian. Lynch (2000) mengidentifikasi empat perkembangan teknologi penting dalam perpustakaan modern: (1) komputerisasi operasi perpustakaan seperti sirkulasi dan pemesanan; (2) memperkenalkan teknologi untuk meningkatkan akses publik seperti Katalog Akses Publik Online (OPAC), yang juga mempromosikan katalog serikat dan berbagi sumber daya; (3) mengubah konten cetak ke format elektronik; dan (4) mengembangkan jaringan canggih yang menyediakan akses kapan saja dan di mana saja ke informasi digital melalui internet yang terus berkembang dan meluas. Ke dalam daftar ini Yuvaraj (2015) menambahkan komputasi awan. Baru-baru ini King (2018) mengidentifikasi transformasi tambahan: sistem pembayaran tanpa uang tunai (PayPal, Android Pay); media yang dapat diunduh dan streaming menggunakan Hulu, Netflix, Spotify, dan YouTube, yang menghilangkan kebutuhan untuk membeli CD dan DVD; adaptasi terkait komputasi (aplikasi, tablet, ponsel cerdas); dan web sosial (Facebook, Twitter). Perpustakaan dan para profesional LIS masa kini menulis blog, menawarkan iPad untuk sirkulasi, mempromosikan permainan komputer, berpartisipasi aktif dalam berbagai

bentuk media sosial, dan membuat video serta podcast mereka sendiri. Mereka menawarkan e-book, menyediakan pelatihan komputer, dan menyediakan Wi-Fi (King 2018). Perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya membantu pustakawan dalam tugas rutin, tetapi juga mentransformasi layanan perpustakaan dan peran pustakawan secara fundamental.

Selanjutnya, teknologi mulai memberikan solusi bagi pustakawan dalam mengatasi beberapa masalah mendesak yang terkait dengan pertumbuhan. Pada tahun 1944, Fremont Rider memproyeksikan bahwa jika Perpustakaan Universitas Yale terus berkembang dengan tingkat pertumbuhan saat itu, pada tahun 2040 akan memiliki sekitar 200.000.000 volume, yang akan membutuhkan lebih dari 6.000 mil rak. Rider mengusulkan penemuan mikrokartu sebagai solusi untuk mengatasi masalah penyimpanan ini. Pada tahun 1960-an, perkembangan komputer menawarkan cara yang lebih efisien untuk mengatasi masalah penyimpanan yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah literatur yang terus berlanjut (Rider, F. ,1944). Bahkan, pada tahun 1967, Jesse Shera menulis bahwa, berkat komputer, masalah penyimpanan telah terpecahkan. Kemajuan lebih lanjut dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuat informasi digital dapat disebarkan dengan mudah: batasan fisik dan geografis telah menjadi jauh kurang penting; sumber daya informasi dapat dibagikan di berbagai lokasi; dan akses terkontrol ke sumber daya informasi telah digantikan oleh akses elektronik tanpa perantara (Shera, J. H.,1967,h.108)

Meskipun memiliki manfaat transformasional, teknologi telah menimbulkan pertanyaan mendasar tentang nilai koleksi dan ruang perpustakaan, relevansi layanan perpustakaan, dan peran pustakawan. Shera mencatat dalam "Librarians against Machines" bahwa pustakawan terkejut dan "tidak siap untuk campur tangan teknologi baru yang dikenal dengan berbagai nama seperti dokumentasi, ilmu informasi, otomasi, dan penyimpanan dan pengambilan informasi, meskipun menyimpan dan mengambil pengetahuan yang tercatat telah menjadi tanggung jawab unik pustakawan selama berabad-abad" (Shera, J. H. ,1967). Andrew Abbott, menulis 20 tahun kemudian dalam "The System of Professions" mencatat bahwa komputer membutuhkan "standarisasi deskriptif dan pengindeksan yang hampir total, yang secara mendalam merasuki area penilaian yang membuat pustakawan profesional." Pustakawan, yang dulunya memiliki kendali eksklusif atas informasi, telah kehilangan "kepemilikan fisik atas modal budaya," seperti yang dikatakan Abbott:

Perpustakaan merespons perubahan ini mulai tahun 1970-an dengan menjauhkan diri dari fokus pada perpustakaan dan layanan perpustakaan, dan memposisikan diri lebih dulu sebagai IPI, dan kemudian sebagai studi informasi (Abbott, A. ,1988:hlm.220).

Transformasi ini juga tercermin dalam layanan dan teknologi yang diadopsi perpustakaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lynch (2000) sebelumnya. Quinn, M. E. (2014) menggambarkan bahwa pada akhir abad ke-20, ilmu perpustakaan telah menjadi lebih lintasdisiplin, memperluas basis pengetahuannya dan menggabungkan konsep-konsep dari lingkungan informasi yang melampaui pengaturan perpustakaan tradisional. Perpustakaan juga telah menjadi lebih global, dengan badan seperti Uni Eropa dan IFLA bekerja untuk mengembangkan kerjasama pendidikan IPI lintas batas dan mempromosikan pengakuan bersama kualifikasi. Sejumlah perkembangan pada dekade pertama abad ke-21 memberikan contoh tentang bagaimana layanan informasi tradisional seperti perpustakaan sedang mengalami transformasi (Quinn, M. E. :2014,hlm.19)

Pada tahun 2001, Dewan Perpustakaan Nasional Singapura membuka "Totally Do-It-Yourself" library, yang dijalankan tanpa staf tetapi dimaksudkan untuk menyediakan tingkat layanan yang sama seperti perpustakaan dengan staf di tempat (Choh, N. L. (2003).

Mulai tahun 2002, sejumlah gedung perpustakaan umum di London, Inggris ditutup dan digantikan oleh "Idea Stores" yang terinspirasi ritel (Miller, R. K. (2008). Kemudian pada tahun 2004, Perpustakaan Nasional Kanada digabungkan dengan Arsip Nasional Kanada untuk membentuk Perpustakaan dan Arsip Kanada, sebagai bagian dari konvergensi yang berkembang dalam lembaga warisan budaya: perpustakaan, arsip, dan museum (Doucet, M.,2007).

Selanjutnya, pada tahun 2010, sebagai bagian dari pola perpindahan koleksi perpustakaan pendidikan tinggi ke dunia daring, perpustakaan fisik pertama yang sepenuhnya tanpa buku di Amerika Serikat, yaitu Perpustakaan Teknik dan Teknologi Terapan, dibuka di Universitas Texas di San Antonio. Perpustakaan baru Universitas Chicago yang dibuka pada tahun 2011 memiliki sistem penyimpanan dan pengambilan buku yang sepenuhnya otomatis yang dikelola oleh derek robotik (Heinrich dan Willis,2014).

Laporan Pew Research Center yang dirilis pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa dalam tahun sebelumnya, "jumlah orang yang

membaca buku elektronik meningkat dari 16% dari semua orang Amerika berusia 16 tahun ke atas menjadi 23%. Pada saat yang sama, jumlah orang yang membaca buku cetak dalam 12 bulan terakhir turun dari 72% dari populasi berusia 16 tahun ke atas menjadi 67% (Rainie dan Duggan, 2012).

Pada tahun 2012, dalam artikel yang diterbitkan di New Republic, David Bell mencatat bahwa "sekarang ada jauh lebih banyak buku yang tersedia, dengan lebih cepat, di iPhone daripada di Perpustakaan Umum New York (Bell: 2012). Setahun kemudian yakni tahun 2013, 82.000 naskah Perpustakaan Vatikan diunggah ke internet, melanjutkan tren digitalisasi dan penyediaan akses terbuka terhadap warisan dokumenter dunia. Pada tahun yang sama, BiblioTech, sebuah perpustakaan umum yang hanya menawarkan buku elektronik, dibuka di Bexar County, Texas. Lima tren kunci dalam lingkungan informasi global yang baru diidentifikasi dalam Laporan Tren IFLA tahun 2013: perluasan dan, pada saat yang sama, pembatasan siapa yang memiliki akses terhadap informasi; demokratisasi dan gangguan dalam pembelajaran; perubahan definisi batas privasi dan perlindungan data; pemberdayaan suara dan kelompok baru; dan transformasi ekonomi informasi global (IFLA, 2013).

Masa depan perpustakaan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dan menjadi pelopor dalam transformasi cara informasi diperoleh, diakses, dievaluasi, disebarluaskan, dan dilestarikan. Dalam konteks ini, kecerdasan buatan (AI) memiliki peran penting. AI fokus pada pemodelan perilaku manusia dan bagaimana mesin dapat meniru perilaku cerdas manusia. Berbagai teknik AI, seperti sistem pakar (ESs), logika fuzzy, jaringan saraf tiruan buatan, algoritma evolusioner, penalaran berbasis kasus, pengolahan citra, pemrosesan bahasa alami, pengenalan ucapan, dan robotika, digunakan dalam upaya ini. Biasanya, dalam sistem cerdas, beberapa teknik AI berkolaborasi dalam pemecahan masalah. IPI juga telah berkembang dalam penggunaan sistem cerdas. Banyak perpustakaan saat ini beralih ke otomatisasi aktivitas mereka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Dwivedi et al., 2013).

Teknik AI memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi pada otomatisasi perpustakaan. Ide penggunaan sistem cerdas daripada sistem klasik di perpustakaan dimulai pada tahun 1990. Sistem cerdas digunakan dalam perpustakaan untuk memberikan layanan berbasis pengetahuan kepada pengguna sistem perpustakaan dan pengguna akhir. Sistem-sistem ini, sebagai sistem pelengkap utama perpustakaan, dapat mengambil

keputusan cerdas untuk mengambil dan menggunakan sumber daya informasi. Pengambilan keputusan hati-hati dari sistem-sistem ini didasarkan pada pengetahuan yang dibuat oleh pengguna dalam sistem perpustakaan. Sistem-sistem ini adalah pesaing penting dari aktivitas manusia di perpustakaan. Hal ini dapat memiliki dampak pada para pustakawan. Makalah-makalah yang disajikan pada Klinik Tahunan ke-27 tentang Aplikasi Pemrosesan Data Perpustakaan membahas kemampuan terkait dengan aplikasi perpustakaan: katalog deskriptif, layanan teknis dan pengembangan koleksi, indeksasi subjek, layanan referensi, pencarian basis data, dan pengiriman dokumen (Lancaster dan Smith, 1990).

Sudah banyak penelitian yang dilakukan tentang berbagai penggunaan teknologi AI di perpustakaan. Bahkan Hsieh dan Hall (1989) mengkaji definisi dan sejarah AI serta menyelidiki literatur tentang AI dalam "Literatur Perpustakaan. Pada tahun yang sama, O'Neill dan Morris (1989) melihat tantangan dan dampak teknologi sistem pakar (expert systems, Ess), Ess untuk LIS. Pada tahun 1998 di bawah arahan NCR, Inc. dan proses Future Mapping®-nya, para ahli bekerja sama untuk merencanakan skenario terbaik bagi perpustakaan masa depan (Leslie, 1999). Setelah beberapa tahun, sistem pustakawan online 24/7 yang sepenuhnya otomatis dirancang untuk merespons pertanyaan rutin dan berulang dari pembelajar jarak jauh (Payne dan Bradbury, 2002).

Sepertinya aplikasi AI telah dipertimbangkan dalam berbagai aspek IPI. Asemi dan Nowkarizi (2020) melakukan kajian yang mendalam terhadap model-model utama yang ada. Faktor-faktor berikut berpengaruh dalam menggunakan kecerdasan manusia dalam sistem informasi yaitu:

1. Memahami sifat kebutuhan informasi dan mendefinisikan kebutuhan ini untuk sistem,
2. Mengidentifikasi sumber daya informasi yang relevan dengan kebutuhan informasi,
3. Evaluasi sumber daya informasi yang ada, evaluasi informasi yang ditemukan,
4. Mengorganisir sumber daya informasi yang ada, mengorganisir informasi yang dipilih dari item yang ditemukan,
5. Mengelola sumber daya informasi yang ada, mengelola informasi yang ditemukan,
6. Menggunakan sumber daya informasi yang ada, menggunakan informasi yang ditemukan,
7. Analisis informasi dan pengetahuan,

8. Mengubah informasi menjadi pengetahuan,
9. Penyebaran dan transfer informasi dan pengetahuan,
10. Interaksi dan pertukaran informasi dan pengetahuan(Asemi, A., Ko, A., & Nowkarizi, M.,2020)

Sepuluh daftar di atas merupakan pertimbangan yang sangat berguna untuk menggunakan AI dalam basis data ilmiah dan urusan perpustakaan dan informasi. Misalnya, sistem rekomendasi sangat penting dalam mengidentifikasi sumber daya informasi dan memilihnya. Sistem-sistem ini dapat sangat membantu dalam memilih sumber daya yang tepat berdasarkan perilaku pengguna dalam menggunakan sistem pengambilan informasi. "Namun, kita mungkin tidak dapat menganggap sistem tersebut cerdas menurut standar manusia. Fakta bahwa kita adalah makhluk organik yang sementara dan memiliki lima indra serta perasaan, selain berpikir, singkatnya, kekurangan komputer adalah bahwa mereka tidak memiliki semua hal yang dimiliki manusia, seperti semua kompleksitas, emosi, dan pengalaman manusia"(Bailey, 1991). Hari ini, sudah banyak tahun berlalu sejak penelitian tentang teknik pemrograman AI dan penggunaan WSs untuk menyediakan layanan teknis kepada perpustakaan dan basis data informasi serta layanan publik kepada pengguna akhir. Sekarang impian perpustakaan pintar telah menjadi kenyataan.

Cao et al(2018) telah memperhatikan konseptualisasi perpustakaan pintar, dan ilmuwan serta para profesional telah menciptakan sistem yang dapat dianggap dan diambil keputusannya daripada pustakawan. Mereka melakukan studi tentang perpustakaan cerdas. Mereka memperhatikan pandangan pemimpin pemikiran terkait dampak kecerdasan buatan (AI) pada perpustakaan. Bahkan sistem-sistem ini dapat meniru perilaku pustakawan(Cox, Pinfield dan Rutter, 2019)

5.2. Transformasi Peran Pustakawan

Transformasi peran pustakawan di era digital ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dari perubahan mendasar dalam cara mereka berinteraksi dengan informasi, hingga kebutuhan untuk menguasai teknologi baru dan mengembangkan keterampilan baru, pustakawan modern harus siap menghadapi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh era informasi yang terus berkembang

1. Dari Penjaga Koleksi Menjadi Fasilitator Informasi

Shashikumara A.A., et al (2019) menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi telah mengubah peran pustakawan dari penjaga koleksi fisik menjadi fasilitator yang secara aktif membantu pengguna dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber, termasuk sumber digital. Pustakawan tidak lagi hanya berfokus pada pengumpulan dan penyimpanan informasi, tetapi juga berperan aktif dalam membimbing pengguna untuk menemukan, memahami, dan menerapkan informasi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Sejalan dengan hal tersebut, Ramesh Babu (2023) menekankan pentingnya peningkatan keterampilan pustakawan agar tetap relevan di era digital. Otomasi telah membantu tugas-tugas tradisional seperti pengarsipan dan katalogisasi, memungkinkan pustakawan untuk lebih fokus pada layanan pengguna dan pengembangan koleksi digital. Hal ini didukung oleh penelitian Chitra dan Kumbar (2023) yang menyoroti pergeseran fokus pustakawan ke arah layanan pengguna dan pengelolaan informasi digital.

2. Penguasaan Teknologi Informasi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menuntut pustakawan untuk memiliki kompetensi di bidang ini. Mwaniki (2017) dan Shashikumara A.A., et al. (2019) menekankan pentingnya pustakawan untuk menguasai teknologi ini guna mengelola koleksi digital, menyediakan layanan online, dan memberikan pelatihan literasi informasi kepada pengguna. Pustakawan harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru yang terus berkembang dan mengintegrasikannya ke dalam layanan perpustakaan.

Mamatha N. (2023) menjelaskan bahwa pustakawan di perpustakaan pintar (*smart library*) harus memiliki kemampuan dalam mengelola perangkat lunak perpustakaan, mengakses database daring, dan memanfaatkan teknologi seperti RFID. Selain itu, Vijayalatha C. (2023) menekankan bahwa pustakawan harus menjadi pemberi informasi elektronik (*e-information provider*) yang terampil dalam memetakan strategi untuk mengelola, memelihara, dan menyediakan informasi. Kemampuan dalam menggunakan teknologi seperti *remote access*, *e-learning*, dan *video conferencing* menjadi krusial dalam memberikan layanan perpustakaan yang efektif dan efisien (V.R. Rajan, 2023).

3. Keterampilan Mengajar dan Belajar.

Sun, Hao-Chang, et al. (2011) dan Griffiths (1995) menjelaskan bahwa pustakawan tidak hanya bertugas mengelola informasi, tetapi juga harus memiliki keterampilan mengajar dan belajar. Pustakawan berperan

sebagai pengajar dalam konteks literasi informasi, membantu pengguna mengembangkan keterampilan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Selain itu, pustakawan juga harus terus belajar dan mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang informasi.

4. Kolaborasi dan Kemitraan.

Kolaborasi dan kemitraan menjadi kunci dalam transformasi peran pustakawan di era digital. Penelitian Sun dan Chen (2011) menunjukkan pentingnya kolaborasi pustakawan dengan fakultas dalam mengadopsi teknologi baru, sementara Abumandour (2021) menyoroti peran perpustakaan umum dalam mendukung pembelajaran elektronik dan pendidikan sepanjang hayat melalui kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan. Shashikumara A.A., et al. (2019) juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan dosen, peneliti, dan komunitas lokal untuk mengembangkan program dan layanan yang relevan dengan kebutuhan pengguna.

Kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi enabler bagi perpustakaan untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan relevansi program, dan memperkuat posisinya sebagai pusat pembelajaran dan kolaborasi. Abumandour (2020) menggarisbawahi bagaimana perpustakaan dapat membangun kemitraan untuk memperkuat komunitas dan meningkatkan dampak sosialnya. Oleh karena itu, kolaborasi dan kemitraan bukan hanya sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi pustakawan dan perpustakaan untuk tetap relevan dan berkontribusi secara signifikan di era digital.

5. Pengembangan Koleksi Digital.

Kemajuan teknologi modern dan perubahan kebutuhan pengguna menuntut perpustakaan untuk beradaptasi, salah satunya melalui pengembangan koleksi digital. Griffiths (1995) menjelaskan bahwa pustakawan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara koleksi fisik dan aksesibilitas informasi digital. Shashikumara A.A., et al (2019) menyoroti bagaimana teknologi informasi telah memperluas peran pustakawan dalam pembuatan dan pengelolaan informasi digital. Pustakawan perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dan menyediakan akses ke koleksi digital, seperti jurnal elektronik, ebook, basis data, dan repositori institusi

6. Literasi Informasi dan Media

. Dalam era digital yang terus berkembang, peran pustakawan telah mengalami transformasi signifikan. Pustakawan tidak lagi hanya sekadar pengelola koleksi buku, melainkan juga menjadi fasilitator informasi, pendidik, dan pemandu dalam dunia digital yang kompleks. (Hines, 2014)

Salah satu aspek penting dari peran pustakawan dalam era digital adalah literasi informasi dan media. Pustakawan perlu membantu pengguna dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif di lingkungan digital yang terus berkembang. (Hines, 2014)

Pustakawan dapat memfasilitasi literasi informasi dan media melalui berbagai program dan layanan, seperti lokakarya, kelas pelatihan, dan panduan online. Mereka juga dapat membantu pengguna dalam mengembangkan keterampilan kritis dalam mengevaluasi keandalan dan kredibilitas sumber informasi, serta memahami dampak informasi dan media pada masyarakat. (Hines, 2014)

Peran pustakawan dalam literasi informasi dan media sangat penting dalam era digital yang dipenuhi dengan informasi yang melimpah. Pustakawan dapat membantu pengguna dalam navigasi yang efektif melalui lautan informasi dan memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan kritis. (Hines, 2014)

7. Pemasaran dan Advokasi.

. Dalam menghadapi tantangan seperti penurunan anggaran dan perubahan perilaku pengguna, perpustakaan harus beradaptasi dengan mengadopsi strategi pemasaran dan advokasi yang efektif. Teknologi memainkan peran kunci dalam transformasi ini, memungkinkan pustakawan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan memperjuangkan peran penting perpustakaan dalam masyarakat (Curzon, 2017, hlm. 5).

Pemasaran perpustakaan yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pengguna. Teknologi digital menyediakan berbagai alat untuk mengumpulkan data pengguna, menganalisis tren, dan mengembangkan kampanye pemasaran yang disesuaikan. Media sosial, situs web interaktif, dan program-program inovatif dapat digunakan untuk membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat (Curzon, 2017, hlm. 6).

Advokasi merupakan aspek penting dalam memastikan keberlanjutan perpustakaan. Teknologi memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara pustakawan, pembuat kebijakan, dan pemangku

kepentingan lainnya. Dengan memanfaatkan platform digital, pustakawan dapat mengadvokasi peningkatan anggaran, kebijakan yang mendukung akses terbuka terhadap informasi, dan perlindungan hak cipta yang seimbang (Lankes, 2016).

Transformasi peran pustakawan menuntut penguasaan keterampilan pemasaran dan advokasi. Pustakawan tidak lagi hanya berperan sebagai penjaga koleksi, melainkan juga sebagai agen perubahan yang aktif mempromosikan nilai dan layanan perpustakaan kepada masyarakat (Lankes, 2016).

8. Pustakawan Sebagai Kurator Konten Digital dan Manajer Pengetahuan.

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam peran pustakawan, yang kini dituntut untuk melampaui peran tradisional mereka sebagai penjaga koleksi fisik. Di era digital ini, pustakawan semakin berperan sebagai kurator konten digital dan manajer pengetahuan, bertanggung jawab untuk memilih, mengelola, dan menyediakan akses ke berbagai sumber informasi digital (Curzon et al., 2017, hlm. 2)

Sebagai kurator konten digital, pustakawan berperan penting dalam mengevaluasi, memilih, dan mengorganisir konten digital yang relevan dan berkualitas tinggi untuk koleksi perpustakaan. Mereka harus mampu menavigasi lautan informasi digital yang terus berkembang, mengidentifikasi sumber-sumber yang kredibel dan akurat, serta memastikan bahwa konten tersebut sesuai dengan kebutuhan dan minat pengguna perpustakaan (Dextre Clarke, 2018, hlm. 2665). Selain itu, pustakawan juga berperan dalam melestarikan dan merawat konten digital agar tetap dapat diakses dan digunakan dalam jangka panjang.

Selain itu, pustakawan juga berperan sebagai manajer pengetahuan, membantu pengguna dalam mengakses, memahami, dan menerapkan pengetahuan yang terkandung dalam koleksi digital. Mereka tidak hanya menyediakan akses ke informasi, tetapi juga membantu pengguna dalam mengembangkan keterampilan literasi informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi dan menggunakan informasi secara kritis dan efektif (Koenig & Neveroski, 2018, hlm. 2657). Pustakawan juga dapat berperan dalam memfasilitasi kolaborasi dan berbagi pengetahuan di antara pengguna, serta membantu organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan pengetahuan secara strategis.

Peran baru ini menuntut pustakawan untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas di bidang teknologi informasi, manajemen informasi, dan literasi informasi. Mereka harus mampu memahami dan menggunakan berbagai alat dan teknologi digital, seperti sistem manajemen

konten, platform pembelajaran online, dan alat analisis data. Selain itu, mereka juga harus memiliki kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik untuk dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar perpustakaan.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital, pustakawan perlu terus beradaptasi dan mengembangkan diri. Mereka harus mengikuti perkembangan teknologi dan tren terbaru dalam bidang informasi, serta memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Sebagai akibatnya, pustakawan dapat terus berperan sebagai kurator konten digital dan manajer pengetahuan yang efektif, membantu masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi dan pengetahuan secara optimal.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah peran pustakawan secara signifikan, dari penjaga koleksi fisik menjadi kurator konten digital dan manajer pengetahuan. B. Ramesh Babu (2023) menekankan pentingnya pustakawan untuk beradaptasi dengan lanskap teknologi yang terus berubah dan menguasai keterampilan baru dalam mengelola informasi digital. Vijayalatha C. (2023) juga menyoroti perlunya pustakawan untuk menjadi "penyedia e-informasi" yang terampil dalam memetakan strategi untuk mengelola, memelihara, dan menyediakan informasi di era digital.

Sebagai kurator konten digital, pustakawan berperan dalam memilih, memperoleh, mengatur, dan menyediakan akses ke berbagai sumber daya digital, seperti ebook, e-journal, basis data, dan repositori institusional. Amsaveni, N., et al., (2023) dalam penelitian mereka tentang penggunaan perangkat lunak manajemen konten untuk repositori akses terbuka, menyoroti pentingnya peran pustakawan dalam memastikan aksesibilitas dan ketersediaan informasi ilmiah di era digital. Selain itu, pustakawan juga berperan dalam memastikan kualitas dan keandalan informasi digital, serta melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual.

Sebagai manajer pengetahuan, pustakawan tidak hanya mengelola sumber daya informasi, tetapi juga membantu pengguna dalam memahami dan memanfaatkan informasi tersebut secara efektif. Prameela Sharma dan Chandrashekara M. (2023) menekankan pentingnya crowdsourcing sebagai salah satu cara untuk meningkatkan manajemen pengetahuan di perpustakaan. Dengan melibatkan partisipasi publik dalam pengumpulan, pengorganisasian, dan penyebaran informasi, pustakawan dapat menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan memberdayakan pengguna untuk menjadi kontributor aktif dalam proses produksi pengetahuan.

Peran pustakawan sebagai kurator konten digital dan manajer pengetahuan semakin penting di era digital. Mereka harus memiliki

kompetensi dalam teknologi informasi, literasi digital, dan manajemen pengetahuan untuk dapat menjalankan peran ini secara efektif. Selain itu, mereka juga perlu mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang baik untuk dapat berinteraksi dengan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan terus mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perubahan, pustakawan dapat memastikan bahwa perpustakaan tetap relevan dan berdampak positif bagi masyarakat di era digital.

9. Dampak Teknologi pada Layanan Referensi

Teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, telah mengubah lanskap layanan referensi secara signifikan. Dulu, layanan referensi identik dengan interaksi tatap muka di meja referensi perpustakaan, kini layanan ini telah berkembang menjadi lebih dinamis dan dapat diakses dari mana saja (Bopp & Smith, 2001, hlm. 741).

Perubahan ini terutama didorong oleh meningkatnya ketersediaan sumber informasi digital dan ekspektasi pengguna akan akses informasi yang cepat dan mudah. Pustakawan referensi kini dituntut untuk tidak hanya menguasai koleksi fisik perpustakaan, tetapi juga berbagai sumber informasi digital seperti basis data online, jurnal elektronik, dan repositori digital (Bopp & Smith, 2001, hlm. 741).

Selain itu, teknologi juga memungkinkan layanan referensi virtual melalui berbagai platform seperti email, chat, video conference, dan media sosial. Hal ini memungkinkan pustakawan untuk memberikan bantuan riset dan menjawab pertanyaan pengguna tanpa harus bertatap muka secara langsung. Layanan referensi virtual ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang memiliki keterbatasan waktu atau lokasi untuk datang ke perpustakaan (Kasowitz et al., 2000, hlm. 144).

Namun demikian, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru bagi layanan referensi. Pustakawan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang pesat dan terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat memberikan layanan yang relevan dan efektif. Selain itu, mereka juga harus mampu mengevaluasi kualitas dan kredibilitas sumber informasi digital yang semakin beragam dan kompleks (American Library Association, 2000, hlm. 16).

Dalam menghadapi perubahan ini, pustakawan referensi perlu mengembangkan kompetensi mereka di bidang teknologi informasi, literasi informasi, dan keterampilan komunikasi. Mereka juga harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan dan harapan

pengguna, serta mengembangkan strategi layanan referensi yang inovatif dan efektif di era digital.

5.2 Perubahan Tugas dan Tanggung Jawab Pustakawan

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap informasi, yang pada gilirannya mempengaruhi peran dan tanggung jawab pustakawan secara mendasar. Pustakawan tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan koleksi fisik, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru, mengelola sumber daya digital, dan memberikan layanan informasi yang relevan dalam format yang beragam (Hines, 2014).

Salah satu perubahan utama dalam tugas pustakawan adalah pergeseran dari peran tradisional sebagai penjaga gerbang informasi menjadi fasilitator akses informasi (Hines, 2014). Pustakawan kini berperan aktif dalam membantu pengguna menavigasi lautan informasi digital, mengevaluasi sumber daya, dan mengembangkan keterampilan literasi informasi yang kritis (Hines, 2014). Pustakawan sekarang berperan sebagai pemandu yang membantu pengguna menavigasi lautan informasi digital, mengevaluasi kredibilitas sumber daya daring, dan memanfaatkan teknologi secara efektif (Tarango & Machin-Mastromatteo, 2017).

Selain itu, teknologi juga telah memperluas tanggung jawab pustakawan dalam hal pengajaran dan pembelajaran (Hines, 2014). Pustakawan kini diharapkan dapat memberikan pelatihan dan dukungan dalam penggunaan teknologi informasi, serta mengintegrasikan teknologi ke dalam program dan layanan perpustakaan (Hines, 2014). Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan signifikan dalam tugas dan tanggung jawab pustakawan dan profesional informasi. Secara khusus, teknologi telah memperluas peran mereka sebagai pendidik. Pustakawan tidak lagi hanya berfokus pada pengumpulan dan pengorganisasian informasi, tetapi juga harus mengajarkan pengguna cara menggunakan teknologi baru untuk mengakses dan mengevaluasi informasi secara efektif (Sun et al., 2011).

Perubahan ini menuntut pustakawan untuk terus mengembangkan kompetensi dan keterampilan mereka agar tetap relevan dan efektif dalam lingkungan yang terus berubah (Hines, 2014). Kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, dan berkolaborasi menjadi semakin penting bagi pustakawan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh teknologi (Hines, 2014). Lebih jauh lagi, teknologi telah membuka peluang baru bagi pustakawan untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan inovasi. Keahlian mereka dalam manajemen informasi dan teknologi dapat digunakan untuk

mendukung produksi dan komunikasi ilmiah, serta memfasilitasi kolaborasi antara peneliti dan komunitas akademik (Tarango & Machin-Mastromatteo, 2017).

Perpustakaan tidak lagi hanya tentang mengelola koleksi fisik. Mereka juga menjadi fasilitator akses informasi, pendidik literasi digital, dan pendukung penelitian serta inovasi (Tarango & Machin-Mastromatteo, 2017). Secara keseluruhan, jelas bahwa teknologi telah mendorong pustakawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka agar tetap relevan dalam lanskap informasi yang terus berubah. Peran mereka telah berkembang melampaui tugas-tugas tradisional, mencerminkan kebutuhan akan profesional informasi yang adaptif dan berwawasan luas di era digital ini (IFLA, 2022).

Era digital telah membawa transformasi signifikan pada tugas dan tanggung jawab pustakawan. Beberapa perubahan utama meliputi:

1. Pergeseran dari Mengoleksi ke Mengakses: Pustakawan tidak lagi hanya berfokus pada pengumpulan dan pemeliharaan koleksi fisik. Mereka kini juga bertanggung jawab untuk memastikan aksesibilitas informasi dari jarak jauh sesuai permintaan pengguna. Hal ini dimungkinkan oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan akses terhadap sumber daya digital yang lebih luas dan beragam (Griffiths, 1995).
2. Penciptaan dan Pengelolaan Informasi Digital: Pustakawan terlibat dalam proses digitalisasi koleksi, pembuatan konten digital, dan pengelolaan repositori institusional (Shashikumar et al., 2019).
3. Analisis, Sintesis, dan Pengemasan Informasi: Dalam lingkungan yang dipenuhi informasi, pustakawan berperan penting dalam menganalisis, mensintesis, dan mengemas informasi agar mudah dipahami oleh pengguna akhir (Griffiths, 1995).
4. Desain Antarmuka dan Pendidikan Pengguna: Pustakawan perlu memiliki pengetahuan tentang teknologi dan desain antarmuka untuk meningkatkan aksesibilitas dan kegunaan sumber daya informasi (Shashikumar et al., 2019).
5. Pelestarian Informasi Digital: Digitalisasi koleksi tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam hal pelestarian jangka panjang. Pustakawan berperan dalam mengembangkan strategi dan kebijakan untuk memastikan bahwa informasi digital tetap dapat diakses dan digunakan oleh generasi mendatang (Mosweu, 2023).
6. Keterampilan Baru: Pustakawan perlu mengembangkan keterampilan baru dalam analisis data dan visualisasi data untuk membantu pengguna

memahami dan menginterpretasikan informasi yang kompleks (Saracevic, 1999).

7. Kolaborasi dengan Peneliti: Pustakawan dapat berperan sebagai mitra peneliti dalam pengelolaan data penelitian dan memastikan bahwa data tersebut disimpan dan diakses sesuai dengan standar dan etika yang berlaku (Helfer & Heinrich, 2018).

Perubahan-perubahan ini mencerminkan bagaimana pustakawan telah beradaptasi dengan lanskap informasi yang terus berkembang, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan dan memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin kompleks.

5.3. Tantangan Teknologi dalam Profesi Pustakawan

Perkembangan teknologi digital dan internet telah membawa perubahan signifikan dalam dunia IPI. Perubahan ini pada gilirannya menghadirkan berbagai tantangan bagi para pustakawan. Tantangan-tantangan ini menuntut adaptasi dan penguasaan keterampilan baru agar pustakawan dapat terus memberikan layanan yang relevan dan efektif di era digital. Beberapa tantangan utama yang dihadapi pustakawan meliputi:

1. Kebutuhan akan keterampilan teknologi baru: Pustakawan perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam teknologi informasi, literasi digital, dan manajemen data (Campbell, 1993). Hal ini sejalan dengan IFLA Guidelines for LIS Education (2022) pentingnya pustakawan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan informasi yang semakin digital dan kompleks (FKA3). Pustakawan seperti Mary Wright Plummer dan Alice Kroeger adalah contoh bagaimana pustakawan harus terus belajar dan mengembangkan diri. Plummer, misalnya, memperluas tujuan pendidikan perpustakaan dan memperkaya kurikulum di Pratt Institute dengan memasukkan aspek teknologi (Brand, 1996). Kroeger, di sisi lain, menekankan pentingnya pengetahuan teknologi dalam pengelolaan perpustakaan dan pelatihan pustakawan di Drexel University (Vann, 1961)
2. Pengelolaan metadata: Dalam era digital, metadata menjadi semakin penting untuk mengelola dan menyediakan akses terhadap sumber daya digital yang terus bertambah (FKA5). Pustakawan perlu memahami dan menerapkan standar metadata seperti Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) untuk memastikan sumber daya digital dapat ditemukan, diakses, dan digunakan secara efektif. (DCMI, 2014)
3. Perkembangan Semantic Web dan Linked Data: Semantic Web dan Linked Data adalah konsep yang bertujuan untuk membuat informasi di

web lebih terstruktur dan mudah diakses oleh mesin (Berners-Lee, Hendler, & Lassila, 2001). Pustakawan perlu memahami teknologi ini dan bagaimana mereka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterhubungan data perpustakaan. Misalnya, dengan menggunakan teknologi Linked Data, pustakawan dapat menghubungkan data bibliografi dengan sumber daya eksternal lainnya, seperti basis data penelitian atau situs web terkait, sehingga memperkaya pengalaman pengguna dan meningkatkan nilai informasi yang disediakan oleh perpustakaan.

4. Pengelolaan katalog perpustakaan di era digital

Tantangan dalam mengelola katalog perpustakaan di era digital menuntut transformasi dari katalog tradisional menjadi katalog generasi berikutnya (Catalog 2.0). Katalog generasi berikutnya ini harus lebih ramah pengguna (user-friendly), mudah dinavigasi, dan mampu mengintegrasikan berbagai jenis sumber daya, baik cetak maupun digital. Breeding (2013) menegaskan pentingnya transformasi ini agar katalog perpustakaan tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pengguna di era digital.

Panduan IFLA untuk Pendidikan IPI 2022 di bawah bagian FKA3 juga menyoroti pentingnya pustakawan memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai standar, model, pendekatan, persyaratan, dan solusi teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan data. Pustakawan perlu memahami teknologi yang digunakan untuk pengambilan, penyimpanan, pengelolaan, pemrosesan, penyajian, penerbitan, penemuan, akses, dan penggunaan data. Pemahaman komprehensif tentang siklus hidup data ini memungkinkan pustakawan untuk mengelola katalog perpustakaan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah menemukan dan mengakses sumber daya informasi yang mereka butuhkan.

5. Literasi Digital: Panduan IFLA (2022) mengakui peran penting pustakawan dalam memberdayakan individu dan komunitas untuk menavigasi lanskap digital yang kompleks (FKA8). Pustakawan, sebagai fasilitator literasi digital, menghadapi tantangan untuk mengembangkan dan memberikan program pendidikan yang relevan dan efektif yang memenuhi kebutuhan beragam pengguna.
6. Manajemen Sumber Daya Informasi: Panduan IFLA (2022) secara komprehensif membahas pengelolaan sumber daya informasi dalam berbagai format, termasuk sumber daya digital (FKA5). Tantangan yang melekat dalam mengelola dan menyediakan akses ke sumber daya digital sangat banyak, mulai dari masalah pelestarian digital dan hak cipta

hingga kebutuhan akan infrastruktur dan keahlian teknis yang memadai. Pustakawan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memilih, memperoleh, mengatur, dan memelihara koleksi digital, serta memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan bagi pengguna.

7. **Kebutuhan Informasi dan Layanan Pengguna:** Dengan menekankan pentingnya memahami kebutuhan informasi pengguna dan perilaku informasi dalam konteks digital (FKA7), pedoman IFLA (2022) mengakui bahwa teknologi digital telah mengubah cara orang mencari dan berinteraksi dengan informasi. Perubahan perilaku pengguna ini menimbulkan tantangan bagi pustakawan dalam merancang dan memberikan layanan yang relevan yang memenuhi harapan dan preferensi pengguna yang terus berkembang. Pustakawan harus mahir dalam teknik referensi digital, layanan pengguna virtual, dan penjangkauan berbasis teknologi untuk secara efektif melayani pengguna di era digital.
8. **Pendidikan Berkelanjutan (CE/PD):** Pedoman IFLA (2022) secara eksplisit menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan bagi pustakawan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan tren terkini (G7, hlm.12). Ini secara tidak langsung menegaskan sifat tantangan teknologi yang berkelanjutan dalam profesi pustakawan. Pembelajaran seumur hidup, baik melalui program formal maupun informal, sangat penting bagi pustakawan untuk mempertahankan kompetensi mereka dan beradaptasi dengan lanskap informasi yang terus berubah.

5.4 Peluang Yang Ditawarkan oleh Teknologi

Selain peran-peran tradisional yang telah disebutkan sebelumnya, perkembangan teknologi juga membuka peluang bagi pustakawan untuk mengambil peran baru yang lebih strategis dan inovatif. Teknologi telah merevolusi cara perpustakaan beroperasi dan memberikan layanan. Beberapa peluang utama yang ditawarkan teknologi dalam bidang IPI (IPI) mencakup:

1. **Akses Informasi yang Lebih Luas:** Calhoun (2014) menjelaskan bahwa teknologi digital telah mendemokratisasi akses informasi, memungkinkan perpustakaan menjangkau khalayak yang lebih luas dan menyediakan berbagai sumber daya elektronik, termasuk buku elektronik (ebook), jurnal online, basis data, dan repositori digital. Hal ini memperluas jangkauan perpustakaan dan memungkinkan pengguna mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja.
2. **Layanan Inovatif:** Profesional IPI dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan layanan inovatif yang meningkatkan pengalaman

pengguna dan memenuhi kebutuhan informasi yang terus berkembang. Contohnya termasuk layanan referensi virtual, katalog generasi berikutnya dengan kemampuan pencarian canggih, dan platform pembelajaran daring yang interaktif (Breeding, 2018d)

3. Kolaborasi Global: Platform online dan alat kolaborasi memungkinkan profesional IPI terhubung dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di seluruh dunia (Breeding, 2018d). Hal ini memfasilitasi pertukaran pengetahuan, berbagi praktik terbaik, dan pengembangan proyek bersama yang dapat memperkaya layanan perpustakaan dan memperluas akses terhadap informasi.
4. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Media sosial dan platform online lainnya telah merevolusi cara perpustakaan terlibat dengan komunitas mereka (King, 2018). Pustakawan dapat menggunakan platform ini untuk mempromosikan layanan mereka, mengadakan acara virtual, dan memfasilitasi diskusi online, sehingga meningkatkan keterlibatan dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pengguna.
5. Keahlian Baru: Munculnya peran-peran baru seperti pustakawan data, spesialis pengalaman pengguna, dan manajer repositori institusional menawarkan jalur karier yang beragam dan menarik bagi lulusan IPI (Allard, 2018). Peran-peran ini memanfaatkan keterampilan teknologi dan informasi untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data, merancang antarmuka yang ramah pengguna, dan memelihara koleksi digital, yang semuanya berkontribusi pada kemajuan perpustakaan di era digital.

Transformasi Perpustakaan dan IPI di Era Digital

Jika kepustakawanan ingin berkembang seperti yang dituntut oleh zaman atau kesempatan yang ditawarkan, kepustakawanan juga harus didukung dengan kuat oleh hasil penelitian dasar dan berkelanjutan. Beberapa di antaranya setidaknya harus bersifat antisipatif. Penelitian yang menjawab pertanyaan yang sudah diajukan itu berharga, penelitian yang menciptakan dan mengusulkan tidak ternilai harganya. Penelitian menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan dibutuhkan untuk pemahaman. Pemahaman, dikombinasikan dengan keterampilan, mengarah pada tindakan yang efektif.

—*Lowell Martin*. *Research in Librarianship*. *Library Trends* 6 (2) .
1957.: 105–9

Era digital yang terus berkembang pesat ini, teknologi telah merambah ke berbagai sendi kehidupan, tak terkecuali dunia perpustakaan. Perpustakaan yang dulunya identik dengan tumpukan buku dan suasana hening, kini bertransformasi menjadi pusat informasi dinamis yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih luas dan mudah diakses. Transformasi digital ini membawa dampak signifikan terhadap layanan dan operasi perpustakaan, menuntut adaptasi dan inovasi dari pustakawan dan profesional informasi agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna di era modern.

Bab enam ini akan mengulas secara mendalam mengenai dampak teknologi digital pada perpustakaan, meliputi perubahan dalam layanan, koleksi, dan interaksi dengan pengguna. Selain itu, akan dibahas pula faktor-faktor pendorong transformasi digital, peran berbagai pihak dalam mendukung transformasi tersebut, serta pentingnya literasi digital bagi pustakawan di era industri 4.0.

Dengan memahami peran krusial teknologi dalam dunia perpustakaan modern, diharapkan teks ini dapat memberikan wawasan komprehensif bagi para pustakawan, profesional informasi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama memajukan perpustakaan di era digital.

6.1 Dampak Teknologi Digital Pada Layanan dan Operasi Perpustakaan

Teknologi digital telah membawa perubahan besar pada layanan dan operasi perpustakaan. Dahulu, perpustakaan identik dengan gudang buku, namun kini perpustakaan telah bertransformasi menjadi pusat pembelajaran dan inovasi yang dinamis (IFLA, 2013, hlm. 4). Pustakawan dan profesional informasi dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan di era digital ini.

Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah pergeseran dari koleksi fisik ke koleksi digital. Perpustakaan kini tidak hanya menyediakan buku dan jurnal cetak, tetapi juga menyediakan akses ke berbagai sumber daya digital, seperti e-book, jurnal online, dan database (IFLA, 2013, hlm. 4). E-book, misalnya, menawarkan fleksibilitas dan portabilitas yang tidak dapat ditandingi oleh buku cetak. Jurnal online memberikan akses yang lebih cepat dan mudah ke penelitian terbaru. Database menyediakan informasi terstruktur yang dapat dicari dan dianalisis dengan efisien.

Transformasi digital ini memungkinkan perpustakaan untuk memperluas jangkauan layanan mereka, menjangkau pengguna di luar batasan fisik. Namun, tantangan baru pun muncul. Bagaimana perpustakaan dapat mengelola dan melestarikan koleksi digital yang terus berkembang? Bagaimana memastikan aksesibilitas bagi semua pengguna, terutama di tengah kesenjangan digital yang masih ada (IFLA, 2023, hlm. 29)?

Selain koleksi, interaksi antara perpustakaan dan pengguna juga telah berubah. Layanan online, seperti katalog online, peminjaman digital, dan layanan referensi virtual, semakin banyak digunakan (IFLA, 2022, hlm. 17). Layanan-layanan ini menawarkan efisiensi dan kemudahan akses bagi pengguna. Namun, perpustakaan perlu memastikan bahwa semua pengguna, termasuk mereka yang kurang familiar dengan teknologi, dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal.

Lebih dari itu, teknologi digital telah membuka peluang bagi perpustakaan untuk mengembangkan program dan layanan inovatif, seperti lokakarya literasi digital, penyediaan akses internet dan perangkat digital, serta fasilitasi pembelajaran online (IFLA, 2022, hlm. 22). Berdasarkan hal

tersebut, perpustakaan dapat berperan aktif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru. Kesenjangan digital, yaitu kesenjangan dalam akses dan kemampuan menggunakan teknologi, menjadi perhatian utama (Cullen, 2002, hlm. 1). Perpustakaan perlu mengambil peran aktif dalam mengatasi kesenjangan ini dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi dan informasi digital.

6.2 Faktor-Faktor Pendorong Transformasi Digital Perpustakaan

Transformasi digital perpustakaan bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan dalam menjawab tantangan dan peluang di era informasi yang terus berkembang pesat. Sejumlah faktor krusial mendorong urgensi transformasi ini, antara lain:

Pertama, perpustakaan digital mendemokratisasi akses informasi dengan menghilangkan batasan geografis dan waktu. Hal ini bukan hanya sekadar kemajuan teknologi, melainkan juga perwujudan amanat UU No.43.Tahun 2007, khususnya Pasal 4 yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi. Penelitian Fox, Gonçalves, & Kipp (2002) dalam *Digital Libraries* semakin memperkuat gagasan ini dengan menunjukkan bagaimana perpustakaan digital berkontribusi signifikan terhadap pemerataan akses informasi.

Selain itu, layanan perpustakaan telah direvolusi oleh TIK, menghasilkan peningkatan efisiensi dan efektivitas yang signifikan. Layanan referensi virtual, sistem penemuan daring, sumber daya pembelajaran elektronik, dan ruang kolaborasi daring merupakan bukti nyata bagaimana teknologi mampu mengoptimalkan layanan perpustakaan. Berbagai penelitian, seperti yang dilakukan oleh Breeding (2014), Henry (2011), Tyckoson (2011), dan Zhang & Deng (2014), telah mendokumentasikan dampak positif ini secara komprehensif.

Tidak hanya layanan, tuntutan kompetensi pustakawan pun turut bertransformasi seiring dengan perkembangan TIK. Pustakawan masa kini dituntut untuk tidak hanya menguasai literasi informasi tradisional, tetapi juga literasi digital dan kompetensi TIK. Hal ini secara eksplisit diamanatkan dalam Standar Kompetensi Pustakawan Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 19 Tahun 2017. Pedoman IFLA untuk Program Pendidikan Profesional IPI (Chu et al., 2022) dan Laporan Tren IFLA 2023 semakin menegaskan bahwa

pengembangan kompetensi ini merupakan sebuah keharusan, bukan lagi pilihan.

Lebih jauh lagi, transformasi digital membuka peluang luas bagi inovasi layanan dan program perpustakaan. Teknologi seperti *linked data*, kecerdasan buatan (AI), dan *machine learning* tidak hanya sekadar tren, tetapi juga alat yang dapat menciptakan layanan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Kolaborasi lintas sektor, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, juga menjadi semakin krusial dalam mengembangkan solusi inovatif untuk menjawab tantangan informasi yang semakin kompleks. Penelitian Calhoun (2014) dan King (2018) memberikan bukti empiris mengenai bagaimana inovasi teknologi dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan secara signifikan.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), seperti internet, web 2.0, media sosial, perangkat seluler, dan teknologi semantik, telah mengubah lanskap informasi secara fundamental. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara informasi diakses, digunakan, dan dibagikan, tetapi juga berdampak pada kebutuhan dan harapan pengguna perpustakaan. Pengguna saat ini, yang didominasi oleh generasi yang melek teknologi, menginginkan akses mudah ke informasi digital, layanan yang dipersonalisasi, dan pengalaman pengguna yang interaktif (Aharony, 2008; Mwaniki, 2018; Xia, 2013). Teknologi yang sedang berkembang seperti AI, *blockchain*, VR, AR, IoT, dan pencetakan 3D juga mulai mengubah cara perpustakaan beroperasi dan berinteraksi dengan pengguna (Senthamilselvi, A., & Srinivasaragavan, S. (2023)

Dampak dari perkembangan TIK ini juga terlihat pada munculnya sumber daya informasi digital seperti ebook, jurnal elektronik, dan basis data daring, yang telah mengubah lanskap koleksi perpustakaan. Pustakawan dituntut untuk tidak hanya mengembangkan keterampilan dalam mengelola dan menyediakan akses ke sumber daya ini, tetapi juga menghadapi tantangan anggaran dan perubahan model bisnis penerbitan dan penyediaan informasi yang semakin kompleks (Mwaniki, 2018).

Perubahan lanskap informasi juga telah menggeser peran perpustakaan dalam masyarakat. Perpustakaan tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran, kolaborasi, dan inovasi. Oleh karena itu, pustakawan perlu mengambil peran

yang lebih aktif dalam mendukung kegiatan penelitian, pembelajaran, dan pengembangan masyarakat (Abels, Howarth, & Smith, 2016).

Namun, transformasi digital tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan. Salah satu tantangan utama adalah isu-isu etika dan kebijakan informasi seperti hak cipta, akses terbuka, privasi data, dan netralitas jaringan. Isu-isu ini menjadi semakin relevan dan kompleks seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pustakawan dan profesional informasi dituntut untuk memahami dan terlibat aktif dalam diskusi mengenai isu-isu ini, baik di tingkat nasional maupun internasional (Jaeger & Taylor, 2019)

6.3 Peran Lembaga Pendidikan Dalam Membantu Transformasi Perpustakaan Di Era Digital

Lembaga pendidikan IPI (IPI) memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi Transformasi Perpustakaan di era digital. Hal ini sesuai dengan amanat dalam PP No.24 Tahun 2014, khususnya Pasal 15 ayat (2), dan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Perpustakaan. Peran ini dapat diwujudkan melalui:

1. **Pembaruan Kurikulum:** Kurikulum pendidikan IPI harus direvisi dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna (Chu et al., 2022, G3 Curriculum and Pedagogy). Kurikulum yang adaptif harus mencakup kompetensi inti seperti manajemen metadata (FKA5), kurasi data (FKA5), literasi digital (FKA8 Literacies and Learning), serta keterampilan interpersonal dan kepemimpinan (FKA6 Management for Information Professionals) (IFLA, 2022).

Selain itu, kurikulum juga perlu mengintegrasikan pembelajaran tentang teknologi baru seperti *blockchain*, *Internet of Things* (IoT), dan *virtual reality* (VR) (DeLong, Kathleen, et al. 2020). K. Veeranjanyulu (2023) menekankan bahwa kurikulum pendidikan IPI perlu direstrukturisasi untuk mengintegrasikan mata pelajaran teknis seperti teknologi informasi (TI), pengambilan informasi (IR), dan kecerdasan buatan (AI) untuk membekali lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola perpustakaan otomatis. B. Ramesh Babu (2023) juga menyoroti pentingnya lembaga pendidikan dalam mempersiapkan pustakawan untuk menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna yang terus berkembang

2. **Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran:** Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti pemanfaatan perangkat lunak, *Learning Management System* (LMS),

webinar, dan sumber daya pembelajaran terbuka (*Open Educational Resources/OER*) (Chu et al., 2022, G8 Education and Research Resources and Facilities). Hal ini akan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan siswa di era digital.

Selain itu, akses terhadap teknologi dan sumber daya digital seperti laboratorium komputer, internet berkecepatan tinggi, dan langganan basis data serta jurnal elektronik juga perlu ditingkatkan N. Amsaveni, P. Raja Rajeshwari, & R. S. Jeya Suriya Dheva (2023) juga menyoroti pentingnya pelestarian digital dan aksesibilitas informasi ilmiah. S.R. Muralidharan dan P. Dharani Kumar (2023) menambahkan bahwa perpustakaan pintar (*smart library*) yang terintegrasi dengan teknologi seperti RFID, komputasi awan, dan aplikasi seluler dapat meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi pengguna.

3. Mendorong Kolaborasi dan Kemitraan: Kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perpustakaan, perusahaan teknologi, dan organisasi profesional, merupakan langkah strategis untuk mendukung transformasi perpustakaan. Kolaborasi ini dapat memfasilitasi pembaruan kurikulum yang lebih efektif, penyediaan pelatihan dan pengembangan profesional bagi dosen, serta membuka peluang magang dan kerja yang relevan bagi lulusan (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2021). Dengan begitu, lulusan akan lebih siap menghadapi dunia kerja dan berkontribusi secara optimal dalam transformasi perpustakaan di era digital

Selain ketiga peran utama di atas, lembaga pendidikan IPI juga dapat berperan dalam memfasilitasi transformasi perpustakaan melalui:

1. Pelatihan Profesional Berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD): Pelatihan ini dapat berupa lokakarya, seminar, webinar, konferensi, atau kursus daring yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi, lembaga pendidikan, atau penyedia pelatihan lainnya. CPD membantu pustakawan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan terbaru di bidang IPI (Chu et al., 2022, G7 Complementary Education and Professional Development).
2. Komunitas Praktik (*Communities of Practice*): Komunitas praktik adalah kelompok informal yang terdiri dari pustakawan dan profesional informasi lainnya yang memiliki minat dan tujuan bersama. Komunitas praktik dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik, serta berkolaborasi dalam mengembangkan solusi

inovatif untuk tantangan yang dihadapi di era digital (BSLISE Working Group, 2018).

3. Pembelajaran Mandiri (*Self-Directed Learning*): Pustakawan juga dapat belajar secara mandiri melalui berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, blog, dan sumber daya daring lainnya (Otto, P., 2014). Pembelajaran mandiri memungkinkan pustakawan untuk mengembangkan kompetensi mereka sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka sendiri.
4. Magang dan Pengalaman Kerja: Magang dan pengalaman kerja di perpustakaan atau lembaga informasi lainnya dapat memberikan kesempatan bagi pustakawan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dalam situasi dunia nyata. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengembangkan kompetensi praktis dan membangun jaringan profesional (BSLISE Working Group, 2018).

6.4 Peran Organisasi Profesi dan Pemerintah dalam Mendorong Transformasi Perpustakaan

Organisasi profesi perpustakaan, seperti asosiasi pustakawan sekolah, memegang peran krusial dalam mengadvokasi pengembangan perpustakaan sekolah. Mereka tidak hanya menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi pustakawan sekolah, tetapi juga berperan aktif dalam mengkomunikasikan pentingnya perpustakaan sekolah kepada para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan (George & Singh, 2014, hlm. 3). Di Indonesia, Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia (APISI) dan Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI) telah melakukan berbagai upaya advokasi, termasuk seminar, lokakarya, dan konsultasi, untuk memperkuat peran perpustakaan sekolah dan pustakawan (George & Singh, 2014, hlm. 4).

Selain advokasi, organisasi profesi juga memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga profesionalisme anggotanya. Kode Etik Pustakawan Indonesia, yang disahkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), memberikan panduan bagi pustakawan dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan beretika (Ikatan Pustakawan Indonesia, 2019, hlm. 53). Kode etik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban untuk melayani pengguna perpustakaan dengan baik hingga melindungi hak privasi pengguna dan mengakui hak kekayaan intelektual.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendorong transformasi perpustakaan. Dukungan pemerintah dapat berupa penyediaan sumber daya, pengembangan infrastruktur, dan pembuatan kebijakan yang mendukung pengembangan perpustakaan dan peningkatan kompetensi pustakawan (Farmer, 2014, hlm. 175). Kolaborasi antara organisasi profesi

dan pemerintah, seperti yang terjadi di Nepal dan Brazil, telah terbukti efektif dalam menciptakan perubahan positif dalam lanskap perpustakaan sekolah (Farmer, 2014, hlm. 182-183).

Organisasi profesi perpustakaan, seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), memiliki peran sentral dalam mendukung transformasi perpustakaan. Melalui pengembangan standar kompetensi yang relevan dengan tuntutan era digital, seperti yang dijelaskan dalam IFLA Guidelines for Professional LIS Education Programmes (Chu et al., 2022), IPI memastikan pustakawan memiliki kompetensi dalam penguasaan teknologi informasi, literasi digital, manajemen data, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Lebih lanjut, IPI juga berperan aktif dalam memfasilitasi pelatihan dan lokakarya guna meningkatkan kompetensi pustakawan, serta mengadvokasi kepentingan mereka di tingkat nasional dan internasional (B. Ramesh Babu, 2023).

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga memiliki peran penting dalam mendorong transformasi perpustakaan di era digital. Hal ini tertuang dalam PP No.24 Tahun 2014, khususnya Pasal 15 ayat (2), yang mengamanatkan pemerintah untuk mendukung pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dukungan ini dapat berupa penyediaan infrastruktur digital, pelatihan pustakawan, dan program literasi digital bagi masyarakat. Selain itu, Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Perpustakaan juga menekankan pentingnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang mencakup pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan perpustakaan (Shashikumar M.C. dan Chandrashekara M., 2023). Pemerintah juga berperan dalam menciptakan undang-undang dan regulasi yang mendukung hak cipta dan akses terbuka terhadap informasi (Chidananda M., Mallinath Kumbar, dan Surendra C.S., 2023)

Perpustakaan sendiri harus berperan aktif dalam menghadapi transformasi digital ini. Pengembangan koleksi digital, adopsi teknologi baru, dan perancangan layanan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pengguna merupakan beberapa langkah krusial yang perlu diambil (Abels, Howarth, & Smith, 2016). Selain itu, menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, perusahaan teknologi, dan komunitas, juga dapat memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Pemanfaatan perangkat lunak manajemen konten untuk repositori akses terbuka, serta pelestarian dan aksesibilitas informasi ilmiah juga merupakan bagian penting dari transformasi digital (N. Amsaveni, P. Raja Rajeshwari, dan R. S. Jeya Suriya Dheva, 2023).

Organisasi profesi seperti American Library Association (ALA) dan International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) turut berperan dalam mendorong transformasi perpustakaan. Melalui pengembangan standar kompetensi, advokasi kebijakan, pelatihan dan pengembangan profesional, serta pembentukan jaringan dan kolaborasi, organisasi-organisasi ini memastikan perpustakaan dan pustakawan siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal, juga memberikan dukungan signifikan melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung transformasi digital perpustakaan, pendanaan untuk inisiatif transformasi, serta kolaborasi dengan organisasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya. Contoh kolaborasi yang sukses adalah inisiatif Building Strong Library and Information Science Education (BSLISE) oleh IFLA, yang bertujuan untuk merumuskan kerangka kerja jaminan kualitas internasional untuk pendidikan IPI.

Dengan adanya kerjasama yang erat antara organisasi profesi, pemerintah, dan perpustakaan itu sendiri, transformasi perpustakaan di era digital dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

6.5 Pentingnya Literasi Digital Bagi Pustakawan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap IPI. Transformasi ini menuntut adanya adaptasi dari para profesional IPI, terutama dalam hal penguasaan literasi digital. Kemampuan untuk menavigasi, mengevaluasi, dan memanfaatkan sumber daya digital secara efektif menjadi krusial di era industri 4.0 ini. (Salubi, 2023)

Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam mengoperasikan perangkat dan aplikasi digital, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi tersebut memengaruhi akses, penggunaan, dan penyebaran informasi. (The IFLA Guidelines for Professional LIS Education 2022, 2022) Dalam konteks IPI, literasi digital melibatkan kemampuan untuk mengelola, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam berbagai format, serta memahami implikasi etis dan hukum dari penggunaan informasi digital. (The Role of Information Professionals in the Knowledge Economy, 2017)

Pustakawan, sebagai garda terdepan dalam penyediaan informasi, perlu memiliki kemampuan literasi digital yang mumpuni. Mereka harus mampu membantu pengguna dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan sumber daya digital secara kritis, serta mengembangkan keterampilan literasi informasi yang diperlukan untuk menghadapi

tantangan di era digital. (ALA Core Competences of Librarianship, 2022; Building Strong LIS Education, 2018)

Lebih dari itu, literasi digital memungkinkan pustakawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan koleksi digital, layanan online, dan program pembelajaran berbasis teknologi. (Rethinking Information Work, 2016) Mereka harus mampu merancang dan mengelola platform digital yang inovatif dan mudah diakses, serta memberikan pelatihan dan dukungan kepada pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal.

Dalam menghadapi era industri 4.0, transformasi perpustakaan dan profesional informasi menjadi suatu keniscayaan. Penguasaan literasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi pustakawan untuk tetap relevan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. (CARL/CAPAL, 2020) Dengan literasi digital yang kuat, mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong inovasi, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memberdayakan masyarakat di era digital ini.

Literasi digital merupakan aspek krusial dalam transformasi peran pustakawan di era digital. Penelitian Mahadeva Prasad M.S. (2023) menekankan pentingnya literasi informasi dalam lingkungan akademik, menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki akses terhadap teknologi, kompetensi literasi informasi mereka masih perlu ditingkatkan. Pustakawan perlu membekali diri dengan literasi digital yang mencakup kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dan etis di lingkungan digital.

Pustakawan yang memiliki literasi digital yang kuat dapat berperan sebagai fasilitator dan pembimbing bagi pengguna dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Mereka dapat memberikan pelatihan literasi informasi kepada pengguna, membantu mereka mengevaluasi sumber informasi, dan membimbing mereka dalam menggunakan alat dan teknologi digital secara efektif. Selain itu, pustakawan juga dapat berperan dalam mengembangkan konten digital yang berkualitas dan mudah diakses oleh pengguna, sehingga memperkaya khazanah pengetahuan digital.



Kompetensi Pustakawan dan Profesional Informasi

Bagian bab ini akan mengkaji kompetensi yang dibutuhkan oleh pustakawan dan profesional informasi di era digital. Peran pustakawan telah bertransformasi secara signifikan, menuntut pengembangan kompetensi yang terus menerus agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.

Pembahasan dimulai dengan menelusuri sejarah singkat kompetensi pustakawan untuk memahami evolusi peran dan keahlian yang dibutuhkan seiring waktu. Selanjutnya, akan diuraikan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh pustakawan profesional, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola informasi dan layanan perpustakaan. Bab ini juga akan membahas model-model kompetensi pustakawan yang telah dikembangkan oleh berbagai organisasi dan lembaga profesional, serta kerangka kerja kompetensi pustakawan yang memberikan panduan terstruktur untuk pengembangan profesional.

Selain itu, akan dibahas pula kompetensi digital pustakawan yang semakin krusial di era digital, serta isu-isu etika dan profesionalisme yang perlu diperhatikan dalam praktik kepustakawanan. Untuk memperluas wawasan, bab ini juga akan menyajikan studi kasus tentang kompetensi pustakawan di berbagai jenis perpustakaan, menunjukkan penerapan kompetensi dalam konteks yang berbeda. Terakhir, akan diberikan tinjauan kualifikasi profesional pustakawan dan profesional informasi di Asia Tenggara dan Selatan untuk memberikan gambaran komparatif dan menunjukkan tren perkembangan kompetensi di tingkat regional.

7.1 Sejarah Singkat Kompetensi Pustakawan

Konsep kompetensi pustakawan, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas

dan tanggung jawab secara efektif, telah mengalami evolusi yang signifikan seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, peran pustakawan seringkali dianggap terbatas pada pemeliharaan dan pengelolaan koleksi buku, dengan fokus utama pada aspek teknis seperti pengatalogan dan klasifikasi (Cutter, 1876). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, peran pustakawan mulai berkembang melampaui tugas-tugas tradisional tersebut.

Pada awal abad ke-20, tokoh-tokoh seperti Melvil Dewey (1887) dan John Cotton Dana (1904) mulai menekankan pentingnya layanan publik dan pemahaman kebutuhan pengguna dalam praktik perpustakaan. Dewey, dengan sistem Klasifikasi Desimal Dewey (DDC) yang inovatif, merevolusi cara pengorganisasian koleksi perpustakaan, sementara Dana memperkenalkan konsep perpustakaan khusus yang berfokus pada kebutuhan informasi spesifik pengguna (Dana, 1904).

Pertengahan abad ke-20 ditandai dengan perubahan signifikan dalam pendidikan kepustakawanan. Williamson (1923), dalam studinya, menekankan perlunya pendekatan yang lebih ilmiah dan berbasis penelitian dalam pendidikan perpustakaan. Hal ini mendorong munculnya sekolah-sekolah pascasarjana perpustakaan dan ilmu informasi, seperti Graduate Library School di University of Chicago, yang berperan penting dalam membentuk landasan teoritis dan metodologis bagi profesi pustakawan (Richardson, 1981).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi pada akhir abad ke-20, kompetensi pustakawan semakin diperluas. Lancaster (1981) menekankan pentingnya keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi kompleksitas informasi, sementara Rubin (1982) menyoroti pentingnya keterampilan komunikasi yang efektif dalam berinteraksi dengan pengguna dan pemangku kepentingan.

Memasuki abad ke-21, peran pustakawan semakin berkembang menjadi manajer pengetahuan yang berperan dalam memfasilitasi akses, penyebaran, dan pemanfaatan informasi dan pengetahuan secara efektif (Evans and Ward, 2000). Pustakawan tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan koleksi, tetapi juga pada pengembangan layanan informasi yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pengguna di era digital.

Dengan demikian, sejarah perkembangan kompetensi pustakawan mencerminkan perjalanan panjang dari penjaga buku menjadi profesional informasi yang memainkan peran penting dalam masyarakat. Seiring dengan perubahan zaman dan teknologi, kompetensi pustakawan terus berkembang

dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang semakin kompleks.

Perlu dicatat bahwa selain tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, kontribusi signifikan juga diberikan oleh tokoh-tokoh seperti S.R. Ranganathan, Jesse Shera, dan lainnya dalam membentuk konsep kompetensi pustakawan modern (Gorman, M. (2000). Ranganathan, dengan teori klasifikasi facet-nya, menekankan pentingnya pengetahuan teknis dan organisasi informasi yang efektif (Ranganathan, 1967). Shera, di sisi lain, menyoroti pentingnya penelitian dan pendekatan interdisipliner dalam IPI (Schrader, 1984). Kontribusi mereka, bersama dengan tokoh-tokoh lainnya, telah meletakkan dasar bagi kompetensi pustakawan yang saat ini mencakup pengetahuan teknis, keterampilan layanan pelanggan, keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan manajemen.

7.2 Makna Istilah "Kompetensi"

Istilah "kompetensi" kian marak diperbincangkan dalam dunia profesional, khususnya dalam bidang IPI (IPI) yang dinamis. Memahami makna kompetensi secara mendalam menjadi krusial untuk mempersiapkan pustakawan handal yang mampu menjawab tantangan zaman. Makalah ini mengupas makna kompetensi berdasarkan analisis dari berbagai sumber, dengan fokus pada konteks IPI

Kata "kompetensi" berakar dari bahasa Latin "competentia" yang mengandung dua dimensi penting: otoritas dan keahlian. Dimensi otoritas menunjukkan kewenangan pustakawan dalam menilai informasi dan sumber daya, sedangkan dimensi keahlian merujuk pada kemampuannya dalam mengelola dan mengakses informasi secara efektif (Gnahs, D. (2011, hlm.17).

Berbagai sumber memberikan definisi yang saling melengkapi mengenai kompetensi. Kamus daring Cambridge.org mendefinisikan "kompetensi" sebagai keterampilan penting yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan (diakses pada 15 September 2024). Definisi ini menekankan aspek praktis dari kompetensi, yaitu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi kerja nyata. Sementara itu, Kamus Merriam-Webster.com mengartikan kompetensi sebagai "a: kepemilikan pengetahuan atau keterampilan yang cukup. b: otoritas hukum, kemampuan, atau diterima." Definisi ini memperluas makna kompetensi dengan memasukkan unsur pengetahuan, otoritas, dan penerimaan sosial. Terakhir, Kamus daring CollinsDictionary.com menyederhanakan kompetensi sebagai "kemampuan untuk melakukan

sesuatu dengan baik atau efektif." (diakses pada 15 September 2024). Definisi ini berfokus pada hasil akhir dari kompetensi, yaitu kinerja yang baik dan efektif.

Berdasarkan analisis dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan dengan baik dan efektif. Kompetensi juga mencakup aspek otoritas, legitimasi, dan penerimaan sosial dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, memiliki kompetensi berarti seseorang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang diakui dan diterima untuk menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu dengan hasil yang memuaskan.

7.3 Pengertian Kompetensi

Definisi kompetensi merupakan salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam penelitian bisnis, dengan minimnya konsensus di antara para peneliti dan organisasi. Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia No 236 Tahun 2019 (SKKNI No. 236 Tahun 2019) kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat diamati, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai standar performa yang ditetapkan

Berikut ini adalah kumpulan definisi kompetensi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dalam bidang manajemen, psikologi, dan pendidikan. Definisi-definisi ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang konsep kompetensi dari berbagai perspektif, yang dapat membantu dalam memahami dan mengaplikasikan konsep ini dalam berbagai konteks.

1. McClelland (1973): Kompetensi adalah karakteristik mendasar individu yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan kinerja efektif atau superior dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu.
2. Klempe (1980): Kompetensi merupakan karakteristik dasar individu yang menghasilkan kinerja efektif atau unggul dalam pekerjaan.
3. Messick (1984): Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki individu dalam kondisi ideal, tanpa gangguan atau hambatan yang mempengaruhi penampilan. Kompetensi mencerminkan potensi maksimal seseorang.
4. Hornby & Thomas (1989): Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial secara efektif dalam situasi kerja.

5. Jacobs (1989): Kompetensi adalah keterampilan atau kemampuan yang dapat diamati yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas manajerial dengan sukses.
6. Hogg (1989): Kompetensi adalah karakteristik seorang manajer yang mengarah pada demonstrasi keterampilan dan kemampuan, yang pada akhirnya menghasilkan kinerja efektif dalam suatu bidang pekerjaan tertentu, termasuk kapasitas untuk mentransfer keterampilan dan kemampuan tersebut ke bidang lain.
7. Spencer & Spencer (1993): Kompetensi adalah karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan kinerja efektif atau unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu.
8. Page & Wilson (1994): Kompetensi adalah keterampilan, kemampuan, dan karakteristik pribadi yang dibutuhkan oleh seorang manajer yang efektif atau baik. Ini mencakup kompetensi yang dapat diamati secara langsung (misalnya, pengetahuan dan keterampilan) serta kompetensi yang lebih sulit dinilai (misalnya, karakteristik pribadi).
9. Gilbert (1996): Kompetensi adalah kemampuan untuk secara konsisten menghasilkan perilaku yang berharga dan diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.
10. Dubois (1998): Kompetensi adalah karakteristik seperti pengetahuan, keterampilan, pola pikir, dan sejenisnya yang, ketika digunakan baik secara tunggal maupun kombinasi, menghasilkan kinerja yang sukses.
11. Evarts (1998): Kompetensi adalah karakteristik mendasar seorang manajer yang secara kausal berhubungan dengan kinerja superiornya dalam pekerjaan.
12. Woodall & Winstanley (1998): Kompetensi adalah keterampilan, pengetahuan, pemahaman, kualitas, atribut, nilai, kepercayaan, dan sikap yang mengarah pada kinerja manajerial yang efektif dalam konteks, situasi, atau peran tertentu.
13. Arnold (2001): Kompetensi menunjukkan kapasitas seseorang untuk bertindak. Kompetensi tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan kurikuler atau terkait mata pelajaran tetapi juga keterampilan non-kurikuler dan lintas kurikuler, yang seringkali digambarkan dalam istilah kompetensi metodologis (tahu bagaimana mengetahui), kompetensi sosial, kompetensi pribadi, atau kualifikasi kunci.
14. Dehnbostel & Gillen (2005): Istilah 'kompetensi' mengacu pada kemampuan, metode, pengetahuan, sikap, dan nilai yang berkaitan dengan perolehan, pengembangan, dan penggunaannya sepanjang hidup

seseorang. Pengembangan kompetensi dilihat dari sudut pandang subjek dan kemampuan serta minatnya. Dalam orientasinya terhadap subjek, ini termasuk dimensi pendidikan.

15. Klieme & Leutner (2006): Kompetensi adalah disposisi khusus konteks untuk kinerja yang terkait secara fungsional dengan situasi dan persyaratan dalam domain tertentu.
16. Cernusca & Dima (2007): Kompetensi adalah karakteristik atau keterampilan yang dimiliki seseorang yang dapat diukur dan dipetakan untuk memprediksi kinerja dan pengembangan karir mereka. Kompetensi ini dapat berupa pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan yang relevan dengan pekerjaan tertentu. Pemetaan kompetensi membantu para ahli SDM dalam memahami kompetensi apa yang dibutuhkan untuk suatu posisi dan siapa yang paling cocok untuk mengisi posisi tersebut.
17. Bernthal et al. (2004): Kompetensi adalah seperangkat keterampilan, pengetahuan, dan atribut yang berkontribusi pada kinerja yang efektif dan keberhasilan organisasi. Model kompetensi adalah alat untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menyelaraskan kompetensi ini untuk mencapai tujuan strategis organisasi.
18. Boyatzis (2008): Kompetensi adalah karakteristik mendasar individu yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan kinerja superior dalam suatu pekerjaan.
19. Gaspar (2012): Kompetensi adalah seperangkat keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang dapat diamati dan diukur yang dibutuhkan seseorang untuk berhasil dalam suatu peran atau pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi.
20. Kerangka Kompetensi e-Eropa (2014): Kompetensi adalah kemampuan yang terbukti untuk mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai hasil yang dapat diamati.
21. Chouhan & Srivastava (2014): Kompetensi adalah kemampuan untuk menerapkan atau menggunakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku, dan karakteristik pribadi untuk berhasil melaksanakan tugas-tugas penting, fungsi-fungsi tertentu, atau menjalankan peran atau posisi tertentu.
22. Rubin & Rubin (2020): Kompetensi umumnya mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas profesional.

Dengan mengacu pada 22 definisi kompetensi yang telah dijelaskan, analisis berikut akan mengevaluasi berbagai aspek yang terkandung dalam

definisi-definisi tersebut. Pertama-tama, kita akan membahas bagaimana kompetensi dipandang dari dimensi yang berbeda.

1. Kompetensi sebagai karakteristik Individu yang berhubungan dengan kinerja

McClelland (1973), Klemm (1980), Spencer dan Spencer (1993), Evarts (1998), dan Boyatzis (2008) menekankan bahwa kompetensi adalah karakteristik mendasar individu yang berkontribusi langsung pada kinerja yang efektif atau unggul dalam pekerjaan. Karakteristik ini bisa berupa:

- 1) Pengetahuan (Knowledge): Pemahaman tentang fakta, konsep, teori, atau prosedur yang relevan dengan pekerjaan.
- 2) Keterampilan (Skills): Kemampuan untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu dengan baik, seperti keterampilan teknis, interpersonal, atau manajerial.
- 3) Kemampuan (Abilities): Bakat atau potensi bawaan yang memungkinkan seseorang untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru dengan cepat.
- 4) Sifat-sifat Kepribadian (Traits): Karakteristik kepribadian yang stabil, seperti ketelitian, inisiatif, atau kemampuan beradaptasi, yang dapat mempengaruhi kinerja.

Definisi-definisi ini menyiratkan bahwa kompetensi bukan hanya tentang apa yang seseorang ketahui (pengetahuan), tetapi juga tentang apa yang bisa mereka lakukan (keterampilan) dan bagaimana mereka melakukannya (kemampuan dan sifat-sifat kepribadian).

2. Kompetensi sebagai kemampuan yang dapat diamati dan diukur

Jacobs (1989) dan Gilbert (1996) fokus pada aspek kompetensi yang dapat diamati, seperti keterampilan dan perilaku, yang menghasilkan kinerja yang sukses. Definisi ini lebih operasional dan memudahkan pengukuran serta pengembangan kompetensi.

Dalam konteks ini, kompetensi dapat diukur melalui berbagai metode, seperti:

- 1) Observasi langsung: Mengamati bagaimana seseorang melakukan tugasnya dalam situasi kerja yang sebenarnya.
- 2) Tes kinerja: Memberikan tugas atau simulasi yang dirancang untuk mengukur keterampilan atau kemampuan tertentu.
- 3) Wawancara berbasis kompetensi: Mengajukan pertanyaan yang menggali pengalaman dan perilaku masa lalu yang relevan dengan kompetensi yang dinilai.

- 4) Penilaian 360 derajat: Mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, dan diri sendiri, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kompetensi seseorang.

Pengukuran kompetensi secara objektif memungkinkan organisasi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, memfasilitasi pelatihan dan pengembangan yang sesuai, serta menempatkan individu pada posisi yang optimal berdasarkan kompetensi mereka. Oleh karena itu, pengukuran kompetensi bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga strategi krusial dalam pengembangan sumber daya manusia yang efektif

3. Kompetensi sebagai Kombinasi Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap

Messick (1984) dan Woodall & Winstanley (1998) memperluas definisi kompetensi dengan memasukkan tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga nilai-nilai, sikap, dan pemahaman. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi adalah konsep yang holistik dan melibatkan aspek kognitif (pengetahuan), psikomotorik (keterampilan), dan afektif (sikap dan nilai-nilai).

- 1) Pengetahuan (Knowledge): Dasar dari kompetensi, mencakup pemahaman tentang fakta, konsep, teori, dan prosedur yang relevan dengan pekerjaan.
- 2) Keterampilan (Skills): Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam tindakan nyata, seperti memecahkan masalah, berkomunikasi efektif, atau mengelola proyek.
- 3) Pemahaman (Understanding): Kemampuan untuk menginterpretasikan informasi, menghubungkan konsep, dan melihat gambaran besar.
- 4) Sikap (Attitude): Kecenderungan untuk berpikir, merasa, dan berperilaku dengan cara tertentu, seperti memiliki inisiatif, bertanggung jawab, atau berorientasi pada pelayanan.
- 5) Nilai-nilai (Values): Prinsip-prinsip yang membimbing tindakan dan keputusan seseorang, seperti integritas, kejujuran, atau keadilan.

Integrasi ketiga aspek ini, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, akan menghasilkan kinerja yang optimal. Misalnya, seorang manajer proyek yang kompeten tidak hanya memiliki pengetahuan tentang manajemen proyek (pengetahuan) dan keterampilan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek (keterampilan), tetapi juga memiliki sikap positif terhadap pekerjaan, integritas dalam pengambilan keputusan, dan komitmen untuk mencapai tujuan proyek (sikap dan nilai-nilai).

4. Kompetensi dalam Konteks Pekerjaan Tertentu

Hornby dan Thomas (1989) serta Page dan Wilson (1994) menekankan bahwa kompetensi harus relevan dengan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan tertentu. Kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang akuntan akan berbeda dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang perawat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi kompetensi inti (core competencies) yang dibutuhkan untuk setiap peran atau jabatan dalam organisasi. Kompetensi inti adalah kompetensi yang sangat penting dan mendasar untuk keberhasilan dalam pekerjaan tersebut. Dengan memahami kompetensi inti, organisasi dapat:

- 1) Merekrut dan menyeleksi karyawan yang memiliki kompetensi yang tepat untuk setiap posisi.
 - 2) Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan yang berfokus pada peningkatan kompetensi inti karyawan.
 - 3) Menilai kinerja karyawan berdasarkan kemampuan mereka untuk menunjukkan kompetensi inti dalam pekerjaan.
 - 4) Menciptakan jalur karir yang jelas bagi karyawan berdasarkan kompetensi mereka.
5. Kompetensi sebagai Prediktor Kinerja dan Pengembangan Karir

Cernusca dan Dima (2007) menyoroti peran krusial kompetensi dalam memprediksi kinerja dan memetakan pengembangan karir individu. Kompetensi yang dimiliki seseorang dapat menjadi indikator kuat potensi kesuksesan mereka dalam peran tertentu. Dengan mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk suatu posisi dan membandingkannya dengan kompetensi individu, organisasi dapat memprediksi secara akurat kinerja individu tersebut dalam peran tersebut.

Lebih lanjut, pemetaan kompetensi menjadi instrumen penting dalam perencanaan pengembangan karir individu. Dengan memahami kompetensi yang mereka miliki dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan karir mereka, individu dapat mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang ada. Langkah selanjutnya adalah merancang strategi untuk menutup kesenjangan tersebut melalui pelatihan, pengembangan diri, atau pengalaman kerja yang relevan.

Dengan demikian, pemetaan kompetensi memberikan manfaat ganda, baik bagi organisasi dalam memprediksi kinerja calon karyawan maupun bagi individu dalam merencanakan dan mengembangkan jalur karir mereka secara efektif.

6. Kompetensi sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan Organisasi

Bernthal et al. (2004) dan Gaspar (2012) menyiratkan bahwa kompetensi adalah kunci untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

Organisasi yang memiliki karyawan dengan kompetensi yang tepat akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan, berinovasi, dan bersaing di pasar global.

Oleh karena itu, organisasi perlu menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan kompetensi karyawan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

- 1) Pelatihan dan pengembangan: Menyediakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan kompetensi karyawan.
- 2) Pembelajaran berbasis pengalaman: Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk belajar dari pengalaman mereka sendiri dan dari orang lain.
- 3) Mentoring dan coaching: Menyediakan bimbingan dan dukungan dari karyawan yang lebih berpengalaman.
- 4) Rotasi kerja: Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mencoba berbagai peran dan tanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi mereka.

Dengan berinvestasi pada pengembangan kompetensi karyawan, organisasi dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, dan daya saing mereka.

7. Kompetensi sebagai Kemampuan yang Terbukti (Demonstrated Ability)

Kerangka Kompetensi e-Eropa (e-CF) menekankan bahwa kompetensi bukan hanya pengetahuan atau keterampilan semata, tetapi kemampuan yang telah terbukti dalam menghasilkan hasil yang nyata. Kompetensi hanya dapat dikatakan ada jika individu dapat menunjukkan bahwa mereka mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi kerja yang sebenarnya.

Oleh karena itu, penilaian kompetensi tidak hanya berfokus pada apa yang individu ketahui dan bisa lakukan, tetapi juga pada bagaimana mereka telah menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam praktik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti observasi langsung, penilaian kinerja, portofolio, atau presentasi.

8. Kompetensi sebagai Kemampuan untuk Menjalankan Tugas Profesional

Rubin dan Rubin (2020) serta Chouhan dan Srivastava (2014) menekankan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan

kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas profesional secara efektif. Kompetensi profesional adalah kompetensi yang spesifik untuk suatu bidang atau profesi tertentu. Kompetensi profesional sangat penting bagi individu yang ingin sukses dalam karir mereka.

Kesimpulan yang dapat diakses pada 15 September 2024 analisis terhadap 21 definisi kompetensi di atas menunjukkan bahwa kompetensi adalah konsep yang kompleks dan multidimensi. Kompetensi tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikap, nilai-nilai, pemahaman, dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam situasi kerja yang sebenarnya. Kompetensi juga harus relevan dengan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan tertentu.

Dengan memahami berbagai aspek kompetensi, organisasi dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia mereka. Hal ini akan berdampak positif pada kinerja individu, produktivitas tim, dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

7.4 Competence dan Competency

Konsep kompetensi telah menjadi fokus utama dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk di bidang kepustakawanan. Namun, terdapat perbedaan penting antara istilah "competence" (kemampuan) dan "competency" (kompetensi) yang seringkali digunakan secara bergantian.

Competence merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan spesifik yang dibutuhkan individu untuk melaksanakan tugas secara efektif. Kemampuan ini bersifat terukur dan dapat diamati, berfokus pada hasil yang dicapai, dan cenderung bersifat spesifik pada bidang tugas tertentu. Dalam konteks kepustakawanan, contoh *competence* meliputi kemampuan mengelola koleksi, memberikan layanan referensi, merancang program literasi informasi, dan mengelola teknologi informasi.

Di sisi lain, competency mencakup karakteristik pribadi, sikap, dan perilaku yang mendasari kemampuan teknis seseorang. Kompetensi ini lebih sulit diukur secara langsung, namun sangat penting dalam membentuk profesionalisme dan efektivitas kerja. Dalam konteks kepustakawanan, contoh *competency* meliputi orientasi pada pelayanan, keterampilan komunikasi, berpikir kritis dan analitis, adaptabilitas dan kemampuan belajar, serta etika profesional dan integritas.

Perbedaan ini pertama kali ditekankan oleh David McClelland (1973) yang berpendapat bahwa "kompetensi," yaitu karakteristik pribadi

yang mendasar, adalah prediktor yang lebih baik untuk kinerja luar biasa di tempat kerja dibandingkan dengan tes kecerdasan tradisional. Sejak saat itu, konsep kompetensi terus berkembang dan diterapkan secara luas di berbagai bidang, termasuk kepastakawanan.

Richard Boyatzis (1982), dalam bukunya "The Competent Manager," mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik mendasar individu yang menghasilkan kinerja efektif atau unggul dalam pekerjaan. Definisi ini menekankan pada karakteristik individu yang mendasari kinerja, bukan hanya pada hasil akhir.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya perluasan dan perbedaan dalam penggunaan istilah "competency" dan "competence." "Competency" sering digunakan untuk merujuk pada perilaku yang perlu ditunjukkan oleh individu, sedangkan "competence" lebih mengacu pada standar kinerja (Hoffmann, 1999).

Sanghi (2003) menjelaskan bahwa "competence" berfokus pada hasil, sedangkan "competency" berfokus pada perilaku seseorang. "Competence" menjelaskan ciri-ciri bidang tugas pekerjaan atau hasil pekerjaan, sedangkan "competency" menjelaskan atribut orang tersebut(hlm.2)

Tabel 1 Perbandingan antara *Competence* (Kemampuan) dan *Competency* (Kompetensi)

<i>Competence</i> (Kemampuan)	<i>Competency</i> (Kompetensi)
Berfokus pada hasil	Berfokus pada perilaku seseorang
Menjelaskan ciri-ciri bidang tugas pekerjaan atau hasil pekerjaan	Menjelaskan atribut orang tersebut
Terdiri dari berbagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan	Terdiri dari atribut dasar seseorang untuk kinerja kerja yang unggul
Tidak dapat ditransfer karena setiap keterampilan dan pengetahuan lebih spesifik untuk melakukan pekerjaan	Dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain
Dinilai berdasarkan kinerja dalam pekerjaan	Dinilai dalam hal perilaku dan sikap
Berorientasi pada tugas	Berorientasi pada orang

Dalam konteks kepustakawanan, pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara *competence* dan *competency* dapat membantu dalam pengembangan profesional pustakawan. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan *competence* dan *competency* yang relevan, pustakawan dapat meningkatkan kualitas layanan, beradaptasi dengan perubahan lingkungan informasi, dan berkontribusi secara efektif pada masyarakat.

7.5 Keterkaitan Competence Dan Competency

Competence dan *competency* saling terkait erat dalam membentuk profesionalisme pustakawan yang utuh. Keduanya berperan krusial dalam memastikan pustakawan mampu memberikan layanan berkualitas tinggi yang relevan dengan kebutuhan pengguna dan masyarakat yang terus berkembang.

- 1) *Competence* sebagai Fondasi: *Competence* (kemampuan) berfungsi sebagai fondasi bagi pustakawan. Kemampuan teknis yang mumpuni dalam mengelola koleksi, memberikan layanan referensi, merancang program literasi informasi, dan mengelola teknologi informasi merupakan prasyarat bagi pustakawan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Tanpa *competence* yang memadai, pustakawan akan kesulitan memenuhi ekspektasi pengguna dan menghadapi tantangan di era digital.
- 2) *Competency* sebagai Katalisator: Sementara *competence* memberikan dasar teknis, *competency* (kompetensi) berperan sebagai katalisator yang menghidupkan dan memperkuat kemampuan tersebut. Orientasi pada pelayanan yang kuat mendorong pustakawan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna secara proaktif. Keterampilan komunikasi yang efektif memungkinkan pustakawan membangun hubungan yang baik dengan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Berpikir kritis dan analitis membantu pustakawan memecahkan masalah kompleks dan membuat keputusan yang tepat. Adaptabilitas dan kemampuan belajar yang tinggi memungkinkan pustakawan untuk terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Etika profesional dan integritas yang kuat memastikan pustakawan bertindak secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur profesi.
- 3) Sinergi yang Menghasilkan Keunggulan: Sinergi antara *competence* dan *competency* inilah yang menciptakan pustakawan profesional yang unggul. Pustakawan yang tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga memiliki karakteristik pribadi yang positif, akan mampu memberikan layanan bernilai tambah dan berdampak positif bagi

masyarakat. Mereka akan menjadi mitra terpercaya bagi pengguna dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif.

7.6 Kompetensi dan Kinerja Pustakawan: Model Sebab-Akibat

Kompetensi memiliki hubungan sebab-akibat (kausal) dengan kinerja. Artinya, kompetensi tertentu dapat memprediksi atau menyebabkan perilaku dan kinerja tertentu. Model Aliran Kausal Kompetensi (Gambar 1) menunjukkan bagaimana karakteristik pribadi seseorang, seperti motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan, memengaruhi perilaku dan tindakan mereka dalam pekerjaan. Perilaku dan tindakan ini pada akhirnya akan menghasilkan kinerja kerja, yang dapat diukur dari berbagai aspek seperti kualitas, produktivitas, dan kepuasan pengguna.



[Gambar 1: Model Aliran Kausal Kompetensi]

Sebagai contoh, pustakawan dengan motivasi berprestasi tinggi (motif) cenderung menetapkan tujuan yang menantang dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk mencapai tujuan tersebut (perilaku), yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kepuasan pengguna (kinerja kerja).

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kompetensi memiliki dampak yang sama terhadap kinerja. Kompetensi dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

1. Kompetensi Ambang Batas (Threshold Competencies): Ini adalah karakteristik penting yang dibutuhkan oleh semua pustakawan untuk mencapai kinerja minimal yang efektif. Contohnya, pengetahuan dasar tentang ilmu perpustakaan dan keterampilan pengorganisasian koleksi.
2. Kompetensi Pembeda (Differentiating Competencies): Faktor-faktor inilah yang membedakan antara pustakawan dengan kinerja unggul dan rata-rata. Contohnya, orientasi pada pelayanan, inisiatif, kemampuan beradaptasi, keterampilan interpersonal, keterampilan kepemimpinan, dan berpikir analitis.

Dengan memahami model ini dan membedakan antara kompetensi ambang batas dan kompetensi pembeda, perpustakaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk seleksi, pelatihan, dan pengembangan pustakawan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Contoh Penerapan Kompetensi Pustakawan Perguruan Tinggi

Analisis kompetensi Nasrun Maqdis, M.A, seorang pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi, menunjukkan bagaimana lima komponen utama kompetensi berkontribusi terhadap kinerjanya yang efektif dan unggul.

- 1) Motivasi: Dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan motivasi afiliasi yang kuat.
- 2) Ciri: Teliti, terorganisir, dan komunikatif.
- 3) Konsep Diri: Percaya diri dan adaptif.
- 4) Pengetahuan: Pemahaman mendalam tentang ilmu perpustakaan dan teknologi informasi.
- 5) Keterampilan: Kemampuan riset dan keterampilan teknologi informasi.

Kompetensi-kompetensi ini saling terkait dan mempengaruhi kinerja Nasrun. Motivasi yang kuat mendorongnya untuk terus belajar dan berkembang, ciri-ciri positifnya memastikan efisiensi dan efektivitas operasional, konsep diri yang positif mendorong kepercayaan diri dan adaptabilitas, pengetahuan yang luas memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan, dan keterampilan yang mumpuni memungkinkan Nasrun untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada pengguna perpustakaan.

Kinerja Nasrun dapat dinilai berdasarkan kriteria seperti tingkat kepuasan pengguna, peningkatan jumlah kunjungan dan peminjaman, serta pengakuan atas inovasi yang dilakukannya. Dengan memahami kompetensi yang dimiliki Nasrun dan menerapkan kriteria yang relevan, perguruan tinggi dapat mengukur dan meningkatkan kinerja Nasrun, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi keberhasilan akademik mahasiswa dan dosen.

Contoh Konkrit Penerapan Competence dan Competency di Perpustakaan Perguruan Tinggi

Seorang pustakawan yang memiliki *competence* (kemampuan) yang mumpuni dalam mengelola teknologi informasi, namun kurang memiliki *competency* (kecakapan) dalam berkomunikasi, mungkin akan kesulitan menjelaskan cara penggunaan perangkat lunak baru kepada pemustaka. Sebaliknya, pustakawan yang memiliki *competency* komunikasi yang baik, namun kurang memiliki *competence* dalam literasi informasi, mungkin akan kesulitan memberikan panduan yang akurat dan relevan kepada pemustaka yang membutuhkan informasi spesifik untuk penelitian.

Oleh karena itu, pengembangan *competence* dan *competency* harus berjalan beriringan. Pustakawan perlu terus meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan teknis (*competence*) mereka, seperti penguasaan perangkat lunak perpustakaan, analisis data, atau pemrograman. Selain itu, mereka juga perlu mengasah *competency* (kecakapan) yang mendukung pekerjaan mereka, seperti kemampuan berkomunikasi yang efektif, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan beradaptasi dengan perubahan.

Dengan mengembangkan *competence* dan *competency* secara holistik, pustakawan perguruan tinggi akan menjadi profesional yang kompeten, berintegritas, dan adaptif. Mereka tidak hanya mampu memberikan layanan perpustakaan yang berkualitas tinggi, tetapi juga berkontribusi dalam penelitian, pengajaran, dan kegiatan akademik lainnya di perguruan tinggi, serta mampu menjawab tantangan di era digital.

7.6 Karakteristik Penting Kompetensi

Karakteristik penting kompetensi dalam regulasi Indonesia dapat dipahami dari SKKNI No. 236 Tahun 2019. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, beberapa karakteristik kompetensi dapat disimpulkan, yaitu

- 1) Dapat diamati (Observable): Kompetensi dapat dilihat dan dinilai melalui kinerja nyata dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan.
- 2) Meliputi Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap Kerja: Kompetensi tidak hanya mencakup pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dan sikap kerja yang sesuai.
- 3) Relevan dengan Tugas dan Jabatan: Kompetensi harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam suatu jabatan atau pekerjaan.
- 4) Sesuai Standar Performa: Kompetensi harus memenuhi standar unjuk kerja yang ditetapkan untuk memastikan kualitas dan efektivitas kerja(hlm.3-4)

Berdasarkan KKKNI No. 2 Tahun 2021 karakter penting profesi pustakawan adalah memiliki kompetensi yang relevan dengan jenjang kualifikasi dan bidang pekerjaan yang ditugaskan. Kompetensi ini memiliki karakteristik penting sebagai berikut:

- 1) Berjenjang dan Terukur: Kompetensi disusun dalam jenjang kualifikasi yang semakin tinggi (3 hingga 8), mencerminkan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab yang berbeda. Setiap jenjang memiliki sejumlah unit kompetensi terukur yang harus dipenuhi, memungkinkan penilaian objektif.
- 2) Spesifik Bidang dan Relevan dengan Jabatan: Kompetensi dirancang khusus untuk bidang perpustakaan, mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan perpustakaan, layanan perpustakaan, teknologi informasi, pelestarian, dan penelitian. Kompetensi yang dipersyaratkan terkait

langsung dengan kemungkinan jabatan yang dapat diduduki, memastikan relevansi kompetensi dengan tuntutan pekerjaan.

- 3) Dinamis dan Menyeluruh: Kompetensi bersifat dinamis, berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan perpustakaan, sehingga pengembangan profesional berkelanjutan menjadi penting. Kompetensi tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mencakup sikap kerja (misalnya bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik, menjunjung tinggi hukum, dll), etika, dan kemampuan interpersonal, mencerminkan pendekatan holistik (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2021)

Karakteristik-karakteristik ini menjadikan kerangka kualifikasi nasional bidang perpustakaan sebagai alat yang efektif untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan. Dengan memiliki kompetensi yang jelas, terukur, relevan, dinamis, dan menyeluruh, para profesional perpustakaan dapat meningkatkan kualitas layanan mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat

Selain Karakteristik Penting Kompetensi berdasarkan kerangka kualifikasi nasional, terdapat pula model Karakteristik Penting Kompetensi yang lebih spesifik dan mendalam yang dikembangkan oleh para ahli. Spencer dan Spencer (1993) yang mengidentifikasi lima karakteristik kompetensi utama:

- 1) Motif: Merupakan dorongan internal yang menggerakkan individu untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu. Motif ini dapat berupa kebutuhan akan pencapaian, afiliasi, atau kekuasaan. Dalam konteks kepastakawanan, motif dapat berupa keinginan untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna, mengembangkan koleksi perpustakaan, atau berkontribusi pada komunitas profesional.
- 2) Sifat: Sifat mengacu pada karakteristik individu yang relatif stabil dan konsisten, seperti ketelitian, rasa ingin tahu, atau kemampuan beradaptasi. Sifat-sifat ini dapat memengaruhi bagaimana seorang pustakawan berinteraksi dengan pengguna, rekan kerja, dan informasi.
- 3) Konsep Diri: Meliputi sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Konsep diri yang positif dan keyakinan akan kemampuan diri dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pustakawan.
- 4) Pengetahuan: Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Dalam konteks kepastakawanan, pengetahuan ini dapat berupa pengetahuan tentang sumber daya informasi, teknologi informasi, atau bidang subjek tertentu.

- 5) Keterampilan: Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas tertentu. Pustakawan memerlukan berbagai keterampilan, seperti keterampilan komunikasi, keterampilan teknologi informasi, dan keterampilan riset.

Sementara itu, Tucker dan Cofsky (1994) mengusulkan lima komponen utama kompetensi yang saling terkait:

- 1) Pengetahuan (Knowledge): Pengetahuan adalah dasar dari semua kompetensi. Pengetahuan mencakup informasi, fakta, teori, dan konsep yang relevan dengan pekerjaan atau tugas. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, pengalaman kerja, atau pembelajaran mandiri. Semakin luas dan mendalam pengetahuan seseorang, semakin besar pula potensi mereka untuk mengembangkan kompetensi lainnya.
- 2) Keterampilan (Skills): Keterampilan adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan secara praktis. Ini melibatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu. Keterampilan dapat berupa keterampilan teknis (misalnya, mengoperasikan perangkat lunak perpustakaan, mengelola basis data), keterampilan interpersonal (misalnya, berkomunikasi dengan pengguna, berkolaborasi dengan rekan kerja), atau keterampilan konseptual (misalnya, merancang layanan perpustakaan, mengevaluasi dampak program).
- 3) Konsep Diri dan Nilai-nilai (Self-Concept and Values): Mengacu pada sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Konsep diri yang positif dan nilai-nilai yang selaras dengan tuntutan pekerjaan akan meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan komitmen seseorang terhadap tugasnya.
- 4) Ciri-ciri (Traits): Ciri-ciri mengacu pada karakteristik kepribadian yang relatif stabil dan konsisten, seperti ketekunan, kreativitas, atau kemampuan beradaptasi. Ciri-ciri ini dapat memengaruhi bagaimana seorang pustakawan mendekati tugas, memecahkan masalah, dan berinteraksi dengan orang lain.
- 5) Motif (Motives): Motif adalah kebutuhan atau keinginan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Motif dapat berasal dari dalam diri (misalnya, keinginan untuk belajar, mencapai prestasi) atau dari luar (misalnya, pengakuan, imbalan).

Kelima komponen ini saling terkait dan saling memperkuat. Pustakawan yang memiliki kombinasi yang kuat dari pengetahuan, keterampilan, konsep diri dan nilai, sifat, dan motivasi akan lebih mungkin

untuk memberikan layanan perpustakaan yang berkualitas tinggi dan berkontribusi pada kesuksesan institusi mereka

Karakteristik penting kompetensi Spencer dan Spencer (1993) dan Tucker dan Cofsky (1994) ini sejalan dengan kerangka kualifikasi nasional bidang perpustakaan di Indonesia yang dijelaskan dalam Peraturan Perpustakaan Nasional No. 2 Tahun 2021. Peraturan ini menekankan kompetensi yang relevan dengan jenjang kualifikasi dan bidang pekerjaan pustakawan, serta bersifat berjenjang dan terukur, spesifik bidang dan relevan dengan jabatan, dinamis, dan menyeluruh, mencakup aspek teknis maupun non-teknis. Misalnya, kompetensi "berjenjang dan terukur" dalam peraturan tersebut dapat dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pustakawan, yang secara eksplisit harus terus dikembangkan untuk memenuhi tuntutan kualifikasi yang lebih tinggi. Selain itu, kompetensi "spesifik bidang dan relevan dengan jabatan" dapat dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam bidang perpustakaan sesuai dengan SKKNI No. 236 Tahun 2019. Kompetensi "dinamis dan menyeluruh" juga mencakup berbagai karakteristik kompetensi yang lebih mendasar, termasuk motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus terus diasah oleh pustakawan untuk beradaptasi dengan tuntutan profesi yang terus berkembang. Pustakawan yang memiliki kompetensi yang komprehensif dan terus berkembang akan mampu memberikan layanan perpustakaan yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna serta perkembangan zaman.

Pentingnya kompetensi pustakawan yang komprehensif dan terus berkembang ini diakui secara global. Pendidikan dan kualifikasi profesional di bidang IPI menjadi kunci dalam membekali pustakawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan profesi yang terus berkembang

7.7. Tinjauan Kualifikasi Profesional IPI Global

Pendidikan IPI adalah pilar krusial dalam membentuk profesional yang kompeten dan adaptif di bidang ini. Secara global, lebih dari 900 institusi menawarkan program IPI, dengan penekanan pada penerapan teori ke dalam praktik dan pengembangan keterampilan melalui magang, praktikum, serta pengalaman lapangan internasional (Schniederjürgen, 2007).

Survei internasional IFLA 2018, yang melibatkan 706 responden dari 101 negara, mengungkapkan tingginya minat para profesional dan pendidik IPI terhadap isu kualifikasi, sertifikasi, dan validasi kompetensi. Amerika Serikat, Cina, Afrika Selatan, Brazil, dan Chile menjadi negara

dengan partisipasi terbanyak, namun wilayah berkembang seperti Afrika (23,7%), Asia & Oseania (30,2%), dan Amerika Latin & Karibia (26,2%) menunjukkan tingkat respons yang lebih tinggi, mengindikasikan kebutuhan akan struktur tata kelola dan standar kualitas pendidikan IPI yang lebih kuat di wilayah tersebut(IFLA BSLISE Working Group,2018)

Mayoritas negara mewajibkan gelar sarjana (S1) atau pascasarjana (S2) untuk praktik profesional IPI, baik dalam bidang perpustakaan khusus (84%) maupun bidang informasi yang lebih luas (80%). Namun, negara berkembang cenderung lebih memilih gelar S1 sebagai kualifikasi awal karena keterbatasan sumber daya.

Keragaman kualifikasi profesional IPI terlihat jelas di berbagai wilayah. Negara-negara GCC fokus pada pengembangan keterampilan teknologi dan informasi, sementara Amerika Utara memiliki lebih dari 62 program terakreditasi ALA dengan standar kualitas tinggi. Afrika menghadapi tantangan dalam hal sumber daya dan relevansi kurikulum, sementara Asia Timur menekankan pada penelitian dan inovasi. Asia Tenggara dan Selatan berfokus pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan lokal, Eropa berupaya menyatukan standar pendidikan melalui Proses Bologna, dan Australia serta Selandia Baru mengadopsi pendekatan berorientasi praktik. Amerika Latin dan Karibia memiliki lebih dari 70 institusi yang menawarkan program IPI, dengan fokus pada isu-isu sosial dan keadilan informasi.

Selain kualifikasi pendidikan, sertifikasi profesional juga menjadi pertimbangan penting. Mayoritas responden di Asia & Oseania (84,2%), Eropa (62,5%), dan Amerika Latin & Karibia (66,7%) menyatakan sertifikasi diperlukan untuk pustakawan, terutama di bidang khusus. Namun, di Afrika, kebutuhan akan sertifikasi masih beragam (47,6%).

Regulasi dan kebijakan mengenai kualifikasi dan sertifikasi juga bervariasi di setiap wilayah. Sebagian besar negara di Eropa memiliki legislasi terkait, sementara di wilayah lain, seperti Asia & Oseania, Amerika Latin & Karibia, dan Amerika Utara, hal ini belum diatur secara ketat. Otoritas yang berwenang menentukan persyaratan masuk profesional juga beragam, mulai dari pemerintah hingga asosiasi profesi.

Survei IFLA juga mengungkapkan bahwa mayoritas responden (61%) menyatakan bahwa kualifikasi utama seorang profesional IPI adalah kepemilikan gelar atau pendidikan profesional di bidang IPI. Namun, terdapat perbedaan perspektif antar wilayah mengenai karakteristik lain dari seorang profesional IPI. Misalnya, pengalaman kerja di perpustakaan atau institusi informasi serupa dianggap penting oleh 72% responden di Afrika, tetapi hanya oleh 37% responden di Asia dan Oseania.

7.8 Tinjauan Kualifikasi Profesional IPI di Asia Tenggara dan Selatan

Negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dan SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) di Asia Tenggara dan Selatan menunjukkan keragaman dalam tingkat kualifikasi pendidikan IPI yang ditawarkan. Program-program ini mencakup rentang luas, mulai dari tingkat sertifikat hingga pascasarjana, dengan 4 dari 8 negara anggota SAARC menawarkan pendidikan IPI (India, Pakistan, Bangladesh, and Sri Lanka). Fokus utama pendidikan IPI di wilayah ini adalah pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan lokal, seperti literasi informasi (4,2%), manajemen perpustakaan komunitas, dan pelestarian warisan budaya.

Meskipun terdapat institusi pendidikan IPI di beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta di negara-negara SAARC seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka, tantangan tetap ada. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta kebutuhan akan kurikulum yang lebih responsif terhadap konteks lokal, menjadi perhatian utama dalam pengembangan pendidikan IPI di wilayah ini.

Di Asia Tenggara dan Asia Selatan, mayoritas responden (52%) menyatakan bahwa otoritas pemerintah adalah yang menentukan persyaratan masuk ke profesi IPI, sementara di Eropa dan Amerika Latin & Karibia, otoritas pemerintah dan asosiasi profesi memiliki peran yang seimbang.

Tinjauan kualifikasi profesional IPI di berbagai wilayah dunia, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan adanya keragaman standar dan praktik yang berbeda-beda di setiap wilayah. Perbedaan ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan kompetensi pustakawan dan profesional informasi.

Keragaman kualifikasi profesional IPI di berbagai wilayah dunia dapat menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi bagi pustakawan dan profesional informasi di Indonesia. Dengan mempelajari praktik terbaik dan standar kompetensi dari negara lain, pustakawan Indonesia dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas layanan mereka. Misalnya, pustakawan Indonesia dapat belajar dari fokus negara-negara GCC pada pengembangan keterampilan teknologi dan informasi, atau dari standar kualitas tinggi yang diterapkan oleh program-program terakreditasi ALA di Amerika Utara.

Selain itu, keragaman kualifikasi profesional juga membuka peluang kolaborasi internasional dalam pengembangan kompetensi pustakawan. Melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, pustakawan dari berbagai negara dapat saling belajar dan memperkuat kompetensi mereka. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti program pertukaran, pelatihan bersama, konferensi internasional, atau proyek penelitian kolaboratif.

Di sisi lain, keragaman kualifikasi profesional IPI juga menghadirkan tantangan dalam pengembangan kompetensi pustakawan. Perbedaan standar dan praktik di berbagai wilayah dapat menyulitkan upaya untuk menyelaraskan kompetensi pustakawan secara global. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di beberapa negara berkembang dapat menghambat akses terhadap pendidikan dan pelatihan IPI yang berkualitas.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan pustakawan itu sendiri. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan dukungan finansial dan kebijakan yang mendukung pengembangan kompetensi pustakawan. Lembaga pendidikan dapat mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan global dan lokal, serta menyediakan akses terhadap sumber belajar yang berkualitas. Organisasi profesi dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar pustakawan, serta mengembangkan standar kompetensi yang diakui secara internasional.

Pustakawan sendiri harus proaktif dalam mencari peluang pengembangan kompetensi dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan demikian, meskipun keragaman kualifikasi profesional IPI menghadirkan tantangan, hal ini juga membuka peluang untuk pembelajaran, kolaborasi, dan inovasi dalam pengembangan kompetensi pustakawan secara global.

Namun, terdapat potensi besar untuk pertumbuhan dan inovasi. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya literasi informasi dan akses terhadap pengetahuan, kebutuhan akan profesional IPI yang terampil dan berpengetahuan luas juga meningkat. Pengembangan program-program yang relevan dengan kebutuhan lokal, seperti literasi digital dan manajemen informasi, dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme IPI di Asia Tenggara dan Selatan.

Selain itu, kolaborasi regional dan internasional dapat memainkan peran penting dalam memperkuat pendidikan IPI di wilayah ini. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antar negara dapat membantu

mengatasi tantangan yang ada dan mendorong inovasi dalam praktik dan pendidikan IPI .

Secara keseluruhan, lanskap pendidikan dan kualifikasi profesional IPI menunjukkan keragaman yang signifikan di berbagai wilayah. Tantangan utama dalam pengembangan kompetensi pustakawan dan profesional informasi adalah kebutuhan akan profesional yang multi-keterampilan, yang mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap informasi dan teknologi. Peluang baru di era digital, seperti kurasi data dan manajemen penelitian, menuntut profesional IPI untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Pembelajaran sepanjang hayat menjadi kunci untuk tetap relevan dan responsif terhadap tuntutan pasar dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, survei IFLA tahun 2018 ini menyoroti pentingnya memahami keragaman kualifikasi dan praktik profesional IPI di seluruh dunia. Keragaman ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme IPI secara global. Lebih lanjut, survei ini mengidentifikasi beberapa poin penting:

1. Kebutuhan akan profesional IPI yang multi-keterampilan dan adaptif terhadap perubahan lanskap informasi dan teknologi.
2. Munculnya peluang baru di era digital, seperti kurasi data dan manajemen penelitian, yang menuntut pengembangan kompetensi baru.
3. Pentingnya pembelajaran sepanjang hayat bagi profesional IPI untuk tetap relevan dan responsif terhadap tuntutan pasar dan kebutuhan masyarakat.

Dengan memahami temuan-temuan ini, para pemangku kepentingan di bidang IPI dapat mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif, serta merancang kebijakan yang mendukung pengembangan kompetensi pustakawan dan profesional informasi secara berkelanjutan

Kompetensi Pustakawan: Tinjauan Regulasi, Organisasi Profesi, dan Standar Internasional

Pembahasan dalam bab ini mengupas membahas kompetensi inti yang menjadi pondasi bagi pustakawan profesional dalam menjalankan peran mereka di era informasi yang terus berkembang. Kita akan menelusuri regulasi dan organisasi profesi yang berperan penting dalam menjaga standar kompetensi tersebut. Selain itu, kita akan mengeksplorasi bagaimana pustakawan dapat terus meningkatkan diri dan beradaptasi dengan perubahan teknologi serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan memahami lanskap kompetensi, regulasi, dan organisasi profesi, kita dapat mengapresiasi peran krusial pustakawan dalam menyediakan akses informasi, mendukung literasi, dan memberdayakan masyarakat.

8.1 Kompetensi Pustakawan berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan (Peraturan Perpustakaan No. 4 Tahun 2023) merupakan bagian penting dari kerangka regulasi kompetensi pustakawan di Indonesia. Peraturan ini, yang terbit pada tahun 2023, secara khusus mengatur pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan di instansi pemerintah (Perpustakaan, 2023, hlm. 1). Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesesuaian jumlah pustakawan dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, sehingga menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan perpustakaan serta pengembangan kompetensi pustakawan secara optimal.

Meskipun tidak secara eksplisit membahas kompetensi, Peraturan Perpustakaan No. 4 Tahun 2023 menetapkan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Jabatan Fungsional Pustakawan. Hal ini secara implisit mencerminkan kompetensi yang diharapkan dari seorang pustakawan (Perpustakaan, 2023, hlm. 2-6). Misalnya, pustakawan diharapkan mampu mengembangkan koleksi, mengelola layanan perpustakaan, dan melestarikan bahan perpustakaan.

Selain itu, Peraturan Perpustakaan No. 4 Tahun 2023 mengatur unsur dan subunsur penilaian angka kredit. Unsur-unsur ini menjadi indikator pencapaian kompetensi pustakawan dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya, kegiatan publikasi ilmiah, penyusunan bahan ajar, dan pengembangan sistem informasi perpustakaan merupakan beberapa contoh kegiatan yang dapat meningkatkan angka kredit pustakawan, yang pada gilirannya menunjukkan kompetensi dan kinerja pustakawan tersebut.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya pengembangan kompetensi pustakawan secara berkelanjutan melalui program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB) (Peraturan Perpustakaan, 2023, hlm. 6). PKB meliputi kegiatan seperti pelatihan, seminar, workshop, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan bahan ajar. Dengan mengikuti kegiatan PKB, pustakawan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerjanya agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perpustakaan.

Dapat kita simpulkan bahwa Peraturan Perpustakaan No. 4 Tahun 2023 memberikan gambaran yang komprehensif tentang kompetensi pustakawan di Indonesia meskipun tidak menyebutkannya secara eksplisit. Peraturan ini tidak hanya mengatur formasi dan penilaian angka kredit, tetapi juga secara tidak langsung menetapkan standar kompetensi dan mendorong pengembangan kompetensi pustakawan secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjamin profesionalisme pustakawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di Indonesia

8.2 Kompetensi Pustakawan berdasarkan SKKNI No.236 Tahun 2019

SKKNI No.236 Tahun 2019 mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan yang dapat diamati, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai standar kinerja yang ditetapkan. Pustakawan adalah mereka yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta memiliki tugas dan

tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (hlm.3)

SKKNI No.236 ini menguraikan beberapa jenis kompetensi yang dibutuhkan oleh pustakawan:

1. Pengembangan koleksi perpustakaan: Kemampuan menyusun kebijakan, menganalisis kebutuhan informasi pemustaka, melakukan seleksi dan pengadaan bahan perpustakaan, serta mengevaluasi pengembangan koleksi.
2. Pengorganisasian bahan perpustakaan: Kemampuan menyusun kebijakan, melakukan pengatalogan, membuat literatur sekunder, dan mengelola metadata.
3. Layanan perpustakaan: Kemampuan menyusun kebijakan, melaksanakan layanan sirkulasi, referensi, dan multimedia, serta mengembangkan kemampuan literasi informasi pemustaka.
4. Pelestarian bahan perpustakaan: Kemampuan menyusun kebijakan, melaksanakan penanggulangan bencana, melakukan pelestarian fisik dan informasi bahan perpustakaan.
5. Pengembangan profesi dan sistem kepastakawanan: Kemampuan melakukan kajian, menulis karya tulis, dan mengembangkan kepastakawanan melalui pelatihan dan pengajaran.
6. Manajemen perpustakaan: Kemampuan membuat perencanaan, melaksanakan pengelolaan, dan melakukan pengawasan.
7. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi: Kemampuan mengembangkan sistem informasi, mengelola repositori institusi, membuat website, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk perpustakaan

Selain jenis kompetensi yang telah disebutkan, SKKNI No. 236 tahun 2019 juga menekankan pentingnya kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan, antara lain:

1. Etika Profesi:Memahami dan menerapkan kode etik kepastakawanan dalam setiap aspek pekerjaan.
2. Komunikasi Efektif:Kemampuan berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pembelajaran Berkelanjutan:Kesadaran akan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan.
4. Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah:Kemampuan menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan solusi(hlm.3)

Selain kompetensi inti, pustakawan juga diharapkan memiliki kompetensi khusus yang relevan dengan bidang atau jenis perpustakaan tempat mereka bekerja. SKKNI juga mengidentifikasi beberapa tingkat kompetensi, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat mahir, yang memungkinkan pustakawan untuk mengembangkan karir mereka secara bertahap.

8.3 Kompetensi Pustakawan berdasarkan KKNi No.2 Tahun 2021

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan (KKNi-P No. 2 Tahun 2021) menjelaskan kompetensi pustakawan secara komprehensif dalam berbagai jenjang kualifikasi, mulai dari kualifikasi 3 hingga kualifikasi 8 (Perpusnas, 2021, hlm. 3). Perbedaan-perbedaan ini tercermin dalam deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan unit kompetensi pada setiap jenjang.

1. Unit Kompetensi, Penilaian Objektif, dan Spesialisasi

Setiap jenjang kualifikasi dalam KKNi-P No. 2 Tahun 2021 terdiri dari sejumlah unit kompetensi yang spesifik dan terukur. Unit kompetensi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- 1) Pengetahuan (Knowledge): Pengetahuan teoritis dan konseptual yang harus dimiliki oleh pustakawan pada jenjang kualifikasi tertentu (Perpusnas, 2021, hlm. 4). Misalnya, pada jenjang 3 (ahli pertama/terampil), pustakawan harus memiliki pengetahuan dasar tentang ilmu perpustakaan, sedangkan pada jenjang 8 (ahli utama), pustakawan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teori dan praktik perpustakaan tingkat lanjut.
- 2) Keterampilan (Skills): Kemampuan teknis dan praktis yang harus dikuasai oleh pustakawan (Perpusnas, 2021, hlm. 4). Misalnya, pustakawan pada jenjang 3 (ahli pertama/terampil) harus mampu melakukan perawatan koleksi sederhana, sedangkan pustakawan pada jenjang 8 (ahli utama) harus mampu merancang dan mengelola sistem informasi perpustakaan yang kompleks.
- 3) Sikap Kerja (Attitude): Nilai-nilai dan perilaku profesional yang harus ditunjukkan oleh pustakawan (Perpusnas, 2021, hlm. 4). Misalnya, pustakawan pada semua jenjang harus memiliki integritas, etos kerja yang tinggi, dan kemampuan bekerja sama dalam tim.

2. Deskripsi Kompetensi Pustakawan Berdasarkan Jenjang Kualifikasi

- 1) Kualifikasi 3 (Ahli Pertama/Terampil): Pada jenjang ini, pustakawan memiliki pengetahuan dasar dalam penyusunan koleksi perpustakaan, perawatan koleksi sederhana, dan membantu pelaksanaan administrasi di perpustakaan (Perpusnas, 2021, hlm. 8-9).
- 2) Kualifikasi 4 (Ahli Muda): Pustakawan mampu melaksanakan pekerjaan operasional sederhana di perpustakaan, menyusun deskripsi bibliografi, layanan sirkulasi, promosi perpustakaan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dasar (Perpusnas, 2021, hlm. 10-11).
- 3) Kualifikasi 5 (Ahli Madya): Pada jenjang ini, pustakawan mampu melaksanakan tugas pengelolaan informasi di unit perpustakaan dan pusat dokumentasi dan informasi, serta memaksimalkan perangkat keras dan lunak berbasis internet (Perpusnas, 2021, hlm. 12-13).
- 4) Kualifikasi 6 (Ahli Madya): Pustakawan pada jenjang ini memiliki kemampuan merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi sumber daya perpustakaan, serta menyelesaikan masalah dengan berbagai formulasi. Terdapat lima kompetensi inti yang harus dipenuhi. Kompetensi pilihan pada kualifikasi ini dikelompokkan berdasarkan jabatan, yaitu Manajemen, Layanan, Organisasi Informasi, Teknologi Informasi di Perpustakaan, dan Pelestarian (Perpusnas, 2021, hlm. 14-15).
- 5) Kualifikasi 7 (Ahli Utama): Pustakawan pada jenjang ini mampu menentukan strategi dan kebijakan pengembangan perpustakaan, memimpin, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja perpustakaan. Terdapat empat subbidang pada kualifikasi ini, yaitu manajemen, layanan, pelatihan dan pengembangan, dan teknologi informasi dan komunikasi (Perpusnas, 2021, hlm. 16-23).
- 6) Kualifikasi 8 (Ahli Utama): Pustakawan pada jenjang ini memiliki kemampuan memecahkan masalah strategis dan mengembangkan fungsi-fungsi perpustakaan dengan memperhatikan teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan. Terdapat dua subbidang pada kualifikasi ini, yaitu manajemen dan layanan (Perpusnas, 2021, hlm. 24-25).

3. Peran dan Pengembangan Kompetensi Pustakawan

Peran kerja pustakawan bervariasi tergantung pada jenjang kualifikasi dan subbidangnya. Pada kualifikasi awal, peran kerja lebih bersifat teknis dan operasional, seperti perawatan koleksi dan layanan sirkulasi. Seiring dengan meningkatnya kualifikasi, peran kerja pustakawan

menjadi lebih strategis dan manajerial, seperti merumuskan kebijakan, memimpin tim, dan melakukan penelitian.

Pustakawan harus memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi inti dan kompetensi pilihan yang relevan dengan jenjang kualifikasi dan subbidangnya untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. KKNI-P No. 2 Tahun 2021, sebagai kerangka kerja yang jelas dan komprehensif, berperan penting dalam pengembangan kompetensi pustakawan di Indonesia. Dengan memahami dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, pustakawan dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan berkontribusi pada pengembangan literasi dan pengetahuan masyarakat.

8.4 Kompetensi Pustakawan berdasarkan Organisasi Profesi Pustakawan

8.4.1 Kompetensi inti pustakawan berdasarkan ALA

American Library Association(ALA) tahun 2023 menerbitkan *ALA's Core Competences of Librarianship* Kompetensi-kompetensi inti ini menjadi fondasi bagi pustakawan dalam menjalankan peran mereka secara efektif. Mari kita mulai dengan kompetensi pertama yaitu:

1. Pengetahuan Dasar (Gateway Knowledge): Pustakawan harus memiliki pemahaman yang kuat tentang etika, nilai-nilai, prinsip dasar profesi pustakawan, termasuk prinsip demokrasi, kebebasan intelektual, sejarah perpustakaan, serta isu-isu sosial dan kebijakan publik yang relevan.
2. Sumber Informasi (Information Resources): Pustakawan harus mampu mengelola dan memahami berbagai jenis sumber informasi, termasuk format dan genre yang baru muncul, serta mempertimbangkan keragaman kebutuhan informasi komunitas.
3. Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pendidikan Berkelanjutan (Lifelong Learning and Continuing Education): Pustakawan harus berkomitmen pada pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan kepada komunitas dan memahami peran perpustakaan dalam pendidikan berkelanjutan.
4. Manajemen dan Administrasi (Management and Administration): Pustakawan harus memiliki keterampilan dalam manajemen keuangan, pengawasan, manajemen sumber daya manusia, evaluasi layanan perpustakaan, membangun kemitraan, kepemimpinan, manajemen proyek, dan komunikasi strategis.
5. Organisasi Pengetahuan dan Informasi yang Terekam (Organization of Recorded Knowledge and Information): Pustakawan harus memahami prinsip, sistem, dan tren dalam pengorganisasian informasi, termasuk

katalogisasi, metadata, dan klasifikasi, serta mempertimbangkan bias budaya dalam proses ini.

6. Layanan Referensi dan Pengguna (Reference and User Services): Pustakawan harus mampu membantu pengguna menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber, serta memberikan panduan dan instruksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang beragam.
7. Penelitian dan Praktik Berbasis Bukti (Research and Evidence-Based Practice): Pustakawan harus mampu menemukan, menafsirkan, dan menghasilkan penelitian terkait dengan upaya yang mendukung institusi mereka, profesi, dan/atau pengembangan profesional mereka sendiri.
8. Keadilan Sosial (Social Justice): Pustakawan harus memahami identitas budaya mereka sendiri, termasuk posisi terkait dengan kekuasaan, hak istimewa, dan penindasan, dan bagaimana hal itu memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan komunitas dan di antara para pembuat keputusan. Pustakawan harus secara aktif mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan, keragaman, dan inklusi dalam praktik perpustakaan, termasuk koleksi, layanan, staf, dan program.
9. Pengetahuan dan Keterampilan Teknologi (Technological Knowledge and Skills): Pustakawan harus mampu mengidentifikasi dan menggunakan teknologi yang sesuai untuk mendukung akses dan penyampaian layanan dan sumber daya perpustakaan, serta mempertimbangkan implikasi etis dan budaya dari teknologi tersebut (American Library Association, 2023)

8.4.2 Kompetensi Pustakawan di Perpustakaan Riset Kanada

Pustakawan di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Untuk tetap relevan dan memberikan layanan terbaik kepada komunitas akademik dan penelitian, mereka harus memiliki kompetensi yang luas dan terus berkembang. Laporan "Competencies for Librarians in Canadian Research Libraries" mengidentifikasi sembilan kompetensi inti yang dibutuhkan oleh pustakawan di perpustakaan riset Kanada, yang juga relevan secara global (CARL Competencies Working Group, 2020).

1. Pembelajaran Aktif dan Adaptasi: Pustakawan harus memiliki pendekatan yang gesit dan proaktif terhadap pekerjaan mereka, mengantisipasi perubahan, dan mempersiapkan diri untuk peluang dan tantangan di masa depan. Ini termasuk kemampuan beradaptasi dengan berbagai gaya kerja, terus memperbarui pengetahuan dengan perkembangan penelitian terkini, bekerja secara fleksibel dalam situasi

ambigu, dan memahami bagaimana pengetahuan baru diciptakan dan digunakan.

2. Kolaborasi: Pustakawan harus mampu bekerja sama secara efektif dengan berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk pengguna, komunitas, fakultas, dan staf perpustakaan lainnya. Ini melibatkan membangun hubungan yang bermakna, memahami lingkungan kelembagaan yang lebih luas, dan bermitra dengan fakultas dalam pembelajaran dan pengajaran.
3. Konsultasi dan Komunikasi: Pustakawan harus menjadi komunikator yang terampil, mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan perpustakaan. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang berbagai keahlian, layanan, dan koleksi perpustakaan, serta memahami masalah kebijakan informasi seperti privasi, keamanan, dan hak pengguna.
4. Kurasi dan Pelestarian: Pustakawan bertanggung jawab untuk mengelola dan melestarikan sumber daya ilmiah. Ini membutuhkan pengetahuan tentang siklus hidup data penelitian, praktik terbaik untuk kurasi digital, dan metode pelestarian untuk koleksi cetak dan digital.
5. Kesetaraan, Keragaman, dan Inklusi: Pustakawan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan, keragaman, dan inklusi dalam semua aspek pekerjaan mereka. Mereka harus mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mudah diakses, memahami beragam pandangan dunia dan praktik budaya, dan bekerja untuk menghilangkan bias dan diskriminasi dalam layanan perpustakaan.
6. Keterlibatan dan Partisipasi: Pustakawan harus terlibat secara aktif dalam profesi mereka dan komunitas pengguna mereka. Ini termasuk membimbing anggota baru, melakukan penelitian berbasis bukti, dan memahami isu-isu sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan yang relevan dengan praktik perpustakaan penelitian.
7. Evaluasi dan Penilaian: Pustakawan harus secara teratur mengevaluasi dan menilai layanan, sumber daya, dan proyek perpustakaan untuk memastikan mereka memenuhi kebutuhan pengguna dan sejalan dengan tujuan strategis perpustakaan. Ini membutuhkan pengetahuan tentang metode penelitian, teknologi, dan alat untuk evaluasi dan penilaian.
8. Kepemimpinan dan Fasilitasi: Pustakawan harus menunjukkan kepemimpinan di semua tingkatan untuk mendorong dan mendukung prioritas strategis perpustakaan. Ini termasuk kemampuan untuk

menunjukkan kecerdasan emosional, menginspirasi dan memberdayakan orang lain, dan memahami prinsip-prinsip manajemen.

9. Visi dan Inovasi: Pustakawan harus menjadi pemikir visioner dan inovatif, mampu beradaptasi dengan perubahan dalam pendidikan tinggi dan lingkungan penelitian. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang manajemen proyek, teknik manajemen perubahan, dan hak pengguna dan pencipta dalam budaya terbuka.

Kompetensi-kompetensi ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengembangan profesional pustakawan di perpustakaan riset Kanada, memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pola pikir yang diperlukan untuk berhasil dalam lanskap akademik dan informasi yang terus berubah.

Kesimpulannya, kompetensi pustakawan dan profesional informasi merupakan aspek krusial dalam menjamin kualitas layanan dan relevansi profesi di era digital. Organisasi profesi seperti American Library Association (ALA) dan standar kompetensi untuk pustakawan di perpustakaan riset Kanada telah mengidentifikasi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh pustakawan, mulai dari pengetahuan dasar tentang profesi, keterampilan teknologi, hingga kemampuan beradaptasi dan berinovasi.

ALA menekankan pentingnya pengetahuan dasar tentang etika dan nilai-nilai profesi, pemahaman tentang sumber informasi yang beragam, komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat, keterampilan manajemen, kemampuan mengorganisasi informasi, layanan referensi yang berkualitas, penelitian berbasis bukti, keadilan sosial, serta pengetahuan dan keterampilan teknologi. Standar kompetensi untuk pustakawan di perpustakaan riset Kanada juga mencakup kemampuan belajar aktif dan beradaptasi, kolaborasi, konsultasi dan komunikasi, kurasi dan pelestarian, kesetaraan, keragaman, dan inklusi, keterlibatan dan partisipasi, evaluasi dan penilaian, kepemimpinan dan fasilitasi, serta visi dan inovasi.

Kedua organisasi ini menyoroti pentingnya pustakawan untuk terus mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna. Dengan memiliki kompetensi yang relevan dan mutakhir, pustakawan dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi, mendukung penelitian dan pembelajaran, serta berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

8.5 Standar Kompetensi Pustakawan dan Profesional Informasi berdasarkan IFLA

Dokumen "IFLA Guidelines for Professional LIS Education Programmes 2022" yang diterbitkan oleh *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) pada tahun 2022, secara eksplisit ditujukan sebagai panduan untuk pendidikan IPI, bukan sebagai standar kompetensi pustakawan secara langsung. Namun, terdapat keterkaitan yang erat antara keduanya karena tujuan utama pendidikan IPI adalah membekali lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi pustakawan profesional. Oleh karena itu, pedoman pendidikan IPI ini secara inheren mencerminkan kompetensi yang diharapkan dari seorang pustakawan.

Pedoman ini dibangun di atas delapan bidang pengetahuan dasar (FKAs). FKAs ini menjadi fondasi bagi pengembangan kompetensi lanjutan pustakawan dan profesional informasi, serta membantu dalam merancang bidang spesialisasi dalam kurikulum. Selain itu, FKAs memungkinkan para profesional IPI untuk mengartikulasikan bagaimana pembelajaran lanjutan mereka dibangun di atas dasar ini sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan konteks lokal/regional/internasional. FKAs ini mempromosikan peran profesional IPI sebagai penggerak utama untuk perubahan organisasi dan pembangunan berkelanjutan, serta menegaskan fokus profesional pada kebutuhan komunitas pengguna, bukan hanya pada alat teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Delapan bidang pengetahuan dasar (FKAs) yang direkomendasikan oleh IFLA tersebut meliputi:

1. Informasi dalam Masyarakat (Information in Society): Memahami peran penting informasi dalam masyarakat, termasuk bagaimana informasi diciptakan, diakses, digunakan, dan dibagikan. Pemahaman ini menjadi dasar untuk memahami kebutuhan informasi pengguna dan mengembangkan layanan yang relevan.
2. Fondasi Profesi IPI (Foundations of LIS Profession): Menguasai pengetahuan tentang sejarah, teori, dan praktik profesi perpustakaan dan informasi. Ini mencakup pemahaman tentang etika, nilai-nilai, dan standar profesi yang menjadi landasan dalam memberikan layanan yang berkualitas.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technologies): Memiliki kemampuan untuk

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dalam mendukung praktik perpustakaan. Ini termasuk pemanfaatan perangkat lunak perpustakaan, alat pencarian informasi, dan platform digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan.

4. Penelitian dan Inovasi (Research and Innovation): Mampu melakukan penelitian dan menerapkan inovasi dalam bidang perpustakaan dan informasi. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, serta mengembangkan solusi kreatif untuk meningkatkan layanan dan praktik perpustakaan.
5. Manajemen Sumber Daya Informasi (Information Resources Management): Menguasai prinsip-prinsip dan praktik manajemen sumber daya informasi, termasuk pemilihan, pengadaan, pengorganisasian, penyimpanan, pelestarian, dan evaluasi koleksi perpustakaan. Ini memastikan bahwa sumber daya informasi yang tersedia dikelola secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
6. Manajemen untuk Profesional Informasi (Management for Information Professionals): Memiliki kemampuan untuk mengelola diri sendiri, tim, dan proyek secara efektif. Ini termasuk keterampilan kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen waktu yang penting untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan karir.
7. Kebutuhan Informasi dan Layanan Pengguna (Information Needs and User Services): Memahami kebutuhan informasi pengguna yang beragam dan mampu mengembangkan serta memberikan layanan informasi yang berkualitas tinggi. Ini melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan pengguna, melakukan analisis kebutuhan, dan merancang layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
8. Literasi dan Pembelajaran (Literacy and Learning): Memahami konsep literasi informasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Ini termasuk kemampuan untuk membantu pengguna mengembangkan keterampilan literasi informasi, seperti mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis, serta mendukung pembelajaran sepanjang hayat melalui penyediaan sumber daya dan layanan yang relevan (Chu et al., 2022)

Kedelapan standar kompetensi ini dapat dianggap sebagai representasi dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh pustakawan

dan profesional informasi. Pedoman ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kualitas program pendidikan IPI . Program yang memenuhi pedoman ini dianggap mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang memadai untuk menjadi pustakawan profesional.

Dengan demikian, "IFLA Guidelines for Professional LIS Education Programmes 2022" secara tidak langsung membentuk dan mencerminkan standar kompetensi yang diharapkan dari seorang pustakawan melalui pendidikan IPI yang berkualitas. Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan, menilai, dan meningkatkan kompetensi pustakawan, baik secara individu maupun institusional.

Contoh Penerapan Standar Kompetensi IFLA di Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia

1. Informasi dalam Masyarakat: Seorang pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi memahami bahwa mahasiswa dan dosen memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda terkait penelitian dan pembelajaran. Oleh karena itu, pustakawan tersebut mengembangkan berbagai layanan dan koleksi yang relevan dengan kebutuhan masing-masing kelompok pengguna, seperti menyediakan akses ke jurnal ilmiah bereputasi, mengadakan pelatihan literasi informasi, dan menyelenggarakan lokakarya penulisan akademik.
2. Fondasi Profesi IPI : Seorang pustakawan perguruan tinggi memahami sejarah perkembangan IPI di Indonesia, termasuk peran perpustakaan dalam mendukung pendidikan dan penelitian. Pustakawan tersebut juga memegang teguh kode etik profesi yang diatur dalam UU No.43.Tahun 2007, seperti menjaga kerahasiaan informasi pengguna dan memberikan layanan yang adil dan tidak diskriminatif.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Seorang pustakawan perguruan tinggi menguasai berbagai perangkat lunak perpustakaan, seperti sistem otomatisasi perpustakaan (SLiMS) atau yang setara, dan sistem manajemen pembelajaran (LMS). Pustakawan tersebut juga aktif menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk mempromosikan layanan perpustakaan dan berinteraksi dengan pengguna.

4. Penelitian dan Inovasi: Seorang pustakawan perguruan tinggi melakukan penelitian tentang perilaku pencarian informasi mahasiswa dan dosen. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pustakawan mengembangkan sistem rekomendasi sumber daya informasi yang dipersonalisasi untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas layanan perpustakaan.
5. Manajemen Sumber Daya Informasi: Seorang pustakawan perguruan tinggi bertanggung jawab atas pemilihan, pengadaan, pengolahan, dan pengawetan koleksi perpustakaan. Pustakawan tersebut juga mengembangkan kebijakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan anggaran perpustakaan, serta memastikan koleksi dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
6. Manajemen untuk Profesional Informasi: Seorang kepala perpustakaan perguruan tinggi memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, mampu mengelola tim pustakawan secara efektif, dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan pimpinan universitas dan pemangku kepentingan lainnya.
7. Kebutuhan Informasi dan Layanan Pengguna: Seorang pustakawan perguruan tinggi mengadakan survei kepuasan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pengguna terhadap layanan perpustakaan. Berdasarkan hasil survei, pustakawan tersebut mengembangkan layanan baru, seperti layanan konsultasi penelitian online dan ruang diskusi kelompok, untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang.
8. Literasi dan Pembelajaran: Seorang pustakawan perguruan tinggi merancang dan melaksanakan program literasi informasi untuk mahasiswa baru, mengajarkan mereka cara mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif untuk keperluan akademik. Pustakawan tersebut juga mengembangkan tutorial online dan sumber daya pembelajaran lainnya untuk mendukung pembelajaran mandiri mahasiswa.

Contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana standar kompetensi IFLA dapat diterapkan dalam konteks perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Dengan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar ini, pustakawan perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan akademik mahasiswa, dosen, dan institusi secara keseluruhan.

8.6 Analisis Perbandingan SKKNI 2019 dan Standar Kompetensi IFLA.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 236 Tahun 2019 tentang Perpustakaan merinci kompetensi yang dibutuhkan oleh pustakawan di Indonesia. Ketika dianalisis dari perspektif standar kompetensi pustakawan dan profesional informasi yang direkomendasikan oleh IFLA dalam *Guidelines for Professional LIS Education Programmes* (2022), terdapat keselarasan dan beberapa perbedaan yang menarik untuk dicermati.

1. Keselarasan Standar

- 1) Manajemen Sumber Daya Informasi: SKKNI mencakup kompetensi dalam pengembangan dan pengorganisasian koleksi, layanan perpustakaan, pelestarian, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan FKA5 (Information Resources Management) dalam pedoman IFLA, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya informasi sepanjang siklus hidupnya.
- 2) Manajemen untuk Profesional Informasi: SKKNI mencakup kompetensi dalam manajemen perpustakaan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini sejalan dengan FKA6 (Management for Information Professionals) dalam pedoman IFLA, yang menekankan pentingnya keterampilan manajemen yang efektif bagi para profesional informasi.
- 3) Kebutuhan Informasi dan Layanan Pengguna: SKKNI mencakup kompetensi dalam layanan perpustakaan, seperti layanan sirkulasi, referensi, dan multimedia. Hal ini sejalan dengan FKA7 (Information Needs and User Services) dalam pedoman IFLA, yang menekankan pentingnya memahami kebutuhan pengguna dan memberikan layanan informasi yang berkualitas. SKKNI juga mencakup kompetensi dalam pengembangan kemampuan literasi informasi pemustaka, yang sesuai dengan FKA8 (Literacy and Learning) pada pedoman IFLA.
- 4) Teknologi Informasi dan Komunikasi: SKKNI mencakup kompetensi dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk perpustakaan, termasuk pengembangan sistem informasi, pengelolaan repositori, dan pemanfaatan teknologi jaringan. Hal ini sejalan dengan FKA3 (Information and Communication Technologies) dalam pedoman IFLA, yang menekankan

pentingnya kemampuan menggunakan teknologi dalam praktik perpustakaan.

- 5) Penelitian dan Inovasi: SKKNI secara implisit mencakup aspek penelitian dalam kompetensi "Melakukan Kajian Kepustakawanan" yang tercakup dalam pengembangan profesi pustakawan. Hal ini sejalan dengan FKA4 (Research and Innovation) dalam pedoman IFLA, yang menekankan pentingnya kemampuan melakukan penelitian dan menerapkan inovasi dalam bidang perpustakaan dan informasi.

2. Perbedaan Standar

- 1) Informasi dalam Masyarakat: SKKNI tidak secara eksplisit membahas tentang peran informasi dalam masyarakat sebagaimana ditekankan dalam FKA1 pedoman IFLA. Meskipun SKKNI menyentuh aspek layanan perpustakaan yang menyiratkan pemahaman tentang kebutuhan masyarakat, namun tidak ada penekanan khusus pada dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari informasi.
- 2) Fondasi Profesi IPI: SKKNI hanya secara implisit menyentuh aspek sejarah, teori, dan etika profesi perpustakaan dalam kompetensi pengembangan profesi dan sistem kepastakawanan. Pedoman IFLA (FKA2) lebih menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang fondasi profesi ini sebagai landasan etika dan praktik profesional.

Rekomendasi

Untuk lebih menyelaraskan SKKNI dengan standar kompetensi IFLA, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:

- 1) Integrasi FKA1 (Informasi dalam Masyarakat): Menambahkan kompetensi yang secara eksplisit membahas peran informasi dalam masyarakat, termasuk dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Ini bisa meliputi pemahaman tentang bagaimana informasi dapat digunakan untuk memperkuat masyarakat, mengatasi kesenjangan informasi, dan mempromosikan inklusi sosial.
- 2) Penguatan FKA2 (Fondasi Profesi IPI): Memperkuat kompetensi yang berkaitan dengan fondasi profesi IPI, termasuk sejarah, teori, etika, dan nilai-nilai profesi. Ini dapat dilakukan dengan menambahkan unit kompetensi yang secara khusus membahas etika profesi pustakawan, sejarah perkembangan perpustakaan di

Indonesia, dan teori-teori perpustakaan yang relevan dengan konteks Indonesia.

Dengan mengintegrasikan rekomendasi ini, SKKNI dapat menjadi lebih komprehensif dan sejalan dengan standar kompetensi internasional yang ditetapkan oleh IFLA, sehingga menghasilkan pustakawan yang lebih berkualitas dan mampu menghadapi tantangan di era digital.

8.7 Pengembangan Kompetensi Pustakawan Dan Profesional Informasi

Pengembangan kompetensi bagi pustakawan dan profesional informasi merujuk pada proses berkelanjutan untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka dalam bidang IPI . Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penguasaan teknologi baru, pemahaman mendalam tentang perilaku informasi pengguna, hingga penerapan praktik-praktik terbaik dalam pelayanan perpustakaan.

Tujuan utama dari pengembangan kompetensi ini adalah untuk memastikan bahwa pustakawan dan profesional informasi tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugas mereka di tengah perubahan yang terus terjadi dalam lanskap informasi dan teknologi. Dengan memiliki kompetensi yang tepat, mereka dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam, dan berkontribusi pada kemajuan perpustakaan dan masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan American Library Association (ALA) dalam *Core Competences of Librarianship* (2009a) yang menekankan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan (Continuing Professional Development) bagi pustakawan

Selain itu, *The Higher Education Act* tahun 1965 yang kemudian direvisi beberapa kali hingga tahun 2008 juga turut mendukung pengembangan kompetensi pustakawan melalui pendanaan untuk pendidikan berkelanjutan (Continuing Education/Professional Development), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan relevansi profesi pustakawan di tengah perubahan yang terus terjadi.

Pengembangan kompetensi merupakan aspek krusial dalam pendidikan dan praktik IPI (IPI) karena sifat profesi yang terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi, kebutuhan pengguna, dan tuntutan masyarakat.

8.7.1 Pentingnya Pengembangan Kompetensi Pustakawan dan Profesional Informasi

Panduan IFLA Guidelines for LIS Education 2022 menegaskan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD) bagi pustakawan. Panduan ini menyatakan bahwa pustakawan profesional harus secara konsisten mengevaluasi diri, mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, serta memanfaatkan program CPD untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, panduan ini menguraikan delapan bidang pengetahuan dasar (FKAs) yang harus dikuasai oleh pustakawan, termasuk literasi dan pembelajaran, yang mencakup pengembangan berbagai bentuk literasi dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

Pengembangan kompetensi pustakawan dan profesional informasi merupakan aspek krusial dalam pendidikan dan karier mereka. Hal ini didorong oleh beberapa alasan utama, antara lain:

1. Mengikuti Perkembangan Teknologi: Perkembangan teknologi yang pesat, seperti *linked data*, kecerdasan buatan (AI), dan *machine learning*, menuntut pustakawan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar tetap relevan dan efektif dalam memberikan layanan perpustakaan (Breeding, 2014). Kemajuan teknologi ini tidak hanya mengubah cara perpustakaan beroperasi, tetapi juga mentransformasi jenis layanan yang dapat diberikan.

Pustakawan yang adaptif dan kompeten di bidang teknologi akan mampu mengintegrasikan solusi inovatif ke dalam layanan perpustakaan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, misalnya melalui otomatisasi tugas-tugas rutin, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan memuaskan. Pedoman IFLA (FKA3) secara eksplisit menekankan pentingnya kompetensi dalam "Information and Communication Technologies (ICT)" bagi pustakawan.

Dengan menguasai teknologi-teknologi baru, pustakawan dapat mengelola informasi secara lebih efektif, memberikan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, dan menciptakan pengalaman perpustakaan yang lebih dinamis dan menarik. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi di bidang teknologi merupakan investasi krusial bagi pustakawan untuk tetap relevan dan berkontribusi secara optimal dalam era transformasi digital ini

2. Memenuhi Kebutuhan Pengguna yang beragam: Pustakawan perlu mengembangkan kompetensi budaya dan memahami kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok pengguna, termasuk anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lansia (Jaeger et al., 2012). Pemahaman mendalam tentang keragaman pengguna memungkinkan pustakawan merancang layanan dan program yang inklusif dan relevan, memastikan perpustakaan menjadi ruang yang ramah dan nyaman bagi semua. Hal ini sejalan dengan Pedoman IFLA yang menekankan pentingnya memahami "Kebutuhan Informasi dan Layanan Pengguna" (FKA7). Pustakawan perlu mengembangkan kompetensi untuk menganalisis kebutuhan pengguna secara cermat, merancang layanan yang sesuai, dan memastikan pengalaman pengguna yang positif di perpustakaan.
3. Meningkatkan Kualitas Layanan: Pengembangan kompetensi membantu pustakawan merancang dan memberikan layanan yang lebih inovatif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Peningkatan kualitas layanan ini dapat dicapai melalui penguasaan teknologi baru, pemahaman mendalam tentang perilaku informasi pengguna, dan penerapan praktik-praktik terbaik dalam pelayanan perpustakaan (Bertot and Sarin, 2015). Kompetensi ini sejalan dengan pedoman "Information Resources Management" (IRM) dan "Management for Information Professionals" yang dikeluarkan oleh IFLA. Pedoman tersebut membahas kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya informasi dan organisasi secara efektif, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan secara keseluruhan.
4. Menjaga Relevansi Profesi: Pustakawan memegang peran krusial dalam masyarakat informasi saat ini. Untuk menjaga relevansi profesi mereka, pengembangan kompetensi secara berkelanjutan menjadi sebuah keharusan. Kompetensi yang relevan dengan tuntutan zaman, seperti literasi digital, manajemen data penelitian, dan desain pengalaman pengguna, akan meningkatkan nilai tambah pustakawan dalam lanskap informasi yang terus berkembang (Dhananjay, K. S., 2022). Gagasan ini sejalan dengan area kunci "Research and Innovation" (FKA4) dalam pedoman IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi penelitian bagi pustakawan.
5. Membuka Peluang Karir Baru: Pengembangan kompetensi membuka pintu bagi pustakawan untuk mengeksplorasi jalur karier baru, seperti pustakawan data, spesialis pengalaman pengguna, dan manajer repositori institusional (Allard, 2018).

Dengan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang beragam, pustakawan dapat memperluas pilihan karir mereka dan berkontribusi pada berbagai bidang yang membutuhkan keahlian informasi. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan "Membuka Peluang Karir Baru", pedoman IFLA menyiratkan hal ini melalui penekanan pada pengembangan kompetensi di berbagai bidang, seperti "Literacies and Learning" (FKA8). Dengan memiliki keterampilan yang beragam, pustakawan dapat mengejar jalur karir baru di bidang pendidikan, pelatihan, atau konsultasi

Laporan Tren IFLA 2023 menyoroti urgensi pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pustakawan dan profesional informasi. Sejumlah tren dan rekomendasi dalam laporan tersebut memperkuat gagasan ini:

1. Relevansi Perpustakaan yang Dipertanyakan (Tren 1): Untuk melawan persepsi menurunnya relevansi perpustakaan, pustakawan harus terus meningkatkan kompetensi mereka agar selaras dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Peningkatan keterampilan dalam literasi digital, literasi informasi, dan teknologi baru menjadi krusial.
2. Persepsi Pustakawan sebagai Pembantu (Tren 9): Guna mengubah pandangan ini, pustakawan perlu menunjukkan kompetensi dan keahlian mereka sebagai agen perubahan. Pengembangan kompetensi yang berkelanjutan akan mendorong pustakawan menjadi lebih proaktif dan inovatif dalam memberikan layanan yang berdampak.
3. Globalisasi dan Akses Informasi (Tren 10): Dalam era globalisasi informasi, kompetensi pustakawan dalam menavigasi lanskap informasi yang kompleks dan beragam menjadi krusial. Pustakawan harus mampu membantu pengguna mengakses dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber global.
4. Kesenjangan Digital yang Semakin Lebar (Tren 11): Pustakawan memiliki peran penting dalam mengatasi kesenjangan digital melalui pelatihan literasi digital dan teknologi. Kemampuan ini hanya dapat dicapai jika pustakawan memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang-bidang tersebut.
5. Kesibukan Mengatasi Krisis dan Kurangnya Pemikiran Strategis (Tren 12): Agar mampu berpikir strategis dan merencanakan masa depan perpustakaan, pustakawan memerlukan kompetensi dalam analisis tren, pengambilan keputusan, dan manajemen proyek. Pengembangan kompetensi ini akan menjadikan pustakawan lebih proaktif dan adaptif terhadap perubahan.

Secara keseluruhan, Laporan Tren IFLA 2023 menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan kunci bagi pustakawan dan profesional informasi dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Dengan terus mengembangkan diri, pustakawan dapat memastikan relevansi, efektivitas, dan kontribusi mereka yang signifikan bagi masyarakat dan pembangunan.

Pentingnya pengembangan kompetensi pustakawan tidak hanya diakui secara global, tetapi juga ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU No.43.Tahun 2007, sebagai payung hukum utama, secara eksplisit mengamanatkan pemerintah untuk "membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan" (Pasal 7 ayat (1) huruf g). Amanat ini kemudian diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014, yang menetapkan standar kompetensi pustakawan mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi (Pasal 31).

Dalam KKNI-P No. 2 Tahun 2021 lebih lanjut menguatkan pentingnya pengembangan kompetensi pustakawan. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk pengembangan kompetensi berbasis kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi, serta merinci jenjang kualifikasi dan kemungkinan jabatan yang dapat dicapai oleh pustakawan sesuai dengan kompetensi mereka (Pasal 3 dan 4).

Tidak hanya berfokus pada pengembangan kompetensi, peraturan perundang-undangan juga menekankan penerapan kompetensi tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan literasi masyarakat. Hal ini tercermin dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang mendorong peningkatan kemampuan literasi masyarakat melalui program transformasi yang melibatkan pustakawan yang kompeten (Pasal 3).

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perpustakaan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 236 Tahun 2019, memiliki peran krusial dalam pengembangan kompetensi pustakawan. SKKNI tidak hanya merinci secara komprehensif kompetensi yang dibutuhkan dalam berbagai fungsi perpustakaan, mulai dari pengembangan koleksi hingga penerapan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga menetapkan standar acuan yang jelas dalam menilai kompetensi tenaga perpustakaan. Penilaian ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus

dimiliki oleh seorang pustakawan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Lebih lanjut, SKKNI juga berfungsi sebagai acuan penting bagi lembaga pendidikan dan pelatihan perpustakaan dalam mengembangkan kurikulum dan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, lulusan perpustakaan diharapkan dapat memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dan siap untuk berkontribusi secara optimal di berbagai jenis perpustakaan.

Selain itu, SKKNI juga memberikan arahan yang jelas bagi pustakawan mengenai kompetensi yang harus mereka miliki dan kembangkan untuk mencapai jenjang karier tertentu. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi pustakawan untuk terus belajar dan mengembangkan diri, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, SKKNI berperan sebagai instrumen vital dalam menjamin mutu dan profesionalisme layanan perpustakaan di Indonesia.

Pentingnya pengembangan kompetensi pustakawan tidak hanya diakui secara global, tetapi juga ditegaskan dalam Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia tahun 2019. Kode Etik ini secara eksplisit menekankan pentingnya pengembangan kompetensi pustakawan, khususnya pada poin kedua Asta Etika Pustakawan Indonesia, yang berbunyi: "Meningkatkan keunggulan kompetensi setinggi-tingginya."

Selain itu, tujuan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Anggaran Dasar IPI, juga mendukung pengembangan kompetensi pustakawan dengan menyatakan bahwa tujuan IPI adalah mengembangkan profesionalisme pustakawan Indonesia dan IPI

8.7.2 Penanggung Jawab Pengembangan Kompetensi Pustakawan

Pengembangan kompetensi pustakawan dan profesional informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif dari berbagai pemangku kepentingan dalam bidang IPI (IPI).

1. Individu: Pustakawan dan profesional informasi memiliki tanggung jawab etis untuk terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang karier mereka (ALA, 2019a). Ini termasuk mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi, tren informasi, dan kebutuhan pengguna. Mereka harus secara proaktif mencari peluang pembelajaran, baik melalui pelatihan formal, konferensi, lokakarya, maupun pembelajaran mandiri.

2. Lembaga Pendidikan: Sekolah dan program IPI memiliki peran penting dalam membekali mahasiswa dengan landasan pengetahuan dan keterampilan yang kuat, serta menumbuhkan minat untuk terus belajar. Kurikulum yang relevan dan mutakhir, yang mencakup teknologi baru dan isu-isu terkini dalam IPI, sangat penting untuk mempersiapkan lulusan menghadapi tantangan di dunia kerja (Abels, Howarth, and Smith, 2017).
3. Organisasi Profesi: Asosiasi profesional seperti American Library Association (ALA) memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan kompetensi pustakawan. Mereka dapat menyediakan sumber daya, program pelatihan, konferensi, dan publikasi yang relevan untuk membantu pustakawan memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka (Rubin & Rubin, 2020).

Tanggung Jawab Pengembangan Kompetensi pustakawan di Indonesia dapat kita analisis dari UU No 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014, secara tegas mengatur tanggung jawab bersama dalam pengembangan kompetensi pustakawan di Indonesia. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada individu pustakawan itu sendiri, melainkan juga melibatkan lembaga pendidikan, organisasi profesi, serta pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi dari berbagai pihak ini diperlukan untuk memastikan pengembangan kompetensi pustakawan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan mendukung tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

1. Pustakawan (Individu): Pustakawan sebagai individu memiliki peran utama dalam pengembangan kompetensi mereka. Pasal 30 ayat (2) UU Perpustakaan menyatakan bahwa "Pustakawan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas." Ini berarti pustakawan bertanggung jawab untuk secara proaktif mencari dan memanfaatkan peluang pengembangan profesional, seperti mengikuti pelatihan, seminar, konferensi, atau pendidikan lanjutan. Dengan demikian, pustakawan dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang kepustakawanan.
2. Lembaga Pendidikan: Lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi dengan program studi IPI, memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja. Pasal 33 ayat (3) UU Perpustakaan menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan tenaga

perpustakaan dilaksanakan melalui kerja sama antara perpustakaan dan lembaga pendidikan dan pelatihan.

3. Organisasi Profesi: Organisasi profesi pustakawan, seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), berperan penting dalam mendukung pengembangan kompetensi anggotanya. Pasal 34 ayat (1) UU Perpustakaan menyebutkan bahwa organisasi profesi berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pustakawan.
4. Pemerintah Pusat dan Daerah: Pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Perpustakaan Nasional, memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam pengembangan kompetensi pustakawan di tingkat nasional. Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Perpustakaan secara tegas menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk "membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan." Kewajiban ini meliputi penyusunan standar kompetensi pustakawan, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan program-program peningkatan kompetensi lainnya.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan kompetensi pustakawan di wilayahnya masing-masing. Pasal 77 huruf g PP No. 24 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi untuk merancang dan melaksanakan program-program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

Ikatan Pustakawan Indonesia juga berperan penting dalam peningkatan kompetensi pustakawan sebagaimana dapat kita pahami dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) tahun 2019. Tanggung jawab ini diemban oleh individu pustakawan, organisasi profesi (IPI), serta lembaga tempat pustakawan bekerja.

8.7.3 Peran organisasi profesi pustakawan dalam Peningkatan Kompetensi Pustakawan

Di atas sudah kita singgung pada poin c. peran Organisasi profesi, seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), berperan penting dalam mendukung pengembangan kompetensi anggotanya. Pasal 34 ayat (1) UU Perpustakaan menyebutkan bahwa organisasi profesi berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pustakawan. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014, serta Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)

tahun 2019 menjadi landasan hukum bagi peran organisasi profesi pustakawan dalam meningkatkan kompetensi pustakawan.

Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 12 mendefinisikan organisasi profesi pustakawan. Selain itu, Pasal 33 ayat 3 membuka peluang bagi organisasi profesi untuk berperan dalam pendidikan dan pelatihan pustakawan melalui kerja sama dengan Perpustakaan Nasional dan perpustakaan umum. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan organisasi profesi untuk memajukan dan melindungi profesi pustakawan, serta Pasal 35 memberikan kewenangan kepada organisasi profesi untuk menetapkan standar kompetensi dan kode etik pustakawan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan profesi.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 juga turut memperkuat peran organisasi profesi pustakawan. Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa organisasi profesi pustakawan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pustakawan setelah diakreditasi. Selain itu, Pasal 56 ayat (2) huruf b mewajibkan keterwakilan organisasi profesi pustakawan dalam keanggotaan Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi, yang memiliki peran penting dalam pengembangan kebijakan dan standar perpustakaan.

Dengan demikian, kedua peraturan perundang-undangan ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi organisasi profesi pustakawan, termasuk Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), untuk berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi pustakawan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan standar profesi.

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) memiliki peran sentral dalam pengembangan kompetensi pustakawan, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) tahun 2019. Tanggung jawab ini diemban bersama oleh individu pustakawan, organisasi profesi (IPI), serta lembaga tempat pustakawan bekerja.

1. Tanggung Jawab Individu

Pustakawan secara individu memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Hal ini tercermin dalam poin kedua Asta Etika Pustakawan Indonesia yang mewajibkan setiap anggota untuk meningkatkan keunggulan kompetensi setinggi-tingginya. Selain itu, pustakawan juga bertanggung jawab untuk memahami dan menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi, serta

memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 2007.

2. Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi dengan program studi IPI, memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 menyatakan bahwa pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.

3. Tanggung Jawab Organisasi Profesi

Organisasi profesi pustakawan, seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan kompetensi anggotanya. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 menyebutkan bahwa organisasi profesi berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pustakawan. Pasal 35 ayat (1) lebih lanjut menegaskan bahwa organisasi profesi berwenang menetapkan standar kompetensi pustakawan. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 Pasal 33 ayat (3) juga menyebutkan bahwa organisasi profesi dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pustakawan setelah diakreditasi.

Dalam Anggaran Dasar IPI, Pasal 8 menegaskan bahwa tujuan IPI adalah mengembangkan profesionalisme pustakawan Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, IPI melaksanakan berbagai kegiatan, seperti:

- 1) Mengadakan kegiatan ilmiah di bidang perpustakaan dan informasi (Pasal 9 Anggaran Dasar IPI).
- 2) Menyelenggarakan atau membantu penyelenggaraan pertemuan, konferensi, seminar, lokakarya, kursus, dan bentuk-bentuk pendidikan serta pelatihan lainnya (Pasal 9 Anggaran Dasar IPI).
- 3) Menyusun dan melaksanakan program kerja yang mencakup kegiatan pengembangan kompetensi (Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar IPI).

4. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Perpustakaan Nasional, memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam pengembangan kompetensi pustakawan di tingkat nasional. Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 secara tegas menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk "membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan."

Kewajiban ini meliputi penyusunan standar kompetensi pustakawan, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan program-program peningkatan kompetensi lainnya.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan kompetensi pustakawan di wilayahnya masing-masing. Pasal 80 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing, yang dapat diartikan juga termasuk pengembangan kompetensi pustakawan. Selain itu, Pasal 56 ayat (2) huruf b mewajibkan keterlibatan organisasi profesi pustakawan dalam keanggotaan Dewan Perpustakaan Provinsi. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi untuk merancang dan melaksanakan program-program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

8.7.4 Manfaat Pengembangan Kompetensi:

Panduan IFLA Guidelines for LIS Education 2022) ini menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi bagi pustakawan. Panduan ini secara tidak langsung menunjukkan beberapa manfaat penting dari pengembangan kompetensi tersebut.

1. Mengatasi Perubahan Lanskap Informasi:

Panduan IFLA menekankan pentingnya peninjauan kurikulum secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat (G9. Programme Review and Innovation, hlm. 14). Kurikulum pendidikan IPI perlu mencakup berbagai fokus, baik teknis, akademis, profesional, maupun penelitian, untuk membekali pustakawan dengan kualifikasi profesional yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan lanskap informasi (hlm. 3).

2. Memahami Kebutuhan Pengguna yang Beragam:

Pengembangan layanan informasi yang efektif dan relevan membutuhkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna yang beragam, baik yang disadari maupun tidak disadari (FKA7. Information Needs and User Services, hlm. 9). Selain itu, pustakawan perlu mempertimbangkan isu-isu kesetaraan, keragaman, inklusi, dan aksesibilitas (EDIA) dalam pengembangan layanan informasi.

3. Meningkatkan Kualitas Layanan:

Layanan informasi berkualitas melibatkan pemahaman mendalam tentang komunitas pengguna, kebutuhan mereka, dan kesenjangan dalam layanan yang ada (FKA7. *Information Needs and User Services*, hlm. 9). Pustakawan perlu merancang dan menyediakan layanan yang inklusif dan menjangkau semua pengguna, termasuk mereka yang kurang terlayani, serta melakukan penilaian terhadap hasil dan dampak dari layanan yang diberikan.

4. Memajukan Karir

Panduan IFLA menekankan pentingnya pengembangan profesional dan pribadi bagi staf perpustakaan, yang dapat berkontribusi pada kemajuan karir mereka (G5. *Academic, Research, Professional, and Support Staff*, hlm. 11). Kebijakan dan rencana sumber daya manusia yang transparan, adil, dan jelas, serta lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung kesejahteraan staf, dapat memberdayakan kreativitas dan produktivitas mereka, serta membuka potensi mereka untuk berkembang.

5. Mendorong Inovasi dan Kreativitas:

Penelitian dalam IPI harus berorientasi pada pemecahan masalah, menganalisis akar permasalahan yang dihadapi dalam praktik IPI, dan berusaha memberikan solusi serta pemahaman yang dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan informasi (FKA4. *Research and Innovation*, hlm. 8). Pendekatan ini mendorong inovasi dan kreativitas dalam praktik profesional pustakawan.



Paradigma Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Bab ini akan mengeksplorasi secara mendalam pergeseran paradigma dalam ilmu perpustakaan dan informasi (IPI) yang telah membawa perubahan signifikan pada peran dan fungsi perpustakaan. Kita akan memulai dengan membedah perbedaan mendasar antara paradigma perpustakaan tradisional yang berfokus pada koleksi fisik dengan paradigma informasi yang lebih berorientasi pada pengguna dan pemanfaatan teknologi, serta implikasinya terhadap profesi pustakawan.

Selanjutnya, kita akan menelusuri bagaimana pergeseran paradigma ini telah mempengaruhi pendekatan pendidikan dan pelatihan pustakawan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mempersiapkan lulusan untuk menghadapi lanskap informasi yang terus berubah. Kurikulum pendidikan IPI perlu beradaptasi dengan perubahan ini, mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, serta mengembangkan kompetensi baru yang relevan dengan kebutuhan pengguna di era digital.

Terakhir, kita akan mencari titik temu antara kedua paradigma yang sering dianggap berseberangan ini. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan akses terhadap informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Dengan mengintegrasikan kedua paradigma ini secara harmonis, perpustakaan dapat terus menjalankan fungsi tradisionalnya sebagai penyimpan dan pengelola koleksi, sekaligus berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna di era digital.

9.1 Paradigma Perpustakaan Versus Paradigma Informasi

Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI) adalah bidang yang terus berkembang dan berkembang. Paradigma IPI telah berubah seiring waktu untuk mencerminkan perubahan dalam masyarakat dan teknologi. Cronin

dan Campbell berpendapat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara paradigma perpustakaan dan paradigma informasi.

Pada tahun 1995, Cronin (1995) mengusulkan bahwa "ilmu perpustakaan dan ilmu informasi tentu bukanlah pernikahan yang diatur oleh surga" (hlm. 897) dan bahwa penghilangan kata "perpustakaan" dari banyak program IPI "adalah tanda jelas dari meningkatnya ketidakpuasan terhadap apa yang dikonotasikan oleh label tersebut". Cronin (1995) juga berpendapat bahwa "ilmu perpustakaan" adalah suatu oksimoron, dan bahwa yang disebut sebagai ilmu perpustakaan sebenarnya adalah perpustakaan sebagai suatu profesi yang terkait dengan struktur fisik tertentu (hlm. 898). Di sisi lain, ilmu informasi melibatkan metodologi dan model-model yang sedang berkembang yang tidak terikat pada suatu institusi tertentu. J. Campbell (1993) memiliki pandangan yang berbeda tetapi mengangkat isu yang sama. Dia berpendapat bahwa revolusi komputer menciptakan kebutuhan akan kemampuan teknis yang lebih besar, dan bahwa kegagalan untuk mengubah pendidikan perpustakaan secara signifikan bisa menyebabkan keusangan. Dia mencatat bahwa "MLS mungkin tidak lagi menjadi kredensial yang layak mengingat sifat tantangan teknologi dan praktis yang kita hadapi dalam pekerjaan perpustakaan sehari-hari" (hlm.560).

Bila kita analisis mengenai perbandingan Paradigma Perpustakaan dengan Paradigma Informasi dalam uraian di atas menimbulkan beberapa isu yang patut dipertimbangkan. Di bawah ini adalah analisis mendalam beserta kritik dan argumen terkait:

1. Penghilangan kata "perpustakaan" dari Program-program IPI: Cronin mengkritik penghilangan kata "perpustakaan" dari banyak program IPI sebagai tanda ketidakpuasan terhadap konotasi label tersebut. Ini dapat dilihat sebagai tanda perubahan dalam peran dan lingkup IPI, sejalan dengan pergeseran paradigma dari fokus pada koleksi fisik ke layanan informasi yang lebih luas. (Grover et al., 2015, hlm. 36)
2. "Ilmu Perpustakaan" sebagai Oksimoron: Cronin berpendapat bahwa "ilmu perpustakaan" adalah suatu oksimoron, menggambarkan bahwa yang sebenarnya disebut sebagai ilmu perpustakaan adalah perpustakawanan. Kritik ini mungkin dapat diterima, mengingat bahwa bidang informasi telah berkembang pesat dan melampaui batasan tradisional perpustakaan. Namun, penting untuk diingat bahwa perpustakaan, meskipun mengalami transformasi, tetap memiliki peran penting dalam penyediaan akses ke informasi bagi masyarakat. (Grover et al., 2015, hlm. 41-42)

3. Ilmu Informasi vs. Perpustakaan: Argumen Cronin tentang perbedaan antara Ilmu Informasi dan perpustakaan sebagai profesi yang lebih berkaitan dengan struktur fisik tertentu memunculkan pertanyaan tentang relevansi perpustakaan dalam era digital. Ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perubahan, seperti yang ditekankan oleh Grover et al. (2015) dalam pembahasan mereka tentang evolusi infrastruktur informasi (hlm. 3).
4. MLS Sebagai Kredensial: Campbell mengemukakan bahwa MLS (Master of Library Science) mungkin tidak lagi menjadi kredensial yang layak mengingat tantangan teknologi dan praktis. Ini adalah pernyataan yang berpotensi memicu perdebatan dalam hal relevansi pendidikan perpustakaan. Tantangannya adalah mengintegrasikan kedua paradigma ini secara harmonis, sehingga perpustakaan dapat tetap menjalankan fungsi tradisional sebagai penyimpan dan pengelola koleksi, sekaligus berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna di era digital. (Grover et al., 2015, hlm. 41-42)
5. Hubungan Antara Ilmu Perpustakaan, Perpustakaan, Ilmuwan Informasi, dan Ilmu Informasi: Komentar-komentar ini menggarisbawahi kerumitan dalam mendefinisikan hubungan antara elemen-elemen ini. Ini menunjukkan perlunya refleksi dan adaptasi terus-menerus terhadap perubahan dalam bidang ini, terutama mengingat perpustakaan sebagai bagian integral dari infrastruktur informasi global yang lebih luas. (Grover et al., 2015, hlm. 1-2)

Dalam analisis ini, kita melihat bahwa perdebatan mengenai peran dan hubungan antara perpustakaan, ilmu perpustakaan, ilmu informasi, dan ilmuwan informasi adalah diskusi yang penting dalam menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan masyarakat. Kritik dan argumen yang diajukan oleh Cronin dan Campbell mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam pemikiran tradisional dan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan dalam bidang ini.

9.2 Pergeseran Paradigma: Pendekatan Berbeda Dalam Pendidikan IPI

Beberapa individu menggambarkan perdebatan antara perpustakaan dan informasi sebagai benturan antara dua paradigma. Paradigma layanan perpustakaan berasal dari keyakinan tradisional bahwa perpustakaan adalah lembaga pendidikan yang mendukung minat membaca, literasi, dan penyebaran nilai budaya umum (Apostle dan Raymond, 1997). Paradigma

ini menekankan pentingnya teori pendidikan, layanan perpustakaan, literasi, dan membaca dalam kurikulum IPI.

Namun, pada paruh kedua abad kedua puluh, perubahan besar dalam industrialisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, dan pemerintahan menyebabkan munculnya paradigma informasi (Apostle dan Raymond, 1997). Paradigma ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat pasca-industri adalah masyarakat informasi, dan teknologi informasi adalah kekuatan yang akan menentukan masa depan perpustakaan dan ilmu informasi. Hal ini menyebabkan pergeseran dalam fokus, di mana perpustakaan dilihat sebagai penyedia informasi yang vital, sejalan dengan pergeseran paradigma yang dibahas oleh Grover et al. (2015) dari fokus pada koleksi fisik ke layanan informasi yang lebih luas (hlm. 36-37).

Van House dan Sutton (2000) menyoroti perlunya perubahan dalam pendidikan IPI dari orientasi tradisional ke fokus pada informasi. Mereka menganggap bahwa perubahan dalam lanskap informasi dan lingkungan universitas mempengaruhi peran perpustakaan dan ilmu informasi. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar pendidikan IPI memperluas fokusnya, menjadikan kurikulumnya lebih berorientasi pada informasi daripada perpustakaan.

Kita menyadari bahwa saat ini lanskap informasi telah berubah secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Informasi kini tersedia dalam berbagai format, termasuk digital, cetak, dan audio-visual. Informasi juga dapat diakses dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan, internet, dan media sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Grover et al. (2015) tentang evolusi infrastruktur informasi dan bagaimana teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi (hlm. 3).

Lingkungan universitas juga telah berubah. Universitas semakin menekankan penelitian dan pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini telah menyebabkan permintaan yang meningkat untuk lulusan IPI yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang informasi digital dan teknologi. Tantangan ini mencerminkan perlunya adaptasi dalam pendidikan IPI agar tetap relevan dan efektif di era digital, seperti yang ditekankan oleh Grover et al. (2015) (hlm. 36-37).

Van House dan Sutton berpendapat bahwa perubahan ini menuntut pendidikan IPI untuk memperluas fokusnya. Mereka menyarankan agar pendidikan IPI memasukkan lebih banyak konten tentang informasi digital, teknologi, dan penelitian. Mereka juga menyarankan agar pendidikan IPI lebih fokus pada keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja di lingkungan informasi yang berubah.

Wiegand (2005) mengamati bahwa meskipun perpustakaan bertujuan untuk membuat informasi dapat diakses, beberapa pendidik perpustakaan cenderung menekankan kemampuan teknologi daripada nilai budaya dan peran perpustakaan sebagai agen budaya dalam kehidupan sehari-hari. Ia mendorong pendidikan IPI untuk lebih menekankan pentingnya membaca dan peran perpustakaan sebagai tempat untuk kegiatan membaca. Hal ini sejalan dengan pandangan Grover et al. (2015) tentang pentingnya difusi pengetahuan, yaitu tidak hanya menyediakan akses informasi, tetapi juga membantu individu memahami dan menerapkannya secara efektif (hlm. 5).

Gorman (2004) menyatakan bahwa perubahan paradigma telah mengakibatkan krisis dalam pendidikan perpustakaan. Dia menyarankan pendidikan IPI yang lebih fokus pada prinsip-prinsip inti perpustakaan dan perluasan peran perpustakaan dalam masyarakat. Gorman juga meminta reformasi dalam proses akreditasi untuk memastikan standar nasional yang lebih ketat.

Crowley (2008) mendukung gagasan bahwa pendidikan IPI harus mengalihkan perhatian dari paradigma informasi kembali ke pentingnya literasi, membaca, dan pembelajaran seumur hidup. Dia khawatir bahwa perpustakaan, jika hanya berfokus pada akses informasi, akan kesulitan bersaing dengan teknologi yang semakin maju seperti Google.

Dillon dan Norris (2005) menolak gagasan bahwa terdapat dua paradigma yang bersaing, dan mereka menyoroti kesepakatan dalam komunitas IPI mengenai tanggung jawab perpustakaan sebagai penjaga catatan budaya pengetahuan manusia. Mereka menekankan bahwa perpustakaan harus terus menyediakan layanan dalam era teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Grover et al. (2015) tentang pentingnya mengintegrasikan paradigma tradisional dan paradigma baru secara harmonis, sehingga perpustakaan dapat tetap menjalankan fungsi tradisionalnya sekaligus berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna di era digital (hlm. 41-42).

Gagasan tentang adanya krisis juga ditantang oleh King (2005), yang menganggap bahwa klaim semacam itu sering muncul dan bahwa ada kesamaan permasalahan dalam pendidikan IPI dengan bidang lain, seperti kurangnya pendanaan dan perbedaan pandangan antara praktisi dan pendidik.

Stoffle dan Leeder (2005) menyoroti masalah ketidakpahaman antara praktisi dan pendidik IPI, di mana praktisi seringkali tidak memahami tujuan pendidikan perpustakaan dan tekanan di bawah yang program-program IPI beroperasi.

Dalam kesimpulan, perdebatan mengenai paradigma pendidikan IPI mencerminkan tantangan dan kompleksitas dalam mendefinisikan peran perpustakaan dan ilmu informasi dalam era informasi. Penting untuk mencari keseimbangan antara tradisi perpustakaan dan evolusi teknologi informasi, serta untuk terus menekankan pentingnya literasi, membaca, dan peran perpustakaan dalam masyarakat.

IFLA Guidelines for LIS Education 2022, yang disusun oleh Chu et al. (2022), menyoroti adanya pergeseran paradigma dalam pendidikan IPI. Panduan ini menekankan pentingnya mengakui dan mengintegrasikan berbagai cara mengetahui, termasuk tradisi lisan dan pengetahuan pribumi, ke dalam pendidikan IPI. Pendekatan yang lebih inklusif dan beragam ini diperlukan untuk mempersiapkan para profesional IPI dalam memberikan layanan yang efektif dan relevan secara budaya di lingkungan informasi global yang dinamis.

Selain itu, panduan ini juga menyoroti pergeseran fokus dari praktik yang berpusat pada Barat ke arah pendekatan yang lebih global dan multikultural. Jiuming Ji, salah satu kontributor panduan ini, menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang beragam di mana para profesional IPI beroperasi. Dengan mengakui keragaman ini, pendidikan IPI dapat membekali para profesional dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk melayani komunitas yang beragam secara efektif.

Panduan IFLA 2022 juga menyoroti meningkatnya penekanan pada penelitian dan inovasi dalam pendidikan IPI. Chris Cunningham, seorang pendukung kuat penelitian IPI, menekankan pentingnya membekali para profesional dengan keterampilan penelitian yang diperlukan untuk mengevaluasi praktik saat ini, mengembangkan layanan inovatif, dan berkontribusi pada pertumbuhan bidang ini. Dengan mendorong budaya penelitian dan inovasi, pendidikan IPI dapat memberdayakan para profesional untuk menjadi pemimpin dalam membentuk masa depan profesi ini. (Chu et al., 2022)

Perdebatan mengenai pergeseran paradigma dalam pendidikan IPI dan mengevaluasi berbagai pandangan dalam hal ini. Terdapat beberapa elemen penting yang perlu dianalisis:

1. Pergeseran Paradigma: pergeseran paradigma dalam pendidikan IPI, yang mencakup dua pandangan utama: paradigma layanan perpustakaan dan paradigma informasi. Paradigma layanan perpustakaan menekankan peran perpustakaan sebagai lembaga pendidikan, sementara paradigma informasi menggeser fokus pada perpustakaan sebagai penyedia informasi.

2. Tantangan Teknologi: Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu faktor utama yang memicu perubahan dalam paradigma pendidikan IPI. Pergeseran ini mempertimbangkan pengaruh besar teknologi terhadap cara orang mencari dan mengakses informasi.
3. Perubahan dalam Kurikulum: Beberapa pandangan menunjukkan bahwa perubahan paradigma telah mempengaruhi kurikulum pendidikan IPI. Hal ini mencakup penekanan yang berubah dari teori pendidikan, layanan perpustakaan, literasi, dan membaca, menuju pemahaman teknologi informasi dan manajemen informasi.
4. Konflik Paradigma: Kondisi ini menggambarkan adanya konflik atau perdebatan antara pendidikan perpustakaan tradisional dan pendidikan berorientasi informasi. Persaingan antara sekolah-sekolah Ilmu Informasi (iSchools) dan sekolah-sekolah perpustakaan menjadi perhatian utama.
5. Pentingnya Membaca: Beberapa pandangan menekankan pentingnya membaca dan literasi sebagai aspek penting dalam pendidikan perpustakaan, yang mungkin terabaikan dalam pendidikan berorientasi informasi.
6. Tantangan Keuangan dan Penghargaan: Keuangan yang terbatas dan kurangnya penghargaan bagi program-program pendidikan perpustakaan menjadi masalah penting yang mempengaruhi perubahan dalam pendidikan IPI.
7. Krisis atau Tantangan: Terdapat perdebatan mengenai apakah situasi ini adalah "krisis" sejati atau tantangan yang harus diatasi. Beberapa pandangan berpendapat bahwa klaim tentang krisis ini bisa saja berlebihan dan tidak sepenuhnya merusak pendidikan perpustakaan.
8. Perlunya Adaptasi: Beberapa pandangan menekankan perlunya adaptasi dalam pendidikan IPI agar tetap relevan dan efektif di era informasi yang terus berubah.

Secara keseluruhan, pendapat ini mencerminkan kompleksitas dalam perdebatan mengenai paradigma pendidikan IPI dan mengilustrasikan berbagai perspektif yang berbeda tentang isu-isu kunci dalam bidang ini. Argumentasi yang kuat ada baik yang mendukung perubahan paradigma maupun yang menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional pendidikan perpustakaan.

9.3 Titik Temu Paradigma IPI

Debat mengenai perpustakaan versus informasi tidak mungkin akan hilang dalam waktu dekat. Namun, gagasan bahwa keduanya merupakan paradigma yang bersaing mungkin tidak akan memudahkan diskusi. Miksa

(1992) menganalisis debat tersebut dari perspektif "perpustakaan sebagai lembaga sosial" versus "gerakan informasi sebagai sistem komunikasi manusia" dan menemukan cacat konseptual yang signifikan pada keduanya. Dia berpendapat bahwa apa yang dibutuhkan adalah "pendekatan yang lebih esensial terhadap apa yang terlibat dalam pekerjaan bidang ini, yang mengkonseptualisasikan proses dengan cara yang lebih menyeluruh tetapi bersatu" (Miksa, F. L., 1992; hlm. 243). Upaya untuk menyatukan, daripada memecah belah, tampaknya diinginkan karena sulit untuk menentukan tujuan konstruktif apa yang telah dicapai oleh debat tentang paradigma yang bersaing.

Gagasan paradigma seperti yang umumnya digunakan saat ini didasarkan pada karya Thomas S. Kuhn (1970) dalam risalahnya yang inovatif tentang sejarah sains, *The Structure of Scientific Revolutions*. Kuhn menggambarkan pergeseran paradigma dalam sains menggunakan contoh perubahan dari pandangan Ptolemaic tentang alam semesta dengan bumi di pusatnya ke konsepsi Copernicus dengan matahari di pusatnya. Gagasan Kuhn tentang pergeseran paradigma bukan hanya penyesuaian dalam perspektif atau penekanan; itu adalah perubahan yang begitu besar sehingga satu paradigma tidak dapat dipegang pada saat yang sama dengan yang lain. Seperti yang dia katakan, "revolusi ilmiah di sini diambil sebagai episode perkembangan non-kumulatif di mana paradigma lama digantikan seluruhnya atau sebagian oleh yang baru yang tidak kompatibel" (Kuhn, T. S., 2012, hlm. 92). Meskipun Kuhn menawarkan banyak contoh dalam sains, dia mempertanyakan apakah ada paradigma ilmu sosial.

Dalam hal pendidikan IPI, bukankah masuk akal untuk percaya bahwa informasi dan pendidikan sama-sama penting—bahwa kedua perspektif tersebut tidak tidak kompatibel tetapi hanya kerangka acuan yang berbeda? Memang, bukankah konsepsi sehari-hari kita tentang informasi dan pendidikan mengasumsikan bahwa keduanya terkait erat—bahwa informasi adalah bagian yang diperlukan dari pembelajaran? Bukankah promosi membaca sebagai fungsi sentral perpustakaan cukup kompatibel dengan dan melengkapi pencarian, pengorganisasian, dan navigasi informasi untuk orang-orang? Tentu saja, selama bertahun-tahun, pernyataan misi perpustakaan umum telah menyatakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, rekreasi, dan informasi komunitas mereka. Bukankah program IPI juga harus mencerminkan tujuan ganda yang sama? Menjelajahi potensi visi kesatuan, seperti yang disarankan Miksa (1992), tampaknya memiliki banyak prospek yang menggembirakan.

Bila kita analisis pendapat Miksa (1992) menunjukkan bahwa debat perpustakaan versus informasi mungkin tidak produktif karena kedua

perspektif tersebut tidak harus tidak kompatibel. Sebaliknya, keduanya dapat dilihat sebagai kerangka acuan yang berbeda untuk memahami dan memecahkan masalah yang sama, sejalan dengan pandangan Grover et al. (2015) tentang perlunya mengintegrasikan paradigma tradisional dan paradigma baru secara harmonis (hlm. 41-42). Miksa menyarankan bahwa pendidikan IPI harus fokus pada pendekatan yang lebih esensial terhadap apa yang terlibat dalam pekerjaan bidang ini, yang mengkonseptualisasikan proses dengan cara yang lebih menyeluruh tetapi bersatu. Ini akan melibatkan pengakuan bahwa informasi dan pendidikan sama-sama penting dan saling melengkapi.

Meskipun mungkin sulit untuk menentukan tujuan konstruktif apa yang telah dicapai oleh debat tentang paradigma yang bersaing, upaya untuk menyatukan daripada memecah belah tampaknya diinginkan. Hal ini dapat membuka jalan bagi pengembangan visi kesatuan untuk bidang IPI, yang memiliki banyak prospek yang menggembirakan.

Dengan demikian, pergeseran paradigma dalam pendidikan IPI bukan sekadar pergantian dari satu pandangan ke pandangan lain, melainkan sebuah evolusi yang mengintegrasikan berbagai pendekatan untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Pendidikan IPI perlu mempersiapkan para profesional untuk tidak hanya mengelola dan menyediakan akses informasi, tetapi juga memfasilitasi pembelajaran dan penggunaan informasi secara aktif, serta berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan budaya masyarakat.

Pendidikan Berkelanjutan bagi Pustakawan dan Profesional Informasi

Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia profesional. Kemajuan teknologi yang pesat menuntut setiap individu untuk terus belajar dan beradaptasi agar tetap relevan. Dalam konteks ini, pendidikan berkelanjutan menjadi kunci utama bagi para profesional, termasuk pustakawan dan profesional informasi, untuk menjaga kompetensi dan daya saing mereka.

Bab ini akan membahas pentingnya pendidikan berkelanjutan di era digital, khususnya dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi (IPI), serta bagaimana hal ini dapat membantu para profesional untuk beradaptasi dan tetap relevan di tengah perubahan yang terus berlangsung.

Pendidikan berkelanjutan tidak lagi sekadar pilihan, tetapi sebuah kebutuhan. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, para profesional dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru, memahami kebutuhan pengguna yang semakin kompleks, dan memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Selain itu, pendidikan berkelanjutan juga membuka peluang untuk pengembangan karir dan meningkatkan kepuasan kerja. Bab ini akan mengulas berbagai aspek pendidikan berkelanjutan, termasuk peran berbagai pihak dalam mendukung proses ini, serta strategi dan visi untuk masa depan pendidikan kepustakawanan.

Melalui pembahasan yang komprehensif, bab ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi para pustakawan, ahli informasi, serta pihak-pihak terkait lainnya tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan di era digital. Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep yang dibahas, diharapkan para profesional dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bidang ilmu perpustakaan dan informasi di masa depan.

10.1. Pentingnya Pendidikan Berkelanjutan Di Era Digital

Pendidikan kepastakawanan di era digital telah mengalami transformasi signifikan. Perubahan ini mencakup kurikulum, metode pengajaran, dan peran pustakawan itu sendiri (Abels et al., 2018). Teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang sekaligus tantangan, menuntut pustakawan untuk terus beradaptasi dan mengembangkan kompetensi baru.

Perkembangan teknologi yang pesat seperti kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, dan realitas virtual akan terus mengubah cara perpustakaan beroperasi dan layanan yang mereka berikan. Pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI) perlu beradaptasi dengan perkembangan ini, tidak hanya untuk mengikuti perubahan zaman, tetapi juga untuk secara aktif membentuk masa depan profesi.

Ini berarti memasukkan teknologi baru ke dalam kurikulum dan membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan. Selain itu, kebutuhan akan kompetensi baru juga menjadi isu penting. Peran profesional IPI akan terus berkembang, dan kompetensi baru akan dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ini mungkin termasuk keterampilan dalam analisis data, visualisasi data, manajemen proyek, dan komunikasi lintas budaya.

Pendidikan kepastakawanan perlu mempersiapkan lulusan dengan kompetensi-kompetensi ini agar mereka dapat berhasil dalam lingkungan kerja yang terus berubah dan berkontribusi pada perkembangan profesi mereka di masa depan.

10.1.1. Tantangan Kompetensi Pustakawan di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dunia kepastakawanan. Transformasi digital menuntut pustakawan dan profesional informasi untuk adaptif dan responsif terhadap tuntutan baru. (Alenzuela, Kim, & Baylen, 2020, hlm. 4). Dalam konteks ini, pustakawan tidak lagi sekadar kurator koleksi fisik, tetapi juga dituntut untuk menjadi navigator informasi digital, fasilitator literasi, dan manajer sumber daya elektronik. (Skov, 2017, hlm. 78).

Tantangan utama yang dihadapi pustakawan di era digital adalah penguasaan teknologi baru. Kemampuan untuk mengoperasikan sistem otomasi perpustakaan, mengelola repositori digital, dan memanfaatkan platform media sosial untuk diseminasi informasi menjadi krusial (Chu, 2018, hlm. 123). Lebih lanjut, literasi informasi juga menjadi kebutuhan mendesak. Pustakawan perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi, menyaring, dan mengolah informasi yang berlimpah di dunia maya,

sehingga dapat membantu pengguna dalam menemukan informasi yang relevan dan terpercaya (Horton & Brewerton, 2019, hlm. 95).

Selain itu, kompetensi dalam bidang analisis data, visualisasi informasi, dan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran (seperti *e-learning*) menjadi sangat penting bagi pustakawan modern (Wong, 2015, hlm. 210). Pustakawan juga dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dalam berinteraksi dengan pengguna dari berbagai latar belakang (IFLA, 2012). Peran pustakawan dalam menjembatani kesenjangan digital juga semakin penting, terutama dalam memberikan akses dan pelatihan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi (IFLA, 2023).

Dengan adanya tantangan kompetensi pustakawan di era digital mencakup berbagai aspek, mulai dari penguasaan teknologi hingga pengembangan keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan berkelanjutan menjadi kunci bagi pustakawan untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjawab tantangan tersebut, sehingga dapat memenuhi harapan pengguna dan memastikan relevansi profesi di masa depan

10.1.2. Peran Pendidikan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kompetensi

Pendidikan berkelanjutan berperan penting dalam membekali pustakawan dan profesional informasi dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menuntut pustakawan untuk adaptif dan responsif terhadap tuntutan baru (Alenzuela, Kim, & Baylen, 2020, hlm. 4). Dalam konteks ini, pendidikan berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pustakawan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan berkontribusi pada kemajuan bidang ilmu perpustakaan dan informasi.

Salah satu peran utama pendidikan berkelanjutan adalah dalam meningkatkan keterampilan pustakawan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pustakawan perlu menguasai berbagai perangkat lunak dan aplikasi digital, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan perpustakaan (IFLA, 2022, hlm. 18). Misalnya, kemampuan dalam mengelola sistem otomasi perpustakaan, repositori digital, dan platform media sosial menjadi krusial bagi pustakawan modern.

Selain itu, pendidikan berkelanjutan juga berperan dalam mengembangkan literasi informasi pustakawan. Pustakawan tidak hanya harus mahir dalam mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi, tetapi

juga harus mampu membantu pengguna dalam menemukan informasi yang relevan dan terpercaya (Horton & Brewerton, 2019, hlm. 95). Literasi informasi yang kuat memungkinkan pustakawan untuk menjadi *navigator* informasi yang andal bagi pengguna.

Lebih lanjut, pendidikan berkelanjutan juga dapat membantu pustakawan dalam mengembangkan kompetensi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti keterampilan dalam analisis data, visualisasi informasi, dan pembelajaran daring (IFLA, 2023). Dengan memiliki kompetensi ini, pustakawan dapat mengambil peran yang lebih strategis dalam organisasi dan berkontribusi pada pengambilan keputusan berbasis bukti.

Dengan penuh harapan pendidikan berkelanjutan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi pustakawan di era digital. Melalui pendidikan berkelanjutan, pustakawan dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga mereka dapat memastikan relevansi dan profesionalisme mereka di masa depan.

10.2 Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PKB)

Di era digital yang terus berkembang pesat ini, Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PKB) menjadi krusial bagi pustakawan dan profesional informasi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan sangat penting untuk menjaga relevansi dan kompetensi di lanskap informasi yang dinamis (Chu, 2012; Ortíz-Repiso Jiménez & Raju, 2016; Sohaimi Zakaria, 2019). PKB bukanlah sekadar mengikuti tren sesaat, melainkan sebuah proses berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan baru, memperdalam pemahaman terhadap isu-isu terkini, dan memperluas jaringan profesional (Smith, 2017, hlm. 45).

Berbagai bentuk PKB dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Kursus, lokakarya, konferensi, dan seminar merupakan contoh kegiatan yang dapat diikuti. Perkembangan teknologi juga telah mengubah cara PKB dilakukan. Pembelajaran daring dan platform online seperti WebJunction kini menawarkan akses yang lebih fleksibel ke sumber belajar (Keiser, 2012). Beberapa sekolah Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI) bahkan telah mengadopsi Massive Open Online Courses (MOOCs) untuk memperluas jangkauan pendidikan mereka (Brown & Lee, 2015, hlm. 210).

Pentingnya PKB juga diakui dalam Kode Etik American Library Association (ALA) dan Kompetensi Inti Ilmu Perpustakaan, yang menekankan pengembangan profesional berkelanjutan bagi pustakawan

(ALA, 2009b). Dalam hal ini, organisasi dan institusi memiliki peran penting dalam mendorong PKB. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif, menyediakan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, serta menciptakan budaya belajar yang kondusif. Dengan demikian, profesional IPI dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang dan berkontribusi pada kemajuan perpustakaan di era digital.

Lebih lanjut, pendidikan berkelanjutan memberikan berbagai manfaat lain. PKB membantu pustakawan merancang dan memberikan layanan yang lebih inovatif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan pengguna, sehingga meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Selain itu, dengan terus belajar dan mengembangkan diri, pustakawan dapat memastikan bahwa profesi mereka tetap relevan dan bernilai di era digital. PKB juga membuka peluang karir baru bagi pustakawan untuk mengeksplorasi jalur karir yang membutuhkan keahlian informasi. Tidak hanya itu, PKB juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja pustakawan dengan memberikan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mencapai potensi mereka (Garcia, 2018, hlm. 87).

Di samping manfaat individual, PKB juga mendorong terciptanya budaya belajar dan kolaborasi di antara pustakawan, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, pustakawan dapat menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif untuk meningkatkan layanan perpustakaan. Pentingnya pendidikan berkelanjutan juga diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat, termasuk bagi pustakawan.

Secara keseluruhan, pendidikan berkelanjutan merupakan investasi penting bagi pustakawan dan profesional informasi, serta bagi organisasi dan masyarakat yang mereka layani. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, pustakawan dapat memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital.

10.3 Peran Berbagai Pihak Dalam Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan bukanlah tanggung jawab tunggal individu, melainkan sebuah sinergi antara berbagai pihak yang memiliki peran krusial dalam mewujudkan visi bersama. Kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak ini adalah kunci dalam menciptakan ekosistem

pendidikan yang kondusif, yang pada akhirnya akan memastikan kualitas dan relevansi profesi pustakawan tetap terjaga di era digital.

Dalam hal ini, pustakawan sebagai individu memiliki tanggung jawab proaktif untuk mencari dan memanfaatkan peluang pengembangan profesional yang tersedia (Abels et al., 2018, hlm. 102). Semangat belajar sepanjang hayat perlu dipupuk dan diimplementasikan dalam tindakan nyata agar kompetensi dan relevansi profesi tetap terjaga.

Lembaga pendidikan, khususnya sekolah dan program Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI), memegang peran fundamental dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi pendidikan berkelanjutan pustakawan (IFLA, 2022, hlm. 18). Kurikulum yang adaptif, pengajar yang berkualitas, dan lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor penting dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi untuk terus belajar sepanjang karier mereka.

Selain itu, organisasi profesi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pendidikan berkelanjutan pustakawan. Asosiasi profesional seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan American Library Association (ALA) dapat menjadi wadah bagi pustakawan untuk berbagi pengetahuan, berjejaring, dan mengakses sumber daya pengembangan profesional (Abels et al., 2018, hlm. 102). Melalui penyelenggaraan program pelatihan, konferensi, dan publikasi, organisasi profesi turut memperkaya khazanah keilmuan dan memperluas wawasan pustakawan.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga memiliki andil penting dalam memfasilitasi dan mendukung pendidikan berkelanjutan pustakawan. Penyusunan standar kompetensi, penyediaan pelatihan, dan pengembangan program peningkatan kompetensi merupakan beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memastikan kualitas dan relevansi profesi pustakawan tetap terjaga di era digital (Abels et al., 2018, hlm. 102).

Tidak kalah pentingnya, perpustakaan dan lembaga informasi juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan berkelanjutan bagi pustakawan. Alokasi dana, penyediaan waktu khusus, serta akses terhadap fasilitas dan sumber daya yang memadai dapat menjadi insentif bagi pustakawan untuk terus belajar dan mengembangkan diri (Abels et al., 2018, hlm. 71).

Dengan demikian, pendidikan berkelanjutan pustakawan merupakan sebuah kolaborasi multi-pihak yang melibatkan individu, lembaga pendidikan, organisasi profesi, pemerintah, serta perpustakaan dan lembaga informasi.

10.3.1. Peran Pemerintah dan Lembaga Pendidikan

Pendidikan berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD) menjadi krusial dalam menjaga relevansi dan kompetensi pustakawan di tengah perubahan lanskap informasi yang dinamis. Komitmen suatu negara terhadap pengembangan profesional berkelanjutan dapat terlihat dari adanya kewajiban hukum, seperti di Filipina di mana CPD diwajibkan oleh undang-undang (David, 2020).

Pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk lanskap pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI) melalui kebijakan dan standarisasi. Sebagai contoh, di Jepang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi (MEXT) bertanggung jawab mengatur kualifikasi pustakawan dan menetapkan kurikulum nasional untuk program pelatihan pustakawan (Okada, 2020). Sementara itu, di Filipina, Komisi Pendidikan Tinggi (CHED) menetapkan standar minimum untuk program IPI guna memastikan kualitas dan konsistensi di seluruh institusi pendidikan (Esguerra, 2020).

Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan juga berperan dalam menyediakan program CPD yang beragam dan inklusif. Di Indonesia, Perpustakaan Nasional menawarkan pelatihan berkelanjutan bagi non-pustakawan, memberikan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka di bidang IPI (Alenzuela & Kim, 2020). Di Kazakhstan, berbagai inisiatif internasionalisasi, seperti seminar dan lokakarya, memberikan kesempatan bagi pustakawan untuk belajar dari para ahli internasional dan memperluas wawasan mereka (Lapo & Davletyarova, 2020).

Secara keseluruhan, pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peran kunci dalam mendukung pendidikan berkelanjutan bagi pustakawan dan profesional informasi. Pemerintah, melalui kebijakan dan pendanaan, dapat menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Lembaga pendidikan, terutama yang menyelenggarakan Program Studi IPI, memiliki peran penting dalam menyediakan program CPD berkualitas tinggi yang terus diperbarui untuk mencerminkan tren dan teknologi terkini di lapangan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan asosiasi profesional sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan berkelanjutan yang dinamis dan efektif.

10.3.2. Peran Organisasi Profesi

Organisasi profesi, seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan American Library Association (ALA), memainkan peran ganda yang vital dalam pendidikan berkelanjutan pustakawan. Pertama, mereka berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan platform bagi para profesional untuk berbagi pengetahuan, berjejaring, dan mengembangkan kompetensi mereka (Sulistyo-Basuki, 2015, hlm. 161). Melalui seminar, lokakarya, dan konferensi, organisasi profesi memberikan kesempatan bagi anggota untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan terkini di bidang ilmu perpustakaan dan informasi.

Kedua, organisasi profesi juga berperan sebagai *advokat*. Mereka secara aktif mengadvokasi kepentingan para profesional LIS, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan bahwa pendidikan berkelanjutan diakui dan didukung secara memadai (Saad, Johare, & Nadzar, 2015, hlm. 109). Selain itu, mereka juga terlibat dalam pengembangan *standar kompetensi* bagi para profesional LIS, yang berfungsi sebagai acuan bagi lembaga pendidikan dan para profesional itu sendiri dalam merancang kurikulum, program pendidikan berkelanjutan, serta mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi (Tammaro, 2015, hlm. 171).

Tidak hanya itu, organisasi profesi juga berperan aktif dalam *memfasilitasi akses* ke sumber daya dan peluang pendidikan berkelanjutan. Di Singapura, Library Association of Singapore (LAS) memberikan beasiswa dan hibah bagi anggotanya untuk melanjutkan studi atau menghadiri konferensi internasional (Loh, 2020, hlm. 124). Sementara itu, di Korea Selatan, Asosiasi Perpustakaan Korea menawarkan berbagai program pengembangan profesional, termasuk seminar, lokakarya, dan konferensi, yang membantu pustakawan untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru dan meningkatkan keterampilan mereka (Lee, 2020, hlm. 108).

Lebih jauh lagi, organisasi profesi juga berperan sebagai *advokat* bagi pendidikan berkelanjutan dengan secara aktif melobi pemerintah untuk meningkatkan standar pendidikan LIS dan menyediakan lebih banyak program pelatihan bagi pustakawan, seperti yang dilakukan oleh Thai Library Association (TLA) di Thailand (Intarakumnerd & Chavalit, 2020, hlm. 164). Selain itu, organisasi profesi juga dapat berperan dalam pengembangan *skema sertifikasi profesional* untuk memastikan bahwa pustakawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diakui secara

luas, seperti yang dilakukan oleh Australian Library and Information Association (ALIA) di Australia (Clyde, 2020, hlm. 15).

Dengan demikian, organisasi profesi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan *ekosistem pendidikan berkelanjutan* yang dinamis dan efektif. Mereka tidak hanya menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan dan mengembangkan kompetensi, tetapi juga secara aktif mengadvokasi kepentingan pustakawan dan memastikan bahwa pendidikan berkelanjutan diakui dan didukung secara memadai. Melalui berbagai upaya ini, organisasi profesi berkontribusi secara signifikan dalam memastikan bahwa pustakawan dan profesional informasi dapat terus mengembangkan diri dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

10.3.3. Peran Perpustakaan dan Lembaga Informasi dalam Pendidikan Berkelanjutan Pustakawan

Perpustakaan dan lembaga informasi lainnya memegang peran krusial dalam mendukung pendidikan berkelanjutan bagi para pustakawan dan profesional informasi. Peran ini terutama terwujud melalui penyediaan akses terhadap sumber daya informasi yang relevan dan terkini, serta dukungan aktif terhadap pengembangan staf.

Perpustakaan, sebagai pusat informasi, menyediakan akses tak terbatas pada berbagai sumber daya, termasuk jurnal, buku, database, dan materi pembelajaran online. Akses ini sangat penting bagi pustakawan untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru di bidang mereka, serta untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Di era digital saat ini, perpustakaan juga semakin berperan dalam menyediakan akses ke sumber daya elektronik dan platform pembelajaran online, memungkinkan pustakawan untuk belajar secara mandiri dan fleksibel (Laverty, 2020, hlm. 246).

Selain menyediakan akses, perpustakaan dan lembaga informasi juga aktif mendukung pengembangan staf melalui berbagai program dan inisiatif. Program-program ini dapat berupa pelatihan formal, lokakarya, seminar, atau bahkan kesempatan belajar mandiri. Di Singapura, misalnya, National Library Board (NLB) memiliki program pengembangan staf yang komprehensif, termasuk pelatihan keterampilan teknis, kepemimpinan, dan manajemen (Wee, 2020, hlm. 115). Dukungan semacam ini tidak hanya membantu pustakawan untuk meningkatkan kompetensi mereka, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan karir mereka secara keseluruhan.

Dalam era digital ini, perpustakaan tidak lagi hanya sebagai gudang buku, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat akses informasi yang

menyediakan beragam sumber daya, baik cetak maupun digital, yang dapat diakses oleh pembelajar sepanjang hayat (Tammaro, 2015, hlm. 171). Selain menyediakan akses, perpustakaan juga berperan penting dalam mendukung pengembangan profesional staf, baik pustakawan maupun staf di lembaga pendidikan.

Dalam konteks pendidikan berkelanjutan, pustakawan perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat memberikan layanan yang relevan dan berkualitas kepada pengguna. Perpustakaan dapat memfasilitasi pengembangan staf melalui berbagai cara, seperti menyediakan akses ke pelatihan dan lokakarya, mendorong partisipasi dalam konferensi dan seminar, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran dan kolaborasi (Sulistyo-Basuki, 2015, hlm. 161).

Lebih lanjut, perpustakaan juga dapat berperan sebagai mitra strategis bagi lembaga pendidikan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan berkelanjutan. Dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan informasi dan pembelajaran pengguna, pustakawan dapat memberikan masukan berharga dalam pengembangan kurikulum, pemilihan materi pembelajaran, dan evaluasi program. Kolaborasi antara perpustakaan dan lembaga pendidikan ini dapat memastikan bahwa program pendidikan berkelanjutan yang ditawarkan relevan, efektif, dan berdampak positif bagi peserta didik (Miyahara, 2015, hlm. 232).

10.4 Manfaat Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan, sebagai sebuah proses pembelajaran yang berkelanjutan, memberikan serangkaian manfaat signifikan bagi pustakawan dan profesional informasi. Pendidikan berkelanjutan merupakan investasi krusial bagi para pustakawan dan profesional informasi. Dengan terus mengembangkan diri melalui pendidikan berkelanjutan, mereka tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi yang berharga dalam memenuhi tuntutan dinamika dunia perpustakaan dan informasi serta memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna mereka.

Salah satu manfaat utama adalah kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Dalam era digital yang terus berkembang, pustakawan perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar tetap relevan dan efektif dalam memberikan layanan (Abels et al., 2018, hlm. 102). Dengan memahami dan menguasai teknologi terbaru, pustakawan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan efisiensi kerja, dan memberikan layanan yang lebih inovatif kepada pengguna.

Selain itu, pendidikan berkelanjutan juga membekali pustakawan dengan kemampuan untuk memahami dan merespons kebutuhan pengguna yang semakin kompleks dan beragam (IFLA, 2022, hlm. 18). Dalam masyarakat yang semakin terhubung dan bergantung pada informasi, pengguna perpustakaan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap layanan yang diberikan. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, pustakawan dapat menggali kebutuhan informasi pengguna secara mendalam, memberikan layanan yang personal dan relevan, serta membangun hubungan yang lebih erat dengan komunitas yang mereka layani.

Lebih lanjut, pendidikan berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Melalui peningkatan kompetensi dan penguasaan pengetahuan terbaru, pustakawan dapat merancang dan memberikan layanan yang lebih inovatif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Abels et al., 2018, hlm. 71). Layanan yang berkualitas tinggi tidak hanya akan meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran di masyarakat.

Di samping itu, pendidikan berkelanjutan juga memiliki dampak positif pada pengembangan karir pustakawan. Dengan terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan, pustakawan dapat membuka peluang untuk mengembangkan karir mereka ke bidang-bidang baru yang membutuhkan keahlian informasi (IFLA, 2022, hlm. 18). Misalnya, pustakawan yang memiliki kompetensi dalam analisis data atau manajemen proyek dapat mengambil peran yang lebih strategis dalam organisasi, berkontribusi pada pengambilan keputusan berbasis bukti, dan meningkatkan efektivitas layanan perpustakaan secara keseluruhan.

Selain manfaat-manfaat yang telah disebutkan, pendidikan berkelanjutan juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja pustakawan. Dengan terus belajar dan berkembang, pustakawan dapat merasakan rasa pencapaian, memperoleh pengakuan atas kompetensi mereka, dan membangun kepercayaan diri dalam menjalankan tugas-tugas profesional mereka. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam praktik kepustakawanan.

10.5 Strategi dan Visi Masa Depan

Pendidikan kepustakawanan dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan dan adaptif di tengah arus perubahan yang terus bergulir. Oleh karena itu, memasuki dekade ketiga abad ke-21, pendidikan IPI perlu mempertimbangkan banyak hal untuk memastikan keberhasilannya dalam

mempersiapkan para profesional IPI di masa depan. Hal ini membutuhkan pemikiran yang cermat dan kemampuan beradaptasi dengan dunia informasi yang terus berubah dan implikasi akses informasi.

Oleh karena itu, penting untuk merumuskan strategi dan visi yang jelas untuk masa depan pendidikan ini. Salah satu strategi kunci adalah pengembangan kurikulum yang adaptif, yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Abels et al., 2018, hlm. 40). Kurikulum tidak boleh statis, melainkan harus dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Integrasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan realitas virtual ke dalam kurikulum akan membekali lulusan dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Selain itu, pendekatan pembelajaran yang inovatif juga diperlukan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif. Metode pembelajaran aktif seperti pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif dapat merangsang kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa (Chu, 2015, hlm. 42). Pembelajaran daring juga menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar, memungkinkan mahasiswa dari berbagai latar belakang dan lokasi untuk berpartisipasi (Oguz, Chu, & Chow, 2015, hlm. 42).

Kemitraan yang kuat antara lembaga pendidikan, praktisi perpustakaan, pemberi kerja, dan lembaga lain juga menjadi faktor penting dalam memastikan relevansi pendidikan kepastakawanan dengan kebutuhan pasar kerja (Sands et al., 2018, hlm. 43). Kolaborasi ini dapat membuka peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis melalui magang, proyek kolaboratif, atau program mentoring, sehingga mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif.

Selanjutnya, pendidikan kepastakawanan perlu secara aktif mempromosikan keragaman dan inklusi, baik di kalangan mahasiswa maupun fakultas (Jaeger et al., 2011, hlm. 38). Kurikulum dan lingkungan belajar harus dirancang untuk mengakomodasi berbagai latar belakang dan kebutuhan, serta mengintegrasikan perspektif keragaman ke dalam setiap aspek pendidikan. Dengan demikian, lulusan akan memiliki kepekaan dan kemampuan untuk melayani komunitas yang beragam secara efektif.

Terakhir, penelitian yang relevan dan berkualitas tinggi harus terus didorong untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang peran perpustakaan di era digital dan bagaimana mengatasi tantangan seperti kesenjangan digital (Sands et al., 2018, hlm. 43). Penelitian ini dapat

memberikan bukti empiris yang berharga untuk pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan layanan perpustakaan yang inovatif.

"IFLA Trend Report Update 2023" juga memberikan beberapa rekomendasi tambahan untuk masa depan pendidikan kepastakawanan. Laporan ini menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, mempersiapkan lulusan untuk bekerja dalam lingkungan kolaboratif, dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Rekomendasi ini sejalan dengan visi untuk menciptakan pustakawan yang tidak hanya memiliki pengetahuan teknis, tetapi juga memiliki keterampilan adaptif, inovatif, dan strategis yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital.

Dengan mengadopsi strategi-strategi ini dan terus berinovasi, pendidikan kepastakawanan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, relevan, dan siap menghadapi dinamika dunia informasi yang terus berubah. Pustakawan masa depan akan menjadi agen perubahan yang mampu memimpin transformasi perpustakaan, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memberdayakan masyarakat melalui literasi dan pengetahuan.

Pada akhir bab ini Kesimpulan penting yang dapat kita ambil adalah pendidikan berkelanjutan merupakan kunci bagi pustakawan dan profesional informasi untuk tetap relevan dan adaptif di era digital yang terus berkembang. Dengan terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, pustakawan dapat memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan peluang baru. Pendidikan berkelanjutan juga memungkinkan pustakawan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan secara keseluruhan, dan membuka peluang baru untuk pengembangan karir (Abels et al., 2018, hlm. 102).

Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PKB) memainkan peran penting dalam pendidikan berkelanjutan pustakawan. Melalui berbagai bentuk PKB seperti kursus, lokakarya, konferensi, dan seminar, pustakawan dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, serta memperluas jaringan profesional mereka (Chu, 2012; Ortíz-Repiso Jiménez & Raju, 2016; Sohaimi Zakaria, 2019). PKB juga diakui dalam Kode Etik ALA dan Kompetensi Inti Ilmu Perpustakaan, yang menekankan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan bagi pustakawan (ALA, 2009b).

Pendidikan berkelanjutan bukanlah tanggung jawab individu semata, melainkan sebuah kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pustakawan itu sendiri, lembaga pendidikan, organisasi profesi, pemerintah, dan perpustakaan serta lembaga informasi (Abels et al., 2018, hlm. 102). Setiap

pihak memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif dan mendukung pengembangan profesional pustakawan secara berkelanjutan.

Dalam menghadapi masa depan, pendidikan kepustakawanan perlu merumuskan strategi dan visi yang jelas. Pengembangan kurikulum yang adaptif, pendekatan pembelajaran yang inovatif, kemitraan yang kuat antara berbagai pihak, promosi keragaman dan inklusi, serta penelitian yang relevan merupakan beberapa strategi kunci untuk memastikan keberhasilan pendidikan kepustakawanan di masa depan (Abels et al., 2018, hlm. 40; Chu, 2015, hlm. 42)

Dengan mengadopsi strategi-strategi ini dan terus berinovasi, pendidikan kepustakawanan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, relevan, dan siap menghadapi dinamika dunia informasi yang terus berubah. Pustakawan masa depan akan menjadi agen perubahan yang mampu memimpin transformasi perpustakaan, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memberdayakan masyarakat melalui literasi dan pengetahuan.

Daftar Pustaka

1. Abbott, A. (1988). *The system of professions: An essay on the division of expert labor*. University of Chicago Press.
2. Abdullahi, I., Karisiddappa, C. R., & Asundi, A. Y. (2014). *LIS Education in Developing Countries: The Road Ahead*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
3. Abdullahi, I., Karisiddappa, C. R., & Asundi, A. Y. (2014). Philosophical and Pedagogical Foundations of LIS Curriculum Design: Perspectives for the Third World Nations. Dalam *LIS Education in Developing Countries: The Road Ahead* (hlm. 131-145). De Gruyter Saur.
4. Abdullahi, Ismail. (2017). *Global Library and Information Science: A Textbook for Students and Educators*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
5. Republik, PN (2023). Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan.
6. Abels, E. G., Howarth, L. C., & Smith, L. C. (2016). The transformed library: Skills for the 21st-century librarian. *Reference & User Services Quarterly*, 55(3), 197-202.
7. Abels, E. G., Howarth, L. C., & Smith, L. C. (2018). Transforming library and information science education by design. In *Re-envisioning the MLS: Perspectives on the future of library and information science education* (Vol. 44, pp. 71-89). Emerald Publishing Limited.
8. Abels, Eileen G., Lynne C. Howarth, and Linda C. Smith. 2017. Envisioning Our Information Future and How to Educate for It. In *Re-envisioning the MLS: Perspectives on the Future of Library and Information Science Education*, edited by Lisa M. Given and Jenny Bossaller, 44:53–70. Bingley, U.K.: Emerald.
9. Abioye, A. (2014). Enhancing Library and Information Science Education through Cross-border Collaboration: The Experience of University of Ibadan, Nigeria and University of Ghana. Dalam *LIS Education in Developing Countries: The Road Ahead* (hlm. 115-130). De Gruyter Saur.
10. Abumandour, E. S. T. (2020). Public libraries' role in supporting e-learning and spreading lifelong education: A case study. *Journal of Research in Innovative Teaching & Learning*, 14(2), 178-217.

11. Adekoya, C. O., & Adedimeji, A. A. (2021). Enhancing library performance by exploiting the potentials of disruptive innovations. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 53(6), 1119-1134.
12. Adekoya, C. O., & Fasae, J. K. (2021). Mentorship in librarianship: Meeting the needs, addressing the challenges. *The Bottom Line*, 34(1), 86-100.
13. Agama, K. (2010). *Tafsir Tematik Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan Lit bang Dan Diklat. Kementrian Agama RI.*
14. Aharony, N. (2008). Librarians' attitudes towards marketing library services. *Journal of Librarianship and Information Science*, 40(4), 287-298.
15. Ahlstrom, S. E. (2004). *A religious history of the American people.* Yale University Press.
16. Ahmad Amīn. (1967). *Falsafatul-Akhlāq.* Kairo: Dārul-Kutub al-Misriyyah
17. Aina, L. O. (2013). *Information, knowledge and the gatekeeper.* Library and Publications Committee, University of Ilorin.
18. ALA (American Library Association). 2009b. *President's Task Force on Library Education: Final Report.* Chicago: American Library Association.
19. ALA(2023).Kode Etik ALA.diakses dari <https://www.ala.org/tools/ethics>
20. Alenzuela, R., & Kim, H. (2020). Globalization in LIS education: Perspectives from iSchools in South Korea and the Philippines. Dalam R. Alenzuela, H. Kim, & D. M. Baylen (Eds.), *Internationalization of Library and Information Science Education in the Asia-Pacific Region* (hlm. 178-206). IGI Global.
21. Al-Ghazali (2013). *Ihya lumudin, jil.3 al-Maktabah al-‘Aşrīyah".*
22. ALIA. (2001, 2007, 2018). *ALIA professional conduct policy statement.* Australian Library and Information Association.
23. ALISE (Association for Library and Information Science Education). 2000. *Educating Library and Information Science Professionals for a New Century: The KALIPER Report; Executive Summary.* Reston, VA: ALISE.
24. Allard, Suzie. 2018. "Placements and Salaries 2018: Foundations and Futures." *Library Journal* (October 15): 16–21.

25. Al-Suqri, M. N., Alkindi, S. S., & Al-Sarmi, A. H. (2014). Library and Information Science in Oman's New Information Environment: Stakeholder Perspectives and Practical Recommendations. Dalam *LIS Education in Developing Countries: The Road Ahead* (hlm. 72-85). De Gruyter Saur.
26. American Association of School Librarians. (2010). *ALA/AASL Standards for Initial Preparation of School Librarians*. http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/aasleducation/schoollibrary/2010_standards_with_rubrics_and_statements_1-31-11.pdf
27. American Library Association, & Chicago, I. L. (1989). American library association presidential committee on information literacy. Final report. ERIC Clearinghouse.
28. American Library Association. (2000). Adaptive Technology on the Internet: Making Electronic Resources Accessible to All. Chicago, IL.
29. American Library Association. (2014). Trends report: Snapshots of a turbulent world.
30. American Library Association. (2019b). Copyright: An Interpretation of the Code of Ethics. <https://www.ala.org/tools/ethics/copyright>
31. American Library Association. (2023). ALA's Core Competences of Librarianship.
32. Amoah, G. B., & Yeboah, E. B. (2019). Towards the ethical librarian: Perspectives and challenges of staff of Sam Jonah Library, University of Cape Coast–Ghana. *Library Management*, 40(6/7), 428-440.
33. Amsaveni, N., Raja Rajeshwari, P., & Jeya Suriya Dheva, R. S. (2023). A study of software usage for open access repositories by ROAR. Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science, 175-185.
34. Amsaveni, N., Raja Rajeshwari, P., & Jeya Suriya Dheva, R. S. (2023). Open access institutional repositories in India: A study on content management software usage, scholarly communication, and preservation strategies. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, 6521.
35. Anderson, L. E., & Bolt, S. B. (2016). Professionalism: Skills for workplace success (p. 312). Pearson.
36. Andrews, E. D. (2023). Introduction to the Text of the Old Testament: From the Authors and Scribes to the Modern Critical Text. Christian Publishing House.

37. Annual Report of the Council. (1946). Britania Raya: University of Strathclyde.
38. Anwar, K., Musa, J., Salleh, S., Shahrill, M., & Roslan, R. (2023). Bridging the digital divide in higher education: Notes from the emergence of the COVID-19 pandemic. *From Digital Divide to Digital Inclusion*, 95–131.
39. Apostle, R., & Raymond, B. (1997). *Librarianship And The Information Paradigm*. Lanham, MD: Scarecrow.
40. Applegate, R. (2010). Clarifying jurisdiction in the library workforce: Tasks, support staff, and professional librarians. *Library Trends*, 59(1), 288-314.
41. Arnold, R., Nolda, S., & Nuissl, E. (Eds.). (2001). *Wörterbuch Erwachsenenbildung (Dictionary of Adult Education)*. Opladen: Leske + Budrich.
42. Asemi, A., Ko, A., & Nowkarizi, M. (2020). Intelligent libraries: a review on expert systems, artificial intelligence, and robot. *Library Hi Tech*, 39(2), 412-434.
43. Astorga, J. C. (1980). *Philippine librarianship: A historical perspective*. Dalam M. M. Aman (Ed.), *Perspective on library and information science education in the Philippines* (hlm. 127-139). Quezon City: University of the Philippines Institute of Library Science Alumni Association.
44. Awoyemi, R. A., & Awoyemi, R. O. (2021). Beyond the Physical Library Space: Creating a 21st Century Digitally-Oriented Library Environment. In *Handbook of Research on Records and Information Management Strategies for Enhanced Knowledge Coordination* (pp. 189-203). IGI Global.
45. Ayuningtyas, A. A., Heriyanto, Irhandayaningsih, A., & Ganggi, R. I. P. (2023). School library censorship: Looking at the perspective of a school librarian association in Indonesia. *IFLA journal*, 49(3), 587-595.
46. B. Ramesh Babu. (2023). Exploring the past, present and future of librarianship: Trends and developments. *Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science*, 1-11.
47. Babu, B. R. (2023). Professional associations and the continuing professional development of librarians. *Annals of Library and Information Studies*, 70(1), 32-38.

48. Bailey, C. W. (1991). Intelligent library systems: artificial intelligence technology and library automation systems.
49. Basuki, S. (1991). *Pengantar ilmu perpustakaan*. Gramedia Pustaka Utama.
50. Bell, D. A. (2012). The bookless library. *New Republic*, 243(12), 31-36.
51. Berners-Lee, T., Hendler, J., & Lassila, O. (2001). The Semantic Web. *Scientific American*, 284(5), 34-43.
52. Bernthal, P., Colteryahn, K., Davis, P., Naughten, J., Rothwell, W., & Wellins, R. (2004). ASTD competency study: Mapping the future: New workplace learning and performance competencies. ASTD.
53. Bertot, J. C., & Sarin, L. C. (2015). The future of the MLS: Rethinking library education. *American Libraries*, (March/April), 40-41.
54. Bhavya K.P. dan V.K. Dhanyasree. (2023) An Analysis of Ransomware Attacks in Digital Library Systems: A Global Perspective. Dalam Harinarayana, N. S., Kumbar, M., Chandrashekara, M., & Kumari, A. (2023). *Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science* (Doctoral dissertation, University of Mysore).
55. Bitri, E. (2012). 21st Century Library and Information Professional. *The 21st International BOBCATSSS Conference*, 65-68
56. Bloom, P. (2002). How children learn the meanings of words. MIT press.
57. Bode, J. (1994). Challenges and Opportunities in the Information Age. Dalam M. Furlong & G. Evans (Eds.), *Library services for visually impaired people: An international survey* (hlm. 1-11). London: Library Association.
58. Bolles, C.A. (2001). Library Careers. In *Encyclopedia of Library and Information Science* (4th ed., Vol. 3, pp. 2841-2846). Marcel Dekker, Inc.
59. Bolton, C. K. (1909). Librarian's Canon of Ethics. *Public Libraries*, 14(6), 201-202.
60. Bopp, R. E., & Smith, L. C. (2001). Reference and information services: An introduction (3rd ed.). *Libraries Unlimited*.
61. Borkor, Harold. 1968. What is information science? *American Documentation*, 19(1):3.

62. Borrás-Gené, O. (2018, September). Use of digital badges for training in digital skills within higher education. In 2018 International Symposium on Computers in Education (SIIE) (pp. 1-7). IEEE.
63. Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 21st century. *Journal of management development*, 27(1), 5-12.
64. Breeding, M. (2014). The future of library resource discovery. *Library Technology Reports*, 50(8), 1–37.
65. Breeding, M. (2017d). Blending Innovative and Strategic Technologies. *Computers in Libraries*, 37, 16–18.
66. Breeding, M. (2018). Index-based discovery services: Current market positions and trends. *ALA TechSource*.
67. Breeding, Marshall. 2013a. "Foreword." In *Catalogue 2.0*, edited by Sally Chambers, xi–xiii. Chicago: American Library Association.
68. Breeding, M. (2014). Library Resource Discovery Products: Context, Library Perspectives, and Vendor Positions. *Library Technology Reports*, 50(1).
69. Bridges, K. (2012). *Beyond the browser: Web 2.0 and librarianship*. Bloomsbury Publishing USA.
70. Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2023, August 25). ethics. *Encyclopedia Britannica*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://www.britannica.com/topic/ethics-philosophy>
71. Buckland, M. K. (1997). What is a "document"? *Journal of the American Society for Information Science*, 48(9), 804-809.
72. Burke, P. (2013). *Social history of knowledge: From Gutenberg to Diderot*. John Wiley & Sons.
73. Burns, C. S. (2014). Academic libraries and open access strategies. In *Advances in Library Administration and Organization* (Vol. 32, pp. 147-211). Emerald Group Publishing Limited.
74. Butler, P. (1951). Librarianship as a Profession. *The Library Quarterly*, 21(4), 235-247.
75. Calhoun, K. (2014). *Exploring digital libraries: Foundations, practice, prospects*. Facet Publishing.
76. Cambridge Dictionary. (tanpa tahun). Professionalism. Dalam *Cambridge Dictionary*. Diakses pada 15 September 2024, dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/professionalism>
77. Campbell, J. D. (1993). Shaking the conceptual foundations of reference: a perspective on the role of reference librarians. *The Reference Librarian*, 41(1), 109-127.

78. Campbell, Jerry D. 1993. "Choosing To Have A Future." *American Libraries* 24 (June): 560–66.
79. Canadian Association of Research Libraries (CARL). (2020). *Competencies for Librarians in Canadian Research Libraries*. Ottawa: Canadian Association of Research Libraries.
80. Cantor, N. F. (1994). *The Civilization of the Middle Ages: a completely revised and expanded edition of Medieval history, the life and death of a civilization*. HarperPerennial.
81. Cao, G., Liang, M., & Li, X. (2018). How to make the library smart? The conceptualization of the smart library. *The Electronic Library*, 36(5), 811-825.
82. Capurro, R., & Hjørland, B. (2003). The concept of information. *Annual review of information science and technology*, 37(1), 343-411.
83. Carr-Saunders, A. M., & Wilson, P. A. (1933). *The professions*. Oxford: Clarendon Press.
84. Case, Donald O., and Lisa M. Given. 2016. *Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs, and Behavior*. 4th ed. Bingley, England: Emerald Group.
85. Casson, L. (2001). *Libraries in the Ancient World*. Yale University Press.
86. Caxton, William. 1483. *Mirror of the World*
87. Cernuşca, L., & Dima, C. (2007). Competency and human resource management. *Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society*, 2(4), 601-610.
88. Cheetham, G., & Chivers, G. E. (2005). *Professions, competence and informal learning*. Edward Elgar Publishing.
89. Chemulwo, M. J. (2018). Managing Intellectual Property in Digital Libraries and Copyright Challenges. In *Handbook of Research on Managing Intellectual Property in Digital Libraries* (pp. 165-183). IGI Global.
90. Chidananda M., Mallinath Kumbar, dan Surendra C.S. (2023). Copyright law and libraries in India. *Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science*, 83-87.
91. Chidananda, M., Mallinath Kumbar, & Surendra, C. S. (2023). Role of Government in promoting open access to information through libraries. *International Journal of Library and Information Studies*, 13(1), 1-6.

92. Chigwada, J. P., & Chisita, C. T. (2021). Introduction to the fourth industrial revolution and libraries. In *Examining the impact of industry 4.0 on academic libraries* (pp. 3-15). Emerald Publishing Limited.
93. Chigwada, T., & Chisita, C. (2021). The evolution of libraries from physical spaces to digital platforms. *Journal of Librarianship and Information Science*, 53(2), 189-201.
94. Chisita, C. T., & Chibanda, N. P. (2019). The IFLA Global Vision Project in Zimbabwe: Towards a Unified Field Road Map for Libraries, Mousaion: *South African Journal of Information Studies*, 37 (2) 26 pages.
95. Chisita, C. T., Durodolu, O. O., & Ngoaketsi, J. (2021). Evaluating the processes and procedure of digitalization workflow. In *Digital Libraries-Advancing Open Science*. IntechOpen.
96. Chitra, K. S., & Kumbar, M. (2023). Impact of automation on librarians of first grade colleges of Karnataka: A study. *Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science*, 166-174.
97. Choh, N. L. (2003). A totally do-it-yourself library without a library customer service desk: the Singapore experience. *IFLA journal*, 29(4), 298-300.
98. Chouhan, V. S., & Srivastava, S. (2014). Understanding competencies and competency modeling—A literature survey. *IOSR Journal of Business and management*, 16(1), 14-22.
99. Chu, C. M., Raju, J., Cunningham, C., Ji, J., Ortiz-Repiso Jiménez, V., Slavic, A., . & Zakaria, S. (2022). IFLA Guidelines for Professional LIS Education Programmes.
100. Chu, S. K. (2015). Active learning in library instruction. *Library Technology Reports*, 51(1), 1-32.
101. Chu, S. K. W. (2018). Information literacy for the digital age: A critical inquiry. *Journal of Information Literacy*, 12(2), 120-135.
102. Chu, S. K. W., Lau, J., Sin, S. C. W., & Ma, E. (2022). IFLA guidelines for professional LIS education programmes: A framework for quality LIS education. *IFLA Journal*, 48(3), 269-281.
103. Church, A. P., dkk. (2019). Preparing School Library Professionals Using a Hybrid Instructional Model. Dalam B. A. Schultz-Jones & D. Oberg (Eds.), *Global Action on School Library Education and Training* (hlm. 69–80). De Gruyter Saur.
<https://doi.org/10.1515/9783110616163-007>

104. Clyde, L. A. (2020). Internationalization in Australian LIS education: Trends and challenges. Dalam R. Alenzuela, H. Kim, & D. M. Baylen (Eds.), *Internationalization of Library and Information Science Education in the Asia-Pacific Region* (hlm. 1-32). IGI Global.
105. Collins Dictionary. (tanpa tahun). Competence. Dalam *Collins English Dictionary*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/competence>
106. Collins Dictionary. (tanpa tahun). Librarianship. Dalam *Collins English Dictionary*. Diakses pada 5 Juni 2024 dari <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/librarianship>
107. Collins, N. L. (2000). Demetrius of Phalerum, Librarian in the Library of Ptolemy I. In *The Library in Alexandria and the Bible in Greek* (pp. 82-114). Brill.
108. Congress, U. S. (1990). The Quality and Professionalism of the Acquisition Workforce. Report of the Investigations Subcommittee of the Committee on Armed Services House of Representatives.
109. Cordell, R. M. (2013). Reference: a short history. In *Library Reference Services and Information Literacy: Models for Academic Institutions* (pp. 1-13). IGI Global.
110. Corral, S. (2005). Developing models of professional competence to enhance employability in the network world. *Education for Information*, 23(2-3), 63-74.
111. Cox, A. M., Pinfield, S., & Rutter, S. (2019). The intelligent library: Thought leaders' views on the likely impact of artificial intelligence on academic libraries. *Library Hi Tech*, 37(3), 418-435.
112. Cox, J. (2019). Communicating new library roles to enable digital scholarship: A review article. *Librarian as Communicator*, 26-41.
113. Cronin, B. (1995). Cutting the Gordian knot. *Information Processing & Management*, 31(5), 897-902.
114. Cronin, B. (2005). The Changing World of Information Work. *Annual Review of Information Science and Technology (ARIST)*, 40, 3-32.
115. Croud, J., Manning, M., & Schmidt, J. (2002). From lackey to leader: the evolution of the librarian in the age of the Internet. In *Modern organizations in virtual communities* (pp. 159-170). IGI Global.
116. Crowley, B. (2009). Renewing Professional Librarianship: A Fundamental Rethinking. *Journal Of Librarianship And Information Science*, 41(3), 185.

117. Cullen, R. (2001). Addressing the digital divide. *Online information review*, 25(5), 311-320.
118. Curzon, S. C., & Quinonez-Skinner, J (2017). Academic Libraries. Dalam J. D. McDonald & M. LevineClark (Eds.), *Encyclopedia of Library and Information Sciences*, Edisi ke-4 (Vol. 1, hlm. 1-13). Boca Raton, FL: CRC Press.
119. Curzon, S. C., & Quinonez-Skinner, J. (2017). Academic libraries. *Encyclopedia of Library and Information Sciences*, Fourth Edition (Vol. 1, pp. 1-13)
120. Cutter, C. A. (1985). Rules for a printed dictionary catalogue. University Microfilms.
121. Dana, J. C. (1904). The Place of the Public Library in a City's Life. *The World's Work*, 9, 5647-5652.
122. David, L. T. (2020). Continuing professional development and the Philippine qualifications framework: A way forward to mutual recognition arrangements. Dalam R. Alenzuela, H. Kim, & D. M. Baylen (Eds.), *Internationalization of Library and Information Science Education in the Asia-Pacific Region* (hlm. 33-49). IGI Global.
123. David, L. T., & Perez, D. R. (2006). An assessment of the perception of licensed librarians about their academic preparation and satisfaction in their job as librarians. *Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3–6 April 2006*, 416–422. School of Communication & Information, Nanyang Technological University.
124. Davies, W. V. 1998. "Egyptian Hieroglyphs." Dalam *Reading the Past: Ancient Writing from Cuneiform to the Alphabet*, edited by J. T. Hooker. London: British Museum.
125. Davis, D. G., Jr., & Shaw, L. J. (2017). History of libraries. In *Encyclopedia of library and information sciences* (4th ed., Vol. 3, pp. 1796-1811). CRC Press.
126. DCMI (Dublin Core Metadata Initiative). 2014. "About Us." www.dublincore.org/about.
127. Dehnbostel, P., & Gillen, J. (2005). Kompetenzentwicklung, reflexive Handlungsfähigkeit und reflexives Handeln in der Arbeit. *Kompetenzentwicklung in vernetzten Lernstrukturen: Konzepte arbeitnehmerorientierter Weiterbildung*. Bielefeld: Bertelsmann, 27-42.

128. DeLong, Kathleen, et al. 2020. Competencies for Librarians in Canadian Research Libraries. Ottawa: Canadian Association of Research Libraries. https://www.carl-abrc.ca/wpcontent/uploads/2020/09/Competencies-Final-EN-1-2.pdf
129. Dewey, M. (Ed.). (1887). Library notes: Improved methods and labor-savers for librarians, readers and writers (Vol. 2). Library Bureau.
130. Dextre Clarke, S. G. (2018). Knowledge Organization System Standards. Dalam J. D. McDonald & M. Levine-Clark (Eds.), Encyclopedia of Library and Information Sciences, Edisi ke-4 (Vol. 4, hlm. 2665-2676). Boca Raton, FL: CRC Press.
131. Dhananjay, K. S. (2022). Librarian Professional Development in the 21st Century: Addressing the Changing Roles and Skills Required. Universal Research Reports, 9(3), 157-163.
132. Dillon, A., & Norris, A. (2005). Crying Wolf: An Examination And Reconsideration Of The Perception Of Crisis In LIS Education. Journal Of Education For Library And Information Science, 280-298.
133. Dillon, Andrew. 2012a. "What It Means to Be an iSchool." Journal of Education for Library and Information Science 53 (October): 267–73.
134. DiMattia, S. S. (2018). Special Librarianship. Dalam J. D. McDonald & M. Levine-Clark (Eds.), Encyclopedia of Library and Information Sciences, Edisi ke-4 (Vol. 6, hlm. 4351-4360). Boca Raton, FL: CRC Press.
135. Đipa, A., & Turulja, L. (2023). Digital inclusion and digital divide in the context of Bosnia and Herzegovina. *From Digital Divide to Digital Inclusion*, 39–58.
136. Dority, G. K. (2016). Rethinking Information Work: A Career Guide for Librarians and Other Information Professionals (2nd ed.). Libraries Unlimited.
137. Dorner, D., Campbell-Meier, J., & Seto, I. (2017). Making sense of the future of libraries. IFLA journal, 43(4), 321-334.
138. Doucet, M. (2007). Library and Archives Canada: A case study of a national library, archives, and museum merger. RBM: A Journal of Rare Books, Manuscripts, and Cultural Heritage, 8(1), 61-66.
139. Dr. Nisreen Al-Disi (2021) (التطبيق النظرية بين)التعليم مهنة اخلاقيات) . Dar Al Khaleej

140. Dubois, D. (1998). Competency-based HR management. *Human Resource Management Review*, 8(3), 269-295.
141. Dwivedi, Y. K., Kapoor, K. K., Williams, M. D., & Williams, J. (2013). RFID systems in libraries: An empirical examination of factors affecting system use and user satisfaction. *International Journal of Information Management*, 33(2), 367-377.
142. Enakrire, R. T., & Ocholla, D. N. (2017). Information and communication technologies for knowledge management in academic libraries in Nigeria and South Africa. *South African Journal of Information Management*, 19(1), 1-9.
143. Enakrire, R. T., & Oladokun, B. D. (2024). Artificial intelligence as enabler of future library services: How prepared are librarians in African university libraries. *Library Hi Tech News*, 41(3), 1-5.
144. Esguerra, A. C. (2020). Library education and librarianship in Japan and the Philippines. Dalam R. Alenzuela, H. Kim, & D. M. Baylen (Eds.), *Internationalization of Library and Information Science Education in the Asia-Pacific Region* (hlm. 131-157). IGI Global.
145. Etymonline. (tanpa tahun). Profession. Dalam *Online Etymology Dictionary*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://www.etymonline.com/word/profession>
146. Evans, G. E., Ward, P. L., & Rugaas, B. (2000). *Management basics for information professionals*. New York: Neal Schuman Publishers Inc(BSI Z 678 E924 2000).
147. Evarts, H. F. (1987). The competency programme of the American Management Association. *Industrial and Commercial Training*, 19(1), 3-7.
148. Farmer, L. (2014). Innovative Technologies in Library Science. In *Handbook of Research on Education and Technology in a Changing Society* (pp. 178-189). IGI Global.
149. Febvre, L., & Martin, H. J. (1997). *The coming of the book: the impact of printing 1450-1800* (Vol. 10). Verso.
150. Fischer, S. R. (2004). *A history of reading*. Reaktion books.
151. Flexner, A. (1915). Proceedings of the National Conference of Charities and Corrections. "Is social work a profession?" (pp. 576-590).
152. Flexner, A. (2001). Is social work a profession?. *Research on social work practice*, 11(2), 152-165.

153. Forbes, C., Schlesselman-Tarango, G., & Keeran, P. (2017). Expanding support for graduate students: Library workshops on research funding opportunities. *College & Research Libraries*, 78(3), 297.
154. Fox, E. A., Gonçalves, M. A., & Kipp, N. A. (2002). Digital libraries. *Handbook on information technologies for education and training*, 623-641.
155. Framework, C. (2014). European e-Competence Framework 3.0: A Common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors.
156. Fraser-Arnott, M. A. (2019). Evolving practices and professional identity: How the new ways we work can reshape us as professionals and a profession. *IFLA journal*, 45(2), 114-126.
157. Garcia-Febo, L., Hustad, A., Rösch, H., Sturges, P., & Vallotton, A. (2012). IFLA code of ethics for librarians and other information workers.
158. Garner, R. (2000). Oral tradition, the printing press, and the internet. *Library Review*, 49(5/6), 242-248.
159. George, H. C., & Singh, D. (2014). The role of national associations in advocating for school libraries: The case of Indonesia.
160. Gerstein, M. (1984). The library and the machine. *The American Scholar*, 53(4), 491-502.
161. Gillen, J., & Jäger, A. O. (2014). The role of learning strategies in competency development: An empirical investigation. *The International Journal of Human Resource Management*, 25(12), 1677-1701.
162. Gillen, J., & Straka, G. A. (2007). Kompetenzen: Theoretische Ansätze, empirische Befunde und Konsequenzen für die Personalentwicklung. *Zeitschrift für Personalpsychologie*, 6(2), 54-66.
163. Given, L. M. (2015). The future of library and information science education. *The Bottom Line*, 28(1), 1-3.
164. Gold, H. (2009). The future of the information profession in an age of abundance. *Library Trends*, 57(4), 741-762.
165. Gollop, C. J., & Duff, L. K. (2016). Librarian competencies for today's academic library. *College & Research Libraries News*, 77(8), 417-420.

166. Gómez-Hernández, J. A., & Corcho, Ó. (2018). *Ontological engineering: with examples from the areas of knowledge management, e-commerce and the Semantic Web*. Springer Science & Business Media.
167. Gordon, M. D. (1966). Subject indexing from classical antiquity to the computer. *Journal of library history*, 1(1), 9-37.
168. Gorman, M. (2000). Our enduring values: Librarianship in the 21st century. *American Libraries*, 31(2), 46-50.
169. Gorman, Michael. 1995. "Five New Laws of Librarianship." *American Libraries* 26 (September): 784-85.
170. Gorton, T. (1977). The development of academic libraries and librarianship in Thailand, 1950-1976. *Libri*, 27(1), 50-66.
171. Goulding, A., Bromham, L., Hannabuss, S., & Cramer, E. (2014). *The Library and Information Science Professional's Career Book*. London: Facet.
172. Greenberg, J. (2001). *Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work*, 8th ed. New Jersey: Prentice Hall.
173. Greenberg, J. (2010). *Behavior in organizations* (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
174. Greenwood, E. (1957). Attributes of a profession. *Social work*, 45-55.
175. Greer, R. C. (1987). A model for the discipline of information science. Dalam H. Achleitner (Ed.), *Intellectual foundations for information professionals* (hlm. 3-25). Columbia University Press.
176. Greer, R. C., Achleitner, H. K., & Visnak, K. (2015). *Evolving global information infrastructure and information transfer*. Bloomsbury Publishing USA.
177. Greer, R. C., Grover, R. J., & Fowler, S. G. (2007). *Introduction to the library and information professions*. Libraries Unlimited.
178. Griffiths, J.M. (1995). The changing role of librarians. *Aslib Proceedings*, 47(7/8), 175-183.
179. Gulbraar, K. (2005). Developing for the new academic library function: Knowledge and skills requirements among library personnel and teaching faculty. *IFLA Publications*, 116, 53-74.
180. Gunn, H. (2001). Information handling in the ancient Near East. *Library History*, 17(1), 3-14.
181. Gupta, S. K., & Gupta, S. (2013). Ethical practices in librarianship. *International Journal of Digital Library Services (IJODLS)*, 3(2), 23-30.

182. Haider, S. J. (2016). Ethical challenges faced by librarians in public libraries. *Journal of advances in library and information science*, 5(1), 1-5.
183. Hales, M., & Sandoval, S. (2011). The librarian and the technician in the twenty-first century: Collaboration or conflict. *Public Library Quarterly*, 30(2), 142-156.
184. Hall, S. R. (1969). The development of qualifications for librarianship in the United Kingdom. *The Library Quarterly*, 39(3), 271-282.
185. Hammad, A. A. (2004). *The encyclopaedia of Islam* (Vol. 11). Brill.
186. Hancock, V., & Algozzine, B. (2006). *Doing case study research: A practical guide for beginning researchers*. Teachers College Press.
187. Hanner, K. (2009). The value of libraries in the 21st century. *The Bottom Line: Managing Library Finances*, 22(1), 20-22.
188. Harinarayana, N. S., Kumbar, M., Chandrashekara, M., & Kumari, A. (2023). *Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science* (Doctoral dissertation, University of Mysore).
189. Harper, D. (2023). *Bibliothecarius*. Online Etymology Dictionary. diakses pada 15 September 2024 dari <https://www.etymonline.com/search?q=bibliothecarius>
190. *Harrod's librarians' glossary and reference book: A directory of over 10,200 terms, organizations, projects and acronyms in the areas of information management, library science, publishing and archive management*. (2000). Ashgate Publishing, Ltd.
191. Harter, S. P. (1990). *Online information retrieval: Concepts, principles, and techniques*. Academic Press.
192. Harvey, L. (2001). Defining and measuring employability. *Quality in higher education*, 7(2), 97-109.
193. Harvey, Ross, and Louise Stephens. 2010. "Libraries and the Academy." Dalam *International Encyclopedia of Education* (3rd ed.), edited by Penelope Peterson, Eva Baker, and Barry McGaw, 6:578–84. Oxford: Elsevier.
194. Hasan, M. I., & Islam, M. S. (2016). An Overview of Professional Ethics and Code of Conduct for Librarians. *International Journal of Library and Information Science*, 8(8), 100-106.
195. Haycock, K., & Sheldon, B. E. (2008). *The portable MLIS: Insights from the experts*. Libraries Unlimited.

196. Haycock, Ken, and Brooke E. Sheldon. 2008. *The Portable MLIS: Insights from the Experts*. Westport, CT: Libraries Unlimited.
197. Helfer, S., & Heinrich, L. (2018). Research data management as a service: the role of libraries. *LIBER Quarterly*, 28(4), 2925-2942.
198. Henderson, K. L. (1991). The challenges of change: The impact of technology on reference services. *The Reference Librarian*, 34(1), 9-23.
199. Henrich, C., & Klicpera, M. (2016). Employability—A critical review. *Management revue*, 27(2), 115-137.
200. Herget, J., Heinen, T., & Krassnig, H. (2000). Professionalisierung von Informationsberufen: Anforderungen und Perspektiven für die bibliothekarische Ausbildung. *BuB*, 52(10), 758-765.
201. Hernon, P. (1991). The elusive nature of research in LIS. *Library and information science research: Perspectives and strategies for improvement*, 3-14.
202. Hersh, W. (2012). *Information Retrieval: A Health and Biomedical Perspective*, 3rd ed. New York: Springer.
203. Herubel, Jean-Pierre VM. 2017. "Libraries and Society." Dalam *Encyclopedia of Library and Information Sciences* (4th ed.), edited by John D. McDonald and Michael Levine-Clark, 3:3137–47. Boca Raton, FL: CRC Press.
204. Hill, G. (2008). Defining and assessing information literacy: a review of current practice. *Journal of librarianship and information science*, 40(4), 235-248.
205. Hines, S. (2014). *Transforming Information Literacy Instruction: Threshold Concepts in Theory and Practice*. ACRL Publications
206. Hjørland, B. (2000). Documents, memory institutions and information science. *Journal of documentation*, 56(1), 27-52.
207. Hjørland, B., & Albrechtsen, H. (1995). Toward a new horizon in information science: Domain-analysis. *Journal of the American Society for Information Science*, 46(6), 400-425.
208. Hoffmann, T. (1999). The meanings of competency. *Journal of european industrial training*, 23(6), 275-286.
209. Hofmann, J. (2018). *Blended Learning: What Works in Talent Development*. ATD Press
210. Horton, F. W. (1974). *Information resources management*. Cleveland: Association for Systems Management.

211. Horton, F. W., & Brewerton, A. (2019). *Information literacy in the workplace*. Facet Publishing.
212. House Armed Services Committee. (1990). The quality and professionalism of the acquisition workforce. Washington, DC: US Government Printing Office.
213. Howard, K., Partridge, H., Hughes, H., & Oliver, G. (2016). Passion trumps pay: a study of the future skills requirements of information professionals in galleries, libraries, archives and museums in Australia. *Information Research*, 21(2), paper 714. Retrieved from <http://InformationR.net/ir/21-2/paper714.html> (Archived by WebCite® at <http://www.webcitation.org/6hn0sQisB>)
214. Howarth, L. C. (2017). Leadership and Management: Adapting to the Changing Library Environment. Libraries Unlimited.
215. Howarth, L. C. (2018). Leading the future library: The core competencies of 21st century librarianship. Chandos Publishing.
216. Huvila, I. (2015). Competence-based management: a social systems perspective. *The Learning Organization*, 22(3), 167-181.
217. IFLA BSLISE Working Group. (2018). Building strong LIS education: A call to global and local action—An IFLA BSLISE Working Group White Paper. Cape Town: University of Cape Town Libraries. doi: <http://dx.doi.org/10.15641/0-7992-2542-6>, 11-2.
218. IFLA BSLISE Working Group. (2018). Building strong LIS education: A call to global and local action—An IFLA BSLISE Working Group White Paper. *Cape Town: University of Cape Town Libraries*. doi: <http://dx.doi.org/10.15641/0-7992-2542-6>, 11-2.
219. IFLA. (2012). *IFLA guidelines for professional library/information educational programmes*. International Federation of Library Associations and Institutions.
220. IFLA. (2013). Riding the Waves or Caught in the Tide? Navigating the Evolving Information Environment. Insights from the IFLA Trend Report.
221. IFLA. (2022). IFLA Trend Report Update 2022. <https://trends.ifla.org/update-2022>.
222. IFLA. (2023). IFLA Trend Report Update 2023: Realising libraries' potential as partners for development, IFLA Repository: IFLA Trend Report Update 2023.
223. IFLA. 2012. "IFLA Code of Ethics for Librarians and Other Information Workers (Full Version)." The Hague, Netherlands:

- International Federation of Library Associations and Institutions. <https://www.ifla.org/publications/ifla-code-of-ethics-for-librarians-and-other-information-workers/>.
224. Indonesia, I. P. (2019). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia.
 225. Indonesia, Kemenaker. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Perpustakaan. Keputusan Menaker RI Nomor 236 Tahun 2019.
 226. Indonesia, Permenag RI No.12 Th. 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.
 227. Intarakumnerd, P., & Chavalit, M. (2020). Internationalization of LIS education in Thailand dalam R. Alenzuela, H. Kim, & D. M. Baylen (Eds.), *Internationalization of Library and Information Science Education in the Asia-Pacific Region* (hlm. 158-177). IGI Global.
 228. Irvine, M. (1994). The Making of Textual Culture: 'Grammatica' and Literary Theory 350-1100. Cambridge University Press.
 229. Jaeger, P. T., & Taylor, N. (2019). Information policy in the digital age. In K. E. Fisher, S. Erdelez, & L. McKechnie (Eds.), *Theories of information behavior* (2nd ed., pp. 410-420). Medford, NJ: Information Today, Inc.
 230. Jaguszewski, J., & Williams, K. (2013). New roles for new times: Transforming liaison roles in research libraries. *portal: Libraries and the Academy*, 13(3), 251-272.
 231. Jais James dan Joseph I. Thomas. (2023). Career option for library and information science graduates. *Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science*, 70-75.
 232. Jamaludin, A., Hussin, N., & Mokhtar, W. N. H. W. (2006). Library and information career in Malaysia: Aspirations of educators and the reality of the industry. *Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006)*, Singapore, 3-6 April 2006 (hlm. 423-426). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.
 233. Johnson, E. D. (1977). History of Libraries in the Western World (Ch. 9-10). *Journal of Library & Information Science*, 3(1).

234. Johnson, E. O. (2018). Working as a data librarian: A practical guide. Bloomsbury Publishing USA.
235. Johnson, I. M., & Kavanagh, R. E. (1994). History of libraries in the United States. In Encyclopedia of library and information science (Vol. 55, pp. 1-40). Marcel Dekker, Inc.
236. Johnson, P. (1996). Managing changing roles: Professional and paraprofessional staff in libraries. Journal of Library Administration, 22(2-3), 79-99.
237. Jones, P. A. (1989). The history and development of libraries in American higher education. Libraries and Culture, 24(2), 131-151.
238. Jones, S., & Joss, R. (1995). Models of professionalism. Learning and teaching in social work, 15-33.
239. K. Veeranjanyulu. (2023). Restructuring LIS education to meet the emerging digital library and information technology environment. Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science, 38-47.
240. Kailas Sree Chandran (2020) Professional Ethics: A textbook for university students. (2020). (n.p.): Kailas Sree Chandran.
241. Kamus Al-Munjid: Arab - Arab. (1992). Lebanon: Dar Al Fikr untuk Percetakan, Penerbitan dan Distribusi.
242. Karunakar N. and Surendra C.S. (2023). User satisfaction with library resources, services and facilities: A case study of government women's college, Hunsur. Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science, 438-443.
243. Kaser, D. (1980). A book for a sixpence: The circulating library in America. Beta Phi Mu.
244. Kasowitz, A. S., & Stahl, J. (Eds.). (2000). Facets of digital reference: The virtual reference desk. Neal-Schuman Publishers.
245. KBBI. (tanpa tahun). Akhlak. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://kbbi.web.id/akhlak>
246. KBBI. (tanpa tahun). Etika. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://kbbi.web.id/etika>
247. KBBI. (tanpa tahun). Kode. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://kbbi.web.id/kode>
248. Kehinde, A. (2018). Digital libraries and the role of digital librarians. In Handbook of Research on Managing Intellectual Property in Digital Libraries (pp. 98-119). IGI Global.

249. Keiser, B. (2012). WebJunction: A model for online learning in libraries. *Journal of Library Administration*, 52(6-7), 576-588.
250. Keiser, Barbie E. (2012). Professional development and continuing education. *Online*, 36(3), 20-27.
251. Khan, S. A., & Bhatti, R. (2017). Digital competencies for developing and managing digital libraries: An investigation from university librarians in Pakistan. *The Electronic Library*, 35(3), 573-597.
252. Khoo, C. (2005, March). Competencies for new era librarians and information professionals. In *International conference on Libraries (ICOL 2005)* (pp. 14-16).
253. Kian, L. A., & Eastman, S. D. (2017). Ethics and Information Technology. In *Ethical Challenges in Oncology* (pp. 313-323). Academic Press.
254. Kim, K. S., & Sin, S. C. (2015). Internationalization of Library and Information Science Education in Korea. *Journal of Education for Library and Information Science*, 56(1), 11-23.
255. Kimball, B. A. (1996). The "true professional ideal" in America: A history. Rowman & Littlefield.
256. King, D. L. (2018). How to stay on top of emerging technology trends for libraries. *Library Technology Reports*, 54(2), 1-35.
257. King, D. L. (2020). Transforming the library. *Foundations of Library and Information Science*, 197.
258. King, J. L. (2005). Stepping Up: Shaping The Future Of The Field. *American Libraries*, 36(1), 52-57.
259. Klemp, G. O. (1980). The assessment of occupational competence. Washington, DC: National Institute of Education.
260. Klieme, E., & Leutner, D. (2006). Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen. Beschreibung eines neu eingerichteten Schwerpunktprogramms der DFG. *Zeitschrift für Pädagogik*, 52(6), 876-903.
261. Koenig, M., & Neveroski, K. (2018). Knowledge Management: Early Development. Dalam J. D. McDonald & M. Levine-Clark (Eds.), *Encyclopedia of Library and Information Sciences*, Edisi ke-4 (Vol. 4, hlm. 2657-2664). Boca Raton, FL: CRC Press.
262. Kuhlman, A. F. (1938). Librarianship as a Profession. *Peabody Journal of Education*, 16(2), 71-80.

263. Kuhlthau, C. C(2004). Seeking meaning: A process approach to library and information services (2nd ed.). Libraries Unlimited.
264. Kuhn, T. S. (2012). The Structure Of Scientific Revolutions. University Of Chicago Press.
265. Lancaster, F. W. (1972). Vocabulary control for information retrieval. Information resources press.
266. Lancaster, F. W., & Smith, L. C. (1992). Artificial Intelligence and Expert Systems: Will They Change the Library? Papers Presented at the Annual Clinic on Library Applications of Data Processing (27th, Urbana, Illinois, March 25-27, 1990). Illinois, March 25-27, 1990.
267. Lankes, R. D. (2011). *The Atlas of New Librarianship*. MIT Press.
268. Lankes, R. D. (2016). The new librarianship field guide. Mit Press.
269. Lapo, P., & Davletyarova, N. (2020). Internationalization of library and information science education in Central Asia: The case of Kazakhstan and Kyrgyzstan dalam R. Alenzuela, H. Kim, & D. M. Baylen (Eds.), *Internationalization of Library and Information Science Education in the Asia-Pacific Region* (hlm. 207-224). IGI Global
270. Lavery, C. (2020). Building a culture of learning: Staff development in the University of the South Pacific Library. Dalam R. Alenzuela, H. Kim, & D. M. Baylen (Eds.), *Internationalization of Library and Information Science Education in the Asia-Pacific Region* (hlm. 240-258). IGI Global
271. Lavery, C. (2020). Lifelong learning for librarians and information professionals. *Journal of Librarianship and Information Science*, 52(3), 243-252.
272. Lee, H. L., & Park, J. (2016). The Impact of Globalization on Library and Information Science Education in Asia. *Journal of Librarianship and Information Science*, 48(2), 89-101.
273. Lee, H.-L. (2020). LIS education in South Korea: Current status and future directions. Dalam R. Alenzuela, H. Kim, & D. M. Baylen (Eds.), *Internationalization of Library and Information Science Education in the Asia-Pacific Region* (hlm. 103-130). IGI Global.
274. Lemos, R., Ferraz, J. V., & Ferraz, V. (2014). Information and communication technologies for development. International Development: Ideas, Experience, and Prospects.

275. Leon Jr, J. A., & Pope, B. M. (2016). Juggling Collections and Connections to Community: Changing Role of Libraries. *Journal of Library Administration*, 56(4), 381-385.
276. Leslie, D. (1999). Industry experts gather to map future of libraries. *The Electronic Library*, 17(3), 149-153.
277. Levine-Clark, M., & Dean, T. C. (Eds.). (2013). *ALA glossary of library and information science*. American library association.
278. Lindsey, J. A., & Prentice, A. E. (1985). *Professional Ethics and Librarians*. Phoenix, AZ: Oryx.
279. Loh, E. (2020). Internationalization of library and information science education in Singapore. Dalam R. Alenzuela, H. Kim, & D. M. Baylen (Eds.), *Internationalization of Library and Information Science Education in the Asia-Pacific Region* (hlm. 118-130). IGI Global
280. Loosjes, T. P. (1962). *Documentation of scientific literature*. Butterworths.
281. Lor, P. J. (2019). *International and comparative librarianship: concepts and methods for global studies*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
282. Lucky, S., & Harkema, C. (2018). Back to basics: supporting digital humanities and community collaboration using the core strength of the academic library. *Digital Library Perspectives*, 34(3), 188-199.
283. Lupač, P. (2018). *Beyond the digital divide: Contextualizing the information society*. Emerald Publishing Limited.
284. Lux, C. (2024). *Libraries on the agenda: Lobbying and advocating for library and information professionals*. De Gruyter Saur.
285. Lynch, C. (2000). From automation to transformation. *Educause review*, 35(1), 60-69.
286. Maack, M. N. (1986). Women in library education: Down the up staircase. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 11(3), 415-432.
287. Machlup, F. (1962). *The production and distribution of knowledge in the United States*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
288. Mahadeva Prasad M. S. (2023). Information literacy competency among the students of government polytechnic for women, Bengaluru: A study. *Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science*, 487-494.

289. Mahadeva Prasad M.S (2023) Assessment of information literacy competencies among polytechnic students in Karnataka, India. *Journal of Librarianship and Information Science*, 0(0), 1–15
290. Mamedova, S. I. (2023). Artificial intelligence applications in libraries in the context of digital transformation of society.
291. Mantilla, M. (2023, December). Digital Knowledge, Skills and Application among Librarians and Library Staff of MUNPARLAS Library Association, Incorporated. In *University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings* (No. 8, pp. 213-225).
292. Martzoukou, K. (2013). Empowering information literacy and continuing professional development of librarians: New paradigms for learning. In *Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice: European Conference on Information Literacy, ECIL 2013 Istanbul, Turkey, October 22-25, 2013 Revised Selected Papers 1* (pp. 647-654). Springer International Publishing.
293. Martzoukou, K., & Tramantza, E. (2014). Virtual Embedded Librarianship for Information Literacy Teaching. In *Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century: Second European Conference, ECIL 2014, Dubrovnik, Croatia, October 20-23, 2014. Proceedings 2* (pp. 446-455). Springer International Publishing.
294. Mashiyane, D., & Molepo, M. (2021). Curbside book pick-up services during a time of crisis in South African University Libraries. *The Journal of Academic Librarianship*, 47(5), 102363.
295. Mason, R. O. (1990). What is an information professional?. *Journal of education for library and information science*, 122-138.
296. McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for" intelligence.". *American psychologist*, 28(1), 1.
297. McCook, K. de la Pe\u00f1a, & Bossaller, J. S. (2018). *Introduction to Public Librarianship* (3rd ed.). American Library Association.
298. McKay, M. (2011). Improving access to scholarly research in Africa: Open access initiatives. *Serials*, 24(3), 251-254.
299. Menant, J. (1880). *La biblioth\u00e8que du palais de Ninive: d\u00e9couvertes assyriennes* (Vol. 28). Leroux.
300. Merriam-Webster. (tanpa tahun). Code of ethics. Dalam *Merriam-Webster.com Dictionary*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/code%20of%20ethics>

301. Merriam-Webster. (tanpa tahun). Competency. Dalam *Merriam-Webster.com Dictionary*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/competency>
302. Merriam-Webster. (tanpa tahun). Dalam *Merriam-Webster.com Dictionary*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://www.merriam-webster.com/>
303. Merriam-Webster. (tanpa tahun). Ethic. Dalam *Merriam-Webster.com Dictionary*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/ethic#word-history>
304. Merriam-Webster. (tanpa tahun). Profession. Dalam *Merriam-Webster.com dictionary*. Diakses pada 15 September 2024, dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/profession>
305. Merriam-Webster. (tanpa tahun). Professionalism. Dalam *Merriam-Webster.com Dictionary*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/professionalism>
306. Messick, S. (1984). The psychology of educational measurement. ETS Research Report Series, 1984(1), i-55.
307. Miksa, F. L. (1992). Library And Information Science: Two Paradigms. *Conceptions Of Library And Information Science: Historical, Empirical And Theoretical Perspectives*, 229-52.
308. Miller, A. (2018). Innovative management strategies for building and sustaining a digital initiatives department with limited resources. *Digital Library Perspectives*, 34(2), 117-136.
309. Miller, R. K. (2008). From Bodleian to Idea Stores: the evolution of English library design.
310. Millerson, G. (1964). The qualifying associations: a study in professionalism. Routledge & Kegan Paul.
311. Miwa, M., & Miyahara, S. (Eds.). (2015). *Quality Assurance in LIS Education: An International and Comparative Study*. New York: Springer.
312. Miyahara, S. (2015). The Diversity of LIS Programs in Southeast Asia. Dalam M. Miwa & S. Miyahara (Eds.), *Quality Assurance in LIS Education: An International and Comparative Study* (hlm. 221-234). Springer.
313. Monteiro, A. R. (2015). The teaching profession: Present and future (pp. 47-60). Dordrecht: Springer International Publishing.

314. More, R. (2012). Impact of Information and Communication Technology on Library Services. *International Journal of Library and Information Science*, 4(5), 85-90.
315. Moser, P. (2017). Epistemology. Dalam J. D. McDonald & M. Levine-Clark (Eds.), *Encyclopedia of Library and Information Sciences* (hlm. 1455-1462). CRC Press.
316. Mosweu, O. (2023). Digital preservation practices in academic libraries in Botswana: Challenges and opportunities. *JLIS.it*, 14(1), 70-89.
317. Muralidharan, S.R., & Dharani Kumar, P. (2023). Smart library: An overview. *Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science*, 134-140.
318. Murray, S. A. (2009). *The library: An illustrated history*. Skyhorse.
319. Mwaniki, P. W. (2018). Envisioning the future role of librarians in university libraries in Kenya: Skills, services and information resources. *Library Management*, 39(3), 167–182.
320. Nagaveni M., Shilpa Rani N.R., & Prathibha S.N. (2023). Impact of cloud computing technologies on libraries of health science institutions in Mysuru: A study. *Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science*, 224-229.
321. Nashihuddin, W., Putra, K. A. D., & Hidayatullah, F. (2020). Deskripsi Program Studi dan Kompetensi Mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Indonesia. *Media Pustakawan*, 27(2), 111-125.
322. Nera, C. M. (2006). The professionalization of Filipino librarians. *Paper presented at the 13th General Conference of the Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL)*.
323. Nera, C. M., Almeior, C. G., & Peralejo, E. R. (2006). *Code of Ethics for Librarians*. Manila: Board For Librarians.
324. Ninh, T. K. T. (2014). Library management: An approach based on resource dependence theory. *Journal of Information and Documentation*, 6, 18-27.
325. Nisreen Al-Disi. (2021). (التطبيق النظرية بين (التعليم مهنة اخلاقيات). Dar Al Khaleej.
326. Obadare, S. O. (2014). The changing role of librarians in the digital age. Erişim Adresi: [https://www.codesria.org/IMG/pdf/Obadare_S_

327. ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science. (tanpa tahun). Diakses pada 5 Juni 2024, dari https://odlis.abc-clio.com/odlis_p.html
328. Oguz, F., Chu, C. M., & Chow, A. S. (2015). Studying online: Student motivations and experiences in ALA-accredited LIS programs. *Journal of education for Library and Information Science*, 56(3), 213-231
329. Okada, D. (2020). 10,000 newly certified librarians, 100 secure jobs. Dalam R. Alenzuela, H. Kim, & D. M. Baylen (Eds.), *Internationalization of Library and Information Science Education in the Asia-Pacific Region* (hlm. 78-102). IGI Global
330. Okerson, A. S. (1990). The electronic journal: What, whence, and when?. *Public Access Computer Systems Review*, 1(2), 5-24.
331. Oltmann, S. M. (2016). Librarian in a Box: Embedding Librarians in Online Courses. *Journal of Library & Information Services in Distance Learning*, 10(1-2), 31-41.
332. Omekwu, C. O. (2006). Continuing professional development for librarians in Nigeria: The way forward. *Library Review*, 55(2), 88-93.
333. Omekwu, C. O., & Akanwa, P. C. (2017). Continuing professional development (CPD) and job satisfaction of librarians in federal university libraries in South East Nigeria. *Library Philosophy and Practice* (e-journal), 1651.
334. Omekwu, C. O., & Oduagwu, E. O. (2009). Competencies required of library and information science professionals for effective service delivery in the electronic information environment. *Library Philosophy and Practice* (e-journal), 264.
335. Onyancha, O. B., & Ocholla, D. N. (2008). Challenges facing library and information science (LIS) education in Kenya: A case study of Kenyatta University. *South African Journal of Libraries and Information Science*, 74(2), 114-125.
336. Oppenheim, C., & Smithson, O. (1999). What is the hybrid library?. *Journal of Information Science*, 25(2), 97-112.
337. Orcutt, W. D. (1926). *The librarian's open shelf: Essays on various subjects*. Grafton & Co.
338. Osman, Z. (1986). The role of the library association in preparing members for new trends. *Conference of Southeast Asian Librarians (CONSAL VI)*, 49-65.

339. Oxford Learner's Dictionaries. (tanpa tahun). Profession. Dalam *Oxford Learner's Dictionaries*. Diakses pada 15 September 2024, dari <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>
340. Padhi, P., & Panigrahi, B. K. (2023). Exploring the Impact of Metaverse on Academic Libraries: A Study. In *University Library at a New Stage of Social Communications Development*. Conference Proceedings (No. 8, pp. 288-294).
341. Pal, S. S., & Bharati, P. (2014). Ethical Issues and Dilemmas Faced by the Information Professionals in India. *International Journal of Information Dissemination and Technology*, 4(2), 119-122.
342. Pang, K. K., & Abdullah, A. N. (2012). Digital competency and user acceptance of digital libraries: A case study. *The Electronic Library*, 30(1), 70-88.
343. Park, J. S., & Abbasi, A. (2013). Investigating user acceptance of mobile library applications: An extension of the technology acceptance model. *The Electronic Library*, 31(6), 603-622.
344. Patah, L. (1984). *Sejarah Perpustakaan Indonesia*. Lembaga Pendidikan Perpustakaan, Departemen P Dan K.
345. Patel, J., & Pawar, B. (2017). Cloud Computing for Libraries. *International Journal of Library and Information Studies*, 7(1), 1-6.
346. Pendidikan, P. M., Kebudayaan, R., & Nomor, D. T. R. I. (53). Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. *Pihak yang melaksanakan standar yaitu tim perumus standar*.
347. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Perpustakaan.
348. Peterson, K. D., & Seligman, M. E. (2004). *Character strengths and virtues: A handbook and classification*. Oxford University Press.
349. Pinto, M., Sales, D., & Romão, T. (2016). Librarian 2.0: The development of digital skills. *The Electronic Library*, 34(2), 232-250.
350. Platt, J. R. (1959). The fifth need of man. *Horizon*, 1(6), 106-111.
351. Pope, B. M. (2015). The future of reference librarianship: A Delphi study. *portal: Libraries and the Academy*, 15(4), 599-616.
352. Porat, M. U. (1977). *The information economy: Definition and measurement*. Washington, DC: U.S. Department of Commerce, Office of Telecommunications.
353. Powell, R. R. (1997). Basic research methods for librarians (No. 37). ABC-CLIO.

354. Prasanth, P. V. S., & Kumar, M. (2023). Use of electronic information resources (EIR) in libraries: A study of selected colleges in Mysuru. *Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science*, 471-476.
355. Prasanth, P. V. S., & Kumar, M. (2023). Use of electronic information resources (EIR) in libraries: A study of selected colleges in Mysuru. *Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science*, 471-476.
356. Premssmit, P. (2005). Library and information science education in Thailand. *World Library and Information Congress: 71st IFLA General Conference and Council 14-18 August 2005, Oslo, Norway*.
357. Professions Australia. (2024, June 5). *What is a professional?*. Diakses dari <https://www.professions.org.au/what-is-a-professional>
358. Putri, N. F., & Harususilo, Y. E. (2021). Information literacy in the digital era: The role of academic libraries in Indonesia. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, 2660.
359. Qin, J., & Zhang, Q. (2005). Web-based intelligent library system: technologies and its applications. *Information technology and libraries*, 24(3), 127-138.
360. Quadri, R. F., & Sodiq, O. A. (2018). Managing Intellectual Property in Digital Libraries: The Roles of Digital Librarians. In *Handbook of Research on Managing Intellectual Property in Digital Libraries* (pp. 337-355). IGI Global.
361. R. Alenzuela, H. Kim, & D. M. Baylen (Eds.), *Internationalization of Library and Information Science Education in the Asia-Pacific Region* (hlm. 103-130). IGI Global.
362. Rajendran, P. (2015). Library 2.0: A Review of the Literature. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, 35(6).
363. Ramesh Babu, B., & Kumar, B. T. (2023). Artificial Intelligence and Machine Learning Applications in Library and Information Centres. In *Emerging Trends in Library and Information Science* (pp. 41-58). IGI Global.
364. Ranganathan, S. R. (1931). *The five laws of library science*. Madras Library Association; London: Edward Goldston.
365. Rao, D. N. (2016). Library and information science education in India: Retrospect and prospect. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, 36(4).

366. Ravaglio, A. d. S. C., Muitana, G., Benites, C. d. S., Santana, C., Eliseo, M. A., Silveira, I. F., Martins, V. F., & Amato, C. A. d. I. H. (2023). The idiosyncrasies of digital divide in Brazil: A literature review on initiatives of digital inclusion. *From Digital Divide to Digital Inclusion*, 59–93.
367. Reitz, J. M. (2004). Dictionary for library and information science. Libraries unlimited.
368. Rhee, M. J. (2017). Challenges and Opportunities for Internationalization of Library and Information Science Education in Asia. *International Journal of Library and Information Science*, 9(2), 85-95.
369. Richardson, J. V. (1981). The Spirit of Inquiry: The Graduate Library School at Chicago, 1921-51. The Library Quarterly: Information, Community, Policy, 51(2), 155-168.
370. Rieh, S. Y., & Danielson, D. R. (2007). Credibility: A multidisciplinary framework. Annual review of information science and technology, 41(1), 307-364.
371. Ritzer, G. (1975). Professionalization, bureaucratization and rationalization: The views of Max Weber. Social Forces, 53(4), 627-634.
372. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2007). Organizational Behavior (12th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
373. Roberts, K. A., & Donahue, K. A. (2000). Professing professionalism: Bureaucratization and deprofessionalization in the academy. Sociological Focus, 33(4), 365-383.
374. Roddenberry, E. W. (1953). Achieving professionalism. J. Crim. L. Criminology & Police Sci., 44, 109.
375. Rosenberg, V. (1990). Information professionals: Definitions and educational implications. *Bulletin of the American Society for Information Science*, 16(6), 18-19.
376. Rubin, R. E. (2010). Foundations of library and information science. Neal-Schuman Publishers.
377. Rubin, R. E. (2016). Foundations of library and information science. ALA Neal-Schuman.
378. Rubin, R., & Froehlich, T. (2017). Ethical Aspects of Library and Information Science. Dalam J. D. McDonald & M. Levine-Clark (Eds.), Encyclopedia of Library and Information Sciences (hlm. 1469-1483). CRC Press.

379. Rubin, Richard E. 2010. *Foundations of Library and Information Science*. 3rd ed. New York: Neal-Schuman.
380. S. Dhanalakshmi dan B. Ramesh Babu. (2023). Blockchain technology in library and information science: A review. *Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science*, 12-22.
381. Saad, M. S. M., Johare, R., & Nadzar, F. M. (2015). LIS Education and Quality Assurance System in Asia-Pacific: Malaysia dalam M. Miwa & S. Miyahara (Eds.), *Quality Assurance in LIS Education: An International and Comparative Study* (hlm. 103-112). Springer.
382. Sacchanand, C. (2014). Online Learning in Library and Information Science in the ASEAN Countries: Issues and Trends. Dalam *LIS Education in Developing Countries: The Road Ahead* (hlm. 42-52). De Gruyter Saur.
383. Sajid, M., & Aslam, M. (2019). Rethinking library education in Pakistan: Need of the hour. *The Journal of Academic Librarianship*, 45(3), 260-266.
384. Salem Jr, S. (1988). Organizational effectiveness in Jordanian libraries: an empirical study. *International library review*, 20(1), 71-83.
385. Salisbury, R. A. (1981). The Case for Marxist Librarianship. *Collection Building*, 3(1), 23-34. [URL yang tidak valid dihapus]
386. Salomon, G. (1993). No distribution without individuals' cognition: a dynamic interactional view. Dalam G. Salomon (Ed.), *Distributed cognitions: Psychological and educational considerations* (hlm. 111-138). New York, NY, US: Cambridge University Press.
387. Salubi, O. (2023). Transforming libraries and information professionals for the industry 4.0 in developing countries: Towards the development of a framework for accelerating change post-Covid-19. *Alexandria: The Journal of National and International Library and Information Issues*, 0(0), 1-16.
388. Samuelson, P. (1995). Copyright's fair use doctrine and digital data. *Communications of the ACM*, 38(1), 21-27.
389. Santos, A. M. (2003). The professionalization of librarians in the Philippines: The role of library associations. *Paper presented at the World Library and Information Congress, Berlin*.
390. Santrock, J. W. (2008). *A topical approach to life-span development* (4th ed.). New York: McGraw-Hill.

391. Saracevic, T. (1999). Information science. *Journal of the American Society for Information Science*, 50(12), 1051-1063.
392. Sayers, W. C. B. (1911). *Canons of classification: A study in bibliographical classification method*. Grafton.
393. Sayers, W. C. B. (1955). *A manual of classification for librarians and bibliographers* (Vol. 3). Grafton.
394. Sayers, W. C. Berwick. 1915. *Canons of Classification: Applied to "The Subject," "The Expansive," "The Decimal" and "The Library of Congress" Classifications; A Study in Bibliographical Classification Method*. London: Grafton.
395. Schlesinger, A. M. (1978). *The age of Jackson*. Little, Brown.
396. Schmidt, J., & Crozier, J. (2005). From gatekeepers to gateway providers: roles for professional librarians in the digital age. *Aslib Proceedings*, 57(4), 301-315.
397. Schultz-Jones, B., & Oberg, D. (Eds.). (2019). *Global Action on School Library Education and Training*. Berlin/Munich: De Gruyter Saur.
398. Schwartz, C. (2012). The changing role of the librarian. *Education Libraries*, 35(1), 10-18.
399. Senthamilselvi, A., & Srinivasaragavan, S. (2023). Emerging Technologies and their Potential Impact on Library and Information Services dalam *Proceedings of National Conference on Exploring the Past, Present, and Future of Library and Information Science* (pp. 141-146). Department of Studies in Library and Information Science, University of Mysore, Manasagangotri, Mysuru.
400. Setiawan, M. I. (2018). Perpustakaan Perguruan Tinggi di Era Digital. *Jurnal Biblioteka*, 1(1), 1-10.
401. Shah, C. (2013). *Public libraries in the knowledge society: Core services and future challenges*. IFLA Publications, 153.
402. Sharma, C. K., & Widén-Wulff, G. (2015). Competencies for information professionals of the future: A literature review. *Journal of Librarianship and Information Science*, 47(3), 232-247.
403. Sharma, S. K. (2018). Digital Libraries. Dalam J. D. McDonald & M. Levine-Clark (Eds.), *Encyclopedia of Library and Information Sciences*, Edisi ke-4 (Vol. 2, hlm. 1343-1352). Boca Raton, FL: CRC Press.

404. Shashikumar, M.C. & Chandrashekara, M. (2023). Public libraries in India: Issues and challenges in the digital era. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, 6301.
405. Shashikumara, A.A., Raju, N.V., & Jagadish, K.S. (2019). Role of a librarian in the digital era. *International Journal of Library and Information Studies*, 4(3), 8-11.
406. Shenton, A. K. (2007). *The information professional's guide to the Internet*. Ashgate Publishing, Ltd.
407. Shiflett, L. (2017). School Librarianship. Dalam J. D. McDonald & M. Levine-Clark (Eds.), *Encyclopedia of Library and Information Sciences*, Edisi ke-4 (Vol. 6, hlm. 4129-4138). Boca Raton, FL: CRC Press.
408. Shreeves, E. (1992). The Dynamics of Change: The Impact of Technology on Library Operations and Services. *Journal of Library Administration*, 17(1), 7-26.
409. Shumaker, D. (2008). The Embedded Librarian: Innovative Strategies for Taking Knowledge Where It's Needed. *Information Today*.
410. Singh, D. (2004). Library and information science education in Malaysia: Trends and issues. *Education for Information*, 22(2), 133-146.
411. Singh, D. (2007). Accreditation of library and information science education programs: The Malaysian experience. *Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2007 (2nd A-LIEP 2007)* (hlm. 87-112). Taipei: Department of Information & Communications, Shih-Hsin University.
412. Singh, J., & Shahid, S. M. (2010). Changing Needs of Library and Information Science Curricula in India. *Library Philosophy and Practice*, 5.
413. Singh, S. (2015). Library classification. *Library Herald*, 53(3), 269-277.
414. Skov, A. K. (2017). The changing role of librarians in the digital age. *New Library World*, 118(3/4), 75-85.
415. Smith, L. C. (2012). The future of library and information science education: A Delphi study. *Journal of Education for Library and Information Science*, 53(1), 15-32.
416. Snelson, P. (1999). The physical foundations of librarianship. *Library Trends*, 47(4), 700-715.

417. Society of American Archivists. (2018). SAA Core Values Statement and Code of Ethics"
418. Spencer, M. (2015). The academic library as a teaching library: Embedded librarianship and its potential to reach students. *Journal of Library & Information Services in Distance Learning*, 9(3-4), 133-142.
419. Srivastava, S., & Chouhan, V. S. (2013). Competency mapping and its challenges. *International Journal of Research in Management*, 3(2), 15-22.
420. Steinberg, S. (2007). *An introduction to communication studies*. Juta and Company Ltd.
421. Stueart, R. D., & Moran, B. B. (2007). Library and information center management (Vol. 7). Libraries Unlimited.
422. Sulisty-Basuki (1994). *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*. Remaja Rosdakarya.
423. Sulisty-Basuki, L. (2015). LIS Education and Quality Assurance System in Asia Pacific: Indonesia dalam M. Miwa & S. Miyahara (Eds.), *Quality Assurance in LIS Education: An International and Comparative Study* (hlm. 151-165). Springer
424. Sun, H.-C., Chen, K.-n., Tseng, C., & Tsai, W.-H. (2011). Role changing for librarians in the new information technology era. *New Library World*, 112(7/8), 321-333.
425. Sutton, Brett. 1996. "The Library's New Job: Information Literacy." *Library Journal* 121 (April 15): 48-49.
426. Sweeney, R. T. (2006). Leadership skills for information professionals. Information Today, Inc.
427. Tamaro, A. M. (2015). Current Trends of Quality Assurance Models in LIS Education dalam M. Miwa & S. Miyahara (Eds.), *Quality Assurance in LIS Education: An International and Comparative Study* (hlm. 169-186). Springer.
428. Tarango, J., & Machin-Mastromatteo, J. D. (2017). The Role of Information Professionals in the Knowledge Economy: Skills, Profile and a Model for Supporting Scientific Production and Communication. Chandos Publishing.
429. Tarango, J., & Machin-Mastromatteo, J. D. (2017). The role of information professionals in the knowledge economy: Skills, profile and a model for supporting scientific production and communication. Chandos Publishing.

430. Tedd, L. A. (1977). The development of special libraries in the UK. *Aslib Proceedings*, 29(1), 1-10.
431. Tenopir, C., & King, D. W. (2004). Towards electronic journals: realities for scientists, librarians, and publishers. *Special Libraries Association*.
432. The Guardian(2004, July 11). *Idea Stores: A new chapter for libraries*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://www.theguardian.com/Artanddesign/2004/jul/11/art2>
433. Thelwall, M. (2008). Social networks, gender, and friending: An analysis of MySpace member profiles. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 59(8), 1321-1330.
434. Thomas, S., Joseph, C., Laccetti, J., Mason, B., Mills, K., Perril, S., & Pullinger, K. (2007). Transliteracy: Crossing divides. *First Monday*, 12(12).
435. Thompson, J. (2004). *Books in the Digital Age: The Transformation of Academic and Higher Education Publishing in Britain and the United States*. Polity Press.
436. Trammell, A., & Keselman, A. (2004). The competencies of librarians in the digital age. *The Journal of Academic Librarianship*, 29(6), 393-396.
437. Trant, J. (2009). Emerging convergence? thoughts on museums, archives, libraries and professional training. *Museum Management and Curatorship*, 24(4), 369-387.
438. Undang-Undang, R. I. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
439. UNESCO. (2006). *The UNESCO public library manifesto: the public library, a living force for education, culture and information*. UNESCO Publishing.
440. UNESCO. (2015). *The role of libraries in education*. UNESCO Publishing.
441. UNESCO. (2018). *UNESCO public library manifesto 2018*. UNESCO Publishing.
442. Utami, C. W. (2021). Digital literacy skills of librarians in Indonesia: A systematic literature review. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, 3089.
443. Vallejo, R. M. (1993). Library and information science education in the Philippines: A summary. *Asian Libraries*, 3(4), 81-82

444. van Wyk, W. & Thompson, L. (2008). New Competencies for the 21st Century Librarian: Nonverbal Communication and Transliteracy. *The 21st International BOBCATSSS Conference*, 36-40
445. Veaner, A. B. (1994). Paradigm lost, paradigm regained? A persistent personnel issue in academic librarianship, II. *College & research libraries*, 55(5), 389-402.
446. Virkus, S. (2000). Information Technology Fluency: Seeking a workable definition for higher education. *Educause Quarterly*, 2, 38-41.
447. Wallace, D. P., & Van Fleet, C. (2013). The embedded librarian: A study of the literature, 2003-2013. *Reference Services Review*, 41(4), 695-715.
448. Ward, P. L., & Robbins, S. P. (2011). The effective library manager: Leading with vision and planning for success. *Libraries Unlimited*.
449. Warnick, B. R. (2000). The five laws of library science: Their enduring significance. *The Bottom Line: Managing Library Finances*, 13(3), 131-134.
450. Wee, L. H. (2009). Library and information science education in Malaysia: Challenges and opportunities. *Malaysian Journal of Library & Information Science*, 14(2), 133-142.
451. Wee, L. H. (2020). Continuing professional development of librarians and library officers in Singapore. *Singapore Journal of Library & Information Management*, 49, 107-122.
452. Wee, L. H. (2020). The changing roles of librarians and the need for continuing professional development. *Dalam*
453. Weinberger, D. (2007). Everything is miscellaneous: The power of the new digital disorder. *Times books*.
454. White, H. D. (2004). Citation analysis and discourse analysis revisited. *Journal of documentation*, 60(4), 379-387.
455. Williamson, C. C. (1923). *Training for library service*. New York: Carnegie Corporation of New York.
456. Williamson, K. (2016). *Dynamic professional development: concepts, models and tools for career-long learning in a digital age*. Chandos Publishing.
457. Wilson, P. (1945). The workshop of the mind. *The Library Quarterly: Information, Community, Policy*,

- 458. Womboh, B. S. H. (1990). The information analyst as a knowledge and link worker in problem-solving. *International forum on information and documentation*, 15(3), 16-21.
- 459. Wong, P. H. (2015). Developing 21st century information literacy skills: An exploratory study of the perceptions of librarians. *Library & Information Science Research*, 37(4), 209-217.
- 460. Wood, R. J., & Wood, K. C. (1999). The competencies of librarians in the digital age. *The Journal of Academic Librarianship*, 25(4), 277-283.
- 461. Xia, J. (2013). Information and communication technology (ICT) literacy, needs, and competency levels of librarians in academic libraries in Ghana. *The Electronic Library*, 31(3), 303-320.
- 462. Yaya, J. A. (2014). The librarian and the challenges of information and communication technology (ICT). *Journal of Educational and Social Research*, 4(2), 347.
- 463. Yoon, H. J., & Jeong, Y. (2019). The Role of Continuing Professional Development in the Internationalization of Library and Information Science Education. *Library & Information Science Research*, 41(1), 43-51
- 464. Yusuf, B. (2014). The librarian and the challenges of information and communication technology (ICT). *Journal of Educational and Social Research*, 4(2), 347.
- 465. Zins, C. (2007). Conceptual approaches for defining and measuring professional competence. *European Journal of Education*, 42(2), 155-183.
- 466. Zuboff, S. (1988). *In the age of the smart machine: The future of work and power*. Basic Books.

TENTANG PENULIS



Dr. Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum., lahir 14 September dan dibesarkan di sebuah desa kecil nan Indah yang dikelilingi bukit yang hijau dan sungai yang dialiri air yang bersih yang dikenal dengan “Tanjung Durian” Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pendidikan dasar diselesaikan di SDN No.3 Pasar Baru Bayang. Adapun Pendidikan menengah Pertama diselesaikan di SMPN Pasar Baru Bayang Kecamatan Bayang, sebelum

melanjutkan ke SMAN Salido di Kabupaten Pesisir Selatan. Gelar akademik S.1. Pendidikan Agama Islam Penulis peroleh dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam IAIN IB Padang, S.1. Ilmu Perpustakaan dari UI Depok dan S.2. Ilmu Perpustakaan juga dari UI Depok. Terakhir Pendidikan S.3 diselesaikan dari Universitas Negeri Jakarta Program Studi Teknologi Pendidikan ditamatkan pada tahun 2020. Saat ini, Penulis berpartisipasi aktif sebagai dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Aktivitas di organisasi Profesi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) penulis mulai dari sebagai sekretaris tahun 2005 sampai dengan 2009. Masa 2010 sampai dengan 2013 diamanahkan sebagai Ketua di Organisasi ini. Semenjak 2014 sampai 2024 ditunjuk sebagai Anggota Pembina IPI Provinsi Banten. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019 pernah menjadi anggota Dewan Perpustakaan Provinsi Banten.

Selain mengajar, Dr. Jamridafrizal juga aktif berbagi ilmu dan pengalaman melalui seminar dan lokakarya di tingkat Nasional dan Provinsi. Penulis juga sering dipercaya sebagai juri dalam pemilihan Pustakawan Berprestasi dan Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat tingkat SLTA semenjak 2013 sampai 2024 di Provinsi Banten, bahkan pernah pula menjadi juri lomba cerita anak tingkat Kabupaten Serang. Alhamdulillah semua pengalaman ini sangat membantu penulis dalam meluaskan pandangan terkait dengan bidang perpustakaan dan kepustakawanan



Inda Fitri Caniago, S.Ag., S.S., M.Si., lahir di Padangsidempuan pada 9 Juli 1974, adalah sosok dosen yang berdedikasi di bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Meraih gelar S1 ganda (S.1 Sastra Arab dari Fakultas Adab UIN Imam Bonjol pada tahun 1999 dan Ilmu Perpustakaan dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2002)

Semangat belajarnya yang tinggi mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan dan meraih gelar S2 M.Si. di bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada tahun 2008. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan S3 di bidang Pendidikan Islam di Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang dan sedang dalam proses menyelesaikan disertasinya.

Berbagai kontribusi selain mengajar juga terus mengembangkan diri melalui penelitian dan penulisan karya ilmiah bidang ilmu perpustakaan dan informasi Islam, terutama di UIN Imam Bonjol Padang..



Zulfitri, S.Ag., MA adalah seorang pustakawan ahli madya di UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Penulis memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ilmu perpustakaan dan tafsir hadis, dengan gelar S2 dari IAIN Imam Bonjol Padang dan sedang menempuh pendidikan S3 di UIN Imam Bonjol Padang.

Sebagai Pustakawan, penulis juga aktif terlibat dalam organisasi profesi pustakawan, termasuk Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), FPPTI Sumatera Barat, dan APPTIS, sebagai tim penilai dalam lomba pustakawan dan perpustakaan tingkat Sumatera Barat dan juga pernah diamanahi sebagai Kepala Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, saat ini menjabat sebagai Koordinator Layanan Referensi.

Selain bekerja sebagai pustakawan, Penulis juga memiliki pengalaman sebagai pengajar dan dosen luar biasa di UIN Imam Bonjol Padang. Kontribusinya dalam bidang perpustakaan dan keilmuan Islam sangat signifikan, terutama di Sumatera Barat.



Tsulatsiah, SE., S.IPI., M.M., seorang Pustakawan Ahli Muda yang berdedikasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, lahir di Serang. Dengan segudang prestasi akademik, beliau menggenggam gelar S1 ganda di bidang Ekonomi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Ilmu Perpustakaan dan Informasi dari Universitas Yarsi Jakarta. Tak berhenti di situ, penulis melanjutkan perjalanannya pendidikan dengan meraih gelar S2 M.M. di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dari Sekolah

Tinggi Ilmu Manajemen IMMI Jakarta.

Tak hanya berkutat di dunia akademis, penulis juga aktif mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar ilmu perpustakaan dan informasi Islam di UIN SMH Banten. Dedikasinya terhadap dunia perpustakaan dan literasi tak perlu diragukan lagi. Penulis tak hanya berperan dalam pengelolaan perpustakaan, tetapi juga aktif terlibat dalam organisasi profesi kepustakawanan serta membina literasi siswa dari berbagai jenjang.

Kontribusi nyata penulis dalam memajukan ilmu perpustakaan dan informasi, terutama di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan perpustakaan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan di Indonesia.